



RPJMD

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
TAHUN 2021-2026**

**JL. Tammauni Pue Ballung
(Kompleks KTM Tobadak)**

Kode pos 91564

www.bappeda.mamujutengahkab.go.id





BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, untuk periode 2021-2026 telah terpilih Bupati dan Wakil Bupati, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju tengah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencanan

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 19. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi

- Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ
Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah
Serentak Tahun 2020;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8
Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2017 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1
Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor
1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor
5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun
2013-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju
Tengah Tahun 2016 Nomor 5);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
(Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun
2016 Nomor 7);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3
Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017-2037
(Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun
2017 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
dan
BUPATI MAMUJU TENGAH
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Mamuju Tengah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025 adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Sulawesi Barat adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
15. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah

sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

16. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Kerangka regulasi adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan daerah secara utuh.
21. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang ataupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
22. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya mencapai visi dan misi kepala daerah serta target pembangunan nasional.
23. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

24. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
25. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
26. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun.
27. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
28. Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
29. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
30. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
31. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
32. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
33. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
34. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
35. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau

sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

36. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
37. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
38. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.
39. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
40. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
41. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

BAB II

RUANG LINGKUP RPJMD TAHUN 2021-2026

Pasal 2

- (1) RPJMD Tahun 2018-2023 adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
 - a. visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih; dan
 - b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

BAB III SISTEMATIKA RPJMD TAHUN 2021-2026

Pasal 3

Sistematika penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
- BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- BAB IX : PENUTUP

Pasal 4

RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
 - b. pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (4) Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan

Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (7) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RPJMD.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik social budaya, gangguan keamanan. Pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional; atau
 - d. Merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VI

Ketentuan Peralihan

Pasal 7

1. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan. Bupati dan Wakil Bupati wajib Menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.
2. Penyusunan RKPD 2025 dan 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada RPJMD 2021-2026.
3. RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih berikutnya.
4. RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2022-2026.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 26 Agustus 2021
BUPATI MAMUJU TENGAH,
ttd

H.ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 26 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,
ttd
H.ASKARY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021 NOMOR
5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


SABRY, S.Ag
NIP.19720619 200312 1 004



BUPATI MAMUJU TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Semesta Alam atas berkah, rahmat, dan hidayah Nya, sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 dapat dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Visi pembangunan 5 tahun ke depan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 adalah Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara. Visi pembangunan ini akan diimplementasikan dengan baik apabila didukung dengan perencanaan yang komprehensif yang didasarkan atas data yang valid serta mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Diharapkan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, serta menjadi panduan bagi masyarakat dan kalangan lembaga swadaya masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tugas sesuai fungsinya masing-masing.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 ini masih membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan materi dokumen ini. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada stakeholder dan partisipasi dari semua pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran, waktu dan tenaga sehingga penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 ini dapat terlaksana dengan baik.

Semoga upaya mulia kita dalam menata pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah ke depan selalu mendapatkan bimbingan dan ridho Allah SWT, sehingga membuahkan hasil yang berdaya guna dan memberikan maslahat bagi rakyat Mamuju Tengah.

Sekian dan terimakasih.

Tobadak, 2021
BUPATI MAMUJU TENGAH,

H.ARAS TAMMAUN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran dari visi-misi kepala daerah terpilih yang disampaikan pada masa kampanye. Melalui RPJMD, visi-misi kepala daerah terpilih yang merupakan komitmen politik diterjemahkan secara teknokratis dalam kinerja yang terukur serta disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Penyusunan RPJMD merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan, sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam dokumen RPJMD, pemerintah daerah wajib merespon kebijakan nasional yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang mengharuskan urusan wajib terkait pelayanan dasar dalam pemerintahan daerah diselenggarakan dengan mengacu pada SPM, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang mengharuskan integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke dalam perencanaan daerah.

Proses penyusunan dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah mengacu pada proses dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut secara garis besar dalam tahapan penyusunan RPJMD meliputi penyusunan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD, Orientasi mengenai RPJMD, Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD, Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD, dan penyusunan rancangan Awal RPJMD. Dokumen Rancangan Awal RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kabupaten Mamuju Tengah adalah salah satu daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun 2020 untuk periode 2021-2024. Sesuai dengan



amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka disusunlah rancangan Awal RPJMD 2021-2026. Sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan mulai dari pembuatan Surat Keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor 188.4.45/66.1/111/2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026.

Tahapan selanjutnya yaitu Orientasi mengenai RPJMD yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 09.00 bertempat di aula Kantor Bappeda Kabupaten Mamuju Tengah dengan media video conference yang dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Kepala Bappeda Kabupaten Mamuju Tengah dan seluruh Tim Penyusun rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 dengan agenda pemaparan materi oleh Tenaga Ahli Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, MS dan Dr. Sultan Suhab, SE., MS dari Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan (P2KP) Universitas Hasanuddin Makassar. Adapun materi Orientasi yang dipaparkan adalah sistematika penyusunan Rancangan awal RPJMD, hal-hal substansial yang harus dicantumkan dalam dokumen berdasarkan lampiran Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dasar hukum penyusunan Rancangan Awal RPJMD, penjelasan tentang pengumpulan data, sumber data dan validitas data yang dibutuhkan dan kinerja keuangan daerah lima tahun terakhir untuk mengevaluasi capaian RPJMD terdahulu dan merumuskan permasalahan, tujuan dan sasaran lima tahun kedepan, 2021-2026.

RPJPD menjadi pedoman dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah. Dalam rangka persiapan penyusunan RPJMD dalam pasal 42 Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa rancangan awal RPJMD disusun sebelum penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk menjadi pedoman penyusunan visi dan misi calon kepala daerah dan wakil kepala, yang mencakup analisis gambaran umum kondisi Daerah, perumusan gambaran keuangan Daerah, perumusan permasalahan pembangunan Daerah, penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan perumusan isu strategis Daerah. Yang kemudian akan dilanjutkan ke tahapan penyusunan rancangan awal RPJMD dimulai sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Rancangan awal RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2021-2026 yang akan disusun ini merupakan penjabaran tahun ke empat atau tahap terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah 2005-2025.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 adalah sebagai berikut:



1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana Telah mengalami perubahan atas Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;



14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;



28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
31. Surat Edaran Bersama Nomor 050/3499/SJ Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
32. Surat Edaran Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017-2037;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2005-2025.
36. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

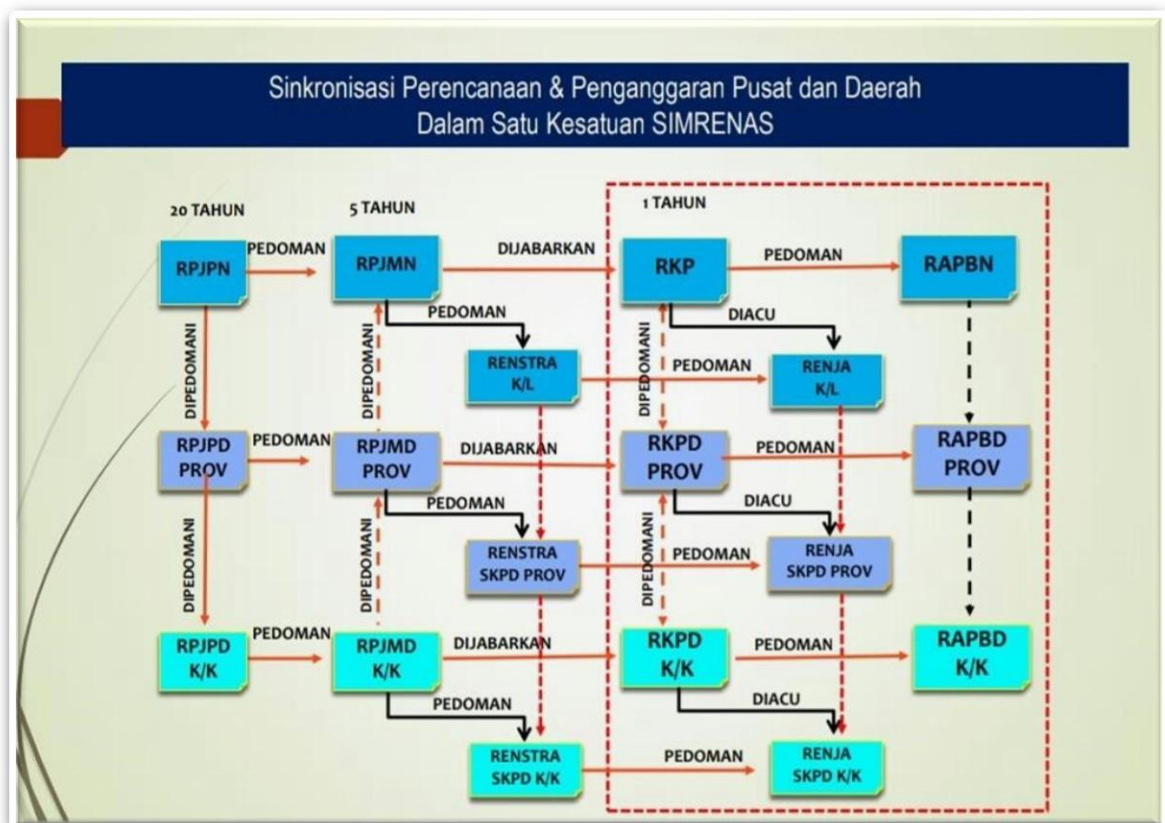
1.3 Hubungan Antara Dokumen

RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut:

1. RPJP Nasional Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional. Dokumen-dokumen ini berisikan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang dan menengah untuk seluruh Indonesia. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2024 mengacu pada RPJPN dan RPJMN.
2. RPJPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat merupakan acuan bagi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah baik untuk arahan pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah.
3. RTRW Provinsi Sulawesi Barat dan RTRW Kabupaten Mamuju Tengah merupakan acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah khususnya dalam perspektif perencanaan dan pemanfaatan ruang.

- Selain hubungannya dengan beberapa dokumen Perencanaan tersebut, Perubahan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah juga perlu memperhatikan dokumen rencana pembangunan yang relevan, antara lain:

- Gambar 1. 1 Bagan Hubungan antar Dokumen Perencanaan**



KABUPATEN MAMUJU TENGAH 6

1.4 Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021 – 2026 mengikuti sistematika sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
- BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
- BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah.
- BAB IV Analisis Isu Strategis, berisi tentang permasalahan untuk perumusan prioritas dan sasaran, permasalahan berdasarkan urusan dan isu-isu strategis daerah.
- BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Bab ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disepakati.
- BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah, Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.
- BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah, Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.
- BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.
- BAB IX Penutup, berisi kesimpulan dan arah kebijakan transisi pembangunan.

1.5 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 adalah:

1. Untuk memberikan gambaran ilmiah tentang evaluasi hasil capaian pembangunan lima tahun terakhir;
2. Untuk merumuskan permasalahan dan isu strategis pembangunan lima tahun kedepan, 2021-2026.

Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Pendek yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya dan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026.

Sehingga terbangunnya konsistensi perencanaan pembangunan daerah dan pencapaian kinerja pembangunan daerah dapat lebih efektif.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah

1) Luas dan batas wilayah administrasi

Kabupaten Mamuju Tengah adalah salah satu dari 6 (enam) Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013, tanggal 11 Januari Tahun 2013. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013, luas wilayah Kabupaten Mamuju Tengah adalah 3.014,37 km². Berdasarkan peta RBI 2014 pada dokumen RTRW Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017-2037 Kabupaten Mamuju Tengah memiliki luas wilayah 3.100,87 Km² (310.086,92) Ha, yang merupakan 18,33 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat (16.916,02 km²).

Batas wilayah Kabupaten Mamuju Tengah yaitu :

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Benggaulu Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara;
- b) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Batu Bicara, Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
- c) Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Karama dan Desa Tarailu Kecamatan Sampaga, Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju; dan
- d) Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar (UU 23 2014 pasal 14 ayat 6 tentang batas wilayah pesisir) (penataan kembali batas dan luas wilayah kabupaten, Kecamatan, desa).

Kabupaten Mamuju Tengah, secara administrasi pemerintahan terdiri atas 5 Kecamatan, 54 Desa, dan 2 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Ibu kota kabupaten terletak di wilayah Benteng Kayu Mangiwang Kecamatan Tobadak. Berdasarkan radius, Kecamatan yang letaknya terjauh dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Karossa (Karossa) yaitu sejauh 45 Km, dan ibukota Kecamatan yang terdekat dari ibu kota Kabupaten adalah Kecamatan Topoyo dan Kecamatan Budong-Budong yang berbatasan langsung dengan Ibukota Kabupaten Mamuju Tengah. Pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :



**Tabel 2. 1 Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah Per Desa/ UPT
Kabupaten Mamuju Tengah**

No	Kecamatan	Nama Desa/UPT	Kecamatan	
			Luas (Ha)	%
1	Tobadak	1. Salubaja	1.556,25	2,22
		2. Bambadaru	1.883,52	2,69
		3. Batu Parigi	21.634,24	30,91
		4. Polongaan	2.790,60	3,99
		5. Mahahe	559,94	0,80
		6. Tobadak	7.036,96	10,05
		7. Saluadak	5.702,06	8,15
		8. Sejati	28.827,80	41,19
		Kecamatan Tobadak	69.991,37	22,57
2	Pangale	1. Pangale	1.230,86	13,51
		2. Sartanamaju	912,4	10,01
		3. Polo Pangale	874,69	14,58
		4. Kuo	453,86	6,34
		5. Polo Lereng	1.230,06	13,50
		6. Polo Camba	1.795,13	19,70
		7. Lamba-Lamba	1.177,25	12,92
		8. Kombiling	858,87	9,43
		9. Lemo-Lemo	577,56	6,34
		Kecamatan Pangale	9.110,67	2,94
3	Budong-Budong	1. Lumu	1.424,94	5,71
		2. Tinali	429,23	1,72
		3. Salumanurung	1.004,83	4,02
		4. Kire	2.514,34	10,07
		5. Salugatta	1.619,03	6,48
		6. Pontanakayang	3.190,80	12,78
		7. Babana	4.117,32	16,49
		8. Pasapa	1.728,67	6,92
		9. Bojo	3.289,01	13,17
		10. Barakkang	4.135,40	16,56
		11. Lembah Hada	1.513,74	6,06
		Kec. Budong-Budong	24.967,31	8,05
4	Topoyo	1. Budong-Budong	1.769,62	2,00
		2. Paraili	620,2	0,70
		3. Topoyo	833,9	0,94
		4. Kabubu	388,88	0,44
		5. Waeputeh	787,49	0,89
		6. Tappilina	732,04	0,83
		7. Tangkou	338,04	0,38



No	Kecamatan	Nama Desa/UPT	Kecamatan	
			Luas (Ha)	%
		8. Tabolang	4.141,75	4,68
		9. Salupangkang	1.092,80	1,24
		10. Salupangkang IV	1.091,16	1,23
		11. Tumbu	1.671,62	1,89
		12. Bambamanurung	476,03	0,54
		13. Pangalloang	1.414,53	1,60
		14. Sinabatta	1.794,58	2,03
		15. Salulekbo	71.327,33	80,61
		Kecamatan Topoyo	88.479,97	28,53
5	Karossa	1. Kambunong	16.942,40	14,41
		2. Tasokko	21.188,97	18,03
		3. Lara	10.222,32	8,70
		4. Karossa	32.860,37	27,96
		5. Lembah Hopo	2.149,64	1,83
		6. UPT Lara III	1.270,46	1,08
		7. Banggaulu	1.420,77	1,21
		8. UPT Mora IV	666,1	0,57
		9. Kayu Calla	964,12	0,82
		10. Kadaila	1.734,29	1,48
		11. Sukamaju	8.948,36	7,61
		12. Salubiru	13.228,86	11,26
		13. Sanjango	5.940,94	5,05
		Kecamatan Karossa	117.537,60	37,90
LUAS KABUPATEN MAMUJU TENGAH			310.086,92	100,00

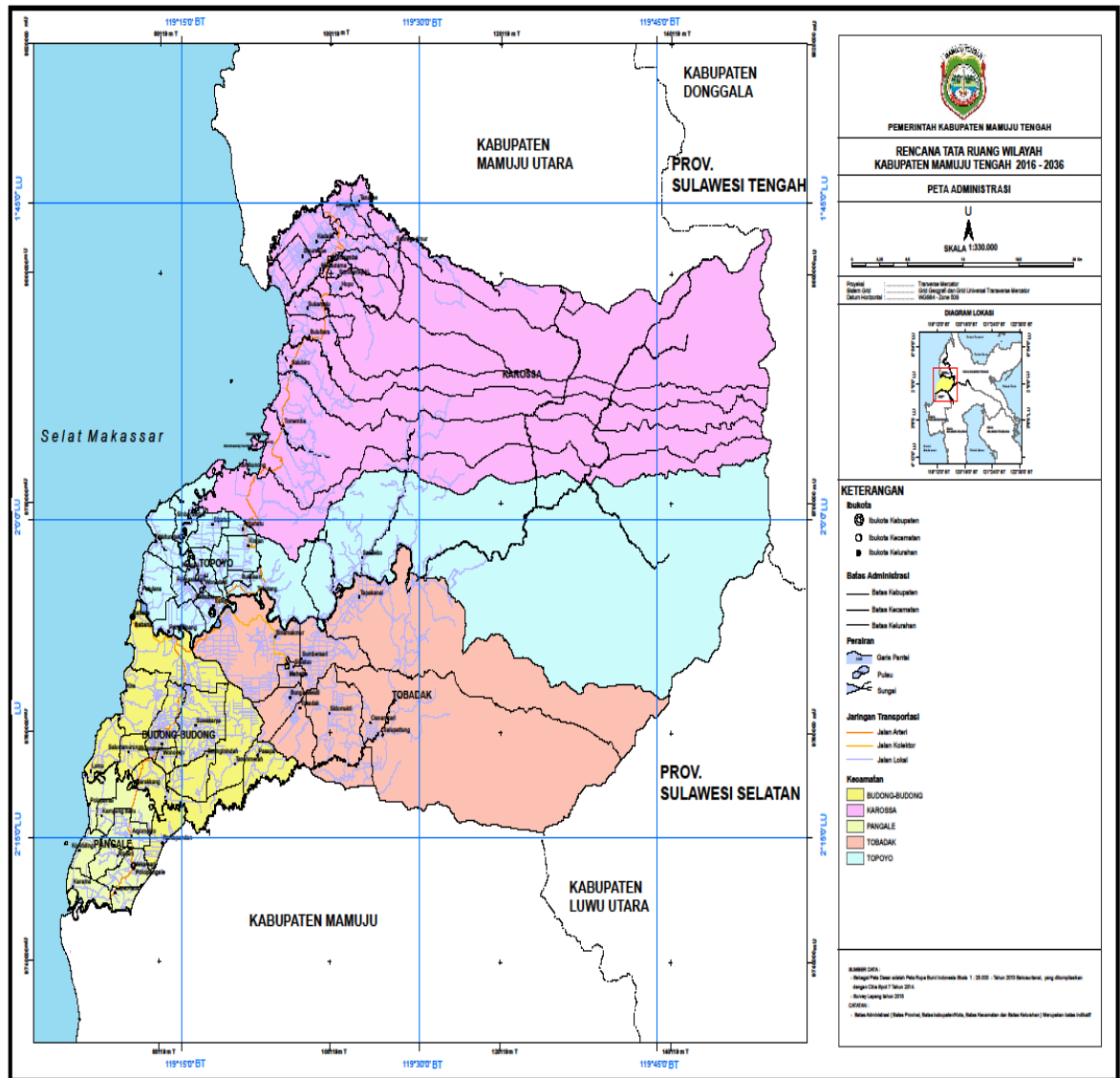
Sumber: RTRW Kabupaten Mamuju Tengah, 2017-2037

Tabel 2. 2 Batas Wilayah Administrasi per Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah

No	Kecamatan	Batas Wilayah			
		Utara	Selatan	Barat	Timur
1	Topoyo	Kec. Karossa	Kec. Tobadak	Selat Makassar	Prov. Sulsel
2	Budong – Budong	Kec. Topoyo	Kec. Pangale	Selat Makassar	Kab. Mamuju
3	Tobadak	Kec. Topoyo	Kab. Mamuju	Kec. Budong-Budong	Prov. Sulsel
4	Pangale	Kec. Budong-Budong	Kab. Mamuju	Selat Makassar	Kab. Mamuju
5	Karossa	Kab. Mamuju Utara	Kec. Topoyo	Selat Makassar	Prov. Sulsel

Sumber: RTRW Kabupaten Mamuju Tengah, 2017-2037

Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Mamuju Tengah



Sumber : Perda RTRW Kab. Mamuju Tengah 2017 -2037

2) Letak dan Kondisi Geografis

a) Posisi Astronomis

Letak Kabupaten Mamuju Tengah Pada posisi astronomis berada pada koordinat $1^{\circ}43'42,90''$ – $2^{\circ}18'30,08''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}7'41,60''$ – $119^{\circ}52'12,97''$ Bujur Timur.

b) Posisi Geostrategis

Letak Kabupaten Mamuju Tengah secara geostrategis berada pada jalur yang sangat strategis karena berada pada posisi jalur perdagangan trans Sulawesi, berada di antara provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah di jalur darat. Jalur laut Kabupaten Mamuju Tengah berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur sehingga ke depannya Kabupaten Mamuju Tengah dapat menjadi Jalur Segitiga Emas perdagangan pada ketiga daerah tersebut ditambah lagi jika



rencana perpindahan Ibukota Negara terealisasi maka kondisi Mamuju Tengah perlu menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan dengan maksimal.

c) Kondisi/ Kawasan

(1) Pedalaman

Daerah pedalaman pada wilayah Mamuju Tengah yang merupakan wilayah yang letaknya jauh dari ibu kota kabupaten dan jauh dari garis pantai berada di beberapa Dusun di tiga Kecamatan yaitu Tobadak, Topoyo dan Karossa kondisi daerah pedalaman saat ini semua telah dapat dijangkau oleh kendaraan meskipun ada beberapa wilayah yang hanya dapat dijangkau oleh kendaraan roda dua.

(2) Terpencil

Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah yang dapat dikategorikan terpencil terdapat di daerah pegunungan di kecamatan Tobadak yaitu Desa Sejati dan Desa Saloadak lalu di Kecamatan Topoyo yaitu Desa Salulebbo dan di Kecamatan Karossa yaitu Desa Sanjango.

(3) Pesisir

Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah yang terdiri dari lima Kecamatan di mana empat Kecamatan terdapat di daerah pesisir, Panjang Garis pantai 102,60 Km dengan Kawasan sempadan pantai luas total kurang lebih 972,49 (Sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan) hektar terdapat di sepanjang garis pantai Kabupaten dengan ketentuan.

(4) Pegunungan

Wilayah pegunungan Kabupaten Mamuju Tengah berada pada Kawasan Taman Nasional Ganda Dewata di Kecamatan Tobadak, Topoyo dan Karossa, Kawasan hutan lindung yang terutama difungsikan sebagai pelindung tatanan ekohidrolika daerah-daerah aliran sungai yang mengairi persawahan, tambak dan/atau memenuhi kebutuhan air perkebunan di Kecamatan Karossa, Tobadak, dan Kecamatan Topoyo.

(5) Kepulauan

Di Kabupaten Mamuju Tengah Hanya Memiliki satu wilayah kepulauan yaitu Pulau Kambunong yang secara administratif berada di Desa Kambunong Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah.

3) Topografi

a) Kemiringan Lahan

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Mamuju Tengah bervariasi dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian antara 0-2.600 meter di atas permukaan laut (dpl). Di wilayah bagian barat merupakan kawasan pesisir

pantai dengan topografi dataran rendah dan ketinggian <25 meter di atas permukaan laut (dpl). Kawasan ini merupakan fisiografi dataran erdimal dan dataran koluvial yang subur dan telah berkembang menjadi kawasan permukiman, pertanian, dan perkebunan. Di beberapa tempat tampak adanya genangan yang menandakan drainase buruk dan rawan terhadap bencana banjir.

b) Ketinggian Lahan

Makin ke timur wilayah ini semakin tinggi dengan topografi perbukitan dengan torehan-torehan alur air yang pada saat terjadi hujan membawa aliran permukaan menuju sungai utama, yakni S. Budong-budong, S. Karama, dan S.Karosa. Pada wilayah perbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah ketinggian topografi mencapai ketinggian 2.600 meter dpl.

Ketinggian tempat di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dikelompokkan menjadi beberapa kelas ketinggian sebagai berikut:

- (1) Kelas ketinggian 50 – 500 m dpl, seluas 159.700,40 Ha
- (2) Kelas ketinggian 500 – 1000 m dpl, seluas 61.820,40 Ha
- (3) Kelas ketinggian 1000 – 1500 m dpl, seluas 38.953,95 Ha
- (4) Kelas ketinggian 1500 – 2000 m dpl, seluas 32.089,89 Ha
- (5) Kelas ketinggian 2000 – 2600 m dpl, seluas 8.872,36 Ha

Secara fisiografi Kabupaten Mamuju Tengah sebagian besar (>4,32%) merupakan wilayah bergunung dengan kemiringan lahan >40%. Lainnya berupa lahan dengan bentuk wilayah datar (lereng 0-2%) yang menempati wilayah seluas 95.734,54 Ha (30,87%), lahan berombak (lereng 2-8%) menempati wilayah seluas 59.111,39 Ha (19,06%), lahan bergelombang (lereng 8-15%) menempati wilayah seluas 58.409,61 Ha (18,83%), lahan agak berbukit (lereng 15-25%) menempati wilayah seluas 50.621,64 Ha (16,32%), dan lahan dengan bentuk wilayah berbukit (lereng 25-40%) yang menempati wilayah seluas 32.795,09 Ha (10,57%).

Tabel 2. 3 Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lahan Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020

Simbol	Kelas (%)	LUAS SEBARAN KEMIRINGAN LAHAN (Ha)					Luas	
		KECAMATAN					Ha	%
		BUDONG-BUDONG	KAROSSA	PANGAL E	TOBADA K	TOPOYO		
A	0 – 2	21.928,51	21.948,22	9.102,80	24.465,59	18.289,42	95.734,54	30,87
B	2 – 8	2.633,30	21.633,67	7,86	18.999,94	15.836,62	59.111,39	19,06
C	8 – 15	200,67	25.412,15	-	14.394,13	18.402,66	58.409,61	18,83



Simbol	Kelas (%)	LUAS SEBARAN KEMIRINGAN LAHAN (Ha)					Luas	
		KECAMATAN					Ha	%
		BUDONG-BUDONG	KAROSSA	PANGAL E	TOBADA K	TOPOYO		
D	15 - 25	194,55	24.245,63	-	7.454,77	18.726,69	50.621,64	16,32
E	25 - 40	10,24	17.943,15	-	2.709,17	12.132,53	32.795,09	10,57
F	>40	-	6.354,71	-	1.967,74	5.092,02	13.414,47	4,32
Total		24.967,29	117.537,56	9.910,67	69.991,36	88.479,97	310.086,7	100

Sumber: Perda RTRW Kab. Mamuju Tengah 2017 -2037

* **Keterangan :**

- A (0-2%) : Datar
- B (2-8%) : Berombak
- C (8-15%) : Bergelombang
- C (15-25%) : Agak berbukit
- D (25-40%) : Berbukit
- E (>40%) : Bergunung

Hingga tahun 2020 ini, belum terjadi perubahan Kemiringan dan Ketinggian Lahan dikarenakan tidak terdapatnya aktivitas yang dapat merubah bentuk permukaan lahan pada Kabupaten Mamuju Tengah dalam skala besar, seperti aktivitas tambang dalam skala besar, bencana alam, ataupun aktivitas lainnya yang dapat mengakibatkan perubahan bentuk permukaan lahan dalam skala besar.

4) Geologi

a) Struktur dan Karakteristik

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Mamuju 2013 dan Lembar Pasangkayu 2014, skala 1:250.000 (Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, 2010) wilayah Kabupaten Mamuju Tengah terdiri dari 7 Formasi, yaitu Formasi Latimojong (Kls), Aluvium (Qa), Formasi Budong-Budong (Qb), Batugamping Koral (Ql), Batuan Terobosan (Tmpi), Formasi Lariang (TQp), Formasi Sekala (Tmps), Batuan Gunungapi Talaya (Tmtv), Batuan Gunungapi Lamasi (Toml), Formasi Pasangkayu (TQp), dan Kompleks Wana (TRw). Rincian formasi geologi wilayah Kabupaten Mamuju Tengah beserta susunan batuanannya kandungan dari masing-masing jenis tanah tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2. 4 Formasi Geologi Kawasan Kabupaten Mamuju Tengah

Simbol	Formasi	Batuan Penyusun	Luas	
			Ha	%
Kls	Formasi Latimojong	Perselingan batupasir malih dengan batusabak dan filit, setempat bersisipan batulempung meta	78.692,36	25,37
Qa	Aluvium	lempung, pasir, kerikil, dan kerakal	43.426,62	14
Qb	Formasi Budong-Budong	konglomerat dan batupasir, setempat dengan sisipan batugamping dan batulanau	20.847,20	6,72
Ql	Batugamping Korai	batugamping terumbu dan batugamping bioklastika, berongga, setempat dg cangkang moluska	2.245,43	0,72
Tmpi	Batuan Terobosan	granit, granodiorit, riolit, 16ermina, dan apilit	7.505,91	2,42
Tmpl	Formasi Lariang	batupasir gampingan dan mikaan, batulempung bersisipan kalkarenit, konglomerat dan tuf	49.030,02	15,81
Tmps	Formasi Sekala	batupasir hijau, grewake, napal, batulempung dan tuf, sisipan lava bersusunan andesit-basal	16.122,08	5,19
Tmtv	Batuan Gunungapi Talaya	breksi gunungapi, tuf dan lava bersusunan andesit-basal, dengan sisipan batupasir dan napal, setempat batubara	41.680,55	13,44
Toml	Batuan Gunungapi Lamasi	tuf, lava dan breksi gunungapi bersusunan andesit-dasit, setempat dgn sisipan batupasir gampingan, dan serpih	41.911,35	13,51
TQp	Formasi Pasangkayu	perselingan batupasir dengan batulempung, setempat bersisipan konglomerat dan batugamping	3.937,27	1,26
TRw	Kompleks Wana	sekis mika, sekis amfibol, genes dan kuarsit	4.676,61	1,5
Blank			11,54	0,003

Sumber: Peta Geologi Lembar Mamuju 2013 dan Lembar Pasangkayu 2014, skala 1:250.000 (Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, 2010)

5) Potensi Kandungan

Sedang untuk kandungan geologi di Kabupaten Mamuju Tengah secara garis besarnya dibagi menjadi 2 (dua), yakni kelompok bahan galian konstruksi dan kelompok galian industri. Berdasar data pada Departemen Pertambangan dan Energi, diketahui bahwa untuk kelompok bahan galian konstruksi meliputi :

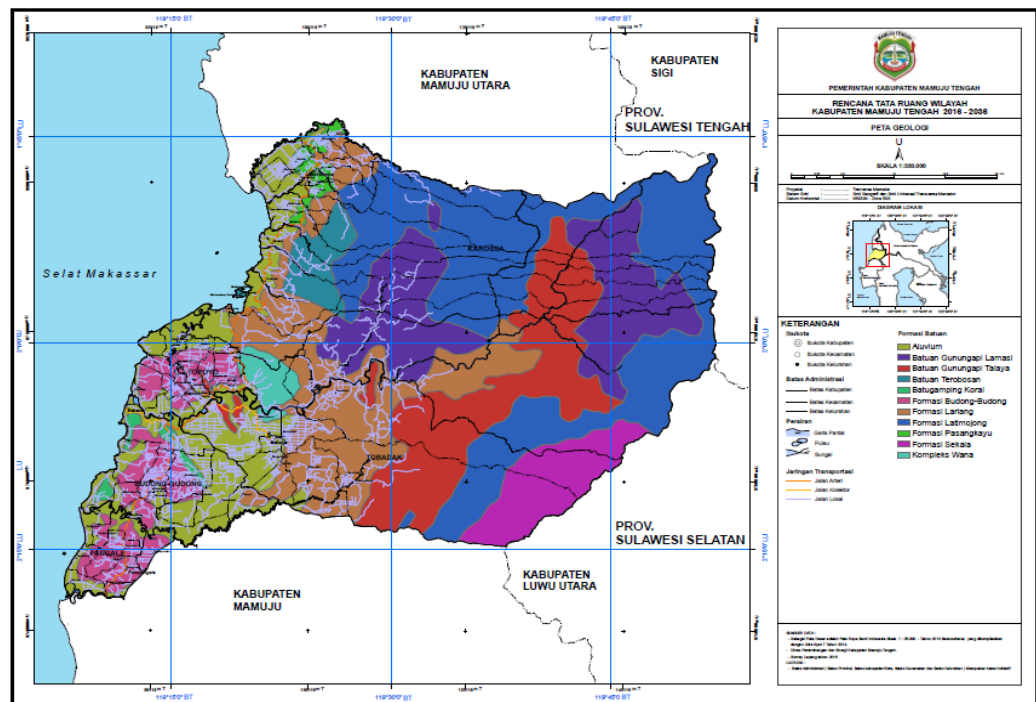
- Granodiorit, tersebar di daerah Salubiro dan Bulukaling Kecamatan Karossa dengan perkiraan cadangan volume sebesar 58.443.750 meter kubik;
- Batu Pasir, tersebar di daerah Kombiling, Salupangkang dan Topoyo Kecamatan Topoyo, di Barakkang Pangale, Bajo Kecamatan Pangale, dengan volume sekitar 630.887.500 meter kubik;
- Konglomerat, tersebar di daerah Pasapa, Tangkou, Topoyo dan Kecamatan Budong-Budong, dengan volume sekitar 134.475.000 meter kubik.

Sementara untuk kelompok bahan galian industri meliputi :

- Batu Sabak, tersebar di daerah Tobinta, Salubaja dan Salubarana Kecamatan Karossa dengan cadangan volume sekitar 22.050.000 meter kubik;
- Sekis, tersebar di daerah Tabolang, Kalandu dan Batusitanduk Kecamatan Topoyo dengan cadangan volume sekitar 2.200.000 meter kubik;
- Batu Gamping, terdapat di daerah Salupangkang Kecamatan Topoyo dengan cadangan volume sekitar 5.625.000 meter kubik;

Lempung, tersebar di daerah Karossa, Benggaulu, Durikumba, Lara, Salubarana dan Tomemba Kecamatan Karossa dengan cadangan volume sekitar 1.297.575.000 meter kubik.

Gambar 2. 2 Peta Geologi Kabupaten Mamuju Tengah



Sumber : Perda RTRW kab. Mamuju Tengah 2017 - 2037



6) Hidrologi

Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dilalui oleh 7 sungai (pembinaan sungai wilayah III) yang mengalir dari daerah perbukitan di bagian timur menuju ke daerah pesisir arah barat dan bermuara di perairan laut Selat Makassar. Sungai-sungai tersebut adalah Sungai Budong-Budong, Sungai Lumu, Sungai Karama, Sungai Karossa, Sungai Benggaulu, Sungai Kamansi, dan Sungai Panggajaoan. Dalam sistem kerja wilayah sungai, sungai-sungai di Kabupaten Mamuju Tengah ini termasuk dalam Wilayah Sungai (WS) Karama, yang meliputi DAS Karama, DAS Budong-Budong dan DAS Karossa. Luas masing-masing DAS menurut Kecamatan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 5 Sebaran DAS Berdasarkan Kecamatan dan Desa di Kabupaten Mamuju Tengah

Nama Das	Desa	Kecamatan					Grand Total
		Budong-Budong	Karossa	Pangale	Tobadak	Topoyo	
Budong-Budong	Babana	2.329,04	-	-	-	-	2.329,04
	Bambadaru	-	-	-	1.120,33	-	1.120,33
	Batuparigi	-	-	-	14.438,05	-	14.438,05
	Bojo	1.124,09	-	-	-	-	1.124,09
	Budong-Budong	-	-	-	-	613,07	613,07
	Kabubu	-	-	-	-	7,56	7,56
	Kambunong	-	11.663,70	-	-	-	11.663,70
	Karossa	-	22.869,95	-	-	-	22.869,95
	Lara	-	6.667,84	-	-	-	6.667,84
	Mahahe	-	-	-	560,19	-	560,19
	Pangalloang	-	-	-	-	1.415,33	1.415,33
	Paraili	-	-	-	-	447,94	447,94
	Pasapa	190,70	-	-	-	-	190,70
	Polongaan	-	-	-	2.607,89	-	2.607,89
	Pontanakayang	637,58	-	-	-	-	637,58
	Saloadak	-	-	-	57,41	-	57,41
	Salu Lebo	-	-	-	-	70.660,61	70.660,61
	Salubiro	-	9.494,20	-	-	-	9.494,20
	Salupangkang	-	-	-	-	194,77	194,77
	Sanjango	-	1.015,35	-	-	-	1.015,35
	Sejati	-	-	-	4.597,37	-	4.597,37
	Sukamaju	-	1.399,15	-	-	-	1.399,15
	Sulobaja	-	-	-	1.485,48	-	1.485,48
	Tabolang	-	-	-	-	4.052,09	4.052,09
	Tangkau	-	-	-	-	88,15	88,15
	Tappilina	-	-	-	-	16,01	16,01
	Tasokko	-	12.368,32	-	-	-	12.368,32
	Tobadak	-	-	-	7.040,35	-	7.040,35
	Topoyo	-	-	-	-	681,43	681,43
	Waipute	-	-	-	-	0,75	0,75
Budong-Budong Total							179.844,70
Karama	Batuparigi	-	-	-	3.740,70	-	3.740,70
	Kombiling	-	-	677,13	-	-	677,13
	Lemo-Lemo	-	-	578,09	-	-	578,09
	Pangale	-	-	1.218,41	-	-	1.218,41
	Polopangale	-	-	1.085,83	-	-	1.085,83



Nama Das	Desa	Kecamatan					Grand Total
		Budong-Budong	Karossa	Pangale	Tobadak	Topoyo	
	Salu Lebo	-	-	-	-	612,51	612,51
	Sartanamaju	-	-	709,94	-	-	709,94
	Sejati	-	-	-	9.420,32	-	9.420,32
Karama Total							18.042,93
Karossa	Benggaulu	-	1.420,68	-	-	-	1.420,68
	Kadaila	-	1.507,52	-	-	-	1.507,52
	Karossa	-	8.620,94	-	-	-	8.620,94
	Kayucala	-	430,66	-	-	-	430,66
	Lara	-	10,62	-	-	-	10,62
	Lara Tiga	-	780,87	-	-	-	780,87
	Lembahhopo	-	730,10	-	-	-	730,10
	Mora Empat	-	666,04	-	-	-	666,04
	Sanjango	-	4.924,26	-	-	-	4.924,26
	Sukamaju	-	1.830,27	-	-	-	1.830,27
Karossa Total							20.921,95
Lumu	Bambadaru	-	-	-	764,14	-	764,14
	Barakkang	4.070,63	-	-	-	-	4.070,63
	Batuparigi	-	-	-	3.458,44	-	3.458,44
	Bojo	2.166,91	-	-	-	-	2.166,91
	Kire	120,43	-	-	-	-	120,43
	Lamba-Lamba	-	-	1.009,47	-	-	1.009,47
	Lembahhada	1.514,81	-	-	-	-	1.514,81
	Lumu	608,66	-	-	-	-	608,66
	Pasapa	1.538,97	-	-	-	-	1.538,97
	Polocamba	-	-	1.268,72	-	-	1.268,72
	Pololereng	-	-	282,76	-	-	282,76
	Polongan	-	-	-	183,75	-	183,75
	Polopangale	-	-	243,71	-	-	243,71
	Pontanakayang	1.528,33	-	-	-	-	1.528,33
	Saloadak	-	-	-	5.647,13	-	5.647,13
	Salu Lebo	-	-	-	-	0,21	0,21
	Salugatta	725,60	-	-	-	-	725,60
	Salumanurung	282,80	-	-	-	-	282,80
	Sartanamaju	-	-	0,09	-	-	0,09
	Sejati	-	-	-	14.816,95	-	14.816,95
	Sulobaja	-	-	-	71,56	-	71,56
	Tinali	429,54	-	-	-	-	429,54
Lumu Total							40.733,59
Kaseo	Kadaila	-	226,80	-	-	-	226,80
	Karossa	-	1.339,70	-	-	-	1.339,70
	Kayucala	-	533,52	-	-	-	533,52
	Lara	-	1.688,17	-	-	-	1.688,17
	Lara Tiga	-	489,53	-	-	-	489,53
	Lembahhopo	-	1.419,47	-	-	-	1.419,47
	Salubiro	-	0,40	-	-	-	0,40
	Sukamaju	-	5.718,67	-	-	-	5.718,67
Kaseo Total							11.416,26
Babana	Babana	262,24	-	-	-	-	262,24
Babana Total							262,24
Barana	Lara	-	1.853,32	-	-	-	1.853,32
	Salubiro	-	2.532,81	-	-	-	2.532,81
	Tasokko	-	1,40	-	-	-	1,40
Barana Total							4.387,53
Batumeanaq	Kambunong	-	0,81	-	-	-	0,81
Batumeanaq Total							0,81
Bijau	Kambunong	-	904,22	-	-	-	904,22



Nama Das	Desa	Kecamatan					Grand Total
		Budong-Budong	Karossa	Pangale	Tobadak	Topoyo	
	Tasokko	-	899,13	-	-	-	899,13
Bijau Total							1.803,35
Dondo	Lumu	364,70	-	-	-	-	364,70
	Salumanurung	9,66	-	-	-	-	9,66
Dondo Total							374,35
Dumung	Lumu	221,63	-	-	-	-	221,63
Dumung Total							221,63
Gatta	Babana	138,25	-	-	-	-	138,25
Gatta Total							138,25
Halijah	Lamba-Lamba	-	\-	126,98	-	-	126,98
	Polocamba	-	-	481,71	-	-	481,71
	Pololereng	-	-	530,65	-	-	530,65
Halijah Total							1.139,34
Kahalean	Barakkang	67,90	-	-	-	-	67,90
	Kire	329,09	-	-	-	-	329,09
	Lumu	204,76	-	-	-	-	204,76
	Salugatta	56,58	-	-	-	-	56,58
	Salumanurung	713,14	-	-	-	-	713,14
Kahalean Total							1.371,47
Kalia	Kambunong	-	438,99	-	-	-	438,99
	Salu Lebo	-	-	-	-	43,76	43,76
	Tasokko	-	4.998,21	-	-	-	4.998,21
Kalia Total							5.480,97
Kambunong A	Kambunong	-	52,67	-	-	-	52,67
Kambunong B	Kambunong	-	55,59	-	-	-	55,59
Kambunong C	Kambunong	-	0,15	-	-	-	0,15
Kambunong D	Kambunong	-	0,09	-	-	-	0,09
Kambunong E	Kambunong	-	0,09	-	-	-	0,09
Kambunong Total							108,58
Kire	Kire	0,46	-	-	-	-	0,46
Kire Total							0,46
Kombiling	Kombiling	-	-	6,14	-	-	6,14
Kombiling Total							6,14
Lelo Kire	Babana	837,01	-	-	-	-	837,01
	Kire	1.612,57	-	-	-	-	1.612,57
	Pontanakayang	1.026,92	-	-	-	-	1.026,92
	Salugatta	837,95	-	-	-	-	837,95
Lelo Kire Total							4.314,45
Manisi	Tasokko	-	927,80	-	-	-	927,80
Manisi Total							927,80
Muara Sampaga	Pangale	-	-	6,98	-	-	6,98
Muara Sampaga Total							6,98
Panggajoan	Babana	374,24	-	-	-	-	374,24
	Kire	214,24	-	-	-	-	214,24
Panggajoan Total							588,48
Panggajoang	Babana	170,40	-	-	-	-	170,40
Panggajoang Total							170,40
Patulana Tengah	Budong-Budong	-	-	-	-	842,18	842,18
	Paraili	-	-	-	-	108,43	108,43
	Tumbu	-	-	-	-	50,58	50,58
Patulana Tengah Total							1.001,18
Patulana Ujung	Budong-Budong	-	-	-	-	239,24	239,24
	Tumbu	-	-	-	-	70,24	70,24
Patulana Ujung Total							309,49
Polo	Kombiling	-	-	172,06	-	-	172,06



Nama Das	Desa	Kecamatan					Grand Total
		Budong-Budong	Karossa	Pangale	Tobadak	Topoyo	
	Lamba-Lamba	-	-	37,90	-	-	37,90
	Polocamba	-	-	46,18	-	-	46,18
	Pololereng	-	-	417,70	-	-	417,70
	Polopangale	-	-	0,20	-	-	0,20
	Sartanamaju	-	-	203,19	-	-	203,19
Polo Total							877,23
Salubiro	Kambunong	-	1,18	-	-	-	1,18
	Salubiro	-	1.196,58	-	-	-	1.196,58
	Tasokko	-	1.985,51	-	-	-	1.985,51
Salubiro Total							3.183,28
Sikeang Kecil	Kire	238,28	-	-	-	-	238,28
Sikeang Kecil Total							238,28
Sinabatta	Bambamanurung	-	-	-	-	476,21	476,21
	Kabubu	-	-	-	-	339,72	339,72
	Kambunong	-	3.812,22	-	-	-	3.812,22
	Paraili	-	-	-	-	32,69	32,69
	Salupangkang	-	-	-	-	898,47	898,47
	Salupangkang Iv	-	-	-	-	1.091,63	1.091,63
	Sinabatta	-	-	-	-	1.381,54	1.381,54
	Tabolang	-	-	-	-	91,21	91,21
	Tangkau	-	-	-	-	250,04	250,04
	Tappilina	-	-	-	-	716,35	716,35
	Tasokko	-	0,25	-	-	-	0,25
	Topoyo	-	-	-	-	152,89	152,89
	Tumbu	-	-	-	-	205,07	205,07
	Waipute	-	-	-	-	787,11	787,11
Sinabatta Total							10.235,41
Tapese A	Kambunong	-	6,60	-	-	-	6,60
Tapese B	Tasokko	-	4,03	-	-	-	4,03
Tapese Total							10,63
Tumbu A	Tumbu	-	-	-	-	0,81	0,81
Tumbu B	Tumbu	-	-	-	-	0,38	0,38
Tumbu Total							1,19
Waitumbu	Budong-Budong	-	-	-	-	70,68	70,68
	Kabubu	-	-	-	-	41,79	41,79
	Paraili	-	-	-	-	31,47	31,47
	Sinabatta	-	-	-	-	409,81	409,81
	Tumbu	-	-	-	-	1.343,11	1.343,11
Waitumbu Total							1.896,86
Grand Total		24.948,55	117.488,39	9.103,85	70.010,05	88.465,85	310.016,68

Sumber: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai & Hutan Lindung Lariang-Mamasa, Tahun 2016

Hingga saat ini sungai-sungai tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini disebabkan karena di wilayah ini belum banyak kegiatan pembangunan baik di bidang pertanian lahan basah maupun kegiatan industri yang banyak membutuhkan air baku dari badan air permukaan yang ada. Kondisi badan air permukaan di wilayah ini semakin terancam dengan adanya kegiatan pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertanian rakyat di daerah tengah dan hulu DAS. Indikasi kerusakan DAS ini terbukti dengan seringnya terjadi banjir pada saat musim hujan. Oleh karena itu penataan daerah aliran sungai di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dan wilayah kabupaten sekitarnya sangat mendesak.

7) Klimatologi

(1) Tipe Iklim dan Curah Hujan

Iklim merupakan salah satu faktor determinan yang sangat menentukan bagi tingkat kesesuaian lahan, produktivitas, jenis dan mutu produk. Setiap jenis tanaman memerlukan unsur iklim dengan kisaran tertentu dalam setiap fase pertumbuhannya. Pada keadaan tertentu fluktuasi unsur iklim yang ekstrim menjadi faktor pembatas terutama pada fase kritis yang pengaruhnya sangat besar terhadap penurunan hasil tanaman. Kondisi iklim di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah disajikan berdasarkan data hujan dan iklim dari Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Majene periode 10 tahun berturut-turut (2004-2013).

Rata-rata curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah tergolong cukup tinggi (>2.000 mm/tahun), yaitu sebesar 2.608 mm/tahun, dengan hari hujan rata-rata sebanyak 103 hari/tahun. Rata-rata curah hujan bulanan minimum terjadi bulan Agustus sebesar 5 mm/bulan dengan hari hujan sebanyak 4 hari, sedangkan rata-rata curah hujan bulanan maksimum terjadi pada bulan Juni sebesar 733 mm/bulan dengan hari hujan sebanyak 13 hari. Jumlah curah hujan dan hari hujan bulanan di Kabupaten Mamuju Tengah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 6 Rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan Bulanan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020

No	Bulan	Curah Hujan tahun 2020 (mm)	Hari Hujan tahun 2020 (hari)
1	Januari	186	12
2	Februari	190	10
3	Maret	75	9
4	April	117	7
5	Mei	212	10
6	Juni	733	13
7	Juli	385	10
8	Agustus	5	4
9	September	158	7
10	Oktober	498	13
11	November	49	8
12	Desember	-	-
Jumlah		2.608	103

Sumber: Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Majene, Tahun 2020

Berdasarkan Zona Agroklimat Oldeman, bulan basah ($CH > 200$ mm/bulan) dijumpai selama 2 bulan berturut-turut, bulan kering ($CH < 100$ mm/bulan) sebanyak 4 bulan berturut-turut, dan bulan lembab ($CH = 100 - 200$ mm/bulan)

sebanyak 6 bulan. Dengan demikian, tipe iklim di daerah kajian menurut diklasifikasikan sebagai **E3**, yang mencirikan bahwa di wilayah kajian hanya terdapat kurang dari tiga bulan basah berturut-turut, serta terdapat antara tiga sampai enam bulan kering berturut-turut, sebagaimana disajikan pada tabel zona iklim.

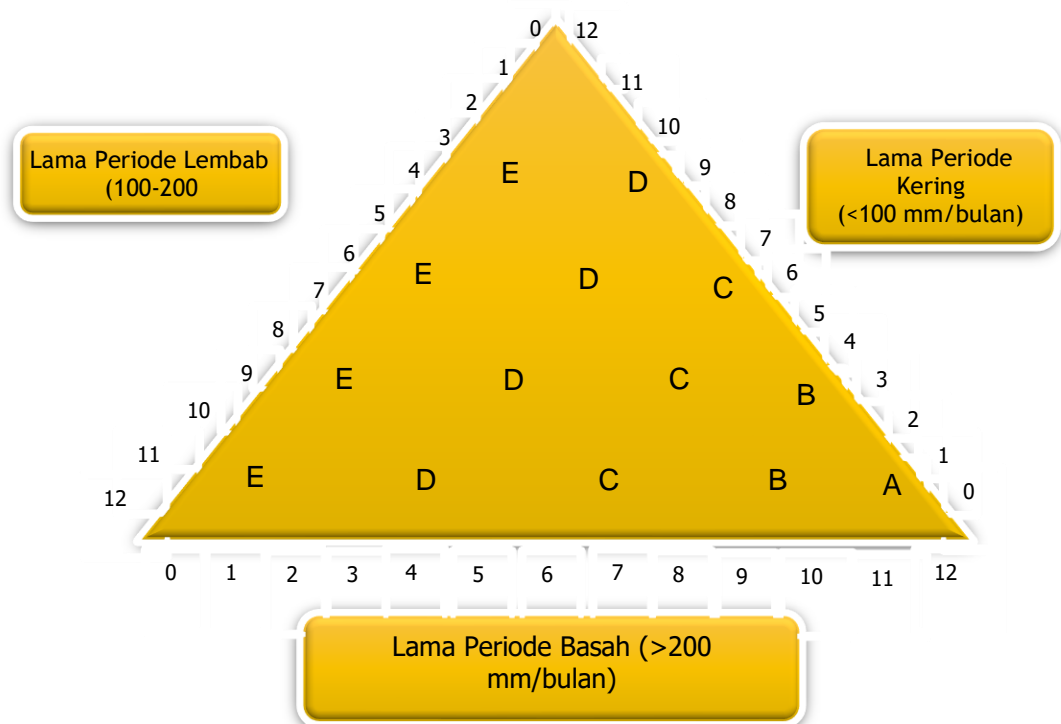
Tabel 2. 7 Zona Iklim dan Sub Divisi Agroklimat Menurut Oldeman (1980)

No	Zona	Bulan Basah Berturut-turut (bulan)	Tipe Iklim
1	A	> 9	E3
2	B	7- 9	
3	C	5 – 6	
4	D	3 – 4	
5	E	< 3	
No	Sub Divisi	Bulan Kering Berturut-turut (bulan)	
1	1	<2	
2	2	2-3	
3	3	3-6	
4	4	>6	

Sumber: Hasil Analisis 2015

Berikut disajikan gambaran zona agroklimat di wilayah kajian menurut klasifikasi Oldeman sebagaimana pada gambar berikut:

Gambar 2. 2 Zona Agroklimat di Kabupaten Mamuju Tengah Berdasarkan Klasifikasi Oldeman



Adapun berdasarkan klasifikasi iklim menurut Schmidt dan Ferguson (1951),

terdapat 8 bulan basah ($CH > 100$ mm/bln), 3 bulan kering ($CH < 60$ mm/bln), dan 1 bulan lembab ($CH = 60-100$ mm/bulan). Penentuan zona iklim menurut Schmidt–Ferguson dilakukan dengan menghitung perbandingan antara jumlah bulan kering (< 60 mm/bulan) dan bulan basah (> 100 mm/bulan) yang dinyatakan dengan rumus:

$$Q = \frac{\text{Jumlah rata-rata bulan kering}}{\text{Jumlah rata-rata bulan basah}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan perbandingan bulan kering terhadap bulan basah tersebut kemudian dibandingkan terhadap Tabel Zona Iklim sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 8 Zona Iklim Berdasarkan Klasifikasi Schmidt – Ferguson (1951)

No	Zona	Nilai Q (%)	Kondisi Iklim
1	A	0 - < 14,3	Sangat basah (<i>very wet</i>)
2	B	14,3– <33,3	Basah (<i>wet</i>)
3	C	33,3– <60,0	Agak Basah (<i>fairly wet</i>)
4	D	60,0 – <100,0	Sedang (<i>fair</i>)
5	E	100,0 – <167,0	Agak kering (<i>fairly dry</i>)
6	F	167,0 – <300	Kering (<i>dry</i>)
7	G	300,0 – <700	Sangat kering (<i>very dry</i>)
8	H	700,0 atau lebih	Luar biasa kering (<i>extremly dry</i>)

Sumber: Handoko Tahun (1995)

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa di daerah kajian bulan basah (> 100 mm/bulan) berlangsung delapan bulan dan bulan kering (< 60 mm/bulan) berlangsung tiga bulan, serta terdapat 1 bulan lembab, sehingga perbandingan antara bulan kering dengan basah $Q = 37,5\%$. Dengan demikian, menurut klasifikasi Schmidt–Ferguson tipe iklim daerah kajian tergolong ke dalam tipe iklim C, yakni daerah agak basah (*fairly wet*).

(2) Suhu dan Kelembaban Udara

Suhu udara rata-rata daerah kajian adalah berkisar $27,1 - 28,1$ °C, di mana suhu udara rata-rata tertinggi terjadi pada bulan Oktober dan November, sedangkan suhu udara rata-rata terendah terjadi pada bulan Januari dan Juli. Suhu udara maksimum berkisar $31,1$ (Juli) s/d $32,7$ (September dan November) dengan rata-rata suhu maksimum sebesar $32,1$. Sedangkan suhu minimum berkisar $23,1$ (Agustus) s/d $24,0$ (November) dengan rata-rata suhu minimum sebesar $23,6$. Kelembaban udara relatif rata-rata adalah $79,7\%$, dimana kelembaban udara relatif terendah terjadi pada bulan September sebesar $75,2\%$, sedangkan kelembaban udara relatif tertinggi dijumpai pada bulan Mei



sebesar 82,1%. Untuk lebih jelasnya, kondisi suhu udara rata-rata di wilayah kajian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 9 Suhu dan Kelembaban Udara di Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah

No	Bulan	Suhu Udara (°C)			Kelembaban Udara (%)	Kec. Angin (knot)		Arah Angin Dominan	Penyinaran Matahari (%)
		Maksimum	Rata-rata	Minimum		Rata-rata	Maksimum		
1	Januari	32,4	28,0	23,6	81,1	3,4	30,0	B	64,2
2	Februari	32,3	27,9	23,4	80,2	3,6	40,0	B	65,5
3	Maret	32,6	27,8	22,9	81,7	3,1	30,0	B	71,0
4	April	31,6	27,8	23,9	81,6	3,7	32,0	T dan B	76,2
5	Mei	31,7	27,8	23,9	82,1	3,9	20,0	T	79,2
6	Juni	31,6	27,8	23,9	81,3	4,8	25,0	T	69,4
7	Juli	31,1	27,4	23,7	80,0	6,2	25,0	T	71,4
8	Agustus	31,8	27,5	23,1	76,0	6,4	25,0	T	87,4
9	September	32,7	28,2	23,6	75,2	5,6	89,0	T	90,4
10	Oktober	32,6	28,2	23,7	78,3	3,8	25,0	T dan B	84,6
11	November	32,7	28,4	24,0	78,9	3,2	28,0	B	75,2
12	Desember	32,0	27,8	23,5	79,8	3,4	40,0	B	63,4
Rata-rata		32,1	27,8	23,6	79,7	4,3	34,1	T dan B	74,8

Sumber : Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Majene Selama 10 Tahun (2004-2013)

8) Penggunaan lahan

Jenis penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah didominasi oleh Hutan Lahan Kering Primer dan Hutan Lahan Kering Sekunder, yakni masing-masing mencakup areal seluas 114.557,96 Ha (38,00%) dan 75.047,22 Ha (24,90%). Penggunaan lahan lainnya yang tergolong agak luas adalah Semak Belukar/Alang -alang seluas 53.689,22 Ha (17,81%), tegalan/ladang seluas 28.695,92 Ha (9,52%), dan Perkebunan/kebun seluas 13.692,46 Ha (4,54%). Penggunaan lahan lainnya berupa tambak, sawah, permukiman, hutan mangrove, padang rumput, dan lain-lain. Secara rinci luas masing-masing jenis penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana berikut:

**Tabel 2. 10 Luas Lahan berdasarkan Penggunaannya
di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020**

NO	TUTUPAN LAHAN	PENGUNAAN LAHAN 2020					LUAS	
		KECAMATAN					HA	%
		BUDONG-BUDONG	KAROSSA	PANGALE	TOBADAK	TOPOYO		
1	Danau Situ /	-	-	-	4,17	-	4,17	0,001
2	Rawa	214,37	3,21	2,30	223,02	58,84	501,74	0,161
3	Sungai	276,04	541,30	158,74	456,87	846,16	2.279,11	0,734
4	Tambak	209,99	1.886,86	873,12	-	1.851,93	4.821,9	1,554
5	Padang Rumput	-	775,21	73,68	494,52	668,21	2.011,62	0,648
6	Pasir Bukit Pasir Darat /	74,65	4,60	24,12	-	51,74	155,11	0,05
7	Pasir Bukit Pasir Laut /	-	-	-	-	0,01	0,01	3,224
8	Perkebunan / Kebun	4.376,61	5.303,92	0,23	3.597,85	783,29	14.061,9	4,534
9	Hutan Bakau	-	443,30	-	-	41,79	485,09	0,156
10	Hutan Rimba	-	93.700,12	208,71	37.962,09	64.945,15	196.816,07	63,46
11	Permukiman	319,01	269,66	162,28	359,53	317,12	1.427,6	0,46
12	Sawah	774,56	301,82	1.868,50	-	27,95	2.972,83	0,958
13	Sawah Tadahan Hujan	-	-	36,23	-	-	36,23	0,011
14	Semak Belukar / Alang Alang	9.709,73	13.757,49	3.174,26	19.457,47	8.626,10	54.725,05	17,647
15	Tanah Kosong / Gundul	41,46	-	38,37	603,07	177,67	860,57	0,277
16	Tegalan / Ladang	8.970,63	548,47	2.490,10	6.832,72	10.093	28.935,62	9,331
Total		24.967,04	117.535,97	9.110,64	69.991,32	88.489,67	310.094,62	100

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Mamuju Tengah 2017 – 2037

a. Kawasan budidaya

Kawasan Budidaya Terdiri atas :

1. Kawasan peruntukan hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi memiliki luas total kurang lebih 134.801,47 (seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus satu koma empat puluh tujuh) hektar 43,34 %, terdiri atas: a. Kawasan hutan produksi tetap; b. Kawasan hutan produksi terbatas; dan c. Kawasan hutan produksi konversi.

2. Kawasan Peruntukan Pertanian



Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas: Kawasan peruntukan tanaman pangan; dan Kawasan peruntukan hortikultura.

Kawasan peruntukan tanaman pangan terdiri dari atas:

- Lahan basah seluas kurang lebih 9.557 (sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh) hektar terdapat di Kecamatan Pangale kurang lebih 4.470 (empat ribu empat ratus tujuh puluh) hektar, Kecamatan Budong-Budong kurang lebih 1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh) hektar, Kecamatan Tobadak kurang lebih 1.655 (seribu enam ratus lima puluh lima) hektar, Kecamatan Topoyo kurang lebih 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) hektar, dan Kecamatan Karossa kurang lebih 1.475 (seribu empat ratus tujuh puluh lima) hektar;
- Lahan kering seluas kurang lebih 9.071,43 (Sembilan ribu tujuh puluh satu koma empat puluh tiga) hektar terdiri dari jagung, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar terdapat di Kecamatan Pangale kurang lebih 232,14 (Dua ratus tiga puluh dua koma empat belas) hektar, Kecamatan BudongBudong kurang lebih 3.764,50 (Tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat koma lima puluh) hektar, Kecamatan Tobadak kurang lebih 4.159,63 (Empat ribu seratus lima puluh Sembilan koma enam puluh tiga) hektar, Kecamatan Topoyo kurang lebih 254,12 (Dua ratus lima puluh empat koma dua belas) hektar, dan Kecamatan Karossa kurang lebih 661,04 (Enam ratus enam puluh satu koma nol empat) hektar.
- Kawasan peruntukan hortikultura seluas kurang lebih 1.371,42 (seribu tiga ratus tujuh puluh satu koma empat puluh dua) hektar, terdapat di Kecamatan Budong-budong, Kecamatan Pangale, Kecamatan Tobadak, Kecamatan Topoyo, dan Kecamatan Karossa.
- Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) terdapat di Kecamatan Pangale, Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Tobadak, Kecamatan Topoyo, dan Kecamatan Karossa dengan luas kurang lebih 7.272, 30 (tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua koma tiga puluh) Ha.

3. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan, seluas kurang lebih 59.996,17 (lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma tujuh belas) hektar, terdiri atas:

- Kawasan peruntukan perkebunan kelapa sawit dengan luas kurang lebih 45.550,32 (empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh koma tiga puluh dua) hektar terdapat di Kecamatan Pangale, Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Tobadak, Kecamatan Topoyo, dan Kecamatan Karossa;



- Kawasan peruntukan perkebunan kelapa dalam dengan luas kurang lebih 275 (dua ratus tujuh puluh lima) hektar terdapat di Kecamatan Pangale, Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Topoyo, Kecamatan Tobadak, dan Kecamatan Karossa;
- Kawasan peruntukan perkebunan cengkeh dengan luas kurang lebih 608 (enam ratus delapan) hektar terdapat di Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Tobadak, Kecamatan Topoyo dan Kecamatan Karossa;
- Kawasan peruntukan perkebunan kakao dengan luas kurang lebih 13.232,35 (tiga belas ribu dua ratus tiga puluh dua koma tiga puluh lima) hektar terdaftar di kecamatan Pangale, kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Topoyo, Kecamatan Tobadak, dan Kecamatan Karossa.
- Kawasan peruntukan perkebunan lainnya (kopi, vanili, kemiri, pala, dan lada) dengan luas kurang lebih 330.5 (tiga ratus tiga puluh koma lima) hektar terdapat di Kecamatan Tobadak dan Kecamatan Karossa.

4. Kawasan potensi perikanan

Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan, baik berupa tambak, kolam, maupun penangkapan. Kawasan perikanan di Kabupaten Mamuju tengah berupa Kawasan peruntukan perikanan tangkap, Kawasan peruntukan budidaya perikanan tambak dan Kawasan peruntukan budidaya perikanan kolam. Berdasarkan data RTRW Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017-2037, potensi kawasan perikanan di Kabupaten Mamuju Tengah sebagai berikut :

- Kawasan peruntukan perikanan tangkap berada di Kecamatan Pangale, Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Topoyo, dan Kecamatan Karossa.
- Kawasan perikanan tambak (perikanan air payau). Kawasan perikanan tambak di Kabupaten Mamuju Tengah terdapat di Kecamatan Budong-budong, Karossa, Pangale, Topoyo dan Tobadak.
- Kawasan peruntukan budidaya perikanan tambak terdiri atas :
 - a) Kawasan tambak udang dan bandeng terdapat di Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Topoyo, Kecamatan Pangale dan Kecamatan Karossa;
 - b) Kawasan budidaya rumput laut terdapat di Kecamatan Karossa, Budong-Budong dan Topoyo.
- Kawasan peruntukan pengolahan perikanan berupa industri pengolahan perikanan terdapat di Kecamatan Budong-budong, Karossa, Pangale, Topoyo dan Tobadak.
- Prasarana perikanan yang dikembangkan meliputi :

- a) Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) di Kecamatan Karossa; dan
 - b) Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Kambunong Kecamatan Karossa, Desa Babana di Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Pangale dan Kecamatan Topoyo.
- a. Perikanan Tangkap Laut

Secara administrasi Kabupaten Mamuju tengah terdiri dari 5 Kecamatan, 54 Desa dan 2 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), 4 kecamatan diantaranya memiliki desa pesisir yang penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Daerah-daerah pesisir tersebut yaitu Kecamatan Pangale (Desa Pangale, Desa Kombiling, Desa Polo Camba, dan Desa Lamba-Lamba), Kecamatan Budong-Budong (Desa Lumu, Desa Kire, Desa Babana), Kecamatan Topoyo (Desa Budong-Budong, Desa Tumbu, dan Desa Sina Batta, Desa Salupangkang IV), dan Kecamatan Karossa (Desa Tasokko, Desa Kambunong, Desa Salu Biro, Desa Lara dan Desa Karossa). Berikut jumlah nelayan di Kabupaten Mamuju Tengah :

Tabel 2. 11 Jumlah Nelayan Per Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pangale	347	347	336	328	328
2.	Budong-Budong	231	231	228	228	228
3.	Tobadak	-	-	-	-	-
4.	Topoyo	207	207	218	218	218
5.	Karossa	251	251	258	258	258
Jumlah		1.036	1.036	1.040	1.032	1.032

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

- b. Perikanan Budidaya

Perikanan Budidaya merupakan kegiatan memproduksi biota (organisme) akuatik (air) melalui pemeliharaan dalam wadah dan lingkungan terkontrol. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah, diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 2. 12 Perikanan Budidaya Air Laut Per Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Jenis Data	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pangale	Jumlah Pembudidaya (Org)	-	-	-	-	-
		Jumlah Produksi (Ton)	-	-	-	-	-
		Nilai Produksi (Rp)	-	-	-	-	-



No	Kecamatan	Jenis Data	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
2.	Budong-Budong	Luas Area (Ha)	-	-	-	-	-
		Jumlah Pembudidaya (Org)	-	-	-	-	-
		Jumlah Produksi (Ton)	-	-	-	-	-
		Nilai Produksi (Rp)	-	-	-	-	-
		Luas Area (Ha)	-	-	-	-	-
3.	Tobadak	Jumlah Pembudidaya (Org)	-	-	-	-	-
		Jumlah Produksi (Ton)	-	-	-	-	-
		Nilai Produksi (Rp)	-	-	-	-	-
		Luas Area (Ha)	-	-	-	-	-
4.	Topoyo	Jumlah Pembudidaya (Org)	-	-	-	-	-
		Jumlah Produksi (Ton)	-	-	-	-	-
		Nilai Produksi (Rp)	-	-	-	-	-
		Luas Area (Ha)	-	-	-	-	-
5.	Karossa	Jumlah Pembudidaya (Org)	20	20	20	100	112
		Jumlah Produksi (Ton)	30,10	70	135	207	18.193,77
		Nilai Produksi (Rp)	90.000.000	210.000.000	405.000.000	621.000.000	54.582.000.000
		Luas Area (Ha)	80	100	100	250	175

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

Tabel 2. 13 Perikanan Budidaya Air Tawar per Kecamatan di Kabupaten Mamuju tengah Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Jenis Data	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pangale	Jumlah Pembudidaya (Org)	-	60	60	69	69
		Jumlah Produksi (Ton)	-	20	23	29	21,18
		Nilai Produksi (Rp)	-	540.000.000	621.000.000	801.200.000	571.860.000
		Luas Area (Ha)	-	126	132	132	132
2.	Budong-Budong	Jumlah Pembudidaya (Org)	-	-	30	91	91



No	Kecamatan	Jenis Data	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
		Jumlah Produksi (Ton)	-	-	1	4	6,27
		Nilai Produksi (Rp)	-	-	20.000.000	134.400.000	169.290.000
		Luas Area (Ha)	-	-	21	21	21
3.	Tobadak	Jumlah Pembudidaya (Org)	-	35	40	45	48
		Jumlah Produksi (Ton)	-	12	15	14	11,27
		Nilai Produksi (Rp)	-	240.000.000	300.000.000	280.000.000	304.290.000
		Luas Area (Ha)	-	62	79	79	93
4.	Topoyo	Jumlah Pembudidaya (Org)	-	35	44,00	44,00	44
		Jumlah Produksi (Ton)	-	5	6	8	7,59
		Nilai Produksi (Rp)	-	150.000.000	206.000.000	252.600.000	204.930.000
		Luas Area (Ha)	-	12	14	14	14
5.	Karossa	Jumlah Pembudidaya (Org)	-	42	42	47	47
		Jumlah Produksi (Ton)	-	38	41	48	25,19
		Nilai Produksi (Rp)	-	1.330.000.000	1.500.200.000	1.500.200.000	680.130.000
		Luas Area (Ha)	-	35	39	39	39

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

Tabel 2. 14 Perikanan Budidaya Air Payau per Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Jenis Data	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pangale	Jumlah Pembudidaya (Org)	-	75	75	91	91
		Jumlah Produksi (Ton)	-	1.156	1.427	1.786	1.096
		Nilai Produksi (Rp)	-	56.644.000.000	69.923.000.000	89.064.506.000	53.704.000.000
		Luas Area (Ha)	-	2.489	2.506	2.506	2.506
2.	Budong-Budong	Jumlah Pembudidaya (Org)	-	55	55	61	61
		Jumlah Produksi (Ton)	-	420	550	376	243
		Nilai Produksi (Rp)	-	18.900.000.000	24.750.000.000	18.741.151.000	11.907.000.000
		Luas Area (Ha)	-	950	997	997	997



No	Kecamatan	Jenis Data	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
3.	Tobadak	Jumlah Pembudidaya (Org)	-	-	-	-	-
		Jumlah Produksi (Ton)	-	-	-	-	-
		Nilai Produksi (Rp)	-	-	-	-	-
		Luas Area (Ha)	-	-	-	-	-
4.	Topoyo	Jumlah Pembudidaya (Org)	-	95	95	107	107
		Jumlah Produksi (Ton)	-	1.098	1.148	1.179	593
		Nilai Produksi (Rp)	-	42.822.000.000	45.814.060.000	58.814.060.000	29.057.000.000
		Luas Area (Ha)	-	1.002	1.064	1.064	-
5.	Karossa	Jumlah Pembudidaya (Org)	-	320	342	342	342
		Jumlah Produksi (Ton)	-	1.398	1.557	1.434	987
		Nilai Produksi (Rp)	-	54.522.200.000	74.736.000.000	70.654.545.000	48.363.000.000
		Luas Area (Ha)	-	2.400	2.479	2.479	2.532

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

Dari Tabel 2.12 diatas diperoleh bahwa Perikanan Budidaya Air Laut hanya terdapat pada kecamatan Karossa, dan tidak terdapat pada Kecamatan lain. Pada tabel 2.13 diperoleh bahwa Perikanan Budidaya Air Tawar terdapat disemua Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah. Sedangkan Pada Tabel 2.14 diperoleh bahwa Perikanan Budidaya Air Payau terdapat di kecamatan Pangale, Budongbudong, Topoyo dan Karossa, tetapi tidak terdapat di Kecamatan Tobadak. Hal ini disebabkan karena kecamatan Tobadak tidak memiliki wilayah pesisir pantai.

5. Kawasan potensi peternakan

Pada umumnya Kabupaten Mamuju Tengah memiliki potensi peternakan yang cukup beragam. Hal ini dapat dilihat terdapatnya beragam jenis hewan ternak di lima Kecamatan berupa peternakan sapi, kerbau, kuda, kambing, ayam, itik, babi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 15 Populasi Ternak di Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun 2016-2020**

No	Jenis Ternak	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Ternak Besar	11.325	8.989	12.632	11.350	15.650
1	Sapi	11.104	8.807	12.380	11.112	15.373
2	Kerbau	134	146	161	150	171
3	Kuda	87	36	91	88	106
B	Ternak Kecil	25.911	30.839	32.974	24.506	37.591
1	Kambing	7.226	6.554	7.787	6.671	9.158
2	Ternak Kecil Lainnya	18.685	24.285	25.187	17.835	28.433
C	Unggas	1.693.124	1.069.509	1.106.517	802.538	1.076.751
1	Ayam	1.682.299	1.041.479	1.077.152	776.966	1.039.400
2	Itik	10.825	28.030	29.365	25.572	37.351

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

b. Kawasan Lindung

Kawasan lindung sebagaimana telah diatur pada Rencana Tata Ruang Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2017-2037, terdiri atas:

1) Kawasan hutan lindung;

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud huruf a memiliki luas total kurang lebih 16.712,58 (enam belas ribu tujuh ratus dua belas koma lima delapan) hektar atau 5,38 (lima koma tiga delapan) persen dari luas wilayah Kabupaten, terdapat di. Kecamatan Karossa dengan luas kurang lebih 16.028,98 (enam belas ribu dua puluh delapan koma sembilan puluh delapan) hektar; b. Kecamatan Tobadak dengan luas kurang lebih 494,44 (empat ratus sembilan puluh empat koma empat puluh empat) hektar; dan Kecamatan Pangale dengan luas kurang lebih 189,15 (seratus delapan puluh Sembilan koma lima belas) hektar.

2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas: a. Kawasan bergambut , Kawasan bergambut memiliki luas total kurang lebih 968,73 (sembilan ratus enam puluh delapan koma tujuh puluh tiga) hektar atau 0,31 (nol koma tiga puluh satu) persen dari luas wilayah Kabupaten, tersebar di Kecamatan Budong-Budong luasnya 550,91 (lima ratus lima puluh koma Sembilan puluh satu) dan Kecamatan Tobadak luasnya 417,82 (empat ratus tujuh belas koma delapan dua). b. Kawasan resapan air memiliki luas total kurang lebih 1.911,46 (seribu sembilan ratus sebelas koma empat puluh enam)

hektar atau 0,62 (nol koma enam puluh dua) persen dari seluruh wilayah Kabupaten, tersebar di Kecamatan Budong-Budong luasnya 314,37 (tiga ratus empat belas koma tiga puluh tujuh) dan Kecamatan Tobadak luasnya 1.597,08 (seribu lima ratus sembilan puluh tujuh koma delapan).

3) Kawasan perlindungan setempat;

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas: a. Kawasan sempadan pantai;. Kawasan sempadan pantai memiliki luas total kurang lebih 972,49 (Sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan) hektar terdapat di sepanjang garis pantai Kabupaten. b. Kawasan sempadan sungai memiliki luas total kurang lebih 2.742 (dua ribu tujuh ratus empat puluh dua) hektar terdapat di sepanjang daerah aliran sungai

4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;

Kawasan suaka alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami dan memberi perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna dan beranekaragam. Tujuan penetapan kawasan ini adalah melindungi keanekaragaman biota tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan umumnya.

Kawasan cagar budaya di wilayah Kabupaten diperlukan penetapannya untuk usaha preservasi peninggalan sejarah dan budaya warisan generasi pendahulu. Hal ini diperlukan untuk memperkuat eksistensi jati diri etnis yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah sehingga dalam aktualisasi diri di era perubahan global ini agar tetap menunjukkan kearifan jati dirinya tanpa terombang-ambing oleh nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nurani dan pandangan hidupnya. Warisan fisik bangunan atau artefak masa lalu yang dapat dijadikan indikator produk peradaban masa lalu, yang sekaligus juga dapat menjaga spirit generasi kini dan generasi penerus harus dijaga dalam kawasan cagar budaya.

Kawasan suaka alam dan cagar budaya di Kabupaten Mamuju Tengah seluas 56.278 Ha (19,29 %), terdapat di Kecamatan Karossa seluas 29.393,87 Ha;

5) Kawasan rawan bencana alam

Kawasan potensi rawan bencana alam di Kabupaten Mamuju Tengah berupa kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan bencana gelombang pasang, kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana gempa, kawasan rawan bencana tsunami, kawasan rawan bencana abrasi; dan kawasan rawan tenggelamnya pantai dan pulau-pulau kecil.



2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah yang dapat dikembangkan adalah wilayah-wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan agar memperoleh pertambahan manfaat dari berbagai segi seperti ekonomi, kualitas, penyelesaian masalah alam seperti bencana alam dan lain sebagainya. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034, Kebijakan Kabupaten Mamuju Tengah sebagai berikut:

- Pusat kegiatan Lokal/PKL di Tobadak\ (ibu Kota Kabupaten Mamuju Tengah) sebagai pusat pengembangan kota terpadu mandiri/KTM.
- Pengembangan Jalan Kolektor Primer, meliputi: Belang-Belang – Pasangkayu- Batas Provinsi Sulawesi Tengah.
- Pengembangan terminal tipe B, di Ibu Kota kabupaten Mamuju Tengah.
- Pengembangan jalur Kereta api lintas utama meliputi; perbatasan kabupaten Pinrang (Sulsel) – Polewali – Wonomulyo – Campalagian – Majene – Mamuju – Belang-Belang – Topoyo – Pasangkayu – Donggala (Sulteng).
- Pengembangan pelabuhan, pelabuhan pengumpan regional di Pelabuhan Budong-Budong.
- Wilayah Sungai, WS karama meliputi DAS Karama, DAS Budong-Budong dan DAS Karossa.
- Kawasan potensi pertanian.Komoditas unggulan tanaman pangan alternatif padi sawah (potensi daerah untuk sawah, realisasi cetak sawah) dan palawija, Jagung, kedelai, jenis ubi serta kacang-kacangan. Berikut ini produktivitas dari tanaman pangan Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2019:

Tabel 2. 16 Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas, Tanaman Pangan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020

No	Komoditi	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kuintal/Ha)
1	Padi	11.004	46.494	423
2	Jagung	42.469	127.003	299,04
3	Kedelai	4.246	443	10,43
4	Ubi	100	1.359	1.359
5	Tanaman Pangan Lainnya	31	385	1.241,94

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

- Kawasan Potensi Tambang

Berdasarkan RTRW Kabupaten Mamuju Tengah, Kawasan potensi pertambangan di Kabupaten Mamuju Tengah terdiri atas Kawasan potensi pertambangan mineral/batubara, dan Kawasan potensi pertambangan minyak dan gas bumi.

- Kawasan Potensi Pertambangan Mineral dan Batubara, terdiri dari :

- a. Kawasan Pertambangan Batu Pasir terdapat di :
 - 1) Kecamatan Karossa : Desa Sanjango, Desa Lara, Desa Karossa dan Desa Salubiro.
 - 2) Kecamatan Topoyo : Desa Topoyo dan Desa Tabolang.
 - 3) Kecamatan Pangale : Desa Pangale dan Desa Lemo-Lemo.
 - 4) Kecamatan Tobadak : Desa Tobadak
 - b. Kawasan pertambangan batu gamping terdapat di Kecamatan Budong-Budong : Desa Lumu dan Desa Kire.
 - c. Kawasan pertambangan biji besi terdapat di Kecamatan Karossa : Desa Benggaulu dan Desa Lara.
 - d. Kawasan pertambangan emas di Desa Sanjango Kecamatan Karossa, dan Kecamatan Topoyo.
 - e. Kawasan pertambangan tembaga di Kecamatan Karossa.
 - f. Kawasan pertambangan galena di Kecamatan Karossa dan Kecamatan Topoyo.
2. Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yaitu pada Blok Budong-budong di Kecamatan Budong-budong.
- i) Kawasan Potensi Pariwisata
- Kabupaten Mamuju Tengah dengan luas wilayah 3.014,37 km² yang terbagi menjadi lima (5) Kecamatan tempat potensi wisata cukup banyak untuk dikembangkan, berdasarkan data yang ada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tengah, terdapat beberapa sebaran objek wisata yang berdasarkan jenis wisata budaya sebagai berikut :

Tabel 2. 17 Sebaran Objek Wisata di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020

No	Jenis Objek Wisata	Jumlah Lokasi	Jumlah Kunjungan (Orang)	
			Domestik	Mancanegara
1	Objek Wisata Budaya	8	1.562	-
2	Objek Wisata Bahari	23	38.277	-
3	Objek Wisata Alam	31	3.462	-
4	Objek Wisata Buatan	11	1.716	-

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

Di Kabupaten Mamuju Tengah terdapat juga objek wisata berdasarkan jenis wisata buatan maupun alam yang tersebar di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah, objek wisata yang paling mendominasi yaitu objek wisata air terjun dan beberapa objek wisata goa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2. 18 Sebaran Objek Wisata berdasarkan Jenis Wisata Alam dan Buatan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020

Objek Wisata		Wilayah
Wisata Alam		
1	Air Terjun Popenga	Lemba Hopo, Kec. Karossa
2	Air Terjun Kalandu	Tabolang, Kec. Topoyo
3	Air Terjun Batu Parigi	Batu Parigi, Kec. Tobadak
4	Air Terjun Butan / Mario Pulana	Salulebbo, Kec. Topoyo
5	Air Terjun Salumabulang	Salulebbo, Kec. Topoyo
6	Air Terjun Salumalabbu	Salulebbo, Kec. Topoyo
7	Air Terjun Salansang	Kire, Kec. Budong-Budong
8	Air Terjun Girmulya	Saluada, Kec. Tobadak
9	Air Terjun Salumoni	Batu Parigi, Kec. Tobadak
10	Air Terjun Lumut	Batu Parigi, Kec. Tobadak
11	Air Terjun Hako	Batu Parigi, Kec. Tobadak
12	Air Terjun Manissi	Tasokko, Kec. Karossa
13	Air Terjun Salubarana	Lara, Kec. Karossa
14	Air Terjun Anjalili	Sukamaju, Karossa
15	Air Terjun Mora	Mora, Kec. Karossa
16	Air Terjun Tanete Letter	Tasokko, Kec. Karossa
17	Air Terjun Piokedi	Sanjango, Kec. Karossa
18	Air Terjun Bidadari	Sanjango, Kec. Karossa
29	Air Terjun Butan Indah	Sanjango, Kec. Karossa
20	Air Terjun Salu Patagang	Sanjango, Kec. Karossa
21	Air Terjun Lara	Lara, Kec. Karossa
22	Air Terjun Salubiro	Salubiro, Kec. Karossa
23	Air Terjun Sejati	Sejati, Kec. Tobadak
24	Air Terjun Kampaja	Kambunong, Kec. Karossa
25	Air Terjun Langgio	Sanjango, Kec. Karossa
26	Goa Mona Moni	Tabolang, Kec. Topoyo
27	Goa Lesang Pembuni	Sanjango, Kec. Karossa
28	Goa Kalong	Sanjango, Kec. Karossa
29	Goa Pio Kedi Tujuh Pintu	Sanjango, Kec. Karossa
30	Goa Tambulang	Kecamatan Budong-Budong
31	Goa Nenek Pulo	Passapa, Kec. Budong-Budong
Wisata Buatan		
1	Pemancingan Ikan Babana	Babana, Kec. Budong-Budong
2	Dermaga Babana	Babana, Kec. Budong-Budong
3	Kawasan Wisata Agro	Tobadak, Kec. Tobadak
4	Kota Terpadu Mandiri (Ktm)	Tobadak, Kec. Tobadak
5	Alun-Alun Topoyo	Topoyo, Kec. Topoyo
6	Kolam Permandian	Sanjango, Kec. Karossa
7	Agro Wisata Durian	Batu Parigi, Kec. Tobadak

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

Sebaran objek wisata berdasarkan jenis wisata bahari yang terdapat di Kabupaten Mamuju Tengah tersebar di beberapa Kecamatan kecuali Kecamatan Tobadak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 19 Sebaran Objek Wisata Berdasarkan Jenis Wisata Bahari di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020

No	Objek Wisata	Wilayah
1	Pantai Kombiling	Kombiling, Kec. Pangale
2	Pantai Lumu	Lumu, Kec. Budong-Budong
3	Pantai Tumbu	Tumbu, Kec. Topoyo
4	Pantai Kambunong	Kambunong, Kec. Karossa
5	Pulau Kambunong	Kambunong, Kec. Karossa
6	Pantai Batu Meana	Tumbu, Kec. Topoyo
7	Pantai Kire	Kire, Kec. Budong-Budong
8	Pantai Patulana	Budong-Budong, Kec. Topoyo
9	Pantai Batu Rede	Kire, Kec. Budong-Budong
10	Pantai Kalia	Tasokko, Kec. Karossa
11	Pantai Batu Karampuang	Tasokko, Kec. Karossa
12	Pantai Anggaleha	Lara, Kec. Karossa
13	Pantai Karossa	Karossa, Kec. Karossa
14	Pantai Salubiro	Salubiro, Kec. Karossa
15	Pantai Lara	Lara, Kec. Karossa
16	Pantai Dato	Tumbu, Kec. Topoyo
17	Pantai Polo Pantai	Polo Pantai, Kec. Pangale
18	Pantai Karama	Karama, Kec. Pangale

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Sebagai implikasi topografi dan geografi, menyebabkan Kabupaten Mamuju Tengah memiliki 10 ancaman bencana dengan tingkat ancaman bencana yang bervariasi, jenis bencana yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah meliputi : ancaman gempa bumi; ancaman tsunami; ancaman abrasi; ancaman angin puting beliung; ancaman gelombang pasang; ancaman banjir; ancaman tanah longsor; ancaman banjir dan tanah longsor; ancaman kekeringan; dan ancaman likuefaksi.

1) Bencana Alam

a. Banjir

Banjir adalah peristiwa atau terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Selain itu juga ada banjir bandang yaitu banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar. Banjir tersebut disebabkan karena terbendungnya aliran sungai pada alur sungai oleh material longsor pada alur sungai di kawasan hulu.

Kawasan rawan bencana Banjir di kabupaten Mamuju Tengah terdapat di :

- Kecamatan Pangale;



- b) Kecamatan Budong-Budong;
- c) Kecamatan Topoyo; dan
- d) Kecamatan Karossa.

b. Gelombang Pasang

Gelombang pasang atau badai adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis disekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia yang berada dibawah lintang 10 derajat tidak terpengaruh oleh gaya koriolis bumi karena itu bukan daerah lintasan siklon tropis. Tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras.

Kawasan rawan bencana Gelombang Pasang di kabupaten Mamuju Tengah terdapat di sepanjang pantai yaitu di:

- a) Kecamatan Pangale;
- b) Kecamatan Budong-Budong;
- c) Kecamatan Topoyo; dan
- d) Kecamatan Karossa.

c. Tsunami

Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang laut (*tsu*) berarti pelabuhan dan (*name*) berarti gelombang, jadi tsunami secara harfiah berarti sebagai gelombang laut yang menerjang pelabuhan atau kawasan pantai. Gelombang ini timbul setelah gempa besar karena adanya interaksi antar lempeng di dasar laut, longsor di bawah laut, jatuhnya meteor di laut serta gunung api di dasar laut.

Kawasan rawan bencana Tsunami di Kabupaten Mamuju Tengah terdapat di sepanjang pantai yaitu di:

- a) Kecamatan Pangale;
- b) Kecamatan Budong-Budong;
- c) Kecamatan Topoyo; dan
- d) Kecamatan Karossa.

d. Abrasi

Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak.

Kawasan rawan abrasi di kabupaten Mamuju Tengah yaitu di:

- a) Kecamatan Pangale;
- b) Kecamatan Budong-Budong;
- c) Kecamatan Topoyo; dan
- d) Kecamatan Karossa.



e. Longsor

Tanah longsor terjadi akibat gerakan massa tanah atau batuan, maupun pencampuran keduanya menurun atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Bencana ini umumnya terjadi di kawasan lereng curam dan daerah kritis. Tanah longsor umumnya dipicu oleh hujan lebat dan gempa.

Kawasan rawan bencana Longsor di kabupaten Mamuju Tengah terdapat di :

- a) Kecamatan Budong-Budong;
- b) Kecamatan Topoyo;
- c) Kecamatan Karossa;
- d) Kecamatan Tobadak.

f. Angin Puting Beliung

Angin Puting Beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 Km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat.

Kawasan rawan bencana Angin Puting Beliung di kabupaten Mamuju Tengah terdapat di:

- a) Kecamatan Pangale;
- b) Kecamatan Budong-Budong;
- c) Kecamatan Topoyo;
- d) Kecamatan Karossa; dan
- e) Kecamatan Tobadak.

g. Gempa

Gempa Bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif dan aktivitas gunung api atau runtuhnya batuan

Kawasan rawan bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju Tengah terdapat di:

- a) Kecamatan Pangale;
- b) Kecamatan Budong-Budong;
- c) Kecamatan Topoyo;
- d) Kecamatan Karossa; dan
- e) Kecamatan Tobadak

h. Kekeringan

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan

pertanian yang memerlukan kecukupan air. Bencana kekeringan memang dipengaruhi oleh berbagai penyebab seperti musim kemarau panjang, kondisi tanah dan topografi. Namun bukan berarti manusia tidak memiliki andil terhadap perubahan itu. Faktor vegetasi dan daerah tangkapan air, tata kelola air dan kearifan dalam memanfaatkan air pun menjadi faktor penentu yang mempengaruhi ketersediaan air. Kawasan rawan bencana Kekeringan di Kabupaten Mamuju Tengah terdapat di:

- a) Kecamatan Pangale;
- b) Kecamatan Budong-Budong;
- c) Kecamatan Topoyo;
- d) Kecamatan Karossa; dan
- e) Kecamatan Tobadak.

i. Likuifaksi

Likuifaksi merupakan salah satu bahaya ikutan gempa bumi. Kejadian likuifaksi bergantung pada intensitas kekuatan gempa bumi. Berdasarkan hasil penelitian kejadian-kejadian likuifaksi di dunia, likuifaksi dapat terjadi pada beberapa nilai percepatan tanah puncak. Kawasan rawan likuifaksi menurut Badan Geologi terdapat di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah yang masuk dalam zona kerentanan likuifaksi sedang artinya zona kerentanan yang dapat mengalami likuifaksi secara tidak merata dan struktur tanah umumnya rusak. Tipe kerusakan struktur tanah yang terjadi berupa pergeseran lateral, penurunan tanah dan semburan pasir.

2) Bencana Non Alam

Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam antara lain kebakaran, kegagalan teknologi, epidemi dan wabah penyakit. Bencana sosial juga termasuk bencana non alam.

a. Kebakaran Lahan dan Hutan

Kebakaran lahan dan hutan adalah suatu kejadian dimana lahan dan hutan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis atau nilai lingkungan. Kebakaran lahan dan hutan sering kali menyebabkan bencana kabut asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar.

Kabupaten Mamuju Tengah masih tergolong rawan bencana kebakaran lahan dan hutan dikarenakan dengan banyaknya lahan gambut. Kawasan rawan bencana kebakaran lahan dan hutan di kabupaten Mamuju Tengah terdapat di Kecamatan Pangale; Kecamatan Budong-Budong; Kecamatan Topoyo; Kecamatan Karossa; dan Kecamatan Tobadak.



b. Kecelakaan Transportasi

Kecelakaan Transportasi adalah kecelakaan transportasi yang terjadi di darat, laut dan udara. Kawasan rawan bencana Transportasi khususnya transportasi darat yang disebabkan oleh prasarana jalan yang belum memadai di kabupaten Mamuju Tengah terdapat di :

- a) Desa Tinali dan Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong; dan
- b) Desa Tasokko, Desa Lara dan Desa Karossa Kecamatan Karossa.

c. Kecelakaan Industri

Kecelakaan Industri adalah kecelakaan yang disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu perilaku kerja yang berbahaya (unsafe human act) dan kondisi yang tidak aman (unsafe conditions). Adapun jenis kecelakaan yang terjadi sangat bergantung pada macam industrinya, misalnya bahan dan peralatan kerja yang digunakan, proses kerja, kondisi tempat kerja, bahkan pekerja yang terlibat di dalamnya. Kawasan rawan bencana Kecelakaan Industri di kabupaten Mamuju Tengah terdapat di :

- a) Desa Pontanakayyang Kecamatan Budong-Budong; dan
- b) Desa Tabolang Kecamatan Topoyo.

d. Konflik Sosial

Konflik Sosial atau kerusuhan sosial atau huru hara adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antar suku, agama dan ras (SARA).

Selain masyarakat asli yang bermukim, Kabupaten Mamuju Tengah yang sebagian wilayahnya menjadi kawasan permukiman transmigrasi juga didiami oleh masyarakat yang berasal dari luar daerah serta berasal dari beberapa suku bangsa di Indonesia. Hal tersebut bukan tidak mungkin akan menyebabkan rawannya kejadian konflik sosial apabila tidak ditangani oleh pemerintah melalui program-program yang bersifat mempererat persatuan dan persaudaraan antar sesama masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah.

2.1.4. Demografi

1) Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2016 mencapai 142.139 jiwa, kemudian menurun menjadi 143.946 jiwa (-3,69%) pada tahun 2017. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 145.756 jiwa (1,26%). Kemudian menurun pada tahun 2019 menjadi 143.272 jiwa (-1,73%) yang terdiri dari 74.239 jiwa laki-laki dan 69.033 jiwa perempuan, dan pada tahun 2020 menurun menjadi 138.130 (-2,7%) yang terdiri dari 71.422 jiwa laki-laki dan 66.708 jiwa perempuan. Data ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah

penduduk perempuan. Jika dilihat dari distribusi penyebarannya pada tahun 2019, jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Topoyo yaitu sejumlah 35.774 jiwa. Sedangkan sebaran jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Pangale sejumlah 15.072 jiwa. Adanya pengurangan jumlah penduduk disebabkan oleh mobilitas penduduk (pindah-datang), kematian, penghapusan dan anomali (data yang tidak aktif). Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 20 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Laki-Laki					Perempuan					Jumlah				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tobadak	14.930	15.209	16.676	15.816	15.098	13.574	13.866	15.027	14.657	13.999	28.504	29.075	31.703	30.473	29.097
2	Pangale	6.839	7.116	7.851	7.768	7.586	6.267	6.688	7.349	7.304	7.144	20.089	13.106	15.200	15.072	14.730
3	Budong-Budong	15.037	15.610	17.456	16.388	15.492	14.186	14.712	15.957	15.344	14.575	29.223	30.322	33.413	31.732	30.067
4	Topoyo	18.259	18.421	18.223	18.534	18.323	17.139	17.287	17.167	17.240	17.144	35.398	35.708	35.390	35.774	35.467
5	Karossa	18.609	18.210	15.540	5.733	14.923	17.299	16.827	14.510	14.488	13.846	35.908	35.037	30.050	30.221	28.769
Jumlah		73.674	74.566	75.746	74.239	71.422	68.465	69.380	70.010	69.033	66.708	142.139	143.946	145.756	143.272	138.130

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mamuju Tengah Tahun 2021

2) Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Kabupaten Mamuju Tengah memiliki angka kepadatan penduduk pada tahun 2016 yaitu 45,84 jiwa, menurun menjadi 46,42 jiwa pada tahun 2017. Kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 47,00 jiwa, menurun menjadi 46,20 jiwa pada tahun 2019, dan menurun menjadi 44,55 pada tahun 2020. Kepadatan penduduk ini mengikuti kenaikan dan penurunan jumlah penduduk tiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 21 Distribusi dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk	142.139	143.946	145.756	143.272	138.130
2	Luas Wilayah (km ²)	3.100,87	3.100,87	3.100,87	3.100,87	3.100,87

3	Kepadatan Penduduk per km ²	45,84	46,42	47,00	46,20	44,55
---	--	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

3) Struktur Kependudukan

Struktur kependudukan Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat berdasarkan struktur penduduk menurut kelompok umur dan struktur penduduk menurut tingkat pendidikan, selanjutnya akan dibahas lebih rinci sebagai berikut :

a) Struktur Penduduk menurut Kelompok Umur

Struktur penduduk berdasarkan kelompok umur dari kelompok umur 0-75 tahun ke atas, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2020, jumlah penduduk terbanyak terdapat pada usia 15-19 tahun dengan jumlah penduduk 16.486 jiwa, sedangkan jumlah penduduk berdasarkan usia terkecil adalah usia 70-74 tahun dengan jumlah penduduk 1.429 jiwa. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2. 22 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Kelompok Umur	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	00-04	7.405	5.868	9.086	10.726	10.658
2	05-09	11.928	11.705	13.480	13.855	13.335
3	10-14	14.301	13.791	15.957	15.406	14.049
4	15-19	14.965	15.067	20.619	19.221	16.486
5	20-24	15.230	14.907	16.687	17.698	15.782
6	25-29	13.746	14.062	11.457	11.067	11.188
7	30-34	13.266	13.057	10.656	9.952	10.218
8	35-39	11.885	12.274	10.301	9.499	9.432
9	40-44	10.809	10.672	9.074	8.796	8.922
10	45-49	9.491	10.074	8.715	7.921	8.039
11	50-54	6.844	7.407	6.544	6.529	6.781
12	55-59	4.884	5.528	4.763	4.632	4.660
13	60-64	3.112	3.689	3.281	3.170	3.524
14	65-69	1.915	2.560	2.249	2.107	2.054
15	70-74	1.209	1.518	1.382	1.350	1.429
16	>75	1.149	1.767	1.505	1.343	1.573
Total		142.139	143.946	145.756	143.272	138.130

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

b) Struktur Penduduk menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil menunjukkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin yang berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2019 dan 2020 jumlah penduduk baik laki-laki maupun perempuan mengalami penurunan. Penurunan jumlah penduduk ini disebabkan karena

adanya mobilisasi penduduk berupa perpindahan penduduk ke daerah lain dan kematian, penghapusan dan anomali (Data yang tidak aktif). Pada tahun 2020 Kecamatan Topoyo merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak sebesar 35.276 jiwa, dengan proporsi laki-laki sebesar 51 persen, dan perempuan sebesar 49 persen dari total penduduk di kecamatan Topoyo. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu kecamatan Pangale dengan jumlah penduduk sebanyak 14.730 jiwa dengan proporsi laki-laki sebesar 51 persen, dan perempuan sebesar 49 persen dari total penduduk di Kecamatan Pangale. Struktur penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 23 Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020

No	Kecamatan	Gender	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Topoyo	Laki-Laki	18.259	18.421	18.223	18.534	18.323
		Perempuan	17.139	17.287	17.167	17.240	17.144
2	Tobadak	Laki-Laki	14.930	15.209	16.676	15.816	15.098
		Perempuan	13.574	13.866	15.027	14.657	13.999
3	Budong2	Laki-Laki	15.037	15.610	17.456	16.388	15.492
		Perempuan	14.186	14.712	15.957	15.344	14.575
4	Karossa	Laki-Laki	18.739	18.210	15.540	15.733	14.923
		Perempuan	17.299	16.827	14.510	14.488	13.846
5	Pangale	Laki-Laki	6.839	7.116	7.851	7.768	7.586
		Perempuan	13.250	6.688	7.349	7.304	7.144
Jumlah			142.139	143.946	145.756	143.272	138.130

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mamuju Tengah Tahun 2021

c) Struktur Penduduk menurut Pendidikan

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2020 terlihat angka tertinggi terdapat pada jumlah penduduk yang belum sekolah sebesar 46.400 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah dengan tingkat pendidikan Strata 3 (S3) yaitu sebesar 6 jiwa dari total jumlah penduduk sebanyak 138.130 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 24 Jumlah Penduduk berdasarkan pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Belum Sekolah	35.210	37.291	46.764	48.552	46.400
2	Belum Tamat SD	25.717	24.955	23.051	21.306	18.922
3	Tamat SD	41.755	41.587	36.166	34.066	33.012

4	Tamat SMP	19.197	19.101	17.518	16.746	16.598
5	Tamat SMA	15.943	16.350	16.893	16.892	17.133
6	Tamat Diploma	1.643	1.682	1.730	1.737	1.757
8	Tamat S1	2.575	2.871	3.477	3.847	4.070
9	Tamat S2	89	101	150	120	132
10	Tamat S3	10	8	7	6	6
Jumlah		142.139	143.946	145.756	143.272	138.130

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mamuju Tengah Tahun 2021

d) Struktur Penduduk menurut Agama

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan selama lima tahun terakhir (2016-2020) penduduk terbanyak di Kabupten Mamuju Tengah, pertama penduduk yang beragama Islam sebanyak 115.760 jiwa, kedua penduduk yang beragama Kristen sebanyak 13.113 jiwa, ketiga penduduk yang beragama Hindu sebanyak 5.726 jiwa, keempat penduduk yang beragama Katolik sebanyak 3.339 jiwa, kelima penduduk yang beragama Budha sebanyak 166 jiwa. Keenam penduduk yang beragama Kepercayaan sebanyak 21 jiwa dan yang paling sedikit adalah penduduk yang menganut agama Kong Hu Cu sebanyak 5 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 25 Jumlah Penduduk berdasarkan Agama di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Islam	118.327	119.748	121.532	119.832	115.760
2	Katolik	3.664	3.701	3.611	3.514	3.339
3	Kristen	13.620	13.836	14.347	13.814	13.113
4	Budha	201	198	165	165	166
5	Hindu	6.282	6.420	6.051	5.913	5.726
6	Kong Hu Cu	14	13	16	9	5
8	Kepercayaan	31	30	34	25	21
Jumlah		142.139	143.946	145.756	143.272	138.130

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mamuju Tengah Tahun 2021

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga

Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara, PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2020 menurun dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2019. Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 adalah -0,40 persen. Hampir seluruh sektor ekonomi yang ada pada PDRB pada tahun 2020 mencatat pertumbuhan yang negatif. Laju pertumbuhan PDRB tertinggi dihasilkan oleh sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,74 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 26 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2019

No	Lapangan Usaha	Tahun									
		2016		2017		2018		2019*		2020**	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,308,010.0	3,29	1,381,382.8	5,61	1,466,185.5	6,14	1,549,311.0	5,67	1.562.880,9	0,88
2	Pertambangan dan Penggalan	24,528.1	9,63	25,408.3	3,59	26,996.4	6,25	27,815.4	3,03	26.628,5	-4,27
3	Industri Pengolahan	167,892.7	-9,48	177,862.6	5,94	194,270.9	9,23	216,448.8	11,42	210.079,2	-2,94
4	Pengadaan Listrik dan Gas	428.9	19,24	462.8	7,91	488.0	5,43	514.6	5,47	532	3,38
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Daur Ulang	1,193.4	6,25	1,287.4	7,88	1,357.4	5,44	1,488.0	9,62	1.522,7	2,38
6	Konstruksi	28,989.0	16,25	30,497.3	5,20	31,747.3	4,10	33,073.8	4,18	29.667,3	-10,30
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	83,197.8	4,87	86,013.4	3,38	89,517.6	4,07	92,669.8	3,52	90.385,8	-2,46
8	Transportasi dan Pergudangan	12,882.4	0,76	13,168.8	2,22	13,592.0	3,21	14,611.1	7,50	13.971,3	-4,38
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,879.0	9,06	3,922.6	1,12	4,159.1	6,03	4,517.3	8,61	4.284,1	-5,16
10	Informasi dan Komunikasi	23,021.8	10,68	24,174.2	5,01	25,424.2	5,17	27,005.4	6,22	29.025,4	7,48

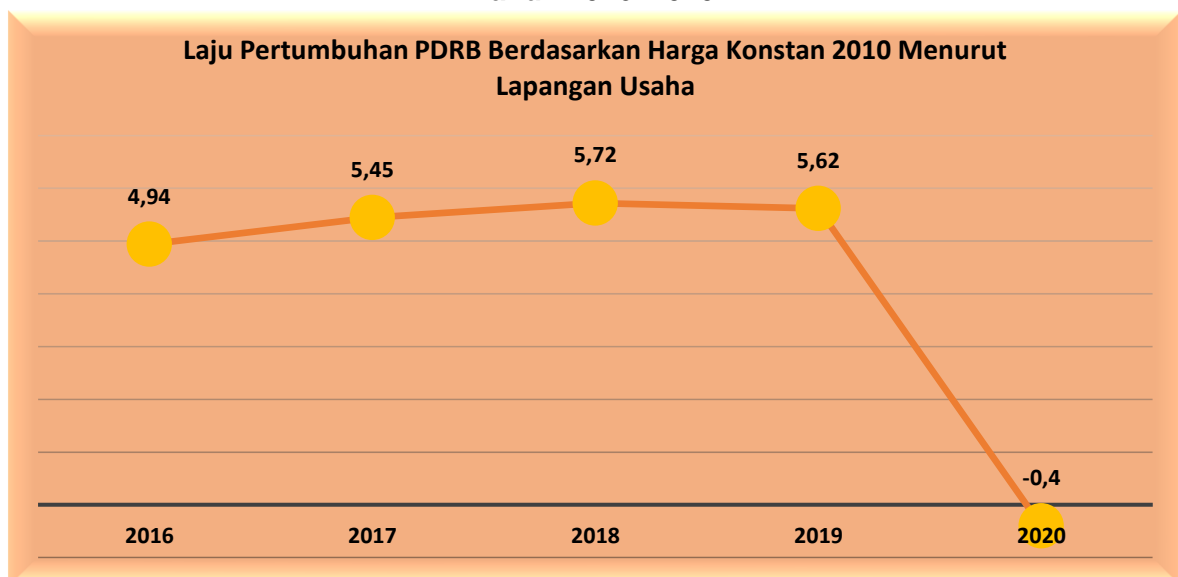


11	Jasa Keuangan dan Asuransi	15,267.4	11,44	16,826.5	10,21	17,599.2	4,59	18,143.2	3,09	19,548	7,74
12	Real Estate	68,207.0	5,60	71,593.2	4,96	73,293.2	2,37	75,849.0	3,49	77,057,7	1,59
13	Jasa Perusahaan	317.4	3,82	325.1	2,43	332.1	2,15	340.4	2,49	325,2	-4,45
14	Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	81,063.0	98,84	82,873.4	2,23	83,673.4	0,97	83,951.0	0,33	75,664,5	-9,87
15	Jasa Pendidikan	73,759.3	9,16	79,945.2	8,39	81,245.2	1,63	82,839.0	1,96	77,976,7	-5,87
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,654.0	10,64	5,932.9	4,93	6,282.9	5,90	6,535.8	4,03	6,740,1	3,12
17	Jasa Lainnya	3,902.5	8,21	4,106.8	5,24	4,256.8	3,65	4,510.8	5,97	4,414,7	-2,13
Produk Domestik Regional Bruto		1,902,193.7	4,94	2,005,783.3	5,45	2,120,421.1	5,72	2,239,624.6	5,62	2,230.704,1	-0,40

Sumber : Sumber : BPS, Mamuju Tengah Dalam Angka, Tahun 2021

Laju Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) di Kabupaten Mamuju Tengah, 2016–2020 memperlihatkan adanya fluktuasi. Pada tahun 2015 sebesar 4,94, pada tahun 2016 meningkat menjadi 5,45% yang selanjutnya pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi 5,72%, kemudian mengalami penurunan menjadi 5,62% pada tahun 2019 dan kembali menurun drastis menjadi -0.40% di tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 2. 3 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) di Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2016–2020



Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten mamuju Tengah Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2016-2020

Untuk nilai dan kontribusi sektor dalam PRDB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan, pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.486.430,7

atau peningkatan sebesar 7,4% dari tahun sebelumnya, pada tahun 2017 menjadi Rp. 2.693.678,1 atau meningkat sebesar 8,3% dari tahun 2016, pada tahun 2018 menjadi Rp. 2.970.170,6 atau meningkat sebesar 10,3% dari tahun 2017, dan pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan menjadi Rp. 3.153.864,3 atau meningkat 6,2% dari tahun 2018 dimana kontribusi terbesar tahun 2019 dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp. 2.245.458,0 atau sebesar 71,20%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 27 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha	Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.751.199.4	6.2	1.896.277.4	8.3	2.121.943.5	11.9	2.245.458.0	5.8	2.287.513.1	1.87
2	Pertambangan dan Penggalian	31.616.4	12.6	32.833.2	3.8	35.403.2	7.8	36.927.4	4.3	36.062.0	-2.34
3	Industri Pengolahan	193.315.8	-7.0	216.283.9	11.9	236.092.1	9.2	267.653.3	13.4	271.056.3	1.27
4	Pengadaan Listrik dan Gas	310.0	22.6	358.3	15.6	378.1	5.5	385.3	1.9	401.5	4.20
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Daur Ulang	1.383.8	7.7	1.493.3	7.9	1.576.6	5.6	1.747.6	10.8	1.792.4	2.56
6	Konstruksi	36.342.5	19.8	39.455.4	8.6	42.293.8	7.2	44.630.8	5.5	41.176.7	-7.74
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	117.588.1	10.3	125.285.7	6.5	134.021.0	7.0	139.696.9	4.2	138.242.3	-1.04
8	Transportasi dan Pergudangan	15.728.0	1.4	16.171.5	2.8	16.750.2	3.6	18.290.0	9.2	17.817.2	-2.59
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.942.9	12.3	5.193.5	5.1	5.569.9	7.2	6.065.5	8.9	5.950.6	-1.89
10	Informasi dan Komunikasi	25.520.5	11.9	27.425.2	7.5	29.462.1	7.4	31.510.1	7.0	33.488.1	6.28
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	20.824.6	14.7	23.788.4	14.2	25.684.5	8.0	26.851.3	4.5	28.850.5	7.45
12	Real Estate	87.478.2	8.9	93.546.2	6.9	95.885.1	2.5	100.113.0	4.4	102.115.3	2.00
13	Jasa Perusahaan	342.1	5.9	352.8	3.1	363.8	3.1	377.1	3.7	362.8	-3.79
14	Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	103.587.0	100.0	106.154.6	2.5	109.785.9	3.4	112.887.7	2.8	101.991.3	-9.65
15	Jasa Pendidikan	83.930.2	12.4	95.927.4	14.3	101.055.8	5.3	106.685.6	5.6	104.221.8	-2.31
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.492.3	13.7	7.943.9	6.0	8.522.7	7.3	8.926.9	4.7	9.051.8	1.40

17	Jasa Lainnya	4,829.0	11.5	5,187.4	7.4	5,382.4	3.8	5,657.8	5.1	5,544.6	-2.00
Produk Domestik Regional Bruto		2,486,430.7	7.4	2,693,678.1	8.3	2,970,170.6	10.3	3,153,864.3	6.2	3,185,638.2	1.01

Sumber: BPS Mamuju Tengah Dalam Angka, Tahun 2021

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa selama lima tahun terakhir (2016 - 2019), struktur perekonomian Kab. Mamuju Tengah didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; serta Perdagangan Besar dan Eceran (reparasi mobil dan sepeda motor). Secara serentak ketiga kategori tersebut memiliki peranan sebesar 84,11% (Atas dasar Harga Berlaku) terhadap total PDRB Kab. Mamuju Tengah tahun 2018.

Apabila melihat tren dari tahun 2016–2019 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, serta Industri Pengolahan merupakan dua lapangan usaha yang memberikan peranan tertinggi terhadap total PDRB Kab. Mamuju Tengah. Namun meskipun peranannya tinggi, selama 2016-2020 lapangan usaha Industri Pengolahan cenderung menunjukkan peranan yang menurun. Sebaliknya, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan peranannya berfluktuasi namun cenderung meningkat. Hal tersebut dapat menggambarkan walaupun struktur ekonomi Kab. Mamuju Tengah masih cenderung pada pertanian namun terlihat juga sudah mulai terjadi pergeseran ke industri.

2.2.2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli. Selama periode 2016 - 2019, laju inflasi Propinsi Sulawesi Barat secara umum mengalami penurunan tiap tahunnya. Pada tahun 2016 tingkat inflasi Kab. Mamuju Tengah pada posisi 2,23 persen, dan pada tahun 2017, inflasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi sebesar 3,79 persen, selanjutnya pada tahun 2018, laju inflasi Propinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan menjadi 1,80 persen, sedangkan pada tahun 2019 laju inflasi juga mengalami penurunan menjadi 1,43 persen dan kembali meningkat di tahun 2020 menjadi 1,80 persen.

**Tabel 2. 28 Perkembangan Inflasi Tahunan di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2016 - 2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Inflasi	2,23	3,79	1,80	1,43	1,80

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2021



Inflasi tahunan 2017 Propinsi Sulawesi Barat tercatat 3,79%. Inflasi tahunan 2017 meningkat dibandingkan dengan inflasi tahun 2016 yaitu sebesar 2,23%. Jika ditinjau secara bulanan, inflasi Propinsi Sulawesi Barat Tengah relatif lebih rendah dibandingkan KTI dan Nasional, inflasi tertinggi di bulan November 2017, tekanan inflasi yang berasal dari komoditas ikan (cakalang, layang, dan bandeng), beras, dan telur ayam ras mengakibatkan inflasi naik selain itu penyesuaian tarif listrik yang dilakukan menjadi salah satu penyebab meningkatnya sumbangan kelompok ini pada inflasi tahunan 2017.

Inflasi triwulan 2018 menurun dibandingkan 2017. Tekanan inflasi yang berasal dari komoditas beras sebagai pemberi andil yang cukup kuat pada tahun 2018. Upaya penjagaan stabilitas pasokan dan jalur distribusi secara berkelanjutan oleh TPID terutama komoditas ikan dan beras bagi bahan pangan utama masyarakat Sulawesi Barat. Selain itu, pengembangan klaster beras, hortikultura, dan pemberian bimbingan teknis bagi petani dan nelayan membantu capaian target inflasi 2018 dan penurunan ini terus berlanjut ke tahun 2019 menjadi 1,43%. Akan tetapi karena dampak pandemic covid 19 yang menghambat arus barang dan jasa di Kabupaten Mamuju Tengah membuat inflasi menjadi naik ke angka 1,80 persen. Harapannya kenaikan inflasi ini tidak berlanjut ditahun depan dengan kesiapan pemerintah dalam menyediakan dan memperlancar arus barang dan jasa di Kabupaten Mamuju Tengah.

2.2.3. PDRB per Kapita

Indikator lain untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kab. Mamuju Tengah atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2020 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2016, PDRB per kapita tercatat sebesar 2,48 Miliar rupiah, pada tahun 2017 sebesar 2,69 Milliar rupiah, tahun 2018 tercatat sebesar 2,97 Milliar rupiah, secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 3,15 Milliar rupiah dan pada tahun 2020 naik menjadi 3,18 Milliar rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2017 ini disebabkan pengaruh laju inflasi yang tinggi.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita atas dasar harga konstan di Kab. Mamuju Tengah juga mengalami fluktuasi sejak tahun 2016 hingga 2020, masing-masing

sebesar 1,90 Miliar rupiah pada tahun 2016 dan 2,00 Milliar rupiah pada tahun 2017, pada tahun 2018 tercatat sebesar 2,97 Milliar rupiah dan terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2019 menjadi 2,239 Milliar rupiah dan pada tahun 2020 turun tipis menjadi 2,230 Milliar rupiah. Penurunan ini diakibatkan pandemic covid 19 yang mempengaruhi perekonomian Kabupaten Mamuju Tengah. Selengkapnya, nilai PDRB perkapita dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 2. 29 PDRB Per Kapita Kab Mamuju Tengah Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2016 - 2020 (Juta Rupiah)

Kabupaten	ADHB					ADHK				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Mamuju Tengah	2,48	2,69	2,97	3,15	3,18	1,90	2,00	2,12	2,23	2,23
Sulawesi Barat	27,52	29,28	31,11	32,87	32,08	35,94	39,49	43,45	46,35	35,90

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2021

2.2.4. Indeks Gini

Tujuan pembangunan adalah peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Jika peningkatan tidak diiringi dengan pemerataan, akan menimbulkan fenomena ketimpangan wilayah. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah Gini Ratio, Indeks Williamson, dan Kriteria Bank Dunia. Koefisien Gini (**Gini Ratio**) merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi variabel tertentu dengan distribusi **Uniform** (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna. Semakin besar nilai Indeks Gini, maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi. Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Standar penilaian ketimpangan gini ratio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- $GR < 0,4$ dikategorikan sebagai ketimpangan rendah,
- $0,4 < GR < 0,5$ dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (moderat),
- $GR > 0,5$ dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi.

Tabel 2. 30 Gini Ratio di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 - 2020

Tahun	Gini Ratio Propinsi Sulawesi Barat	Gini Ratio Perkotaan	Gini Ratio Pedesaan
2016	0.371	0.441	0.341
2017	0.339	0.392	0.299
2018	0,366	0.451	0.311
2019 (Maret)	0.365	0.445	0.317
2020	0,356	0,437	0,321

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2021

Gini ratio di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2016 sebesar 0,371, pada tahun 2017 menurun menjadi 0,339 tetapi pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 0,366 dan menurun kembali sebesar 0,001 point pada maret 2019 menjadi 0,365. Hal ini menunjukkan secara umum Gini Ratio di Sulawesi Barat dari tahun 2016 sampai tahun maret 2019 telah terjadi fluktuasi.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada tahun 2016 sebesar 0,441 dan pada tahun 2017 menurun menjadi 0,392 tetapi meningkat kembali tahun 2018 menjadi 0,451 dan pada bulan Maret tahun 2019 tercatat sebesar 0,445, angka ini menurun sebesar 0,006 poin. Untuk daerah pedesaan Gini Ratio pada tahun 2016 sebesar 0,341 di tahun 2017 turun menjadi 0,299 tetapi meningkat kembali pada tahun 2018 menjadi 0,311 dan pada maret tahun 2019 tercatat sebesar 0,317, angka ini meningkat sebesar 0,006 poin dibanding Gini Ratio September 2018. Pada tahun 2020 Gini Rasio Kabupaten Mamuju Tengah mengalami penurunan menjadi sebesar 0,356 atau turun sebesar 0,009 dari tahun sebelumnya. Angka gini ratio yang fluktuatif ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat tergolong rendah. Situasi ini membutuhkan upaya penurunan atau tetap berada pada tingkat rendah.

2.2.5. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100-angka kemiskinan). Angka Kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk (1) Mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan; (2) Membandingkan kemiskinan antar waktu, antardaerah; (3) Menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka. Presentase penduduk diatas garis kemiskinan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan, tahun 2016 sebesar 93,17 persen diatas garis kemiskinan, tahun 2017 menurun 0,12 persen menjadi 93,05 persen dan tahun 2018 kembali

menurun menjadi 92,86 persen tetapi pada tahun 2019 presentase penduduk diatas garis kemiskinan meningkat menjadi 93,13 persen dan kembali meningkat di tahun 2020 menjadi sebesar 93,21 persen. Presentase ini diharapkan akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya pembangunan yang ada dikabupaten Mamuju Tengah.

Tabel 2. 31 Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penduduk	93,17	93,05	92,86	93.13	93,21

Sumber: BPS Mamuju Tengah Dalam Angka, Tahun 2021

2.2.6. Proporsi Penduduk dengan Pendapatan per Kapita per Hari

Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata semua penduduk di suatu daerah. Proporsi penduduk dengan pendapatan perkapita perhari digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu daerah atau menilai besarnya persentase penduduk miskin dalam suatu daerah yang diukur dari garis kemiskinan berdasar kebutuhan. PPP perkapita pada tahun 2017 sebesar 26,68 atau naik sebesar 2,30 dari angka 24,38 pada tahun 2016. Kemudian turun di tahun 2018 diangka 25,83 dan kembali naik di tahun 2019 diangka 26,36 atau naik sebesar 0,53 kemudian di tahun 2020 naik diangka 26,87 atau menguat sebesar 0,51 dari tahun sebelumnya.

Tabel 2. 32 Proporsi Penduduk dengan Pendapatan Per Kapita Per Hari di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Miskin	8.430	8.820	9.280	9.160	9.250
2	Jumlah Penduduk	124.380	127.600	130.830	134.030	135.280
3	Proporsi Penduduk Miskin	6,83	6,95	7,14	6,87	6,79

Sumber: BPS Mamuju Tengah Dalam Angka, Tahun 2021

2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan non fisik suatu daerah yang direpresentasikan oleh tiga dimensi, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kualitas hidup yang layak. Dengan pengukuran IPM ini, setidaknya ada 3 manfaat yang diperoleh, diantaranya adalah: 1) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk); 2) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu

wilayah/negara; dan 3) IPM juga dapat digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Mulai tahun 2016, penghitungan sudah menggunakan metode baru. Beberapa komponen maupun agregasi penghitungan berubah untuk menghasilkan indikator yang lebih baik. Sepanjang periode 2016-2020 capaian IPM Kabupaten Mamuju Tengah terus meningkat walaupun pencapaian IPM ini masih dibawah target IPM Provinsi yaitu sebesar 70,53 persen. IPM Kabupaten Mamuju Tengah mengalami peningkatan pada semua komponen pembentuknya. Pada tahun 2019, angka harapan hidup di Mamuju Tengah 68,06 tahun, rata-rata lama sekolah 7,24 tahun dan pengeluaran perkapita setahun 85.01 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 IPM Mamuju Tengah mengalami kenaikan menjadi 65,71 atau naik sebesar 0,61 dari tahun sebelumnya.

Tabel 2. 33 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	IPM	62.22	62.89	63.64	65.10	65.71

Sumber: BPS Mamuju Tengah Dalam Angka, Tahun 2021

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat menunjukan dari tahun 2016-2020 Kabupaten dengan IPM tertinggi adalah Kabupaten Mamuju dengan nilai IPM Tahun 2016 sebesar 65,65, Tahun 2017 sebesar 66,32, Tahun 2018 sebesar 67,11, Tahun 2019 sebesar 67,72 dan Tahun 2020 sebesar 68,15. Sedangkan Kabupaten dengan nilai IPM terendah adalah Kabupaten Polewali Mandar dengan nilai IPM tahun 2016 sebesar 61,51, Tahun 2017 sebesar 62,35, Tahun 2018 sebesar 63,14, Tahun 2019 sebesar 63,74 dan Tahun 2020 sebesar 63.84. Data perbandingan IPM Antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 34 Perbandingan Capaian IPM Antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Majene	64,80	65,40	66,01	66,59	66,91
2	Polewali Mandar	61,51	62,35	63,14	63,74	63,84
3	Mamasa	63,51	63,92	64,66	65,32	66,02
4	Mamuju	65,65	66,32	67,11	67,72	68,15
5	Pasangkayu	65,17	65,67	66,60	67,27	67,79

6	Mamuju Tengah	62,89	63,64	64,43	65,10	65,71
---	---------------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka, Tahun 2021

2.2.8. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Melek huruf sangat berkaitan erat dengan buta huruf, semakin meningkat angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. Walaupun sempat menurun di tahun 2017 sebesar 2,94 persen dari tahun sebelumnya. Pencapaian angka melek huruf di Kabupaten Mamuju Tengah terus meningkat hingga selama tiga tahun terakhir. Di tahun 2020 angka melek huruf mencapai 94,48 atau naik sebesar 0,89 persen dari tahun sebelumnya. Data capaian angka melek huruf di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 35 Pencapaian Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka melek huruf	94,35	91,41	93,58	93,84	94,68

Sumber: BPS Mamuju Tengah Dalam Angka, Tahun 2021

Tabel 2. 36 Perbandingan Capaian Angka Melek Huruf Antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Majene	-	-	94,07	95,20	95,85
2	Polewali Mandar	-	-	90,39	90,98	91,16
3	Mamasa	-	-	94,66	94,21	92,66
4	Mamuju	-	-	93,15	94,65	93,13
5	Pasangkayu	-	-	95,60	96,46	95,13
6	Mamuju Tengah	94,35	91,41	93,58	93,84	94,68
Sulawesi Barat		-	-	92,85	93,59	93,17

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2021

2.2.9. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Salah satu variabel yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Indikator ini menunjukkan sampai pada

jenjang pendidikan apa secara umum tingkat pendidikan penduduk dewasa yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan menunjukkan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Mamuju Tengah Pada Tahun 2016 adalah sebesar 7,1 tahun, Pencapaian ini lebih rendah dari capaian Provinsi Sulawesi Barat yaitu sebesar 7,14 tahun dan capaian Nasional sebesar 7,95 Tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat di Kabupaten Mamuju Tengah yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,1 Tahun atau hanya sampai kelas 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sederajat. Pada tahun 2017 angka rata-rata lama sekolah sebesar 7,13 mengalami peningkatan sebesar 0,02 persen dan kembali meningkat pada tahun 2020 sebesar 7,46 atau naik sebesar 0,22 persen dari tahun sebelumnya. Data ini menunjukkan bahwa masih sangat rendahnya tingkat pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah yang peningkatannya tidak terlalu signifikan dari tahun ke tahun. Untuk itu, selain menjadikan ini sebagai pekerjaan rumah dan tanggung jawab bersama untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, juga menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan yang lebih baik ke depannya. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 37 Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata Lama Sekolah	7.10	7.13	7.23	7.24	7,46

Sumber: BPS Mamuju Tengah Dalam Angka, Tahun 2021

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan adanya peningkatan terhadap rata-rata lama sekolah di Provinsi Sulawesi Barat setiap tahunnya. Dari tahun 2016 sebesar 7,14 tahun meningkat menjadi 7,89 tahun di akhir tahun 2020. Untuk tahun 2020 kabupaten dengan rata-rata lama sekolah paling besar adalah Kabupaten Majene dengan rata-rata lama sekolah sebesar 8,65 tahun. Sedangkan Kabupaten dengan rata-rata lama sekolah paling kecil yaitu Kabupaten Polewali Mandar yaitu 7,41 tahun. Kabupaten Mamuju Tengah berada di urutan ke lima dengan rata-rata lama sekolah yaitu 7,46 tahun. Data perbandingan rata-rata lama sekolah antar kabupaten di provinsi Sulawesi barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 38 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Majene	7,81	8,14	8,25	8,52	8,65
2	Polewali Mandar	6,89	7,09	7,24	7,40	7,41
3	Mamasa	6,98	7,10	7,22	7,37	7,65
4	Mamuju	7,21	7,26	7,53	7,69	7,95
5	Pasangkayu	7,47	7,48	7,68	7,92	7,98
6	Mamuju Tengah	7,10	7,13	7,23	7,24	7,46
Sulawesi Barat		7,14	7,31	7,50	7,73	7,89

2.2.10. Angka Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup adalah jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Usia Harapan Hidup merupakan manifestasi dari derajat kesehatan penduduk di suatu wilayah. Capaian Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Mamuju Tengah nampaknya meningkat dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2019 Usia Harapan Hidup di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 68,06 Tahun meningkat sebesar 0,70 dari Tahun 2016 yaitu sebesar 67,36 tahun. Hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata waktu untuk hidup yang dapat dicapai oleh bayi yang lahir pada Tahun 2019 di Kabupaten Mamuju Tengah selama 67,68 Tahun. Capaian ini tentunya jauh lebih tinggi dari Angka Usia Harapan Hidup di Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2020, Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah, sebesar 68,33 atau naik sebesar 0,27 dari tahun sebelumnya, sedangkan Angka Usia Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Barat naik di angka 65,06 Tahun atau naik sebesar 0,24 Tahun dari tahun 20019 diangka 64,82 Tahun. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kualitas penghidupan di Sulawesi Barat pada umumnya.

Tabel 2. 39 Angka Usia Harapan hidup di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016- 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Usia Harapan hidup di Kabupaten Mamuju Tengah	67,36	67,52	67,79	68,06	68,33
2	Angka Usia Harapan hidup di Provinsi Sulawesi Barat	64,31	64,34	64,58	64,82	65,06

Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2021

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan adanya peningkatan trend angka usia harapan hidup yang ada di Provinsi Sulawesi Barat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 Kabupaten dengan angka usia harapan hidup paling besar yaitu Kabupaten Mamasa dengan angka usia harapan hidup yaitu 70,87 tahun. Sedangkan Kabupaten dengan angka usia harapan hidup paling kecil yaitu Kabupaten Majene dengan angka usia harapan hidup yaitu 61,56 tahun. Kabupaten Mamuju Tengah berada pada urutan kedua dengan usia harapan hidup yaitu 68,33 tahun. Data perbandingan angka usia harapan hidup antar kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 40 Perbandingan Angka Usia Harapan Hidup Antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Majene	60,64	60,79	61,05	61,30	61,56
2	Polewali Mandar	61,65	61,76	61,97	62,18	62,38
3	Mamasa	70,43	70,48	70,62	70,75	70,87
4	Mamuju	66,51	66,65	66,94	67,23	67,52
5	Pasangkayu	65,13	65,33	65,62	65,91	66,20
6	Mamuju Tengah	67,36	67,52	67,79	68,06	68,33
Sulawesi Barat		64,31	64,34	64,58	64,82	65,06

Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2021

Ada banyak hal yang dapat menjadi faktor tingginya usia harapan hidup, seperti kondisi sosial ekonomi, perilaku hidup sehat, pemenuhan gizi, tenaga penolong kelahiran/tenaga medis yang handal, faktor lingkungan, dan lain sebagainya. Peningkatan derajat kesehatan yang salah satunya ditandai dengan peningkatan angka usia harapan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, diperlukan kesadaran tinggi dari masyarakat itu sendiri untuk dapat berperilaku hidup sehat dengan tetap memelihara lingkungan sekitar.

2.2.11. Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk merupakan salah satu klasifikasi status gizi di mana seorang balita mengalami kurang gizi yang diketahui berdasarkan pengukuran antropometri seperti penambahan berat badan, tinggi badan/panjang badan, lingkar kepala, lingkar lengan, dan lain-lain. Jika diukur menggunakan grafik pertumbuhan anak (GPA) yang mengacu pada WHO dengan berbagai indikator pendukung, gizi buruk memiliki kategori sendiri. Balita dikatakan mengalami gizi

buruk ketika hasil pengukuran indikator BB/TB untuk status gizinya kurang dari 70 persen nilai median. Gizi buruk pada balita biasanya disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan nutrisi harian, makan dalam porsi yang terlalu sedikit sehingga asupan nutrisi kurang optimal, serta memiliki satu atau lebih kondisi kesehatan yang menyulitkan proses penyerapan nutrisi di dalam tubuh balita.

**Tabel 2. 41 Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Balita Gizi Buruk	0,17%	0,14%	0,64%	0,63 %	0,65%
2	Jumlah Balita Gizi Buruk	21	17	80	79	47
3	Jumlah Balita	11.632	11.632	12.378	12.377	7.196

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

Gizi buruk masih menjadi masalah kesehatan terutama di negara miskin dan negara berkembang seperti Indonesia. Menurut WHO, sebanyak 54 persen penyebab kematian bayi dan balita disebabkan karena keadaan gizi buruk. Anak yang mengalami gizi buruk memiliki risiko meninggal 13 kali lebih besar dibandingkan anak yang normal. Dari data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 persentase balita gizi buruk mengalami peningkatan sebesar 0,05 persen dari tahun sebelumnya, namun pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,01 persen. Sedangkan pada tahun 2020 presentase balita gizi buruk meningkat menjadi 0,65 persen. Peningkatan ini berbanding dengan penurunan jumlah balita dan jumlah balita gizi buruk. Hal ini tentunya menjadi masalah yang harus ditangani agar tidak terjadi peningkatan persentase Balita Gizi buruk di tahun selanjutnya.

2.2.12. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Prevalensi Gizi kurang adalah jumlah keseluruhan balita yang mengalami kurang gizi yang diakibatkan oleh kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berpikir, dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan.

**Tabel 2. 42 Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Mamuju Tengah
Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Prevalensi Balita Gizi Kurang	0,%	0,%	1,27%	1,42 %	8,77%

2	Banyaknya Balita Gizi Kurang	0	0	158	176	631
3	Jumlah Balita	11.632	11.632	12.378	12.377	7.196

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

Perbedaan antara gizi kurang dan gizi buruk adalah tingkat gizi kurang lebih ringan dan waktu yang relatif lebih singkat. Namun jika gizi kurang tidak ditangani secara serius maka seorang penderita dapat menjadi gizi buruk. Berdasarkan data di atas, prevalensi Balita gizi kurang mengalami peningkatan sebesar 0,15% dari tahun 2019 yakni 1.28% menjadi 1.42% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 sebesar 8,77%. Namun pada tahun 2017 dan 2016 prevalensi Balita gizi kurang belum ada data dari Dinas Kesehatan.

2.2.13. Cakupan Desa Siaga Aktif

Desa siaga merupakan salah satu bentuk orientasi pelayanan kesehatan dari sebelumnya yang bersifat sentralistik menjadi lebih partisipatif dan bottom up. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 564/MENKES/SK/VIII/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga, desa siaga merupakan desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri.

**Tabel 2. 43 Cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Mamuju Tengah	-	-	-	100%	104%

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

Suatu desa dikatakan menjadi desa siaga apabila memenuhi 2 kriteria yakni memiliki satu orang tenaga bidan yang menetap di desa tersebut dan sekurang-kurangnya 2 orang kader desa, serta memiliki minimal 1 bangunan pos kesehatan desa (poskesdes) beserta peralatan dan perlengkapannya. Berdasarkan data di atas Pada Tahun akhir tahun 2020 cakupan desa siaga aktif telah mencapai 100 persen.

2.2.14. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angka Partisipasi Angkatan Kerja merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja yang berusia 15 tahun ke atas dan jumlah keseluruhan penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Pada Tahun 2020 jumlah angkatan kerja yang berusia 15 tahun ke atas sebanyak 67.414 jiwa dari jumlah total penduduk berusia 15 tahun ke atas yakni 95.530 jiwa.

Tabel 2. 44 Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	-	75.34%	74.86%	69.90%	70.57%

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, BPS Mamuju Tengah, Tahun 2021

Pada tahun 2019 terjadi penurunan yang sangat besar sebesar 6.35 % menjadi 69.59% yang berarti bahwa sebanyak 95429 jiwa yang merupakan angkatan kerja dari jumlah total penduduk berusia 15 tahun ke atas yakni 107.343 jiwa.

2.2.15. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan rasio antara jumlah penduduk angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun). Pada Tahun 2016 jumlah angkatan kerja sebesar 74,98% yakni sebanyak 60.169 jiwa dari jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) sebanyak 80.709 jiwa. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 0.96b% menjadi 75.94% (65.585 jiwa dari 83.081 jiwa). Namun Pada tahun 2019 menunjukkan penurunan sebesar 6.35 % yakni sebesar 78,46% (67.005 dari 85.309 jiwa). Pada tahun 2020 meningkat menjadi 70.04 persen. Tingkat partisipasi Angkatan kerja di kabupaten mamuju tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 45 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-	74.98	75.94	69.59	70.04

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, BPS Mamuju Tengah, Tahun 2021

2.2.16. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami penurunan dari Tahun 2017 yakni dari angka 2,78% menjadi 2,63% tahun 2018. Namun kemudian pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 0,4% yakni dari angka 2,63% menjadi 2,67% demikian pula pada tahun 2020 menjadi 2,71%. Peningkatan ini pada umumnya oleh karena dampak Pandemi Covid 19. Berbagai upaya masih harus terus dilakukan meskipun data tersebut di atas telah menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Mamuju tengah

Tabel 2. 46 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,92%	2,78%	2,63%	2,67 %	2,71 %

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, BPS Mamuju Tengah, Tahun 2021

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat menunjukan trend yang berfluktuatif pada tingkat pengangguran terbuka yang ada di provinsi Sulawesi Barat. Data yang ada menunjukan adanya peningkatan pada tingkat pengangguran terbuka pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2019 sebesar 3,18 persen, kemudian meningkat di tahun 2020 sebesar 3,32 persen. Peningkatan tingkat pengangguran ini disebabkan karena adanya pandemic Covid-19. Pada tahun 2021 Jika diperbandingkan dengan tingkat provinsi, Provinsi Sulawesi Barat berada di urutan TPT yang paling rendah yaitu sebesar 3,28 persen, sedangkan TPT tertinggi tercatat di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 10,12 persen. Data tingkat pengangguran terbuka antar kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 47 Tingkat Pengangguran Terbuka Antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Majene	5,51	3,51	3,77	4,12	4,26

2	Polewali Mandar	3,66	3,94	3,17	3,19	3,15
3	Mamasa	1,92	2,60	2,99	3,06	3,67
4	Mamuju	3,78	2,40	2,63	2,66	2,89
5	Pasangkayu	1,44	3,29	3,94	3,57	3,70
6	Mamuju Tengah	2,92	2,78	2,63	2,67	2,71
Sulawesi Barat		3,35	3,21	3,16	3,18	3,32

Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2021

2.2.17. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2020 sebesar 97,29 % yakni sebanyak 65 589 penduduk yang bekerja dari 67. 414 angkatan kerja.

**Tabel 2. 48 Rasio Penduduk yang bekerja di Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Penduduk yang bekerja	97,08%	97,22%	97,37%	97,33%	97,29%

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, BPS Mamuju Tengah, Tahun 2021

Rasio penduduk yang bekerja pada Tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,15 persen sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,04% yakni sebanyak 62.541 penduduk yang bekerja dari 64.255 angkatan kerja.

2.2.18. Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke atas

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas adalah perbandingan kesempatan kerja penduduk terhadap total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Pendekatan yang digunakan untuk menghitung kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja (supply side) dengan asumsi bahwa jumlah penduduk yang bekerja sama dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Pada Tahun 2017 terjadi peningkatan rasio kesempatan kerja sebesar 4,16 %. Hal ini dikarenakan terbukanya beberapa lapangan pekerjaan baru berupa pekerjaan konstruksi pemerintah dan pembangunan Pabrik Kelapa

Sawit baru yang berada di Karossa sehingga menyerap banyak tenaga kerja baru. Akan tetapi pada tahun 2018 dan 2019 secara berturut-turut mengalami penurunan dikarenakan terjadinya penurunan jumlah penduduk dan secara bersamaan dibarengi dengan menurunnya lapangan pekerjaan. Tercatat jumlah penduduk usia produktif di tahun 2018 sebanyak 106.737 jiwa atau turun sebesar 4.640 jiwa dan ditahun 2019 kembali turun dengan jumlah penduduk usia produktif sebanyak 98.485 jiwa atau turun sebesar 3.612 jiwa.

Tabel 2. 49 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Kesempatan Kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	69,09%	73,25%	72,89%	63,50%	66,60%

Sumber data : BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2021

Penghitungan rasio di atas bersumber dari data jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 62.541 jiwa dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yakni sebanyak 98.485 jiwa pada tahun 2019 atau turun sebesar 9,39 persen dari tahun sebelumnya.

2.2.19. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja adalah mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 26,18 persen dari angka 49,50 persen menjadi 23,32 persen. Hal ini bersumber pada data pada Tahun 2019 penduduk usia kerja di Kabupaten Mamuju Tengah yang memilih bekerja dengan berusaha sendiri sebanyak 10.880 jiwa dan menjadi pekerja bebas keluarga sebanyak 12.075 jiwa dari total 62.541 orang yang bekerja.

Tabel 2. 50 Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri Dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Proporsi Tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	47,21%	38,78%	49,50%	23,32%	22,6%

Sumber data : BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2021

Pada Tahun 2016 penduduk usia kerja di Kabupaten Mamuju Tengah yang memilih bekerja dengan berusaha sendiri sebanyak 9.785 jiwa dan menjadi pekerja bebas keluarga sebanyak 17.795 jiwa dari total 58.415 orang yang bekerja. Pada Tahun 2017 penduduk usia kerja di Kabupaten Mamuju Tengah yang memilih bekerja dengan berusaha sendiri sebanyak 7.031 jiwa dan menjadi pekerja bebas keluarga sebanyak 17.695 jiwa dari total 63.760 orang yang bekerja. Pada Tahun 2018 penduduk usia kerja di Kabupaten Mamuju Tengah yang memilih bekerja dengan berusaha sendiri sebanyak 8.749 jiwa dan menjadi pekerja bebas keluarga sebanyak 23.544 jiwa dari total 65.244 orang yang bekerja dan pada tahun 2019 penduduk usia kerja di Kabupaten Mamuju Tengah yang memilih bekerja dengan berusaha sendiri sebanyak 10.880 jiwa dan menjadi pekerja bebas keluarga sebanyak 12.075 jiwa dari total 62.541 orang yang bekerja. Kemudian pada tahun 2019 penduduk usia kerja di Kabupaten Mamuju Tengah yang memilih bekerja dengan berusaha sendiri sebanyak 10.880 jiwa dan menjadi pekerja bebas keluarga sebanyak 12.075 jiwa dari total 62.541 orang yang bekerja serta pada tahun 2020 penduduk usia kerja di Kabupaten Mamuju Tengah yang memilih bekerja dengan berusaha sendiri sebanyak 11.324 jiwa dan menjadi pekerja bebas keluarga sebanyak 13.700 jiwa dari total 65.589 orang yang bekerja.

2.2.20. Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera 1

Keluarga pra sejahtera dikategorikan sebagai keluarga yang sangat miskin yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal seperti kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan, sedangkan keluarga sejahtera 1 dikategorikan sebagai keluarga miskin yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, interaksi lingkungan tempat tinggal, dan sarana Transportasi.

Tabel 2. 51 Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I	28,03%	24,64%	26,41%	26,12%	4%

Sumber: Dinas Sosial Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

Pada Tahun 2017 terdapat 2.191 Kepala Keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga sangat miskin dan 9.414 sebagai Kepala Keluarga yang miskin. Angka ini sebesar 30,15% dari total Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak 38.408 Kepala Keluarga. Namun terjadi kenaikan sebesar 3,64% pada tahun 2018, yakni sebanyak 2.191 yang masih dikategorikan sebagai keluarga yang sangat miskin dan 9.389 sebagai keluarga miskin atau sebesar 33,79% dari 34.348 Kepala Keluarga sedangkan ditahun 2019

peningkatan sebanyak 32 Kepala Keluarga menjadi sebanyak 9.105 Kepala Keluarga dari total keluarga sebanyak 34.858 Keluarga. Dan pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis menjadi 1.678 dari 41.951 keluarga

2.2.21. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Kabupaten Mamuju Tengah pertama kali melakukan survey indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2019 dengan hasil survey sebagai berikut.

**Tabel 2. 52 Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun 2016-2020**

No	Nama OPD	Uraian	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Dinas Sosial	Unsur Pelayanan (%)	-	-	-	83,76	74,14
		Mutu Pelayanan	-	-	-	B	C
		Kinerja Pelayanan	-	-	-	Baik	Kurang Baik
2	RSUD	Unsur Pelayanan (%)	-	-	-	73,05	72,88
		Mutu Pelayanan	-	-	-	C	C
		Kinerja Pelayanan	-	-	-	Kurang Baik	Kurang Baik
3	UPTD Air Minum	Unsur Pelayanan (%)	-	-	-	71,58	72,99
		Mutu Pelayanan	-	-	-	C	C
		Kinerja Pelayanan	-	-	-	Kurang Baik	Kurang Baik
4	DPMPTSP, Koperasi UKM	Unsur Pelayanan (%)	-	-	-	71,38	74,75
		Mutu Pelayanan	-	-	-	C	C
		Kinerja Pelayanan	-	-	-	Kurang Baik	Kurang Baik
5	Disdukcapil	Unsur Pelayanan (%)	-	-	-	70,56	75,25
		Mutu Pelayanan	-	-	-	C	C
		Kinerja Pelayanan	-	-	-	Kurang Baik	Kurang Baik

Sumber : Bappeda Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2016 – 2020 di Kabupaten Mamuju Tengah khususnya pada tahun 2019 persentase dari unsur pelayanan yang tertinggi adalah Dinas Sosial dengan nilai 83,76. Sedangkan persentase dari unsur pelayanan yang terendah adalah Disdukcapil dengan nilai 70,56.

2.2.22. Persentase PAD terhadap Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Persentase PAD terhadap pendapatan Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2016 sampai 2018 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, di mana Persentase PAD terhadap pendapatan Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2017 sebesar 5,95% meningkat menjadi 7,03% pada tahun 2018, akan tetapi pada Tahun 2019 kembali turun menjadi 5,26 persen dan 3,03 persen di tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 53 Persentase PAD Terhadap Pendapatan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	PAD (Rp)	Jumlah Pendapatan Daerah (Rp)	Persentase PAD Terhadap Pendapatan (%)
1	2016	17.169.464.181,00	632.376.498.713,00	2,72
2	2017	36.714.595.466,00	616.641.469.808,00	5,95
3	2018	43.816.586.733,36	623.527.716.638,08	7,03
4	2019	32.562.615.960,00	618.722.255.635,00	4,55
5	2020	26.982.391.204,96	642.853.285.087,96	3,03

Sumber : Badan Keuangan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

2.2.23. Opini BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) Kabupaten Mamuju Tengah. Ini merupakan opini WTP yang diberikan untuk ketiga kalinya oleh BPK terhadap LKP yang disampaikan oleh pemerintah. Opini WTP menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBD lima Tahun terakhir dalam laporan keuangan, secara material telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 54 Opini BPK Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Laporan Keuangan Pemerintah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Inspektorat Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

2.2.24. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pemenuhan kebutuhan pangan seyogyanya tidak hanya ditekankan pada aspek kuantitas, tetapi juga memperhatikan kualitasnya, termasuk keragaman pangan dan keseimbangan gizi. Konsumsi pangan yang beragam sangat penting karena tubuh memerlukan 45 jenis zat

gizi yang dapat diperoleh dari berbagai jenis makanan dan minuman. Sampai saat ini belum ada satu jenis pangan yang dapat memenuhi semua kebutuhan zat gizi tersebut. Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Tabel 2. 55 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2016 – 2020
Kabupaten Mamuju Tengah

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	82,3	86,7	91,2	95,6	Na

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2016 sampai 2019 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2017 sebesar 9,06 meningkat menjadi 9,28 pada tahun 2018 dan kembali meningkat sebesar 5,4 persen pada Tahun 2019. Pada tahun 2020 tidak dilakukan survey terhadap pola pangan harapan dikarenakan adanya refocusing anggaran.

2.2.25. Penguatan Cadangan pangan

Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan yang dapat berfungsi menjaga kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan, disamping itu juga dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan yang bersifat sementara disebabkan gangguan atau terhentinya pasokan bahan pangan, misalnya karena putusnya prasarana dan sarana transportasi akibat bencana alam. Jumlah cadangan Pangan yang ada di kabupaten Mamuju Tengah masih mengikut di Bulog Provinsi Sulawesi Barat yang bertempat di Kab. Mamuju oleh karena itu data yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tengah adalah data Jumlah Ketersediaan Pangan yang ada di kabupaten mamuju tengah.

**Tabel 2. 56 Penguatan Cadangan Pangan di Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun 2016 – 2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penguatan Cadangan Pangan	17,5%	20,167%	49,95%	70,80%	Na

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

Penguatan cadangan pangan Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2016 sampai 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, di mana Penguatan cadangan pangan Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2017 sebesar 20,16 persen menjadi 49,95 persen pada tahun 2018 dan kembali meningkat sebesar 70,80 persen pada Tahun 2019.

2.2.26. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Mamuju Tengah terpantau cukup baik dan mengalami peningkatan dari Tahun ke Tahun. Dari data yang diperoleh, penanganan daerah rawan pangan pada Tahun 2017 sebesar 67 persen dan meningkat ditahun berikutnya sebesar 67 persen dan meningkat kembali pada Tahun 2019 sebesar 90,7 persen. Pada tahun 2020 ada dua daerah yang menjadi target intervensi yaitu Desa Salulebo dan Desa Bojo. Data Penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 57 Penanganan Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun 2016 – 2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penanganan daerah rawan pangan	45%	67%	83,5%	90,7%	100%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

2.2.27. Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB

Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan di antaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan-lain-lain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dsb. Untuk Kabupaten Mamuju Tengah rata-rata kontribusi

sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB sebesar 87% setiap tahunnya. Data Kontribusi PDRB di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 58 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha/Industry	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan	87%	87%	88%	87%	87%

Sumber : Badan Pusat Statistik, Mamuju Tengah Dalam Angka, Tahun 2021

2.2.28. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB

Pada kondisi awal di tahun 2016, kontribusi sektor pertanian palawija terhadap PDRB sebesar 11 persen, kemudian ditahun berikutnya berturut-turut mengalami kenaikan dan pada tahun 2018 mengalami penurunan dari 14 persen ditahun 2017 menjadi 12 persen ditahun 2018 dan kembali naik sebesar 17 persen ditahun 2019 dan pada akhir tahun 2020 meningkat menjadi 18 persen. kontribusi pertanian terhadap pdrb yang variatif naik turunnya di akibatkan oleh beberapa faktor seperti, harga hasil produksi yg tidak menentu, alih fungsi lahan, ketersediaan sarana dan prasana, beralihnya tenaga kerja pertanian yg digantikan oleh mesin dan pemuda sudah mulai tidak tertarik bekerja sebagai petani. Data Kontribusi sektor pertanian (palawija) Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 59 Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha/Industry	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	11%	14%	12%	17%	18%

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021

2.2.29. Produksi Sektor Pertanian

Hasil produksi perkebunan yang mempunyai potensi pengembangan dipandang dari sisi permintaan, baik dari dilihat dari peluang pasar maupun pesaingnya, serta mempunyai nilai ekonomis tinggi adalah kelapa sawit, kakao, kelapa dalam, cengkeh dan lada . Dari komoditas tersebut kepala sawit merupakan komoditas dengan hasil produksi terbesar yang terbagi dua yakni areal perkebunan rakyat dan perkebunan perusahaan. penurunan produksi padi di tahun 2020 diakibatkan oleh alih fungsi lahan, belum tersedianya benih unggul dalam jumlah cukup, ketersediaan pupuk bersubsidi tidak mencukupi cuaca dan iklim yang belum dapat di prediksi. Data produksi sektor pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 60 Produksi Sektor Pertanian (dalam Ton) di Kabupaten Mamuju Tengah Pada Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha/Industry	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Sektor Pertanian	107.024	333.441	416.583	333.994	175.683

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021

2.2.30. Kontribusi Sektor Perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan di antaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan-lain-lain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dsb. Pada tahun 2017 kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB sebesar 65 persen, kemudian meningkat menjadi 66 persen di tahun 2018 dan kemudian menurun di tahun 2019 menjadi 59% dan tahun 2020 menjadi 56 persen. Data kontribusi sektor perkebunan di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 61 Produksi Sektor Perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB di Kabupaten Mamuju Tengah Pada Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha/Industry	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Sektor Perkebunan tanaman keras	-	65 %	66%	59 %	56%

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021

2.2.31. Produksi Sektor Perkebunan

Hasil produksi perkebunan yang mempunyai potensi pengembangan dipandang dari sisi permintaan, baik dari dilihat dari peluang pasar maupun pesaingnya, serta mempunyai nilai ekonomis tinggi adalah kelapa sawit, kakao, kelapa dalam, cengkeh dan lada . Dari komoditas tersebut kelapa sawit merupakan komoditas dengan hasil produksi terbesar yang terbagi dua yakni areal perkebunan rakyat dan perkebunan perusahaan. Angka produksi sektor perkebunan pada tiga tahun terakhir mengalami kenaikan di mana tahun 2017 produksi mencapai 114.183 Ton kemudian menurun menjadi 144.142 ton pada tahun 2018 dan kembali naik sebesar. 234.188 Ton di tahun 2019. Pada tahun 2020 terjadi penurunan drastis pada produksi perkebunan menjadi 105.465 ton atau menurun sebesar 54,96 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel 2. 62 Produksi Sektor Perkebunan (dalam Ton) di Kabupaten Mamuju Tengah Pada Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha/Industry	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Sektor Perkebunan	117.961	114.142	133.623	234.118	105.465

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021

2.2.32. Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah selama lima tahun terakhir kontribusi produksi kelompok Petani terhadap PDRB mencapai 100 persen setiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok tani sebesar 46.493 ton. Kontribusi sektor produksi kelompok tani di Kabupaten Mamuju tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 63 Kontribusi Sektor Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB di Kabupaten Mamuju Tengah Pada Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha/Industry	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021

2.2.33. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB

Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2016-2018 cenderung menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2017 menurun sebesar 0,02 persen dan kembali menurun pada tahun 2018 sebesar 0,04 persen. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 0,59 persen atau meningkat sebesar 0,004 persen dan pada tahun 2020 menurun sebesar 0,01 persen dari tahun sebelumnya. Data kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB di kabupaten mamuju tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 64 Kontribusi Sektor Kehutanan (dalam Persen) terhadap PDRB di Kabupaten Mamuju Tengah Pada Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha/Industry	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	0,61	0,59	0,55	0,59	0,58

Sumber data : BPS Kabupaten Mamuju Tengah Dalam Angka, Tahun 2021

2.2.34. Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB

Berdasarkan data BPS dari seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam Kategori Pertambangan dan Penggalian, di Mamuju Tengah hanya terdiri dari kategori kegiatan

Pertambangan dan Penggalian Lainnya. Hasil dari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat, dan komoditi penggalian selain tersebut di atas. Termasuk dalam subsektor ini adalah komoditi garam hasil penggalian. Kontribusi kategori Pertambangan dan Penggalian terhadap pembentukan PDRB Mamuju Tengah relatif rendah selama lima tahun terakhir. Kontribusinya hanya sebesar 35,403 milyar rupiah atau sekitar 1,19 persen tahun 2018 dan meningkat menjadi 36,927 milyar rupiah atau sekitar 1,17 persen pada tahun 2019 sedangkan pada tahun 2020 nilai kontribusi perdagangan menurun menjadi 1,13 persen. Data kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di kabupaten mamuju tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 65 Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB di Kabupaten Mamuju Tengah Pada Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha/Industry	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	1,27	1,22	1,19	1,17	1,13

Sumber data : BPS Kabupaten Mamuju Tengah Dalam Angka, Tahun 2021

2.2.35. Kontribusi Sektor Kelautan Dan Perikanan Terhadap PDRB

Kabupaten Mamuju Tengah memiliki luas wilayah 3.014,37 km² dengan panjang garis pantai 86,21 Km dengan jumlah yang tersebar di empat kecamatan dengan 18 merupakan desa pesisir. Potensi Kelautan dan perikanan terdiri dari Perikanan Tangkap dengan komoditi seperti di antaranya tembang, ikan batu, penja, tuna, kakap merah, cakalang, banjar, kerapu, kakap, teri dan tongkol. Kemudian Perikanan Budidaya disebut juga sebagai budidaya perairan atau akuakultur yang dibagi menjadi usaha budidaya yaitu budidaya air payau yang meliputi jenis usaha budidaya tambak dengan komoditas yaitu udang windu, udang vaname dan ikan bandeng dan Budidaya air tawar dengan komoditas ikan nila serta Budidaya laut meliputi usaha budidaya rumput laut dengan komoditas jenis *cottoni*, dan budidaya dengan Karamba Jaring Apung (KJA) dengan komoditas Ikan Kerapu (baru dikembangkan). Berdasarkan data statistik menunjukkan adanya penurunan pada kontribusi sektor perikanan pada tahun 2017 sebesar 0,12 persen dan tahun 2018 sebesar 0,38 persen. Pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 8,51 persen dan tahun 2020 juga mengalami peningkatan menjadi 8,74 persen. Data kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 66 Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Mamuju Tengah Pada Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha/Industry	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB	8,56	8,44	8,06	8,51	8,74

Sumber data : BPS Kabupaten Mamuju Tengah Dalam Angka, Tahun 2021

Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Mamuju Tengah pada tiga tahun terakhir cenderung mengalami penurunan dari 8,56 Persen pada tahun 2016 menjadi 8,44 Persen di tahun 2017 dan 8,01 Persen di tahun 2018 serta mengalami peningkatan kembali pada tahun 2019 menjadi 8,43 persen dari total keseluruhan sektor kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

2.2.36. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Perdagangan merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan strategis untuk mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Kabupaten Mamuju Tengah. Sektor perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga wajar. Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan.

Selama periode 2016-2020, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor secara konsisten menyumbang sekitar 4-5 persen. Namun pada tahun 2020, kontribusi kategori ini turun menjadi 138,24 milyar rupiah atau sekitar 4,34 persen dari tahun 2019 sebesar 4,42 persen. Dari nilai tersebut, sekitar 79,33 persen merupakan sumbangan dari subkategori Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor sedangkan sisanya merupakan sumbangan dari subkategori Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya. Secara umum, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor cenderung naik selama periode 2016-2019, kecuali tahun 2020 mengalami sedikit penurunan. Begitu pula dengan laju pertumbuhan, dimana tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,46 persen. Nilai ini turun dari tahun 2019 yang naik sebesar 3,52 persen. Hal ini disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat dan distribusi barang yang terkendala akibat pandemi Covid19. Data kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 67 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Mamuju Tengah Pada Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha/Industry	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	4,73	4,64	4,51	4,42	4,34

Sumber data : BPS Kabupaten Mamuju Tengah Dalam Angka, Tahun 2021

2.2.37. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Sektor industri sangat dibutuhkan dalam mengembangkan perdagangan yang berdaya saing tinggi. Dengan begitu nilai ekonomi suatu barang akan semakin meningkat sehingga akan semakin menambah daya jual. Melimpahnya sumber daya alam di Kabupaten Mamuju Tengah, memungkinkan bahan mentah dijadikan sektor industri dan kerajinan yang memiliki prospek untuk dikembangkan. Kontribusi Sektor Industri disumbang oleh Industri pengolahan tambang, makanan dan minuman, tekstil/pakaian/aksesoris dan Industri Pengolahan Lainnya.

Pada Kategori Industri Pengolahan, penyumbang terbesar di tahun 2020 adalah Industri Makanan dan Minuman, mencapai 229,53 milyar rupiah atau sebesar 84,68 persen. Berikutnya Industri Barang Galian Bukan Logam sebesar 37,88 milyar atau 13,97 persen, Industri kayu dan barang dari kayu dan gabus sebesar 1,22 milyar atau 0,5 persen. Selain itu, peranan kategori lainnya masing-masing kurang dari lima persen. Secara nominal, Industri Pengolahan mengalami masih mengalami sedikit kenaikan walaupun dalam keadaan Pandemi Covid19 dari 267,63 miliar rupiah di tahun 2019 menjadi 271,65 miliar rupiah di tahun 2020. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhannya cukup berfluktuasil dan namun pada tahun 2020 dimana terjadi penurunan sebesar -2,94 persen. Pada tahun 2020, hampir semua subkategori mengalami kontraksi kecuali industri barang galian bukan logam (tumbuh 5,39 persen), industri pengolahan dari logam (tumbuh 2,52 persen) dan industri pengolahan lainnya (tumbuh 0,59 persen). Sedangkan mayoritas sisanya mengalami kontraksi. Subsektor yang mengalami penurunan. Penurunan yang paling besar adalah Industri kertas dan barang dari kertas yaitu sebesar -11,39 persen.

Tabel 2. 68 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB di Kabupaten Mamuju Tengah Pada Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha/Industry	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	7,77	8,03	7,94	8,47	8,51

Sumber data : BPS Kabupaten Mamuju Tengah Dalam Angka, Tahun 2021

Kontribusi Sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku di Kabupaten Mamuju Tengah pada tiga tahun terakhir cenderung mengalami berfluktuatif dari 7,77 Persen pada tahun 2016 menjadi 8,02 Persen di tahun 2017 dan sedikit turun pada angka 7,95 Persen di tahun 2018 serta mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2019 yakni 11,42 persen dari total keseluruhan sektor kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Untuk melihat perkembangan kesejahteraan rakyat dari sisi ekonomi salah satunya dapat dilihat dari perkembangan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat. Masyarakat yang dengan tingkat pendapatan lebih tinggi, secara umum akan lebih sejahtera dibanding mereka yang pendapatannya lebih rendah. Sejalan dengan pendapatan, pengeluaran atau konsumsi masyarakat juga mencerminkan tingkat kesejahteraan. Tabel di bawah ini menjelaskan Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan dari tahun 2016 sampai dengan 2020.

**Tabel 2. 69 Angka Pengeluaran Per Kapita di Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Penduduk (Rp.)	-	771.741	870.490	1.043.492	976.512

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2020

Dari hasil survei Badan Pusat Statistik Kab. Mamuju rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2017-2019 terus mengalami peningkatan dari Rp 771.741 pada tahun 2017 dan menjadi Rp 1.043.492 tahun 2019. Peningkatan pengeluaran konsumsi penduduk ini salah satunya juga dikarenakan adanya peningkatan upah gaji yang mereka terima, seperti adanya kenaikan gaji pegawai, upah buruh dan lain-lain. Hal lain yang juga mendorong peningkatan konsumsi adanya peningkatan inflasi atas barang dan jasa, pada akhirnya memaksa penduduk untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta peningkatan arus komoditas barang, hingga perubahan gaya hidup masyarakat. Sedangkan pada tahun 2020 rata-rata pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami penurunan menjadi Rp. 976.512 atau menurun sebesar 0,93% dari tahun sebelumnya.

2) Rata-Rata Pengeluaran per Kapita menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran.

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung selama setahun terakhir. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Selama kurun lima tahun terakhir (2016 – 2020) pengeluaran rata-rata per kapita penduduk Kabupaten Mamuju Tengah untuk kebutuhan pangan dan non pangan cenderung meningkat, Untuk kebutuhan pangan yang mendominasi adalah padi-padian, ikan/udang/cumi-cumi/kerrang, sayuran-sayuran, buah-buahan, makanan dan minuman jadi, serta rokok dan tembakau. Sedangkan untuk kebutan non pangan didominasi oleh pengeluaran perumahan, bahan bakar, penerangan, dan air, hal ini menunjukkan semakin meningkatnya penghasilan masyarakat dan tidak kalah pentingnya adalah munculnya gaya hidup perkotaan yang cenderung pengeluarannya yang sifatnya sekunder. Data pengeluaran rata-rata perkapita sebulan di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 70 Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020 (Rupiah)

No	Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran			Total Pengeluaran
		40 Persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas	
1	Padi-padian	76.180	89.110	104.974	87.123
2	Umbi-umbian	2.393	3.954	7.227	3.986
3	Ikan/udang/cumi/kerrang	38.914	65.507	100.031	61.800
4	Daging	2.694	11.423	33.565	12.371
5	Telur dan susu	8.050	21.356	41.717	20.199
6	Sayur-sayuran	20.034	34.619	57.920	33.460
7	Kacang-kacangan	3.604	7.737	11.797	6.900
8	Buah-buahan	19.165	36.833	73.612	37.142
9	Minyak dan kelapa	9.543	14.254	20.084	13.540
10	Bahan minuman	12.844	21.431	29.047	19.527
11	Bumbu-bumbuan	7.185	13.084	17.937	11.700
12	Konsumsi lainnya	5.501	10.355	15.085	9.364



13	Makanan dan minuman Jadi	44.479	89.808	139.101	81.576
14	Rokok dan tembakau	35.369	102.485	114.659	78.119
	Jumlah Makanan	285.957	521.956	766.756	476.725
1	Perumahan, bahan bakar, penerangan, air	131.739	266.932	486.481	256.903
2	Aneka barang dan jasa	40.814	72.351	193.252	83.966
3	Barang yang tahan lama				
4	Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	12.258	28.054	55.133	27.168
5	Pajak pemakaian dan premi asuransi	20.321	33.406	67.961	21.158
6	Keperluan pesta dan upacara	3.617	15.747	66.961	21.158
	Jumlah Bukan Makanan	219.213	447.285	1.164.432	499.786
	Jumlah Pengeluaran Kabupaten Mamuju Tengah	505.170	969.241	1.931.908	975.512

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021

3) Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. Sektor usaha dengan produktivitas tenaga kerja yang besar terdapat pada sektor Administrasi pemerintahan, pertanahan, & jaminan sosial wajib, perdagangan besar & eceran, reparasi mobil & sepeda motor, pertanian, dan industri pengolahan. Sedangkan sektor usaha yang kecil terdapat pada sektor Jasa perusahaan, jasa lainnya, penyediaan akomodasi dan makan minum, pengadaan air, pengelolaan sampah & daur ulang. Data produktivitas per sektor di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 2. 71 Produktivitas Per Sektor di Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun 2016-2020**

No	Lapangan Usaha	Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%
A	Pertanian	1,751,199.40	29,1	1,896,277.40	28,9	2,121,943.50	31,7	2,248,458.00	34,9	2,287,513,1	33,9
B	Pertambangan dan Penggalian	31,616.40	0,53	32,833.20	0,50	35,403.20	0,52	36,927.40	0,57	36,062,0	0,53
C	Industri Pengolahan	193,315.80	3,21	216,283.90	3,29	236,092,1	3,52	267,653.30	4,16	271,056,3	4,0
D	Pengadaan Listrik dan Gas	310.00	0,005	358.3	0,005	378.10	0,005	385.3	0,005	401,5	0,006
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,383.80	0,02	1,493.30	0,02	1,576.60	0,02	1,747.60	0,03	1,792,4	0,03
F	Konstruksi	36,342.50	0,60	39,455.40	0,60	42,293.80	0,63	44,630.80	0,70	41,176,7	0,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	117,588.10	1,95	125,285.70	1,91	134,021.00	2,00	139,696.90	2,17	138,243,3	2,05
H	Transportasi dan Pergudangan	15,728.00	0,26	16,171.50	0,25	16,750.20	0,25	18,290.00	0,28	17,817,2	0,26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,942.90	0,08	5,193.50	0,08	5,569.90	0,08	6,065.50	0,09	5,950,6	0,09
J	Informasi dan Komunikasi	25,520.50	0,42	27,425.20	0,42	29,462.10	0,44	31,510.10	0,49	33,488,1	0,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	20,824.60	0,35	23,788.40	0,36	25,684.50	0,38	26,851.30	0,42	28,850,5	0,43
L	Real Estate	87,478.20	1,45	93,546.20	1,43	95,885.10	1,43	100,113.00	1,56	102,115,3	1,51
M,N	Jasa Perusahaan	342.10	0,005	352.80	0,005	363.80	0,005	377.10	0,005	362,8	0,005
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	103,587.00	1,72	106,154.60	1,62	109,785.90	1,63	112,887.70	1,76	101,991,3	1,51
P	Jasa Pendidikan	83,930.20	1,40	95,927.40	1,46	101,055.80	1,50	106,685.60	1,66	104,221,8	1,55
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,492.30	0,12	7,943.90	0,12	8,522.70	0,12	89,226.90	1,38	9,051,8	0,13

R.S .T.U	Jasa Lainnya	4.829.00	0.08	5.187.40	0.08	5.382.40	0.008	5.657.80	0.08	5.544,6	0.08
Jumlah Angkatan Kerja		60.189		65.585		67.005		64.255		67.414	

Sumber: Data Diolah Tim Penyusun RPJMD, Tahun 2021

4) Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap Total Desa

Desa Swasembada adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip dengan kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju.

Dalam kaitannya dengan upaya peningkatan daya saing daerah maka salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah melalui peningkatan dan percepatan pertumbuhan status desa menjadi desa swasembada. Berikut disajikan tabel persentase desa berstatus swasembada di Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2016-2020.

Tabel 2. 72 Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap Total Desa di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Desa berstatus Sasembada	16	19	21	21	22
Jumlah Desa	54	54	54	54	54
Persentase desa berstatus swasembada	29,62	35,18	38,89	38,89	40,74

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021

5) Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB

Rasio ekspor dan impor terhadap PDB atau yang biasa lebih dikenal dengan Rasio Perdagangan-PDB adalah indikator pengaruh relatif perdagangan internasional dalam ekonomi suatu negara. Rasio ini dihitung dengan membagi nilai agregat impor dan ekspor dalam kurun waktu tertentu dengan Produk Domestik Bruto (PDB) pada kurun waktu yang sama. Meski disebut rasio, hasil akhirnya biasanya ditampilkan dalam bentuk persentase. Rasio ini dijadikan patokan keterbukaan suatu negara terhadap perdagangan internasional. Karena itu, rasio ini juga bisa disebut Rasio Keterbukaan Perdagangan. Rasio ini dapat dipandang sebagai indikator globalisasi suatu negara. Secara regional rasio ekspor dan impor dibagi dengan jumlah PDRB sesuai tahun berkenaan. Berikut disajikan data rasio ekspor dan impor terhadap PDRB Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2016-2020.

Tabel 2. 73 Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Ekspor	858	866	933	1268	
Impor	901	906	940	943	
ekspor bersih	-43	-40	-7	325	0
PDB	2,486,430.70	2,693,678.10	2,970,170.60	3,153,864.30	
Rasio Ekspor Dan Impor Terhadap PDB	-1.72939E-05	-1.485E-05	-2.3568E-06	0.000103048	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

6) Angka Kriminalitas yang Tertangani

Data Registrasi dari Polres selama lima tahun mencatat bahwa tingkat kejahatan (*crime rate*) di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami pola yang berfluktuatif setiap tahunnya. Tahun 2016 menunjukkan angka kriminalitas tertangani setiap 10.000 ribu penduduk sebesar 9,33 kemudian menurun di tahun 2018 menjadi 7,76 dan kembali meningkat di tahun 2018 menjadi 10,71 dan tahun 2019 menjadi 12,39. Peningkatan kejahatan ini disebabkan adanya peningkatan pada kasus pencurian, penganiayaan, penipuan, narkoba, dan kasus lainnya. Pada Tahun 2020 angka kriminalitas yang tertangani menurun menjadi 5,47 per 10.000 ribu penduduk seiring dengan penurunan jumlah kasus kriminalitas yang terjadi. Data angka kriminalitas yang tertangani dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 74 Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kriminalitas tertangani	116	99	140	166	74
2	Jumlah Penduduk	124.380	127.601	130.727	134.028	135.280
3	Angka kriminalitas tertangani	9,33	7,76	10,71	12,39	5,47

Sumber: POLRES Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

7) Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (*defendancy ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk 15-64 tahun (angkatan

kerja). Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara/ daerah apakah tergolong maju atau berkembang. Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2. 75 Rasio Ketergantungan Penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Usia	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	0-14, > 65 thn	37.907	37.209	43.659	44.787	44.382
2	15-64 thn	104.232	106.737	102.097	98.485	90.898
3	Rasio	36.37	34.86	42.76	45.48	48,82

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

Tercatat rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami peningkatan pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 42,76 persen dan 45,48 persen yang artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 43 orang dan 46 orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi di tahun 2018 dan 2019 dan pada tahun 2020 rasio ketergantungannya kembali meningkat menjadi 48,82 yang artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 48 orang yang belum dan tidak produktif lagi.

2.3.2. Fokus Fasilitas wilayah/ Infrastruktur

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan mengembangkan kerangka strategis dan kebijakan penguatan konektivitas. Komponen pembentuk postur konektivitas fisik di antaranya pengembangan jaringan infrastruktur. Konektivitas wilayah dengan kondisi infrastruktur yang memadai akan mampu meningkatkan kapasitas suatu wilayah. Mobilitas masyarakat yang mudah dan lancar akan mempermudah masyarakat untuk beraktivitas ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur merupakan salah satu permasalahan yang harus dihadapi oleh sebuah wilayah yang sedang berkembang ke arah perkotaan. Permasalahan yang tampak pada tahun belakangan ini antara lain adalah pengembangan infrastruktur di Kecamatan Topoyo. Perhatian masyarakat pada infrastruktur di Kecamatan Topoyo sangatlah tampak. Infrastruktur di wilayah ini juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian.

1) Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan jalan yang dapat memberikan akses tiap kendaraan. Untuk panjang jalan dihitung baik jalan panjang Nasional maupun jalan provinsi yang di Kabupaten Mamuju Tengah maupun jalan Kabupaten desa. Sementara itu untuk jumlah kendaraan diperoleh data dari jumlah angkutan darat yang melintas di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.

Prasarana jaringan jalan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah kondisinya terus mengalami perbaikan menuju kondisi jalanan yang lebih baik. Sehingga diharapkan mampu menunjang kegiatan perekonomian masyarakat di daerah. Peningkatan infrastruktur terutama jalan menjadi program khusus Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melihat semakin meningkatnya jumlah kendaraan baik roda empat maupun roda dua. Rasio panjang jalan di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2016 rasio Panjang jalan per kendaraan sebesar 2,68 kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 25,20 dan pada akhir tahun 2020 rasio Panjang jalan per kendaran mencapai 26%. Artinya setiap 26,22 KM melayani 17.764 unit kendaraan. Data rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 76 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Jalan	46.617	46.617	465.879	465.879	465.879
2	Jumlah Kendaraan	17.352	17,430	18.481	19.028	17.764
3	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	2,68	2,67	25,20	24,48	26,22

Sumber: Dinas Perhubungan Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

2) Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 sebanyak 18.991 kemudian meningkat menjadi 20.432 atau meningkat sebesar 7% dari tahun sebelumnya dan menurun pada tahun 2020 sebesar 53,7% Data Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 77Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	18.896	18.991	19.021	20.432	10.975

Sumber : Dinas Perhubungan kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

3) Jumlah Orang/ Barang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal Per Tahun

Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa jumlah orang/barang yang melalui dermaga/bandara/terminal berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2018 bahwa jumlah orang/barang yang melalui dermaga/bandara/terminal sebanyak 8.600 kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 9.380 orang/barang dan menurun menjadi 42% dari tahun sebelumnya. Data Jumlah orang/barang yang melalui dermaga/bandara/terminal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 78 Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal per tahun di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Orang/Barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	6.420	8.600	9.380	10.090	4.244

Sumber : Dinas Perhubungan kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

4) Ketaatan Terhadap RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah hasil perencanaan tata ruang, demikian yang dimaksud dalam Bab I, Pasal 1 (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sehingga RTRW harus menjadi pilar utama sebagai pintu masuk awal dan utama (*main entrance*) dalam hal perencanaan pembangunan sekaligus kekuatan perekonomian lokal. Perencanaan tata ruang dilakukan dengan mempertimbangkan azas keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi budi daya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya, serta fungsi pertahanan keamanan; aspek pengelolaan secara terpadu berbagai sumber daya, fungsi dan estetika lingkungan, serta kualitas ruang. Rasio ketaatan terhadap RTRW dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 79 Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2016-2021
Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi RTRW	100%	100%	100%	100%	100%
2	Rencana peruntukan RTRW	100%	100%	100%	100%	100%
3	Rasio	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

Penataan Ruang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Penataan ruang di daerah ini sangat penting untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota maupun keserasian dengan wilayah disekitarnya. Pengaturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah berjangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun dari mulai tahun 2017 sampai tahun 2037.

Dalam rangka implementasi kebijakan tata ruang dan sebagai perangkat operasional RTRW sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta mengacu Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), maka Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menindaklanjuti pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang.

5) Luas wilayah Industri

Berdasarkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Mamuju Tengah, serta mempertimbangkan pemerataan kesejahteraan antar wilayah dan antar lapisan masyarakat, pengembangan industri di Kabupaten Mamuju Tengah lebih diarahkan tumbuh berkembangnya kawasan industri pertanian (agroindustri) di samping industri kecil dan rumah tangga. Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Mamuju Tengah seluas 709,30 Ha terdapat di Kecamatan Budong-Budong, sedangkan kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah.

6) Luas wilayah Kebanjiran

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana sebagai “peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan

dampak psikologis". Jumlah Kawasan Rawan Bencana Banjir yang terjadi di Kabupaten Mamuju Tengah seperti pada Tabel.

**Label 2. 80 Jumlah Kawasan Rawan Bencana Banjir
di Mamuju Tengah Tahun 2016-2020**

No	Uraian	LUAS (Ha)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kawasan Rawan Bencana Banjir	22 Ha	12 Ha	10 Ha	12 Ha	4 Ha

Sumber: BPBD Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

Melihat kondisi wilayah Kabupaten Mamuju Tengah yang luas sangat memungkinkan termasuk wilayah yang rentan terhadap bencana. Termasuk di Kabupaten Mamuju Tengah bencana yang biasa terjadi yakni bencana banjir sebanyak 15 kasus pada tahun 2017 dan daerah yang sering mengalami banjir yakni kecamatan Topoyo sebanyak 6 kali banjir selama satu tahun. Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah mengambil kebijakan dalam penanggulangan bencana agar dapat mendukung kelancaran Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan termasuk mengantisipasi dampak bencana.

7) Luas Wilayah Perkotaan

Permukiman perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan sosial. Kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Mamuju Tengah mencakup areal seluas 707,56 Ha, terdapat di setiap ibukota kecamatan yang ada dan Ibukota Kabupaten Mamuju Tengah.

8) Jenis Dan Jumlah Bank Dan Cabang

Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Keuangan. keberadaan bank pada suatu daerah memegang peranan sangat penting dalam perekonomian juga berperan dalam stabilitas Keuangan, pengendalian inflasi, sistem pembayaran serta otoritas moneter. Di kabupaten Mamuju Tengah keberadaan Bank sangatlah sentra dikarenakan sebagian besar masyarakat Mamuju Tengah bekerja sebagai petani sawit yang menerima pendapatan pada saat panen dimana uangnya sebagian besar disimpan di Bank agar lebih aman. Pada saat ini Kabupaten Mamuju Tengah memiliki 3 bank yang terdiri dari 2 bank pemerintah, dan 1 bank pemerintah daerah yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 81 Jenis dan Jumlah Bank di Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun 2016-2020**

Jenis Bank	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bank Pemerintah					
Jumlah Bank	2	2	2	2	2
Jumlah kantor bank	2	2	2	2	2
Bank Pemerintah Daerah					
Jumlah Bank	1	1	1	1	1
Jumlah kantor bank	1	1	1	1	1
Bank Swasta Nasional					
Jumlah Bank	-	-	-	-	-
Jumlah kantor bank	-	-	-	-	-
Bank Umum Syariah					
Jumlah Bank	-	-	-	-	-
Jumlah kantor bank	-	-	-	-	-
Bank Asing dan Campuran					
Jumlah Bank	3	3	3	3	3
Jumlah kantor bank	3	3	3	3	3

Sumber: BPS Kab. Mamuju Tengah Dalam Angka, Tahun 2021

9) Jenis, Kelas, Dan Jumlah Restoran

Sebelum terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah jumlah usaha rumah makan sudah tergolong banyak. Hal ini disebabkan oleh Kabupaten Mamuju Tengah merupakan Jalan Trans Sulawesi. Di mana kendaraan umum dan pribadi yang lewat menjadikan daerah ini sebagai opsi untuk beristirahat. Adapun jenis dan jumlah rumah makan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 82 Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020**

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pangale	2	3	2	2	2
2	Budong-Budong	3	3	3	3	3
3	Tobadak	12	15	12	12	9
4	Topoyo	18	21	18	18	19
5	Karossa	12	14	12	12	14
Mamuju Tengah		47	56	47	47	47

Sumber: BPS Kab. Mamuju Tengah Dalam Angka, Tahun 2021

Pada tahun 2020 usaha usaha mikro kecil dan menengah khususnya Usaha Restoran/Rumah Makan cukup mengalami peningkatan sudah mencapai 86 Usaha atau sebesar 35 % dari tahun 2017 dimana jumlah restoran/Rumah Makan pada tahun

2017 sebesar 56 Usaha. Dari perkembangan ini menunjukkan bahwa potensi usaha Rumah Makan di Kabupaten Mamuju Tengah dapat berkontribusi dalam menciptakan tenaga kerja baru serta mewujudkan Kabupaten Mamuju Tengah sebagai tempat singgah yang layak bagi perjalanan trans Sulawesi.

10) Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air pasal 1 menyatakan bahwa sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Pada pasal yang sama dijelaskan sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah sedangkan daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya. Berikut ini adalah jenis pelayanan dasar Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari di Kabupaten Mamuju Tengah

Penyediaan melalui sistem perpipaan di Kabupaten Mamuju Tengah dilakukan oleh UPTD Air Bersih di bawah urusan bidang keciptakaryaan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 menyatakan bahwa UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan Air Bersih oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten Sedangkan pemenuhan sumber air baku dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan lainnya dilaksanakan bidang keciptakaryaan melalui kegiatan PAMSIMAS.

Cakupan pelayanan Penyediaan Air Bersih Kabupaten Mamuju Tengah dari tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami lonjakan peningkatan dan telah melayani 93.257 Jiwa, secara pemenuhan akses air minum dari jumlah penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 65%. Kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 75% yang artinya dari total 138.310 penduduk sebanyak 104.215 rumah tangga telah mengakses air bersih. Kondisi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2. 83 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih
Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	38.270	51.403	62.346	93.257	104.215
2	Jumlah Warga Negara	149.252	143.946	145.756	143.272	138.130
Persentase Capaian		26%	36%	43%	65%	75%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

Meskipun mengalami perkembangan namun pemenuhan kebutuhan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari di Kabupaten Mamuju Tengah belum mencapai 100% sehingga masih perlu disempurnakan dan ditingkatkan secara bertahap dalam membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum hingga kepolosok desa sesuai dengan perkembangan kemampuan daerah.

11) Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

Secara umum pelayanan dan keterjangkauan listrik di Kabupaten Mamuju Tengah sudah sampai masuk ke desa-desa terpencil. Penyebaran dan pendistribusian aliran listrik sudah dapat dirasakan oleh semua golongan masyarakat. Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami peningkatan, demikian pula dengan jumlah daya terpasang. Sampai tahun 2020 jumlah pelanggan listrik di Mamuju Tengah mencapai 27.662 pelanggan. Peningkatan ini disebabkan bertambahnya permintaan dan kebutuhan kapasitas daya oleh aparat daerah dan masyarakat pendatang baru dari daerah lain di tahun pertama yang bekerja mengisi organisasi pemerintahan dan minat masyarakat luar yang tertarik berdomisili di kabupaten ini.

**Tabel 2. 84 Pelanggan Listrik PT.PLN (Persero) Menurut Kecamatan
di Kabupaten Mamuju tengah Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Budong-Budong	-	3.863	4.829	5.530	5.664
2	Pangale	-	1.908	2.385	2.798	3.107

3	Topoyo	-	5.232	6.540	7.671	7.805
4	Karossa	-	3.409	4.261	4.864	4.998
5	Tobadak	-	4.152	5.190	5.954	6.088
Jumlah		-	18.564	23.205	26.817	27.662

Sumber: PLN Cabang Topoyo, Tahun 2021

12) Persentase Penduduk yang menggunakan HP/ telepon

Penduduk jaman sekarang mengandalkan informasi dari perangkat elektronik dan akses internet untuk memenuhi kebutuhan akan informasinya. Untuk dapat mengakses informasi tersebut diperlukan alat yakni Handphone/telepon. Di Kabupaten Mamuju Tengah penduduk yang telah menggunakan HP/telepon sebesar 15 persen dari jumlah penduduk secara keseluruhan.

Perkembangan Jasa Telekomunikasi di Kabupaten Mamuju Tengah tidak lepas dari upaya Pemerintah untuk menjangkau seluruh Wilayah dengan penambahan BTS dari Tahun 2016 sebanyak 26 BTS naik menjadi 32 Buah pada Tahun 2019. Berdasarkan agregat kependudukan Pada Tahun 2019 Jumlah Penduduk 154.626 Jiwa dengan Jumlah Penduduk yang menggunakan Handphone/Telepon sebanyak 78.492 orang atau sebesar 51 persen kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 55 persen. Atau meningkat 4 persen dari tahun sebelumnya.

Tingginya pengguna Handphone/Telepon di Kabupaten Mamuju Tengah ini sangat membantu dalam meningkatkan PDRB Kabupaten Mamuju Tengah khususnya sector Jasa Telekomunikasi. Bahkan jika diarahkan penggunaan Jasa tersebut dalam usaha – usaha UMKM maka akan terjadi perubahan dan percepatan pembangunan dunia Usaha di Kabupaten Mamuju Tengah.

Tabel 2. 85 Tabel Persentase Penduduk Yang Menggunakan Handphone/Telepon di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon	Jumlah penduduk	Persentase
1	2016	-	-	-
2	2017	-	-	-
3	2018	-	77.916	-
4	2019	154.626	78.492	51%
5	2020	145.756	79.706	55%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

2.3.3. Fokus Iklim Berinvestasi

1) Angka Kriminalitas yang Tertangani

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat terlaksana jika pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat. penanggulangan kriminalitas merupakan hal yang penting dalam mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mamuju Tengah. Tingkat kriminalitas daerah juga menjadi aspek penilaian penting oleh investor yang akan berinvestasi di wilayah tersebut, tentu hal ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Kasus kriminal yang ditangani di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 86 Angka Kriminalitas Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Kasus	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Narkoba	-	-	-	3	13
2	Pembunuhan	-	-	-	0	3
3	Seksual	-	4	3	11	7
4	Penganiayaan	-	26	14	30	10
5	Pencurian	-	51	35	40	22
6	Penipuan	-	6	22	11	6
7	Pemalsuan Uang	-	-	-	0	0
8	Lainnya	-	21	66	71	12
9	Jumlah Tindak Kriminal selama 1 (satu) Tahun	116	108	140	166	74
10	Jumlah Penduduk	124,380	127,601	130,727	134,028	135,280
11	Angka Kriminalitas	9,33%	8,46%	10,71%	12,39%	5,47%

Sumber: Polsek Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2016 angka kriminal sebanyak 116 kasus dan uraian kasus yang terjadi tidak dapat diuraikan karna data tersebut masih begabung dengan data kriminal kabupaten mamuju, pada tahun 2017 kasus kriminal tertinggi yaitu kasus pencurian dengan jumlah 51 kasus, penganiayaan dengan jumlah 26 kasus, penipuan dengan jumlah 6 kasus menyusul seksual dengan jumlah 4 kasus . Adapun kasus lainnya berjumlah 21 kasus adalah kasus yang terdiri dari pengerusakan, pencemaran nama baik, penggelapan, penemuan mayat, perebutan tanah, pengancaman, pengeroyokan, penghinaan, penyerobotan, kekerasan dalam



rumah tangga dan kekerasan terhadap anak. Untuk jumlah kasus kriminal selama 1 tahun adalah 108 kasus dengan persentase angka kriminalitas 0,08 %.

Kemudian pada tahun 2018 kasus kriminal tertinggi kembali oleh kasus pencurian dengan jumlah 35 kasus, penipuan dengan jumlah 22 kasus, penganiayaan dengan jumlah 14 kasus menyusul seksual dengan jumlah 3 kasus. Adapun kasus lainnya berjumlah 66 kasus adalah kasus yang terdiri dari pengerusakan, pencemaran nama baik, penggelapan, pengancaman, pengeroyokan, penghinaan, penyerobotan, kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak. Untuk jumlah kasus kriminal selama 1 tahun adalah 140 kasus dengan persentase angka kriminalitas 0,11%.

Pada tahun 2019 kasus kriminal tertinggi masih pada kasus pencurian dengan jumlah 40 kasus, penganiayaan dengan jumlah 30 kasus, penipuan dan seksual dengan jumlah masing-masing 11 kasus. Adapun kasus lainnya berjumlah 71 kasus adalah kasus yang terdiri dari pengerusakan, pencemaran nama baik, pembakaran, penggelapan, penemuan mayat, perebutan tanah, pengancaman, pengeroyokan, penghinaan, penyerobotan, kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak. Untuk jumlah kasus kriminal selama 1 tahun adalah 166 kasus dengan persentase angka kriminalitas 0,12%. Kemudian Pada tahun 2020 hingga sampai pada bulan Juli kasus kriminal tertinggi yaitu Narkoba dengan jumlah 11 kasus, seksual dengan jumlah 5 kasus penganiayaan dan seksual dengan jumlah masing-masing 3 kasus serta pembunuhan dengan jumlah 1 kasus. Untuk jumlah kasus kriminal sampai dengan bulan Juli 2020 adalah 23 kasus.

Dilihat dari angka kriminalitas, dari tahun 2016 ke tahun 2019 terus mengalami kenaikan yang berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang juga ikut bertambah. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kriminal. Pada kasus pencurian, penipuan dan pemalsuan uang faktor ekonomi menjadi penyebab utama. Selebihnya karena faktor sosial di mana kabupaten Mamuju Tengah menjadi daerah yang berkembang sangat pesat sebagai kabupaten baru dan termuda di provinsi Sulawesi Barat, seperti terlihat pada kasus narkoba yang baru terjadi di tahun 2013 sebanyak 3 kasus dan meningkat pesat di tahun 2020 menjadi 11 kasus yang berpotensi terus meningkat hingga periode bulan Desember 2020. Terbentuknya dan diresmikannya Kepolisian Resort (Polres) Mamuju Tengah pada akhir tahun 2019, diharapkan penanganan kasus kriminal dapat berjalan dengan baik serta terjadi penurunan jumlah kasus / angka kriminal di kabupaten mamuju. Namun, sarana dan prasarana juga perlu segera dibenahi untuk meningkatkan pelayanan para pengayom masyarakat.

2) Jumlah Demonstrasi

Demonstrasi “demo” atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah. Berikut ini jumlah kejadian demonstrasi di Kabupaten Mamuju Tengah:

Tabel 2. 87Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Mamuju Tengah 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Demonstrasi Politik	-	-	-	2	3
2	Demonstrasi ekonomi	-	1	1	1	1
3	Demonstrasi pembebasan lahan	1	1	-	1	2
4	Demonstrasi kesehatan	1	1	-	-	-
5	Demonstrasi Pendidikan		1	1	-	2
Jumlah		2	4	2	4	9

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2016 terjadi sebanyak 2 kegiatan demonstrasi yakni demonstrasi kasus pembebasan lahan tambak warga di Kecamatan Karossa yang diserobot perusahaan tambak dan demonstrasi kesehatan terkait dengan pelayanan kepada masyarakat khususnya puskesmas dan rumah sakit, kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi sebanyak 4 kegiatan demonstrasi yaitu demonstrasi di bidang ekonomi terkait kesejahteraan karyawan dan janji pihak perusahaan PT. Trinity Palmas Plantation untuk mengutamakan putra daerah sebagai karyawan, demonstrasi bidang pendidikan terkait fasilitas sekolah di daerah terpencil, bidang kesehatan terkait BPJS kesehatan dan kasus pembebasan lahan di Desa Bojo, Rawa Indah dan Barakkang, lalu pada tahun 2018 menurun menjadi 2 kegiatan demonstrasi yaitu demonstrasi bidang ekonomi terkait pembagian bagi hasil koperasi PT. Astra Agro Lestari, demonstrasi bidang pendidikan terkait pendaftaran CPNS jurusan pertanian, dan tahun 2019 kembali meningkat yakni terjadi sebanyak 4 kegiatan demonstrasi, yaitu demonstrasi di bidang politik terkait dengan mekanisme penunjukan / penetapan kareteker desa, perda desa tentang usia kepala desa dan tupoksi DPRD dalam pengawasan anggaran dana desa serta kebijakan publik lainnya, demo keterlibatan pemuda dalam transparansi pengelolaan dana desa serta demo

terkait kasus pembebasan lahan tentang mekanisme agrarian di Kabupaten Mamuju Tengah. Di bidang ekonomi demonstrasi terkait perda CSR perusahaan.

3) Lama Proses Perijinan

Kemudahan prosedur dan tata cara memperoleh perizinan atau pengurusan izin usaha merupakan salah satu faktor pendukung minat investor agar mau berinvestasi di Kabupaten Mamuju Tengah. Kecepatan birokrasi dalam melayani permohonan perijinan untuk beberapa jenis perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah adalah 1 hari kerja, namun untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terdapat kajian teknis di lapangan sehingga waktunya sedikit lebih lama. Dalam perspektif ke depan, pelayanan perizinan akan terus diperbaiki dan disempurnakan sehingga terjamin kepastian prosedur, waktu dan keamanan perizinan serta pada akhirnya akan memberi kenyamanan dan kemudahan kepada investor untuk berinvestasi di Kabupaten Mamuju Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 88 Lama Proses Perijinan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020

No	Uraian	Lama mengurus (hari)	Jumlah persyaratan (dokumen)	Biaya resmi (rata-rata maksimum Rupiah)
1	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	1 Hari	10	0
2	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	1 Hari	10	0
3	Izin Usaha Industri (IUI)	1 hari	5	0
4	Tanda Daftar Industri (TDI)	1 hari	6	0
5	Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga	1 Hari	11	0
6	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Tergantung teknis, ada kajian dilapangan	7	Biaya ditentukan oleh OPD teknis / Dinas PUPR
7	Izin Usaha Jasa Konstruksi	1 Hari	9	0
8	Izin Lokasi	1 Hari	13	0
9	Izin Usaha Peternakan	1 Hari	7	0
10	Izin Apotik	5 Hari	15	0
11	Izin Klinik	5 Hari	18	0
12	Izin Toko Obat	5 Hari	12	0
13	Izin Praktik Apoteker (SIPA)	5 Hari	9	0
14	Izin Praktik Perawat Gigi	5 Hari	10	0
15	Surat Izin Praktik Dokter	5 Hari	9	0
16	Surat Izin Praktik Bidan	5 Hari	12	0

17	Surat Izin Praktik Perawat	5 Hari	13	0
18	Izin Usaha Peternakan	1 Hari	7	0

Sumber: Dinas PTSP-KUKM Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa proses perijinan di Kabupaten Mamuju Tengah dari beberapa dokumen perizinan yang diterbitkan lama prosesnya yaitu selama 1 dan 5 hari kerja, kecuali Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikarenakan ada kajian teknis di lapangan. Adapun persyaratan dokumen untuk penerbitan perizinan berbeda-beda jumlahnya sesuai peraturan dan kebutuhan, sedangkan dari segi biaya untuk pengurusan perizinan adalah gratis atau tidak dipungut biaya kecuali Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diatur berdasarkan tipe dan kriteria bangunan dengan jenis Retribusi yang akan menjadi Pendapatan Asli daerah (PAD), tetapi Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah sampai saat ini yang menjadi kendala adalah untuk mendapatkan Rekomendasi Teknis dari Instansi terkait, pemohon perizinan masih harus menyampaikan permohonan kepada OPD terkait dan datang langsung ke kantor OPD tersebut karena sarana dan prasarana untuk dapat melakukan pelayanan terpadu satu pintu secara penuh, efektif dan efisien masih terbatas. Dalam hal ini, Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah belum dapat memfasilitasi seluruh tim teknis dari masing-masing OPD untuk berkantor / bekerja di Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Hal inilah yang membuat pemohon perizinan harus mengurus rekomendasi teknisnya di kantor OPD terkait. Kedepannya, pemerintah daerah akan berupaya agar dapat melakukan pelayanan terpadu satu pintu secara penuh, efektif dan efisien sehingga minat untuk berinvestasi oleh investor meningkat.

4) Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Jenis Pajak Daerah yang menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju Tengah meliputi: (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Air Tanah; (7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (8) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan (9) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Penerimaan Pajak Daerah pada Tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan dengan rincian hasil pajak daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 89 Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun Anggaran 2016 – 2020***

No	Uraian	Pendapatan Pajak Daerah				
		Tahun Anggaran 2016	Tahun Anggaran 2017	Tahun Anggaran 2018	Tahun Anggaran 2019	Tahun Anggaran 2020*



1	Pajak Hotel	1,750,000.00	1,800,000.00	2,725,000.00	6,290,000.00	4,635.000.00
2	Pajak Restoran	19,380,000.00	20,095,000.00	1,458,464,834.00	1,429,225,026.00	704.850.448,00
3	Pajak Hiburan	-	1,125,000.00	1,125,000.00	1,231,000.00	0,00
4	Pajak Reklame	132,838,000.00	79,555,000.00	49,605,000.00	43,695,000.00	57.818.000,00
5	Pajak Penerangan Jalan	465,430,291.00	2,315,404,700.00	2,783,998,204.00	3,026,852,196.00	3.512.122.131,00
6	Pajak Air Tanah	717,500.00	450,000.00	630,000.00	1,460,000.00	345.000,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,280,437,306.00	888,762,870.00	1,051,694,552.00	734,928,169.75	377.224.605,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	417,338,856.00	372,438,645.00	1,319,901,248.00	1,982,928,942.00	2.426.653.101,00
9	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	82,597,720.00	1,960,440,768.00	784,403,740.00	581,505,187.00	1.089.679.250,00
JUMLAH		2,400,489,673.00	5,640,071,983.00	7,452,547,578.00	7,808,115,520.75	8.173.327.535,00

Sumber: Badan Keuangan Kab. Mamuju Tengah, 2020 (Data Tahun 2020* masih dalam proses audit)

Berdasarkan tabel realisasi pendapatan dari pajak diatas menunjukkan bahwa pajak penerangan jalan merupakan komponen terbesar dalam pendapatan pajak daerah Kabupaten Mamuju Tengah dengan penerimaan pajak sebesar Rp. 3.026.852.196 atau 38,77 persen dari total penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Sedangkan komponen pajak hiburan memiliki penerimaan pajak paling rendah dengan jumlah Rp. 1.231.000. atau 0,02 persen.

Jenis retribusi daerah yang menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju Tengah meliputi: (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan; (2) Retribusi Pelayanan Persampahan; (3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan; (4) Retribusi Pelayanan Pasar; (5) Retribusi Terminal; (6) Retribusi Tempat Khusus Parkir; (7) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; (8) Retribusi Sewa Alat-Alat Berat; (9) Retribusi Air Bersih; (10) Retribusi SITU; (11) Retribusi IUJK; (12) Retribusi Usaha Perdagangan (SIUP); (13) Retribusi Izin Gangguan; (14) Retribusi Izin Trayek; (15) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas; (16) Rtribusi Hasil Pertanian; (Retribusi Sewa Gedung/Tempat; (17) Retribusi Jasa Ketatausahaan dan (19) Retribusi TDP. Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2019 dapat direalisasikan sebesar Rp. 16.990.331.273. Adapun perincian pendapatan dari retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2. 90 Perincian Pendapatan Retribusi Daerah di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2016 - 2020*

No	Uraian	Pendapatan Retribusi Daerah				
		Tahun Anggaran 2016	Tahun Anggaran 2017	Tahun Anggaran 2018	Tahun Anggaran 2019	Tahun Anggaran 2020 *
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	686,897,599.00	2,669,487,000.00	6,722,994,540.00	12,842,518,523.00	7,910,660,577.00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan	-	54,338,000.00	73,805,000.00	89,545,000.00	92,625,000.00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-	24,500,000.00	-	-	-
4	Retribusi Pelayanan Pasar	117,492,000.00	145,720,000.00	300,258,000.00	183,020,000.00	191,870,000.00
5	Retribusi Terminal	19,800,000.00	3,800,000.00	15,900,000.00	16,343,000.00	23,779,000.00
6	Retribusi Tempat Khusus Parkir	15,700,000.00	-	39,605,000.00	72,857,000.00	45,421,000.00
7	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	108,880,000.00	572,852,000.00	233,714,000.00	640,030,000.00	375,577,000.00
8	Retribusi Sewa Alat-Alat Berat	91,850,000.00	114,650,000.00	157,300,000.00	408,200,000.00	136,400,000.00
9	Retribusi Air Bersih	507,821,000.00	1,475,147,250.00	2,201,604,500.00	2,737,817,750.00	3,298,591,376.00
10	Retribusi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	20,000,000.00	12,500,000.00	10,000,000.00	-	-
11	Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	5,200,000.00	2,200,000.00	600,000.00	-	-
12	Retribusi Usaha Perdagangan (SIUP)	-	-	10,000,000.00	-	-
13	Retribusi Izin Gangguan	20,000,000.00	10,500,000.00	-	-	-
14	Retribusi Izin Trayek	64,185,000.00	28,085,000.00	-	-	-
15	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	40,000,000.00	25,000,000.00	-	-	-
16	Retribusi Hasil Pertanian	3,500,000.00	1,750,000.00	-	-	-
17	Retribusi Sewa Tempat Gedung/Tempat	2,200,000.00	258,275,000.00	-	-	-
18	Retribusi Jasa Ketatausahaan	327,710,000.00	780,000.00	-	-	-
19	Retribusi TDP	-	-	10,000,000.00	-	-
Jumlah		2,031,235,599.00	5,399,584,250.00	9,775,681,040.00	16,990,331,273.00	12,074,923,953.00

Sumber: Badan Keuangan Kab. Mamuju Tengah, 2020 (Data Tahun 2020 masih dalam proses audit)

Berdasarkan tabel rincian penerimaan retribusi di atas menunjukkan bahwa Retribusi pelayanan kesehatan merupakan komponen terbesar dalam penerimaan retribusi Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2019 dengan penerimaan retribusi sebesar Rp.12.842.518.523 atau sekitar 75,59 persen dari total penerimaan retribusi daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Sedangkan penerimaan retribusi terendah terdapat pada Retribusi Terminal sebesar Rp. 16.343.000 dan ada beberapa retribusi yang tidak ada karena terkendala terkait peraturan daerah yang belum ada.

5) Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Dalam proses daya saing daerah diperlukan sebuah peraturan daerah yang dapat mendukung suatu iklim usaha dengan kriteria penting kualitas Perda, yaitu prinsip transparansi dalam tujuan penetapan perda; transparansi dalam hal tarif dan denda; tidak ada tumpang tindih antara satu perda dengan perda yang lain; perda yang ramah dalam mendukung lingkungan usaha; dan perda yang tepat sasaran dalam mendukung dinamika usaha. Berikut ini jumlah peraturan daerah yang mendukung iklim usaha yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah:

Tabel 2. 91 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2016 -2020

No	Peraturan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1	-	-	-	-
2	Pajak Air Tanah	1	-	-	-	-
3	Pajak Hotel	1	-	-	-	-
4	Pajak Restoran	1	-	-	-	-
5	Pajak Hiburan	1	-	-	-	-
6	Pajak Parkir	1	-	-	-	-
7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1	-	-	-	-
8	Pajak Penerangan Jalan	1	-	-	-	-
9	Pajak Reklame	1	-	-	-	-
10	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1	-	-	-	-
11	Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Mamuju Tengah	-	1	-	-	-
12	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	-	1	-	-	-



13	Retribusi Pelayanan Pasar	-	-	1	-	-
14	Retribusi Pemakaian kekayaan daerah	-	-	1	-	-
15	Retribusi Persampahan/Kebersihan	-	-	1	-	-
16	Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-	1	-	-
17	RPJPD	1	-	-	-	-
18	Perubahan RPJMD	-	-	-	1	-
19	Badan Usaha Milik Daerah	-	-	-	-	1
Jumlah		11	2	4	1	1

Sumber: Bagian Hukum Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa peraturan daerah yang mendukung suatu iklim usaha yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah sebagian besar berkaitan dengan pungutan pajak dan retribusi daerah, selain itu peraturan daerah lain yang mendukung iklim usaha seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, Penyelenggaraan Pelayanan Publik, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Peraturan Daerah Terkait Perubahan RPJMD merupakan Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha, terkait dengan perijinannya belum diperdakan.

Dari table diatas menunjukkan masih kurangnya peraturan daerah yang ada di kabupaten Mamuju Tengah yang mendukung iklim investasi daerah dimana jumlah perda yang ada tahun 2016 sebanyak 11 Perda, tahun 2017 sebanyak 2 Perda, tahun 2018 sebanyak 4 Perda dan tahun 2019 hanya 1 Perda, hal ini disebabkan beberapa kendala yaitu : 1. Perda retribusi dan pajak daerah terkendala karena belum terpenuhinya persyaratan berkas sesuai dengan rekomendasi dari Kemendagri; 2. Beberapa Perda masih dalam proses pengesahan di badan legislatif daerah; 3. Belum ada pengajuan Perda dari perangkat daerah terkait; 4. Kurangnya anggaran menyakut penyelesaian Perda daerah, dan kendala ini diharapkan dapat terselesaikan sehingga daya saing daerah dapat meningkat.

6) Persentase Desa Berstatus Swasembada

Kabupaten Mamuju Tengah memiliki 5 kecamatan dan 54 desa yang mana terbagi atas desa Swadaya, desa swakarya dan desa swasembada, setiap tahunnya desa yang ada berubah statusnya dari desa swadaya menjadi desa swakarya, desa swakarya menjadi desa swasembada. Berdasarkan data dari Kementerian keuangan Republik Indonesia pada tabel di bawah dapat dilihat perkembangan desa setiap tahunnya

dengan dasar Indeks Desa Membangun (IDM) sehingga dapat dilihat Jumlah desa swasembada di Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 92 Persentase Desa Swasembada Kabupaten di Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa Swasembada	16	19	21	21	22
2	Jumlah Desa	54	54	54	54	54
3	Persentase Desa berstatus swasembada dibagi jumlah desa(1)/(2)*100	29,62	35,18	38,89	38,89	40,74

Sumber: DPMD Kab. Mamuju Tengah (Menkeu RI), Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya, artinya jumlah desa yang berstatus swasembada bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah desa yang berstatus swasembada yaitu 16 desa dengan persentase 29,62% dari jumlah desa yang ada. Pada tahun 2017 desa berstatus swasembada meningkat menjadi 19 desa dengan persentase 35,18%, sampai dengan tahun 2018 jumlah desa yang berstatus swasembada mencapai 21 desa dari total 54 desa dengan presentase 38,89 % dan pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan menjadi 27 desa atau presentase 50,00%, peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2018 ke tahun 2019. Desa swasembada ini terbagi dalam 5 kecamatan ; kecamatan tobadak 3 desa swasembada dari 8 desa yang ada, kecamatan pangale 6 desa swasembada dari 9 desa yang ada, kecamatan budong-budong 7 desa swasembada dari 11 desa yang ada, kecamatan topoyo 6 desa swasembada dari 9 desa yang ada, dan di kecamatan karossa 5 desa swasembada dari 11 desa yang ada . Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya jumlah desa yang berstatus swasembada mengalami penambahan, dan pada akhirnya semua desa yang masih berstatus swadaya dan swakarya dapat berubah status menjadi desa swasembada.

2.3.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sumber daya manusia yang tangguh, mandiri, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumber daya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk pada suatu wilayah.

1) Kualitas Tenaga Kerja

SDM yang berkualitas akan meningkatkan daya saing dan perkembangan investasi yang masuk di suatu daerah. Kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas, karena mayoritas perusahaan-perusahaan atau lapangan kerja lainnya lebih memilih tenaga kerja yang berkualitas baik. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan rasio lulusan S1/S2/S3 yang terus meningkat meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah rasio S1/S2/S3 adalah 0,03 terhadap jumlah penduduk. Rasio lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 93 Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah lulusan S1	2.575	2.871	3.477	3.847	4.070
2	Jumlah lulusan S2	89	101	114	120	132
3	Jumlah lulusan S3	10	8	7	6	6
4	Jumlah lulusan S1/S2/S3	2.674	2.980	3.598	3.973	4.208
5	Jumlah penduduk	149.252	143.946	145.756	143.272	138.130
6	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	0,018	0,021	0,025	0,028	0,030

Sumber: Dinas Dukcapil Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2016 rasio lulusan S1/S2/S3 yaitu 0,018. Pada tahun – tahun berikutnya rasio lulusan S1/S2/S3 terus meningkat menjadi 0,028 pada tahun 2019 dan 0,030 pada tahun 2020.

2) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan untuk melihat apakah suatu daerah merupakan kategori daerah maju dengan produktivitas penduduk yang tinggi atau daerah berkembang dengan produktivitas penduduk yang masih rendah. Rasio ini merupakan indikator demografi yang sangat penting, semakin tinggi angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi. Sementara itu semakin rendah angka rasio menunjukkan semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif/ tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 94 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	penduduk usia < Jumlah 15 tahun	-	31.364	38.523	39.987	39.750
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	-	5.845	5.136	4.800	4.632
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif	-	37.209	43.659	44.787	44.382
4	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun	-	106.737	102.097	98.485	90.898
5	Rasio ketergantungan	-	0,35	0,43	0,46	0,49

Sumber: Dinas Dukcapil Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2017 yaitu 0,35. Pada tahun – tahun berikutnya rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Mamuju Tengah terus meningkat menjadi 0,46 pada tahun 2019 dan kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 0,49 Hal ini dengan asumsi bahwa setiap penduduk usia 15-64 tahun benar-benar dapat produktif. Jika usia produktif tidak dapat diberdayakan untuk benar-benar produktif secara ekonomi atau hanya menjadi pengangguran, maka justru akan menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan sosial di antaranya kesenjangan sosial dan kerawanan sosial.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1) Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjut nya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Jenis Pelayanan SPM ada tiga yaitu Pendidikan Dasar, Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Anak Usia Dini. Untuk Pendidikan dasar mengalami pola yang berfluktuatif setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2016 jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/MI,SMP.MTS) adalah sebesar 78 persen, kemudian menurun pada dua tahun berikutnya yaitu tahun 2017 menjadi 76 persen dan tahun 2018 menjadi 65 persen.

Pada tahun 2020 meningkat menjadi 73 persen yang artinya dari total 2.429 penduduk usia 7-15 tahun, jumlah siswa yang tercatat sebesar 18.528 orang.

Pendidikan Kesetaraan Merupakan pendidikan nonformal yang mencakup program Paket A,B,C dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik. Untuk Pendidikan kesetaraan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimulai pada tahun 2016 sebesar 12 persen, kemudian terus meningkat setiap tahunnya dan diakhir tahun 2020 menjadi 83%. Sedangkan Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan jenjang pendidikan yang ditempuh anak sebelum ia masuk ke sekolah dasar (SD). Pendidikan anak usia dini adalah suatu pembinaan yang diperuntukkan bagi anak 0-6 tahun, di mana usia ini menjadi usia emas pembentukan kepribadian dan karakter anak. Data yang ada menunjukkan cakupan Pendidikan anak usia dini di Kabupaten Mamuju Tengah yang mengalami pola yang berfluktuatif setiap tahunnya. Walaupun sempat meningkat di tahun 2019 menjadi 61 persen, di tahun 2020 kembali menurun menjadi 52 persen yang artinya dari total 5.199 penduduk usia 5-6 tahun yang mengikuti Pendidikan dini sebanyak 2,726 jiwa. Data capaian indikator SPM Dinas Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 95 Capaian Indikator SPM Dinas Pendidikan
di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS) (%)	78%	76%	65%	65%	73%
		Jumlah siswa 7-15 thn	18.836	18.366	17.716	17.601	18.528
		Jumlah penduduk 7-15	24.205	24.072	27.291	27.276	25.429
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam	12%	15%	21%	79%	83%

		pendidikan kesetaraan (%)					
		Jumlah siswa 7-18thn	38	50	84	308	293
		Jumlah penduduk 7-18	32.859	33.038	39.351	39.188	35.452
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (%)	41%	50%	47%	61%	52%
		Jumlah siswa 5-6 thn	1.836	2.226	2.342	3.090	2.726
		Jumlah penduduk 5-6 thn	4.442	4.484	5.006	5.037	5.199

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

2) Kesehatan

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Sasaran ditentukan dengan menggunakan data proyeksi, dari BPS kemudian dimasukkan pada rumus penentuan sasaran yang ditetapkan oleh Kemenkes. Sedangkan data capaian didapatkan dari laporan bulanan petugas puskesmas. Pelayanan kesehatan pada ibu hamil juga disebut Antenatal Care (ANC) yaitu pelayanan kesehatan oleh tenaga profesional untuk ibu hamil selama masa kehamilannya yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan. Belum tercapainya target SPM disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, 1. Masih adanya ibu yang berpindah domisili pada masa kehamilan sehingga jumlah sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi berkurang, 2. Terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, yaitu kehamilan yang tidak diprogramkan oleh pasangan atau kehamilan diluar nikah sehingga menutup-nutupi kehamilan. 3. Masih adanya kehamilan usia 0-3 bulan yang tidak terdeteksi. Upaya yang dilakukan dalam upaya peningkatan capaian pelayanan kesehatan ibu hamil yaitu pendampingan yang dilakukan oleh bidan desa mulai dari masa awal kehamilan sampai dengan kunjungan neonatus lengkap, yaitu sampai dengan 28 hari setelah bayi lahir. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel berikut :

Tabel 2. 96 Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Ibu Hamil	-	3.011	3.087	3.087	3.134

2	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	2.226	2.322	2.362	2.558
Persentase Capaian			73,93%	75,22%	76,51%	81,62

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Sasaran ditentukan dengan menggunakan data proyeksi, dari BPS kemudian dimasukkan pada rumus penentuan sasaran yang ditetapkan oleh Kemenkes. Sedangkan data capaian didapatkan dari laporan bulanan petugas puskesmas. Capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin pada tahun 2019 menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun 2018 yaitu naik dari 83.88 % menjadi 84.88 % dan pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 84,97 %. Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akses capaian pada indikator ini adalah, masih adanya ibu hamil yang mau bersalin di rumah, bukan pada fasilitas kesehatan. Adapun upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan capaian SPM ini adalah dengan memaksimalkan peran bidan desa dalam kegiatan pendampingan ibu hamil, mengawal proses awal kehamilan hingga kelahiran usia 28 hari. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel berikut :

Tabel 2. 97 Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Ibu Bersalin	-	2.874	2.949	2.949	2.987
2	Jumlah Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	2.421	2.459	2.503	2.538
Persentase Capaian			84,24 %	83,38 %	84,88 %	84,97 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Sasaran ditentukan dengan menggunakan data proyeksi, dari BPS kemudian dimasukkan pada rumus penentuan sasaran yang ditetapkan oleh Kemenkes. Sedangkan data capaian didapatkan dari laporan bulanan petugas puskesmas. Capaian pada pelayanan bayi baru lahir menunjukkan penurunan dari tahun 2018 yaitu sebesar 88.99 % menjadi 88.67 %. Pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 86,42% hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut antara lain, masih adanya kasus kematian baik itu kejadian kematian janin dalam rahim dan lahir

mati. Adapun upaya yang dilaksanakan adalah pelaksanaan AMP (Audit Maternal Perinatal) yang dilaksanakan ketika terjadi kematian bayi oleh Dinas Kesehatan, yaitu kegiatan penelusuran sebab kematian atau kesakitan ibu untuk mencegah kematian serupa di masa yang akan datang serta pelaksanaan Midwifery Update oleh organisasi profesi bidan. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel berikut :

Tabel 2. 98 Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Bayi Baru Lahir	-	2.735	2.807	2.807	2.880
2	Jumlah Ibu Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	2.452	2.498	2.498	2.489
Persentase Capaian		-	89,65%	88,99%	88,67	86,42%

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Sasaran ditentukan dengan menggunakan data proyeksi, dari BPS kemudian dimasukkan pada rumus penentuan sasaran yang ditetapkan oleh Kemenkes. Sedangkan data capaian didapatkan dari laporan bulanan petugas puskesmas. Capaian Pelayanan Kesehatan Balita mengalami peningkatan dari 62.12 % pada tahun 2018, naik menjadi 76.38 % pada tahun 2019 kemudian menurun menjadi 62,40% di tahun 2020. Belum tercapainya target 100 % pada pelayanan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, keikutsertaan anak usia 0 s/d 59 bulan untuk menerima pelayanan kesehatan di posyandu yang masih sangat kurang, utamanya pada saat anak telah menyelesaikan imunisasi wajib dasar. Adapun upaya yang telah dan masih terus dilaksanakan adalah kegiatan kejar timbang yang dilaksanakan secara door to door, namun terkendala lagi keberadaan orang tua anak yang tidak berada di rumah pada saat tiba waktu kedatangan petugas kesehatan serta keterbatasan SDM pada saat pelaksanaan kegiatan kejar timbang. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel berikut :

Tabel 2. 99 Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Balita	-	12.064	12.377	12.377	12.652
2	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	6.925	7.688	9.453	7,895
Persentase Capaian			57,40 %	62,12 %	76,38 %	62,40 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Sasaran ditentukan dengan menggunakan data dari hasil kunjungan ke sekolah. Sedangkan data capaian didapatkan dari laporan bulanan petugas puskesmas. Sedangkan data capaian didapatkan dari laporan bulanan petugas puskesmas. Terjadi perbedaan kriteria penentuan sasaran pada pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar pada tahun 2018 dan 2019. Jumlah sasaran pada tahun 2018 yaitu total anak kelas 1-7, sedangkan pada tahun 2019, sasarannya adalah total anak kelas 1-9. Terjadi peningkatan angka capaian pada tahun 2019 yaitu sebesar 97.97 %, yang mana pada tahun 2018 berada pada angka 88.08 %. Pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 82,88%. Kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan pemberian layanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar yaitu ketidak hadirannya siswa yang bersangkutan pada saat tiba waktu pelaksanaan kegiatan, sehingga siswa yang bersangkutan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Adapun pada skrining ini, kegiatan yang dilaksanakan antara lain, pengukuran tinggi badan, berat badan, pengukuran daya penglihatan, pendengaran, pemeriksaan gigi dll. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel berikut :

Tabel 2. 100 Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar	-	6.058	6.879	16.198	18.756
2	Jumlah yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	5.517	6.059	15.869	15.545
Persentase Capaian			91,07%	88,08%	97,97%	82,88%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Capaian pelayanan kesehatan pada usia produktif mengalami kenaikan angka pada tahun 2020 yaitu 85,18 %, dibandingkan tahun 2019 yaitu 81.83 %. Kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan ini, antara lain keterbatasan sarana pada saat pelaksanaan skrining yaitu pada pelaksanaan pengukuran tekanan darah dan gula darah, untuk itu diupayakan pengadaan alat yang dimaksud melalui pengadaan menggunakan dana JKN puskesmas, namun karena keterbatasan, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan alat yang dimaksud. Selain itu masalah SDM juga memberikan pengaruh, dalam hal ini seringkali terjadi penggantian pengelola atau pelaksana program di puskesmas. Pelaksanaan skrining di lapangan juga terkendala keterbatasan kendaraan dinas. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel berikut :

Tabel 2. 101 Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Usia Produktif	-		59.135	77.135	77.169
2	Jumah yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		40.095	63.267	65.735
Persentase Capaian		-		67,80 %	82,02 %	85,18 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Sasaran ditentukan dengan menggunakan data proyeksi, dari BPS kemudian dimasukkan pada rumus penentuan sasaran yang ditetapkan oleh Kemenkes. Sedangkan data capaian didapatkan dari laporan bulanan petugas puskesmas. Terjadi penurunan angka capaian pada pelayanan kesehatan pada tahun 2019 yang berada pada angka 74,48% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu berada pada angka 83.27 % Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ketidakmampuan warga usila untuk hadir di fasilitas kesehatan. Dalam rangka peningkatan capaian pelayanan ini, maka salah satu upaya yang dilaksanakan adalah pemberian layanan kesehatan langsung dengan mendatangi rumah warga usila oleh petugas puskesmas, namun belum terlaksana di seluruh wilayah kerja puskesmas sehingga belum dapat mencapai target SPM 100 %. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel berikut :

Tabel 2. 102 Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kunjungan Warga Usia > 60 Tahun	-	9.952	9.952	9.952	8.488
2	Jumlah Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	6.214	8.578	8.287	6.322
Persentase Capaian		-	62,44 %	86,19 %	83,27 %	74,48 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Penentuan sasaran yaitu hasil perhitungan jumlah penderita hipertensi kab./kota dibagi penduduk usia 15 tahun keatas. Capaian yaitu jumlah sasaran yang melaksanakan pengukuran tensi minimal selama 12 bulan. Capaian pelayanan terhadap penderita hipertensi mengalami kenaikan dari tahun 2018 ke 2019 yaitu 57.74 % menjadi 74.09 sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 71,79%. Adapun kendala yang dihadapi adalah masih adanya pelaksana program yang belum memahami definisi operasional dan syarat tercapainya sasaran yaitu pelaksanaan pengukuran tensi minimal sekali sebulan selama 12 bulan dan pemberian farmakoterapi dan edukasi. Selain itu keterbatasan alat dan pelaksana SPM yang masih dipegang oleh tenaga kontrak menjadi kendala dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan ini. Untuk itu diupayakan pengadaan alat secara bertahap melalui dana JKN serta memberikan edukasi terhadap pelaksana program di puskesmas. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel berikut :

Tabel 2. 103 Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penderita Hipertensi	-		15.489	24.955	24.955
2	Jumlah Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		8.944	18.489	17.914
Persentase Capaian		-		57,74 %	74,09 %	71,79 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes

Penentuan sasaran yaitu hasil perhitungan jumlah penderita DM kab./kota dibagi penduduk usia 15 tahun keatas. Capaian yaitu jumlah sasaran yang melaksanakan pengukuran gula darah minimal sekali dalam sebulan selama 12 bulan. Capaian pelayanan terhadap penderita DM mengalami kenaikan dari tahun 2018 ke 2019 yaitu 85.71 % menjadi 95.94 % dan pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 95.86%. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan alat dan masih adanya sasaran yang tidak melaksanakan pengukuran gula darah minimal sekali sebulan selama 12 bulan dan pemberian farmakoterapi dan edukasi. Untuk mengatasinya diupayakan pengadaan alat secara bertahap melalui dana JKN serta memberikan edukasi terhadap pelaksana program di puskesmas. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel berikut :

Tabel 2. 104 Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penderita DM	-		1.513	2.289	1.836
2	Jumlah Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		1.324	2.196	1.760
Persentase Capaian		-	76,80%	87,51%	95,94%	95,86%

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

10. Pelayanan Kesehatan Pasien Dengan Gangguan Jiwa Berat

Capaian pelayanan terhadap ODGJB telah mencapai target 100 % pada tahun 2020, artinya seluruh pasien tidak terlantar dan telah tertangani. Adapun masalah yang belum terselesaikan adalah masih ditemukan pasien yang dipasung, serta sebagian besar pasien ODGJB belum memiliki fasilitas BPJS. Fasilitas BPJS akan diperlukan pada saat merujuk pasien dan menerima resep obat yang harus diperoleh dari dokter spesialis kejiwaan. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel berikut :

Tabel 2. 105 Persentase Pelayanan Kesehatan Pasien Dengan Gangguan Jiwa Berat di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ODGJB	-		142	147	199
2	Jumlah Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		135	147	199
Persentase Capaian		-	35,71%	95,07%	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

11. Pelayanan Kesehatan Terduga Penderita TBC

Penentuan jumlah sasaran yaitu dengan menghitung total suspek yang memiliki gejala utama yaitu mengalami batuk berlendir lebih dari 2 minggu. Capaian terhadap sasaran adalah jumlah spesimen dahak yang diperiksa dari total sasaran. Pada tahun 2018, capaian pelayanan kesehatan terhadap penderita TBC mencapai angka 56.72 % dan berhasil mencapai target 100 % di tahun 2019 berkat pelaksanaan gerakan ketuk pintu untuk melaksanakan pengambilan spesimen dahak. Pada tahun 2020 direncanakan pergeseran metode pemeriksaan dengan menambahkan pelaksanaan TCM (Tes Cepat Molekuler) selain tetap melaksanakan pemeriksaan laboratorium terhadap spesimen dahak pasien. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel berikut :

Tabel 2. 106 Persentase Pelayanan Kesehatan Terduga Penderita TBC di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Orang Terduga Penderita TBC	-	252	372	2.386	2.046
2	Jumlah Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	165	211	2.386	2.185
Persentase Capaian		-	65,48%	56,72%	100%	94%

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

12. Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Terinfeksi HIV

Penentuan sasaran yaitu dari total 7 kelompok sasaran dan angka capaian terhadap sasaran diperoleh dengan melaksanakan tes RDT HIV. Capaian pada pelayanan ini telah mencapai target pada tahun 2018 dan berlanjut hingga pada tahun 2019. Penentuan sasaran penderita HIV diperoleh menghitung total 7 kelompok orang-orang yang beresiko terinfeksi HIV, yaitu 1. Ibu hamil, 2. Transgender, 3. Penderita penyakit IMS (Infeksi Menular Seksual), 4. WPS, 5. LSL, 6. Penghuni lembaga, 7. Penasum. Selanjutnya dari total tersebut, akan dilaksanakan tes RDT HIV minimal sebanyak 3 kali. Kendala yang dihadapi adalah pada proses menghitung sasaran pada kelompok penasum dan LSL. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel berikut :

Tabel 2. 107 Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Terinfeksi HIV di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun
----	--------	-------

		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Orang Beresiko Terinfeksi HIV	-	3.176	3.772	3.291	3.424
2	Jumlah Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1.076	3.809	3.283	3,424
Persentase Capaian		-	33,88%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari

Urusan Pekerjaan Umum merupakan pelayanan dalam menyediakan sarana dan prasarana publik primer dalam mendukung kegiatan pembangunan suatu daerah. Pelayanan prasarana dan sarana pada suatu daerah merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian. Pentingnya penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum ini telah disadari oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan secara bertahap dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2020. Pelayanan urusan Pekerjaan Umum difokuskan pada pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air pasal 1 menyatakan bahwa sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Pada pasal yang sama dijelaskan sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah sedangkan daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya. Berikut ini adalah jenis pelayanan dasar Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari di Kabupaten Mamuju Tengah:

Tabel 2. 108 Persentase Penyediaan Kebutuhan Pokok Air minum Sehari-Hari di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Bidang Urusan/ Indikator	Target Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pekerjaan Umum					

1	Persentase penduduk berakses air minum	26,92 %	35,71 %	42,77 %	65,09 %	75,45 %
---	--	---------	---------	---------	---------	---------

Sumber: Dinas PUPR, Tahun 2021

Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami perkembangan yang fluktuatif. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tahun 2016 Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 26% dan meningkat hingga tahun 2019 sebesar 65%. Meskipun mengalami perkembangan namun SPM pemenuhan kebutuhan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari di Kabupaten Mamuju Tengah belum mencapai 100% sehingga masih perlu disempurnakan dan ditingkatkan secara bertahap dalam membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum hingga ke pelosok desa sesuai dengan perkembangan kemampuan daerah.

2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik

Nilai SPM ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah adalah nilai tingkat pelayanan sistem jaringan dan pengolahan air limbah dinyatakan dalam prosentase jumlah masyarakat yang terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota pada tahun akhir SPM terhadap jumlah total penduduk di seluruh kabupaten/kota tersebut.

Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hal ini terkait kerjasama Antar Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan Dinas Kesehatan dalam upaya Pengembangan Prasarana dan sarana penyaluran air limbah domestik untuk meningkatkan Kesehatan Masyarakat, Perilaku Hidup Sehat Dan Kualitas Lingkungan.

Tabel 2. 109 Persentase Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Target Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pekerjaan Umum					
1	Persentase rumah tinggal bersanitasi	22%	37%	47%	69%	72%

Sumber: Dinas PUPR, Tahun 2021

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju tengah, persentase capaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik tahun 2016 sebesar 22 % dan meningkat menjadi 69% di tahun 2019 dan 72% di tahun 2020. Meskipun terjadi peningkatan namun SPM Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik belum mencapai 100%.

Upaya dalam persentase capaian 100% SPM Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Mamuju Tengah memiliki kendala dalam kemampuan daerah memberikan bantuan dana pembangunan sarana dan prasarana dan aksesibilitas ke pelosok desa-desa terpencil masih terbatas.

4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pemerintah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Tabel 2. 110 Persentase Pencapaian Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	N/A	N/A	N/A	3	11
		Jumlah warga negara korban bencana	N/A	N/A	N/A	23	30
		Persentase	N/A	N/A	N/A	13%	37%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi	N/A	N/A	N/A	2	10

	penyediaan rumah layak huni (%)					
	jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten	N/A	N/A	N/A	14	14
	Persentase	N/A	N/A	N/A	14%	17%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel di atas data pada Tahun 2016, dari 2 jenis Standar Pelayanan Minimal yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mamuju Tengah, masih 0 %, hal ini dipengaruhi data yang belum ada dan urusan perumahan masih bergabung dengan Dinas Pekerjaan Umum yang urusan perumahan masih dilaksanakan oleh pejabat eselon IV atau masih ditangani oleh setingkat kepala seksi. Begitupun pada tahun 2017 sampai 2018 dua jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang perumahan masih 0 %, hal ini dipengaruhi karena Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman baru dibentuk menjadi dinas sehingga urusan perumahan ditangani oleh pejabat eselon II, dimasa satu tahun berjalan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman tersebut data-data terkait pemenuhan SPM belum ada atau masih 0%, namun pada tahun 2018 terjadi bencana gempa bumi yang pusatnya di Kota Palu memberikan dampak dan efek ke Kabupaten Mamuju Tengah, dari gempa tersebut sebanyak 84 rumah masyarakat terkena dampak gempa berdasarkan laporan oleh pemerintah desa, namun setelah dilakukan verifikasi lapangan dan verifikasi teknis korban gempa hanya terdapat 30 korban dengan spesifikasi rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan. Sehingga pada tahun 2019 data terkait korban bencana sudah ada dan diintervensi sebanyak 3 unit yang sumber dananya dalam penanganan dan pemenuhan rumah menggunakan dana APBN melalui Dana Alokasi Khusus sebanyak 2 unit di Desa Tappilina dan 1 unit di Desa Batu Parigi melalui program Kementerian Transmigrasi yaitu Pemukiman Transmigrasi di Salundeang. Sehingga total yang diintervensi pada Tahun 2019 sebanyak 3 unit rumah.

Sedangkan pada Tahun 2020 jumlah rumah yang sudah diintervensi sebanyak 11 unit rumah dengan sumber pendanaan dari dana APBN, APBD dan Pihak Swasta/CSR serta partisipasi masyarakat dengan system kolaboratif dari unsur Pemerintah Daerah, Pihak Swasta dan Masyarakat. Adapun dari sepuluh rumah yang diintervensi 1 unit bersumber dari program Kementerian PUPR melalui penyediaa

Rumah Khusus, 5 unit bersumber dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Kegiatan Membangun Rumah Rakyat (MEMBARA) sebanyak 4 unit yang sumber pendanaannya secara kolaboratif.

Sementara untuk penanganan dampak relokasi pembangunan daerah tepatnya pembangunan jembatan kembar yang menghubungkan Desa Topoyo dan Desa Tobadak sekaligus nantinya menjadi icon kota Tobadak yaitu terdapat 14 warga dan dari 14 warga tersebut diintervensi atau penanganannya masyarakat yang terkena dampak relokasi pembangunan diberikan atau penyediaan rumah melalui Program Kementerian PUPR melalui penyediaan Rumah Khusus yang ada di Desa Tobadak tepatnya Rumah Khusus Daerah Tertinggal.

5) Ketenteraman dan Ketertiban

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pemerintah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

1. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Tabel 2. 111 Persentase Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum di Kabupaten Mamuju Tengah 2016-2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga yang memperoleh layanan penegakan hukum perda dan perkada	N/A	7	8	6	2
		Jumlah warga yang melapor	N/A	16	14	12	2
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada (%)	N/A	44%	57%	50%	100%

Sumber: Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

Data pada tahun 2016 data tidak tersedia karena data tersebut masih bergabung dengan bagian pemerintahan sekretaris daerah. Belum tercapainya SPM Trantib

untuk pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum dikerekanakan beberapa hal yakni:

1. Kegiatan yang bersangkutan dengan capaian tersebut belum ada yang dilaksanakan;
2. Kebutuhan SDM PP PNS berkaitan pelayanan terkait belum terpenuhinya penyebabnya belum ada PNS yang mengikuti diklat untuk penegakkan perda;
3. Kurangnya koordinasi antara perangkat daerah terkait dengan trantib;
4. Kurangnya pemahaman tupoksi trantib oleh masyarakat (kerja sama lintas sektor dengan polisi)
5. tidak adanya letak wilayah strategis sehingga perlu adanya perda wilayah strategis;
6. Belum adanya perda penegakkan satpol-pp.

2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Tabel 2. 112 Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi (jiwa)	N/A	2	1	8	24
		Jumlah warga yang terkena bencana (jiwa)	N/A	15	48	93	29
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	N/A	13%	2%	9%	83%

Sumber: Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

Data pada tahun 2016 data tidak tersedia karena data tersebut masih bergabung BPBD. Belum tercapainya SPM Trantib untuk Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dikerenakan beberapa hal yakni:

- 1) Belum ada penetapan wilayah manajemen kebakaran dimana hal ini harus disertai dengan kajian;
- 2) Suplai air yang kurang merupakan masalah pokok (sarana dan prasarana pemadam kebakaran dengan memberi titik-titik posko untuk suplai air hanya 5 titik);
- 3) Kurangnya APD pemadam;
- 4) Kurangnya tenaga terlatih.



3. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Tahun 2016 dan 2018 warga negara yg memperoleh layanan informasi adalah peserta, relawan Destana (Desa Tangguh Bencana) sebanyak 125 orang dan kegiatan Sekolah Tangguh Bencana sebanyak 80 orang dari 2 Sekolah di Tahun 2018 serta TRC BPBD. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2019 hanya Bimtek dan Sosialisasi untuk aparaturnya dan TRC BPBD yang menyebabkan BPBD mengalami kesulitan memperoleh data warga yang memperoleh layanan informasi dan untuk data Daerah Rawan Bencana yang digunakan BPBD adalah data Daerah Rawan Bencana Alam di RPJMD 2016-2021 dimana yang paling dominan dan sering terjadi:

- a. Gempa bumi, diseluruh daerah Kab. Mamuju Tengah meliputi: Kecamatan Pangale; Kecamatan Budong-Budong; Kecamatan Topoyo; Kecamatan Karossa; dan Kecamatan Tobadak
- b) Tsunami, Kawasan rawan bencana Tsunami di Kabupaten Mamuju Tengah terdapat di sepanjang pantai yaitu di Kecamatan Pangale; Kecamatan Budong-Budong; Kecamatan Topoyo; dan Kecamatan Karossa.
- c) Banjir dan Tanah Longsor, Kawasan rawan bencana Banjir dan Tanah Longsor di kabupaten Mamuju Tengah terdapat di:
 - 1) Desa Polo Pangale, Desa Polo Camba, Desa Polo Lereng Kecamatan Pangale;
 - 2) Desa Pasapa, Desa Bojo dan Desa Babana Kecamatan Budong-Budong;
 - 3) Desa Salulebbo, Desa Tabolang, Desa Salupangkang III, Desa Salupangkang IV dan Desa Pangalloang Kecamatan Topoyo;
 - 4) Desa Benggaulu, Desa Sanjango, Desa Karossa, Desa Lara, Desa Lembah Hopo, Desa Sukamaju, Desa Salubiro, Desa Tasokko dan Desa Kambunong Kecamatan Karossa;
 - 5) Desa Tobadak, Desa Batu Parigi, Desa Sulobaja, Desa Saloadak dan Desa Sejati Kecamatan Tobadak.

Dan yang menjadi kendala BPBD dalam memenuhi pencapaian SPM-nya karena masih kurang menyeluruhnya sosialisasi terkait kebencanaan ke masyarakat di mamuju tengah baik itu informasi dan pencegahan serta kesiapsiagaan terhadap bencana.

Tabel 2. 113 Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020

1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi	125	-	205	-	29.964
		Jumlah warga yang ada di kawasan rawan bencana	142.139	-	145.756	-	143.697
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	0,09%	0,00%	0,14%	0,00%	20,85%

Sumber: BPBD Kab Mamuju Tengah, Tahun 2021

3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sama dengan indikator Pelayanan informasi rawan bencana yang menjadi kendala adalah masih sedikitnya warga negara yang mendapatkan pelayanan karena pada tahun 2016 dan 2018 warga negara yg memperoleh layanan informasi adalah peserta, relawan Destana (Desa Tangguh Bencana) sebanyak 125 orang dan kegiatan Sekolah Tangguh Bencana sebanyak 80 orang dari 2 Sekolah di Tahun 2018 serta TRC BPBD. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2019 hanya Bimtek dan Sosialisasi untuk aparaturnya dan TRC BPBD yang menyebabkan BPBD mengalami kesulitan memperoleh data warga yang memperoleh layanan informasi dan yang menjadi kendala BPBD dalam memenuhi pencapaian SPM-nya karena masih kurang menyeluruhnya sosialisasi terkait kebencanaan ke masyarakat di Mamuju Tengah baik itu informasi dan pencegahan serta kesiapsiagaan terhadap bencana.

Tabel 2. 114 Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	jumlah warga negara yang memperoleh layanan	125	-	205	-	29.964
		Jumlah warga negara	142.139	-	145.756	-	143.697
		jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	0,09%	0,00%	0,14%	0,00%	20,85%

Sumber: Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pada tahun 2016, 2017, 2019, 2020 data assesmen TRC BPBD dan dokumentasi PUSDATIN BPBD menggambarkan bahwa kejadian yang paling sering terjadi adalah banjir dan longsor. Sedangkan pada tahun 2018 data bencana mengalami penurunan karena data yang tercatat hanya dominan kejadian gempa bumi yg terjadi di Palu. Dimana yang terdampak hanya beberapa titik di Kabupaten Mamuju Tengah yg mengakibatkan banyak rumah warga roboh.

Tabel 2. 115 Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan	3.007	3.824	694	5.453	198
		Jumlah warga negara yang terkena bencana	3.007	3.631	694	5.453	198
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	100%	105%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

6) Sosial

Pada Tahun 2016, dari 5 jenis Standar Pelayanan Minimal yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah, 2 Jenis Pelayanan mencapai 100% yakni Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti dan Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti. Adapun selanjutnya perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota mencapai angka 99,70%, Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sebesar 27,03%, dan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti masih 0% diakibatkan oleh tidak ditemukannya tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di Kabupaten Mamuju Tengah. Rendahnya capaian rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diakibatkan oleh ketergantungan daerah terhadap bantuan yang berasal dari pusat dan tidak adanya sokongan yang bersumber dari APBD.

Pada Tahun 2017, dari 5 jenis Standar Pelayanan Minimal yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah, 2 (Dua) Jenis Pelayanan mencapai 100% yakni Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti serta Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Adapun Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti menurun drastis dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 19,23% yang diakibatkan oleh meningkatnya angka penyandang disabilitas yang semula hanya sebanyak 10 (sepuluh) Orang menjadi 52 (lima puluh dua) Orang dan tidak adanya sokongan bantuan penyandang disabilitas yang bersumber dari APBD. Seluruh bantuan berasal dari provinsi yang difasilitasi oleh para pendamping di Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti bahkan 0% yang diakibatkan oleh tidak adanya bantuan dari pusat dan daerah, serta rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti masih 0% diakibatkan oleh tidak adanya tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di Kabupaten Mamuju Tengah.

Pada Tahun 2018, dari 5 jenis Standar Pelayanan Minimal yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah, 2 Jenis Pelayanan mencapai 100% yakni Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti dan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota, Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti meningkat menjadi 70,39% karena adanya bantuan yang bersumber dari APBD namun dalam jumlah yang masih sangat kecil, Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti meningkat menjadi 24,10% karena adanya bantuan yang bersumber dari APBN, dan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti masih 0% diakibatkan oleh tidak adanya tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di Kabupaten Mamuju Tengah.

Pada Tahun 2019, dari 5 jenis Standar Pelayanan Minimal yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah, 2 Jenis Pelayanan mencapai 100% yakni Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti dan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota. Ada 1 jenis SPM yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti menjadi 47,91%. Ada 1 jenis SPM yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang menjadi 63,92 yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah penyandang disabilitas dalam jumlah yang cukup besar yang tidak dibarengi dengan besarnya peningkatan bantuan yang tersalurkan. Adapun rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti masih 0% yang diakibatkan oleh tidak adanya tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di Kabupaten Mamuju Tengah.



Tabel 2. 116 Penerima Layanan SPM Urusan Sosial Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	10	10	126	140	32
		Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang berada di luar panti	10	52	179	219	269
		Persentase	100%	19,23%	70,39%	63,92%	11,90%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	44	43	9	14	29
		Jumlah anak terlantar yang berada diluar panti	44	43	9	14	29
		Persentase	100%	100%	100%	100%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	10	0	20	126	243
		jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang berada di luar panti	37	53	83	264	326
		Persentase	27,03%	0%	24,10%	47,91%	74,54%
4	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan	jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh	0	0	0	0	0

	pengemis di luar panti	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti					
		jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang berada di luar panti	0	0	0	0	0
		Persentase	0%	0%	0%	0%	0%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	jumlah warga negara korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	3,711	4.264	1.294	2.976	188
		jumlah warga negara yang menjadi korban bencana di kabupaten/ kota	3.722	4.264	1.294	2.976	188
		Persentase	99,70%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Sosial Kab Mamuju Tengah, Tahun 2021

2.4.2. Layanan Urusan Wajib Dasar

1) Pendidikan

(1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.

Taman Kanak-kanak (TK) adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun. Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB) adalah salah satu bentuk

satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.

Kelompok Bermain (KB) adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun. Taman Penitipan Anak (TPA) adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun. Satuan pendidikan anak usia dini (SPS) adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.

**Tabel 2. 117 Pendidikan Anak Usia Dini Di Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun 2016 – 2020**

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak	3.521	3.838	3.933	4.036	4.360
2	Jumlah anak usia 4 – 6 Tahun	13.079	12.861	15.490	10.116	7.818
3	Pendidikan Anak Usia Dini	27%	30%	25%	40%	56%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(2) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK berguna untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Tabel 2. 118 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 – 2020

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	PAUD					
1	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak	3.521	3.838	3.933	4.036	4.360
2	Jumlah anak usia 4 – 6 Tahun	10.388	10.352	12.905	13.244	18.188
3	APK PAUD	34%	37%	30%	30%	24%
B	SD/MI					
1	Jumlah Siswa Yang Bersekolah Di Jenjang Pendidikan SD/MI	15.211	14.815	14.336	14.193	13.796
2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	15.203	15.187	17.140	17.150	16.053
3	Apk Sd/Mi	100%	98%	84%	83%	86%
C	SMP/Mts					
1	Jumlah Siswa Yang Bersekolah Di Jenjang Pendidikan SMP/Mt	5.393	5.539	5.523	4.904	4.732
2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	9.002	8.885	10.151	10.126	9.406
3	APK SMP/MTs	60%	62%	54%	48%	50%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

APK PAUD Kabupaten Mamuju Tengah selama 5 tahun terakhir berfluktuatif dan capaian pada tahun 2020 sebesar 24 persen. Sedangkan APK SD/MI sederajat pada rentang tahun 2016-2018 terus mengalami penurunan, sementara pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 86 persen. Sementara itu untuk tingkat SMP/MTs sederajat terusdari tahun 2017-2019 terus mengalami penurunan kemudian meningkat di tahun 2020 menjadi 50 persen dari 9.406 jumlah penduduk yang berusia 13-15 tahun.

(3) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni berguna untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintah tentang standar pelayanan minimal bahwa target pelayanan minimal pendidikan dasar sebesar 100 persen, dimana seharusnya tidak ada lagi penduduk usia pendidikan dasar yang tidak mendapatkan pelayanan minimal pada satu lingkup daerah.

Tabel 2. 119 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	PAUD					
1	Jumlah siswa kelompok usia 4-6 tahun	-	2.629	3.765	3.995	4.303
2	Jumlah penduduk kelompok usia 4-6 tahun	10.388	10.352	12.905	14.670	18.188
3	APM PAUD	0%	25%	29%	27%	24%
B	SD/MI					
1	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	13.443	13.016	12.697	12.667	13.796
2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	15.203	15.187	17.140	17.150	16.053
3	Apm sd/mi	88%	86%	74%	74%	86%
C	SMP/mts					
1	Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/mts	5.393	5.350	5.019	4.934	4.732
2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	9.002	8.885	10.151	10.126	9.406
3	APM SMP/MTs	60%	60%	49%	49%	50%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas APM Kabupaten Mamuju Tengah pada tingkat pendidikan SD/MI sederajat mengalami penurunan sejak tahun 2016 yaitu 88,06 persen turun menjadi 86 persen tahun 2017 dan terus turun menjadi 74 persen pada tahun 2018 dan 2019. Kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 86 persen Begitu pula pada tingkat pendidikan SMP/MTS sederajat mengalami penurunan pada rentang tahun 2016-2019 dan kemudian pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 50%.

(4) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah dihitung dengan membandingkan jumlah murid pada kelompok usia tertentu yang bersekolah pada tingkat pendidikan pada tahun tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia

tertentu dikalikan 1.000. APS Pendidikan Dasar adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. APS merupakan indikator dasar yang digunakan penduduk untuk melihat akses penduduk terhadap fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

**Tabel 2. 120 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020**

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	SD/MI					
1	Jumlah murid usia 7-12 thn	13.443	13.016	12.697	12.667	13.796
2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	15.203	15.187	17.140	17.150	16.053
3	APS SD/MI	88,42	85,70	74,08	73,86	85,94
B	SMP/Mts					
1	Jumlah murid usia 13-15 thn	5.393	5.350	5.019	4.934	4.732
2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	9.002	8.885	10.151	10.126	9.406
3	APS SMP/Mt	59,91	60,21	49,44	48,73	50,31

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

APS SD/MI di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2016-2019 terus mengalami penurunan yakni 884,23 per 1000 penduduk pada tahun 2016, 857,04 per 1000 penduduk pada tahun 2017, 740,78 per 1000 penduduk pada tahun 2018 dan 738,60 per 1000 penduduk pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 859,40 per 1000 penduduk. Demikian juga Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs Kabupaten Mamuju Tengah terus mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Mamuju Tengah dalam memberikan kesempatan penduduk usai sekolah untuk mengenyam pendidikan harus lebih mendapat perhatian.

(5) Angka Kelulusan (AL)

a) Angka Kelulusan SD/MI

Angka kelulusan merupakan presentase penduduk yang menamatkan pendidikan pada suatu jenjang pendidikan tertentu sesuai kelompok usia referensi pada jenjang

pendidikan tersebut. Angka kelulusan ditunjukkan dengan perbandingan antara jumlah siswa yang lulus dengan siswa pada jenjang terakhir. Untuk SD angka kelulusan didapatkan dari perbandingan jumlah lulusan dengan jumlah siswa kelas 6. Angka kelulusan Mamuju Tengah pada tahun 2017 melebihi 100 persen oleh karena ada peserta didik yang datang di wilayah kerja dinas pendidikan mengikuti ujian pada tingkatan SD/MI. Data perkembangan angka kelulusan SD/MI Di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 121 Perkembangan Angka Kelulusan (AL) SD/MI Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	2.567	2.552	2.417	2.323	2.101
2	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI tahun sebelumnya	2.635	2.450	2.492	2.413	2.323
3	Angka Kelulusan	97,42	104,16	96,99	96,27	90,44

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

Angka kelulusan Mamuju Tengah pada tahun 2016 dan 2017 melebihi 100 persen oleh karena ada peserta didik yang datang di wilayah kerja dinas pendidikan mengikuti ujian pada tingkatan SD/MI.

b) Angka Kelulusan SMP/ MTs

Angka kelulusan SMP/MTs ditunjukkan dengan perbandingan antara jumlah siswa yang lulus dengan siswa pada jenjang terakhir yang didapatkan dari perbandingan jumlah lulusan dengan jumlah siswa kelas 3 atau kelas 9

Tabel 2. 122 Perkembangan Angka Kelulusan SMP/Mts Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya	1.587	1.766	1.831	1.696	1.697
2	jumlah siswa pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya	1.587	1.831	1.885	1.696	1.819
3	Angka Kelulusam	100	96,45	97,13	100	93,29

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(6) Angka Melanjutkan (AM)

a) Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs

Angka melanjutkan menunjukkan persentase lulusan yang melanjutkan ke pendidikan tinggi. Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs membandingkan jumlah siswa yang terdaftar pada tingkat I SMP/Mts dengan jumlah siswa lulusan SD/MI tahun ajaran sebelumnya.

Tabel 2. 123 Perkembangan Angka Melanjutkan dari SD/MI SMP/MTs Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	jumlah siswa tingkat I pada jenjang SMP/MTs	1.789	1.857	1.545	1.441	1.602
2	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya	2.567	2.552	2.417	2.323	1.465
3	AM SD/MI ke SMP/Mt	69,69	72,76	63,92	62,03	10,93

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

Perlu dicermati bahwa angka melanjutkan rendah menunjukkan bahwa ada siswa lulusan SD/MI yang melanjutkan pendidikan diluar kabupaten Mamuju Tengah dan atau jenjang pendidikan SMP/MTs tidak mampu menampung lulusan SD/MI serta adanya putus sekolah. Demikian juga ketika angka melanjutkan lebih dari 100 persen berarti bahwa ada lulusan SD/MI dari luar yang melanjutkan pendidikan di kabupaten Mamuju Tengah.

(7) Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk sekolah tingkat pendidikan Dasar di Kabupaten Mamuju Tengah disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 124 Ketersediaan Sekolah Dan Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Tahun	Pendidikan Dasar		
		Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 7-12 thn	Rasio
1	2016	144	24.205	59,49

2	2017	145	24.072	60,23
3	2018	148	27.291	54,23
4	2019	150	27.276	54,99
5	2020	150	25.459	58,92

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

Dari data di atas terlihat bahwa daya tampung gedung sekolah di Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2020 untuk tingkat SD/MI sebesar 58,92 dari jumlah penduduk usia 7-12 tahun yakni 25.459 orang.

(8) Rasio Guru/ Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Berikut gambaran rasio guru terhadap murid berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah:

**Tabel 2. 125 Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar
Kabupaten Mamuju Tengah Di Mamuju Tngah Tahun 2016-2020**

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Guru (SD/MI + SMP/Mts)	584	653	653	880	880
2	Jumlah Murid (SD/MI + SMP/Mts)	20.604	20.354	19.859	19.097	18.528
3	Rasio Guru/murid Sekolah Pendidikan Dasar	283,44	320,82	328,81	460,81	474,96

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(9) Rasio Guru/ Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar

Rasio guru siswa per kelas merupakan perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan dasar. Rasio guru siswa yang terlalu tinggi akan mengurangi efektifitas pembelajaran, sebaliknya rasio yang terlalu rendah menunjukkan bahwa proses belajar mengajar tidak efisien karena 1 orang guru mengajar sedikit siswa.

**Tabel 2. 126 Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar
Kabupaten Mamuju Tengah Di Mamuju Tengah Tahun 2016-2020**

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas	309	336	336	376	376
2	Jumlah murid Pendidikan dasar	15.211	14.815	14.336	14.193	13.796
3	Rasio Guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	203,14	226,79	234,38	264,92	272,54

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(10) Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar

Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar adalah banyaknya murid kelas 1 yang berhasil menamatkan pendidikannya di Sekolah Dasar pada tahun tertentu terhadap jumlah penduduk yang berusia 12 tahun, yang dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk memonitor cakupan pendidikan dan kemajuan murid untuk menamatkan pendidikan di Sekolah Dasar tanpa memperhatikan apakah pernah mengulang di suatu kelas.

Tabel 2. 127 Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar Di Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Tahun	Banyaknya Lulusan SD	Banyaknya Penduduk usia 12 Tahun	Proporsi
1	2016	3421	1674	204 %
2	2017	3608	1673	216%
3	2018	3363	1596	211%
4	2019	3328	3129	106%
5	2020	2101	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(11) Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan, dan Laki-Laki

Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15-24 tahun adalah perbandingan jumlah penduduk berusia 15-24 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dengan jumlah penduduk usia 15-24 tahun. Indikator ini merefleksikan outcome pendidikan dasar sejak 10 tahun terakhir sebagai ukuran efektifnya sistem pendidikan dasar. Indikator ini kerap dilihat sebagai proksi untuk mengukur kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi. Pembagian berdasarkan jenis kelamin merupakan indikator ini menunjukkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan dan merupakan indikator kunci pemberdayaan perempuan di masyarakat.

Tabel 2. 128 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan, dan Laki-Laki Di Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Jenis Kelamin	Huruf Latin	Huruf Lainnya
1	Laki-Laki	94,37 %	19,73%
2	Perempuan	94,59%	21,90%
3	AMH Kabupaten Mamuju Tengah	94,48	27,78

Sumber: BPS, Mamuju Tengah Dalam Angka, Tahun 2021

(12) Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/ D-IV

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV / menunjukkan persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berijazah kualifikasi S1/D-IV.

Tabel 2. 129 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/ D-IV di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV	580	647	647	820	317
2	Jumlah Guru SD/MI, SMP/MT	584	653	653	880	880
3	Proporsi Guru Kualifikasi S1/DIV	99%	99%	99%	93%	36%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

2) Kesehatan

(1) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pengaruh budaya yang membuat ibu ingin melahirkan bukan pada fasilitas kesehatan, sehingga kemungkinan besar pertolongan persalinan dilakukan oleh dukun beranak. Intervensi terhadap ibu hamil, agar rutin melaksanakan pemeriksaan kesehatan diyakini dapat menurunkan angka kematian bayi. Data Dinas Kesehatan selama lima tahun menunjukkan angka kematian bayi yang berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2016 angka kematian bayi sebesar 6 jiwa per 1000 KH, kemudian meningkat menjadi 9 jiwa per 1000 KH, kemudian menurun drastis di tahun 2019 menjadi 3 jiwa per 1000 KH, dan kembali meningkat menjadi 14 jiwa per 100 KH. Data angka kematian bayi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 130 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Tahun	AKB
1	2016	6 / 1000 KH
2	2017	9 / 1000 KH
3	2018	7 / 1000 KH
4	2019	3/1000 KH
5	2020	14/1000KH

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(2) Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan selama lima tahun terakhir Angka kelangsungan hidup bayi mengalami pola yang berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah kelahiran bayi sebesar 2.334 jiwa dengan jumlah kematian bayi sebanyak 14 jiwa. Kemudian meningkat di tahun 2017 sebesar 2.495 KH yang diiringi dengan peningkatan jumlah kematian bayi sebanyak 23 jiwa. Di tahun 2018 dan tahun 2019 penanganan kelangsungan hidup bayi dapat ditingkatkan dengan melihat jumlah kematian bayi pada tahun 2019 senyak 7 jiwa. Akan tetapi di tahun 2020 jumlah kematian bayi meningkat drastis sebanyak 36 jiwa dari 2.592 KH. Data kelangsungan hidup bayi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 131 Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	tahun	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu	Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu	Angka kelangsungan hidup bayi
1	2016	14	2.334	5
2	2017	23	2.495	8
3	2018	17	2.507	6
4	2019	7	2.507	2
5	2020	36	2.592	13

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(3) Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup

Kematian balita biasanya disebabkan oleh penyakit - penyakit tertentu. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Angka Kematian Balita menunjukan pola yang berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2016 angka kematian balita sebesar 1 jiwa per 1000, kemudian menurun ditahun 2017 menjadi 0 jiwa per 1000 KH. Pada tahun 2017 jumlah balita yang meninggal sebanyak 1 orang. Kemudian kembali meningkat pada tahun 2020 sebesar 2 jiwa per 1000 KH. Pada tahun ini jumlah kematian bayi sebanyak 5 jiwa. Data angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 132 Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Tahun	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup
1	2016	1 / 1000 KH
2	2017	0 / 1000 KH
3	2018	1 / 1000 KH
4	2019	0/ 1000 KH
5	2020	2/ 1000 KH

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(4) Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa pada tahun 2017 merupakan tahun dengan tingkat Kematian Neonatal paling tinggi yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Dimana pada tahun ini terdapat 42 kasus kematian bayi dibawah umur satu bulan atau sebesar 17/1000 KH. Walaupun sempat menurun pada tahun 2018 dan 2019 menjadi 7/1000 KH pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 12/1000 KH, yang artinya dari 1000 kelahiran ada 12 kasus kematian bayi di bawah umur 1 bulan. Kesehatan ibu pada saat hamil, perawatan ketika hamil dan pada saat bersalin menjadi faktor yang mempengaruhi indikator ini. Selain itu, keterlambatan dalam mencapai fasilitas kesehatan serta kurang lengkapnya alkes juga menjadi penyebab angka kematian neonatal. Angka kematian neonatal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 133 Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten mamuju tengah Tahun 2016-2020

No	Tahun	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup
1	2016	12 / 1000 KH
2	2017	17 / 1000 KH
3	2018	7/ 1000 KH
4	2019	7/ 1000 KH
5	2020	12/1000 KH

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(5) Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada angka kematian ibu dari 170/100.000 KH ditahun 2019 meningkat menjadi 347/100.000 KH di tahun 2020. Jumlah kematian ibu pada tahun ini sebanyak 9 kasus. Adapun faktor yang menyebabkan tingginya kasus kematian ibu pada tahun ini yaitu masih adanya ibu hamil yang enggan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang mempengaruhi kesehatan ibu pada saat hamil, perawatan ketika hamil dan pada saat bersalin. Selain itu, keterlambatan dalam mencapai fasilitas kesehatan serta kurang lengkapnya alkes juga menjadi penyebab angka kematian ibu yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Data angka kematian ibu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 134 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Mamuju tengah Tahun 2016-2020

No	Tahun	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup
1	2016	129 / 100.000 KH
2	2017	240 / 100.000 KH
3	2018	239 / 100.000 KH

4	2019	160 / 100.000 KH
5	2020	347 / 100.000 KH

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(6) Rasio Posyandu per Satuan Balita

Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Jumlah posyandu di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2018 sebanyak 162 unit dengan jumlah 9.807 balita, dengan demikian rasio posyandu terhadap balita 1:17. Hal ini menunjukan setiap 1 posyandu melayani 17 balita. Kemudian pada tahun 2019 jumlah posyandu meningkat menjadi 181 unit atau meningkat sebesar 11,7 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 jumlah posyandu menurun menjadi 177 unit yang diikuti dengan jumlah penurunan balita sebesar 22 persen dengan rasio posyandu terhadap balita sebesar 1:19 yang artinya setiap 1 posyandu melayani 19 balita. Data rasio posyandu dan balita dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 135 Rasio Posyandu dan Balita di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah posyandu	Jumlah Balita	Rasio Posyandu Per
				Satuan Balita
1	2016	143	9.571	15
2	2017	157	9.328	17
3	2018	162	9.807	17
4	2019	181	11.768	15
5	2020	177	9.167	19

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(7) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pusut per Satuan Penduduk

Puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu (Pustu) merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Rasio Puskesmas, poliklinik dan pustu bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan tersebut dalam memenuhi pelayanan kepada penduduk, dengan demikian pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan menunjukan bahwa selama lima tahun terakhir jumlah puskesmas, poliklinik dan pustu sebanyak 48 unit

dengan rasio pada tahun 2019 sebesar 0,48 dan menurun di tahun 2020 sebesar 0,44. Data rasio puskesmas, poliklinik dan pustu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 136 Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Per Satuan Penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Thn	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	Jumlah Penduduk	Rasio Puskesmas, Pustu per satuan penduduk
1	2016	48	121.384	0,44
2	2017	48	127.601	0,40
3	2018	48	145.756	0,40
4	2019	48	134.028	0,48
5	2020	48	135.280	0,44

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(8) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 jumlah penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Data dari Dinas Kesehatan terhitung konstan di angka 0,01. Hal ini terjadi karena jumlah rumah sakit yang tidak bertambah selama lima tahun terakhir dan peningkatan jumlah pertumbuhan penduduk yang tidak terlalu signifikan. Data rasio rumah sakit di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 137 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Jumlah Rumah Sakit	Jumlah Penduduk	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
1	2016	1	121.384	0,01
2	2017	1	124.380	0,01
3	2018	1	145.756	0,01
4	2019	1	134.028	0,01
5	2020	1	135.280	0,01

Sumber: Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah 2021

(9) Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Pada tahun 2016-2018 jumlah dokter yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah konstan sebesar 18 dokter, kemudian meningkat pada tahun menjadi 19 dokter dengan rasio 0,08 per satuan jumlah penduduk. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah dokter sebanyak 9 dokter dengan peningkatan rasio dokter sebesar 0,19 per satuan jumlah penduduk. Data rasio dokter per satuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 138 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017 - 2020

No	Tahun	Jumlah Dokter	Jumlah Penduduk	Rasio Dokter Per satuan penduduk
1	2016	18	121.384	0,12
2	2017	18	127.601	0,12
3	2018	18	145.756	0,09
4	2019	19	134.028	0,08
5	2020	26	135.280	0,19

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(10) Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Rasio tenaga medis per satuan penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dan cakupan pelayanan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk. Berdasarkan data Dinas Kesehatan menunjukkan rasio tenaga medis yang mengalami pola yang berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2017 rasio tenaga medis sebesar 1,14 per satuan penduduk dengan jumlah 146 tenaga medis, kemudian menurun di tahun 2018 menjadi 1,06 atau menurun sebesar 7 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 1,37 per satuan penduduk hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah tenaga medis menjadi 184 orang dengan jumlah penduduk sebesar 134.028 jiwa. Pada tahun 2020 rasio tenaga medis menurun menjadi 1,32 atau sebesar 0,05 persen dari tahun sebelumnya sebesar 5 persen disebabkan karena adanya penurunan pada jumlah medis menjadi 179 orang sedangkan untuk jumlah penduduk mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan sebanyak 1.252 jiwa. Data rasio tenaga medis per satuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 139 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Jumlah Tenaga Medis	Jumlah Penduduk	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk
1	2016	129	121.384	1,06
2	2017	146	127.601	1,14
3	2018	155	145.756	1,06
4	2019	184	134.028	1,37
5	2020	179	135.280	1,32

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(11) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan menunjukkan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani cenderung menurun setiap tahunnya. Pencapaian tertinggi yaitu pada tahun 2019 dengan jumlah cakupan penanganan sebesar 96 persen, kemudian terus menurun

sampai tahun 2020 menjadi 71%, dimana dari 669 jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan hanya sebesar 472 ibu yang mendapatkan penanganan defenitif. Penurunan di tiga tahun terakhir ini menandakan bahwa ada kejadian komplikasi yang tidak dapat ditangani sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya kematian ibu atau bayi. Indikator lain dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan ibu hamil serta budaya yang menyebabkan ibu hamil tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang lengkap. Data cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 140 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
1	2016	95%
2	2017	96%
3	2018	94%
4	2019	78%
5	2020	71%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(12) Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan menunjukkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mengalami pola yang berfluktuatif namun cenderung menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2016 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan sebesar 92 persen, kemudian menurun di tahun 2017 sebesar 82 persen dan kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi 88 persen. Sedangkan tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 84 persen. Agar persalinan minim resiko, maka setiap ibu hamil dan bersalin wajib ditangani oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan. Hal ini berarti di seluruh puskesmas telah tersedia tenaga kesehatan yang dimaksud, tinggal bagaimana memberikan sosialisasi bagi ibu hamil agar mau melakukan persalinan di fasilitas kesehatan yang ada. Namun faktor pengetahuan dan ekonomi yang lemah serta fasilitas yang masih terbatas menyebabkan masih ada yang tidak bersalin di fasilitas kesehatan. Data cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 141 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020



No	Tahun	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
1	2016	92%
2	2017	82%
3	2018	88%
4	2019	85%
5	2020	84%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(13) Cakupan Desa/ Kelurahan UCI (*Universal Child Immunization*)

UCI (*Universal Child Immunization*) adalah kondisi tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0,11 bulan), ibu hamil, WUS, dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 Dosis BCG, 3 Dosis DPT, 4 Dosis Polia, 4 Dosis Hepatitis B, 1 Dosis Campak. Ibu hamil dan WUS meliputi 2 Dosis IT. Anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 Dosis DT, 1 Dosis Campak dan 2 Dosis IT.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan menunjukkan cakupan desa/kelurahan UCI yang berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2016 cakupan desa/kelurahan UCI sebesar 76 persen, kemudian di tahun 2017 meningkat menjadi 96 persen dan menurun di tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 menjadi 78 persen dan kembali meningkat dengan penambahan yang signifikan menjadi 114 persen atau meningkat sebesar 67,6 persen dari tahun sebelumnya. Data cakupan desa/kelurahan UCI dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 142 Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Cakupan Desa / Kelurahan UCI
1	2016	76%
2	2017	96%
3	2018	78%
4	2019	68%
5	2020	114%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(14) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan menunjukkan selama 5 tahun berturut-turut, cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan, selalu mencapai 100%. Data cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 143 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
1	2016	100%
2	2017	100%
3	2018	100%
4	2019	100%
5	2020	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(15) Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan menunjukkan selama 5 tahun proporsi penduduk dengan asupan kalori < 2.100 Kkal/Kapita/Hari sebesar 0 persen. Data proporsi penduduk dengan asupan kalori dibawah tangga konsumsi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 144 Proporsi Penduduk Dengan Asuhan Kalori Di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar Yang Digunakan Indonesia 2.100 Kkal/Kapita/Hari) di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020

Tahun	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)
2016	0%
2017	0%
2018	0%
2019	0%
2020	0%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(16) Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak

Persentase Imunisasi Campak adalah perbandingan antara banyaknya anak berumur 1 tahun yang telah menerima minimal satu kali imunisasi campak terhadap jumlah anak

berumur 1 tahun, dan dinyatakan dalam persentase. Anak berumur usia 1 tahun adalah anak usia 12-23 bulan. Berdasarkan data yang ada pada Dinas Kesehatan menunjukkan persentase anak usia 1 tahun yang mendapatkan imunisasi campak menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan dari 94 persen di tahun 2019 menjadi 36 persen. Data ini menunjukkan dari 7.196 jumlah anak usia 1 tahun hanya sebesar 2.616 anak yang mendapatkan imunisasi campak. Cakupan imunisasi campak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ketersediaan tenaga Kesehatan berkompeten, kualitas system pelayanan Kesehatan anak, partisipasi masyarakat di suatu wilayah dan adanya virus Covid-19 merupakan faktor yang paling besar mempengaruhi penurunan cakupan anak usia 1 tahun yang mendapatkan pelayanan imunisasi campak. Data persentase anak usia 1 tahun yang Diimunisasi campak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 145 Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak
1	2016	103%
2	2017	107%
3	2018	94%
4	2019	94%
5	2020	36%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021

(17) Non Polio AFP rate per 1000.000 Penduduk

Non polio AFP adalah kasus lumpuh layuh akut yang diduga kasus polio sampai dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus polio. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak ditemukan kasus Non Polio AFP di Kabupaten Mamuju Tengah. Data non folio AFP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 146 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk
1	2016	0 / 100000
2	2017	0 / 100000
3	2018	0 / 100000
4	2019	0 / 100000
5	2020	0 / 100000

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021

(18) Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

Pneumonia adalah penyakit yang memang sering menyerang balita. Penanganan yang terlambat dan tidak tepat dapat menyebabkan kematian pada balita. Lemahnya sosialisasi dan ketidaktahuan menyebabkan masih adanya balita penderita pneumonia yang tidak ditangani. Data cakupan balita pneumonia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 147 Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Cakupan balita pneumonia yang ditangani
1	2016	3%
2	2017	10%
3	2018	12%
4	2019	10%
5	2020	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021

(19) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Penderita TBC BTA yang tidak memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan menjadikan dirinya tidak akan mendapatkan pengobatan yang tepat. Hal inilah yang mempengaruhi cakupan terhadap penanganan penderita TBC BTA. Data menunjukkan pada tahun 2018 dan 2019 cakupan indikator ini telah mencapai angka 100 %. Diharapkan untuk tahun - tahun berikutnya hal-hal ini tetap bertahan mengingat beratnya pengobatan terhadap pasien penderita TBC BTA. Data cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 148 Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
1	2016	3 %
2	2017	10 %
3	2018	12%
4	2019	10%
5	2020	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021

(20) Tingkat Prevelensi Tuberkulosis (per 1000.000 Penduduk)

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan menunjukkan Tingkat prevalensi TBC mengalami kenaikan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir dan penurunan di tahun 2020. Pada tahun 2020 tingkat pravelensi turbekulosis mencapai 107 per 100.000 penduduk (145 orang) dari total penduduk sebanyak 135.280 jiwa. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya kasus baru yang telah ditemukan yang mana karena ketidaktahuan pasien sehingga tidak memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan. Data tingkat pravelensi tuberkulosis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 149 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
1	2016	27 / 100.000
2	2017	51 / 100.000
3	2018	145 / 100.000
4	2019	187 / 100.000
5	2020	107/ 100.000

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021

(21) Tingkat Kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan menunjukkan tingkat kematian karena tuberkulosis cenderung menurun setiap tahunnya walaupun sempat meningkat drastis di tahun 2017 sebesar 92,3 persen dari tahun sebelumnya. Pada akhir tahun 2020 tercatat tidak ada kasus kematian karena tuberkulosis. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan pemerintah daerah dalam menekan jumlah kematian karena Tuberkulosis. Data tingkat kematian karena tuberkulosis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 150 Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
1	2016	1 / 100000
2	2017	13 / 100000
3	2018	10 / 100000
4	2019	8/ 100000
5	2020	0 / 100000

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021

(22) Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS

Pengobatan dengan strategi DOTS (Directly Observed Treatment, Short-course), adalah strategi pengawasan langsung pengobatan jangka pendek. Namun berdasarkan data dari Dinas Kesehatan selama lima tahun terakhir program DOTS belum dilakukan hal ini dilihat dari capaian kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS sebesar 0 persen. Data proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 151 Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS
1	2015	0%
2	2016	0%
3	2017	0%
4	2018	0%
5	2019	0%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021

(23) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Penemuan kasus DBD yang tidak disertai dengan penanganan yang cepat dan tepat dapat berakibat fatal, namun penanganannya di 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan progres adanya peningkatan cakupan dimana pada tahun 2020 seluruh pasien mendapatkan penanganan berupa tindakan pengobatan sesuai standar. Hal ini disebabkan oleh tingkat kesadaran yang mulai baik dan keaktifan pengelola program dalam mendeteksi dan menangani kasus DBD. Diharapkan tahun - tahun berikutnya cakupan bisa lebih ditingkatkan lagi. Data cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 152 Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
1	2016	99%
2	2017	100%
3	2018	100%
4	2019	100%
5	2020	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021

(24) Penderita Diare yang Ditangani

Penanganan penderita diare menunjukkan peningkatan yang sangat baik dari tahun ke tahun, hal ini tergambar pada tabel yang tersaji. Mengingat diare merupakan penyakit yang paling sering terjadi pada anak, sehingga penanganannya pun perlu dilaksanakan dengan baik. Lingkungan yang sehat diyakini dapat menurunkan secara signifikan angka kejadian diare pada suatu wilayah. Sampai pada tahun 2020 jumlah penderita diare yang dapat ditangani sebesar 100 persen. Data penderita diare yang di tangani dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 153 Penderita diare yang ditangani Di Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun 2016 - 2020**

No	Tahun	Penderita diare yang ditangani
1	2016	69,8 %
2	2017	83%
3	2018	98,8 %
4	2019	100%
5	2020	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021

(25) Angka Kejadian Malaria

Malaria adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk dari manusia dan hewan lain yang disebabkan oleh protozoa parasit (sekelompok mikroorganisme bersel tunggal) dalam tipe Plasmodium. Malaria menyebabkan gejala yang biasanya termasuk demam, kelelahan, muntah, dan sakit kepala. Penanganan malaria terbilang baik, terlihat pada tabel yang memperlihatkan penurunan angka kejadian tiap tahunnya. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan menunjukan angka kejadian malaria di Kabupaten Mamuju Tengah yang menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2017 merupakan angka kejadian malaria tertinggi dengan rasio 3,13 per 100.000 penduduk, kemudian menurun di tahun 2018 menjadi 2,06 per 100.000 penduduk dan terus menurun sampai pada tahun 2020 menjadi 0,74 per 100.000 penduduk. Data angka kejadian malarian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 154 Angka Kejadian Malaria Di Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun 2016 - 2020**

No	Tahun	Angka kejadian Malaria
----	-------	------------------------



1	2016	1,65
2	2017	3,13
3	2018	2,06
4	2019	0,75
5	2020	0,74

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021

(26) Tingkat Kematian akibat Malaria

Pelaksanaan skrining, upaya promotif, preventif dan penanganan pasien malaria terbukti berhasil sesuai dengan data yang tersaji, yang menunjukkan tidak adanya kematian akibat malaria di 5 (lima) tahun terakhir. Data kematian malarian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 155 Tingkat Kematian Akibat Malaria Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Tingkat kematian akibat malaria
1	2016	0
2	2017	0
3	2018	0
4	2019	0
5	2020	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021

(27) Proporsi Anak Balita yang Tidur dengan Kelambu Berinsektisida

Penggunaan kelambu adalah upaya pencegahan terhadap angka kejadian penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk seperti DBD dan Malaria. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan menunjukan selama 5 (lima) tahun terakhir proporsi anak balita yang tidur menggunakan kelambu berinsektisida sebesar 0 persen. Data proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 156 Proporsi Anak Balita Yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektisida Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida
1	2016	0 %
2	2017	0 %
3	2018	0 %
4	2019	0 %
5	2020	0 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021

(28) Proporsi Anak Balita dengan Demam yang Diobati dengan Obat Anti Malaria yang Tepat

Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sporozoa genus plasmodium. Terapi yang sering digunakan adalah ACT (artemisinin combination therapy) yang berguna untuk membunuh semua stadium parasit yang ada di dalam tubuh. Namun data menunjukkan proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan anti malaria yang tepat pada angka nol. Data proporsi anak balita yang diobati dengan obat anti malaria dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 157 Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat
1	2015	0
2	2016	0
3	2017	0
4	2018	0
5	2019	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021

(29) Prevalensi HIV/AIDS (%) dari Total Populasi

Prevalensi HIV / AIDS sejak tahun 2016 hingga 2020 prevalensinya berada pada angka 0,00 %. Penanganan yang cepat dan tepat pada terduga penderita diharapkan dapat menurunkan prevalensinya ke angka 0 % di tahun berikutnya, yang mana program tersebut telah berhasil pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Data prevalensi HIV/AIDS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 158 Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi
1	2016	0
2	2017	0
3	2018	0
4	2019	0
5	2020	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021

(30) Penggunaan Kondom pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan menunjukan selama 5 (lima) tahun terakhir penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi pada usia 15-24 tahun sebesar

0. Data penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 159 Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir
1	2016	0
2	2017	0
3	2018	0
4	2019	0
5	2020	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021

(31) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin pada 2 (dua) tahun terakhir mencapai angka 100 %, dibanding pada 2016 dan 2017 yang jauh dari target. Ini membuktikan bahwa pelayanan kepada masyarakat miskin menjadi semakin baik dari tahun ke tahun.

Tabel 2. 160 Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
1	2016	0
2	2017	0
3	2018	0
4	2019	2%
5	2020	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021

(32) Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi dipengaruhi oleh jumlah bayi yang datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar oleh petugas kesehatan. Pelayanan yang baik akan mendorong masyarakat menjadi rutin dan aktif memeriksakan kesehatan bayi mereka. Berdasarkan data yang ada menunjukkan cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami pola yang fluktuatif setiap tahunnya. Walaupun sempat mengalami penurunan di tahun 2019

tetapi angka capaian tersebut masih diatas target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 94 persen. Pada tahun 2020 cakupan kunjungan bayi mencapai 100 persen yang artinya dari total kunjungan 2.591 bayi secara keseluruhan telah mendapatkan pelayanan Kesehatan yang sesuai standar. Data cakupan bayi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 161 Cakupan Kunjungan Bayi Di Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun 2016 - 2020**

No	Tahun	Cakupan kunjungan bayi
1	2016	120%
2	2017	80%
3	2018	103%
4	2019	98%
5	2020	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021

(33) Cakupan Puskesmas

Cakupan puskesmas adalah sebagian dari manfaat kesehatan potensial, yang lebih kepada sistem kesehatan yang sesungguhnya diterima dalam pelayanan sesuai dengan kapasitas. Berdasarkan data yang ada menunjukan cakupan puskesmas di Kabupaten Mamuju Tengah stagnan di angka 200 persen. Dimana dari total 5 kecamatan terdapat 10 puskesmas yang tersedia. Data cakupan puskesmas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 162 Cakupan Puskesmas Di Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun 2016 - 2020**

No.	Tahun	Cakupan puskesmas
1	2015	200%
2	2016	200%
3	2017	200%
4	2018	200%
5	2019	220%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021

(34) Cakupan Pembantu Puskesmas

Cakupan pembantu puskesmas adalah sebagian dari manfaat kesehatan potensial, yang lebih kepada sistem kesehatan yang sesungguhnya diterima dalam pelayanan

sesuai dengan kapasitas. Pada tahun 2019 data cakupan puskesmas pembantu sebanyak 83 persen dari total 54 desa kemudian menurun di tahun 2020 menjadi 77 persen. Data cakupan pembantu puskesmas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 163 Cakupan Pembantu Puskesmas Di Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun 2016 - 2020**

No	Tahun	Cakupan Puskesmas
1	2016	84%
2	2017	84%
3	2018	81%
4	2019	83%
5	2020	77%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021

(35) Cakupan Kunjungan Ibu Hami K4

Cakupan pelayanan ibu hamil K4 terdiri atas minimal 1 kali kontak pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga. Data menunjukkan bahwa cakupan indikator ini dari tahun ke tahun belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini disebabkan faktor ekonomi yang lemah dan pengetahuan mereka yang terbatas akan pentingnya mendapatkan pemeriksaan kesehatan ibu hamil yang lengkap hingga usia kehamilan 32 minggu. Pada tahun cakupan ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 sebesar 79 persen menurun 18,6 persen dari tahun sebelumnya. Data cakupan kunjungan ibu hamil dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 164 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Di Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun 2016 - 2020**

No	Tahun	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4
1	2016	80%
2	2017	75%
3	2018	62%
4	2019	97%
5	2020	79%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021

(36) Cakupan Pelayanan Nifas

Cakupan pelayanan nifas juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Faktor yang menjadi penyebab adalah pengetahuan ibu serta tingkat kesadaran dan keinginan untuk mendapatkan pemeriksaan pada fasilitas kesehatan yang masih rendah. Hal ini diperkuat pula dengan ekonomi keluarga yang lemah. Berdasarkan data yang ada menunjukkan pada tahun 2020 cakupan pelayanan nifas sebesar 78 persen, dimana dari total ibu nifas sebanyak 3.173 orang hanya sebesar 2.467 ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar. Data cakupan pelayanan nifas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 165 Cakupan Pelayanan Nifas Di Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun 2016 - 2020**

No	Tahun	Cakupan Pelayanan Nifas
1	2016	92%
2	2017	100%
3	2018	78%
4	2019	86%
5	2020	78%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021

(37) Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani

Berdasarkan data dari Dinas kesehatan selama lima tahun terakhir cakupan neonatus berfluktuatif namun cenderung menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2019 terjadi penurunan yang sangat signifikan dari 42 persen di tahun 2018 menurun menjadi 6 persen. Angka 6 persen menunjukkan jumlah neonates yang di tangani sebesar 138 kasus dari total 2.489 kasus yang ada. Rendahnya cakupan indikator ini disebabkan oleh masih adanya ibu yang melahirkan bukan di fasilitas kesehatan, sehingga komplikasi yang terjadi tidak ditangani oleh petugas kesehatan. Data cakupan Neonatus dengan komplikasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 166 Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani
Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020**



No	Tahun	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani
1	2016	39%
2	2017	45%
3	2018	42%
4	2019	6%
5	2020	36%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021

(38) Cakupan Pelayanan Anak Balita

Beradsarkan data dari Dinas Kesehatan menunjukan cakupan pelayanan anak balita yang cenderung meningkat setiap tahunnya, walaupun sempat menurun di tahun 2020 sebesar 18,4 persen dari tahun sebelumnya. Angka capaian ini masih sangat rendah dibandingkan dengan target sebesar 100 persen yang telah ditetapkan. Rendahnya capaian indikator ini disebabkan oleh rendahnya partisipasi orang tua dalam rangka memeriksakan balita mereka di fasilitas kesehatan. Kedepannya Perlu dilakukan upaya sosialisasi yang lebih baik lagi dan juga advokasi ke desa untuk lebih memaksimalkan fungsi posyandu, sehingga diharapkan cakupan indikator ini dapat meningkat pada tahun - tahun berikutnya. Data cakupan pelaynan anak balita dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 167 Cakupan Pelayanan Anak Balita Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Cakupan Pelayanan Anak Balita
1	2016	53%
2	2017	59%
3	2018	63%
4	2019	76%
5	2020	62%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021

(39) Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin

Dalam rangka upaya penurunan jumlah bayi dengan gizi kuang dan gizi buruk, maka pemberian makanan pendamping ASI untuk keluarga miskin ini sangatlah penting. Tabel menunjukkan bahwa seluruh sasaran mendapatkan MP ASI ini sehingga cakupan indikator nya mencapai 100 %.

Tabel 2. 168 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin
1	2016	-
2	2017	-
3	2018	-
4	2019	-
5	2020	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021

(40) Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Penjaringan kesehatan merupakan salah satu bentuk dari pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mendeteksi dini siswa yang memiliki masalah kesehatan agar segera mendapatkan penanganan sedini mungkin. Penjaringan kesehatan dilakukan pada peserta didik kelas tingkat SD. Berdasarkan data yang ada menunjukkan adanya penurunan cakupan penjaringan Kesehatan siswa SD pada tahun 2020 menurun menjadi 75 persen, atau menurun sebesar 20,21 dari tahun sebelumnya. Data cakupan penjaringan Kesehatan siswa SD dan setingkat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 169 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat
1	2016	47%
2	2017	44%
3	2018	100%
4	2019	94%
5	2020	75%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021

(41) Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara serius oleh seluruh jenjang pemberi pelayanan kesehatan. Hal ini terbukti dengan cakupan indikator ini yang telah mencapai angka 171 % tahun 2019.

Tabel 2. 170 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
1	2016	0
2	2017	0



3	2018	0
4	2019	171%
5	2020	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021

(42) Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Pelayanan gawat darurat (emergency care) adalah bagian dari pelayanan kedokteran yang dibutuhkan oleh penderita dalam waktu segera (immediately) untuk menyelamatkan kehidupannya (life saving). Instalasi kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan gawat darurat disebut dengan nama Instalasi Gawat Darurat (emergency unit). di 2 (dua) tahun terakhir cakupan indikator ini berada pada angka 100 %. Hal ini menandakan bahwa SDM kesehatan pada IGD/UGD telah bekerja dengan baik. Data cakupan

Tabel 2. 171 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 – 2020

Tabel 2. 172 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1
1	2016	0
2	2017	0
3	2018	0
4	2019	100 %
5	2020	100 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021

(43) Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan epidemiologi < 24 Jam

Pelaksanaan penyelidikan epidemiologi belum pernah dilaksanakan dikarenakan pengetahuan serta kompetensi yang dibutuhkan belum dimiliki oleh pengelola program yang bertugas di puskesmas. Data cakupan Desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

2. 173 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
1	2015	0%
2	2016	0%
3	2017	0%

4	2018	0%
5	2019	0%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021

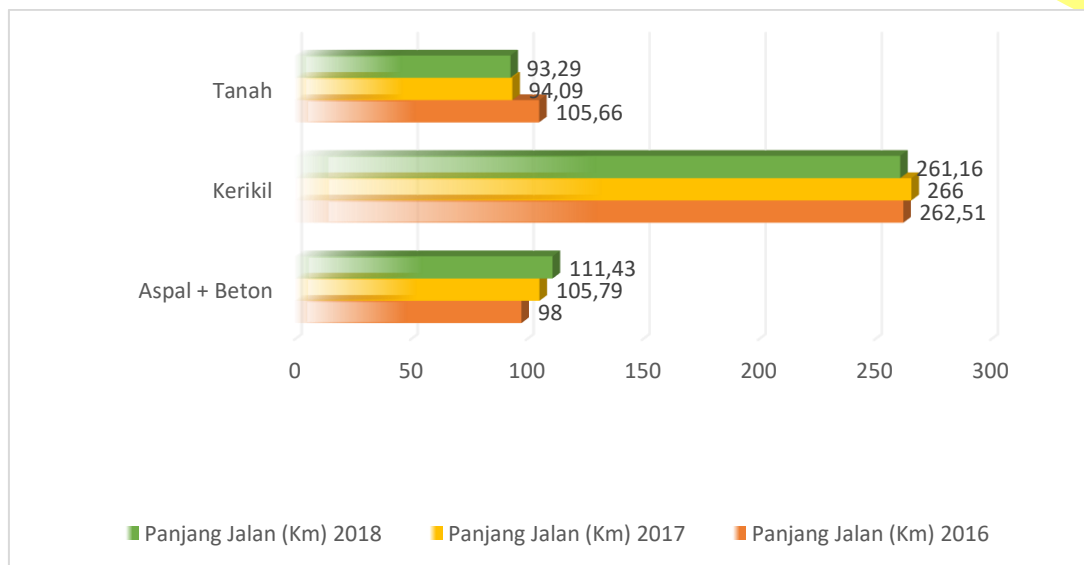
3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum merupakan pelayanan dalam menyediakan sarana dan prasarana publik primer dalam mendukung kegiatan pembangunan suatu daerah. Pelayanan prasarana dan sarana pada suatu daerah merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian. Pentingnya penyelenggaraan urusan pekerjaan umum ini telah disadari oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan secara bertahap dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2020. Pelayanan urusan Pekerjaan Umum difokuskan pada pelayanan urusan Jaringan Jalan, Sumber daya Air dan Jembatan, Air Minum, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung dan Lingkungan, dan Jasa Konstruksi.

(1) Jaringan Jalan

Pembangunan di bidang kebinamargaan ini dapat ditinjau dari kinerja kondisi jalan kabupaten yang telah dipelihara maupun yang telah dibangun. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan sejak tahun 2016 dan hingga kini tahun 2020 mencapai 45,25%. Kondisi panjang jalan kabupaten selama 5 tahun terakhir relatif tetap yaitu 465,88 km. Pada tahun 2017 Konstruksi permukaan jalan yang berupa aspal sepanjang 76,67 km, beton 29,12 km, Kerikil 265,99 km, dan tanah 94,09 km, namun pada tahun 2020 Konstruksi permukaan jalan yang berupa aspal sepanjang 63,15 km, beton 52,13 km, Kerikil 330,90 km, dan tanah 19,70 km. Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten Mamuju Tengah. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada :

Gambar 2. 1 Kondisi Konstruksi Permukaan Jalan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017- 2020



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah , Tahun 2021

Selama 5 tahun terakhir pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan berbagai cara untuk mempertahankan umur jalan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah rehabilitasi jalan melalui program rehabilitasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas jalan. Panjang jalan kondisi rusak yang ter rehabilitasi sejak tahun 2016 di Kabupaten Mamuju Tengah meningkat hingga tahun 2020. Hal ini menunjukkan peningkatan efektivitas aksesibilitas ke pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Mamuju Tengah mudah dijangkau oleh masyarakat. Kondisi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2. 174 Panjang Jalan Keseluruhan Berdasarkan Kondisi Jalan (Km)
Kabupaten Mamuju Tengah, 2016 - 2020**

Panjang Jalan (Km)						
No	Kondisi Jalan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Baik	69,83	78,22	77,79	78,90	98.18
2	Sedang	67,33	72,26	73,56	77,78	112.62
3	Rusak Ringan	190,21	188,79	190,42	191,23	222.54
4	Rusak Berat	138,51	126,61	124,11	117,98	32.54
Total Panjang Jalan		465,88	465,88	465,88	465,88	465,88

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

**Tabel 2. 175 Hasil Kinerja Urusan Jaringan Jalan Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun 2016 - 2020**

No	Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pekerjaan Umum					



1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,29	0,32	0,32	0,34	0,45
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,00328	0,00324	0,00320	0,00325	0,00337
3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam)	29,44%	32,30%	32,49%	33,63%	45,25%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(2) Irigasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Irigasi pasal 1 menyatakan bahwa Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

Ada dua indikator urusan irigasi yaitu rasio jaringan irigasi dan persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik. Saluran irigasi di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2016 sepanjang 36.642 meter menjadi 48.971 meter pada tahun 2019. sedangkan Luas Lahan Budidaya Pertanian sejak tahun 2016 hingga 2019 seluas 7.642 Ha, ini berarti bahwa rasio jaringan irigasi di Kabupaten Mamuju Tengah telah terpenuhi sebesar 6,41. Kondisi selengkapnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2. 176 Hasil Kinerja Urusan Jaringan Irigasi di Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2016 - 2020

No	Bidang Urusan/Indikator	Target Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pekerjaan Umum					
1	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	0,57%	0,60%	0,68%	0,80%	Na
2	Rasio Jaringan Irigasi	4,79	5,24	5,69	6,41	Na

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah Tahun 2021

(3) Air Minum dan Sanitasi

Dari 8 tujuan dan 18 target MDGs, air minum bersama sanitasi termasuk dalam Tujuan 7 MDGs yaitu pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan target 10 yakni mengurangi setengah dari jumlah penduduk yang tidak memiliki akses air minum dan sanitasi dasar yang sehat. Untuk mencukupi kebutuhan air minum, telah dilakukan upaya pemenuhan melalui sistem perpipaan dan non perpipaan.

Penyediaan melalui sistem perpipaan di Kabupaten Mamuju Tengah dilakukan oleh UPTD Air Bersih dibawah urusan bidang keciptakaryaan dan melalui program

PAMSIMAS. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 menyatakan bahwa UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan Air Bersih oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten.

Cakupan pelayanan UPTD Air Bersih Kabupaten Mamuju Tengah dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami lonjakan peningkatan dan telah melayani 104.215 Jiwa, namun secara pemenuhan akses air minum dari jumlah penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2020 sebesar 75,45%. Kondisi selengkapnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2. 177 Hasil Kinerja Urusan Air Minum di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020

No	Bidang Urusan/ Indikator	Target Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pekerjaan Umum					
1	Persentase penduduk berakses air minum	26,92 %	35,71 %	42,77 %	65,09 %	75,45 %

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

Upaya peningkatan sanitasi lingkungan yang sehat dilaksanakan melalui upaya pembangunan sanitasi lingkungan yang berbasis masyarakat berupa pembangunan MCK Plus serta pembangunan septik komunal. Cakupan pelayanan sanitasi di Kabupaten Mamuju Tengah dengan Jumlah Rumah tinggal tahun 2019 sebanyak 19.636 KK, sedangkan jumlah rumah tinggal yang berakses sanitasi pada tahun 2020 sebanyak 20.618 KK. Kondisi selengkapnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2. 178 Hasil Kinerja Urusan Sanitasi di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2020

No	Bidang Urusan/ Indikator	Target Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pekerjaan Umum					
1	Persentase rumah tinggal bersanitasi	22%	37%	47%	69%	72%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(4) Penataan Ruang

Penataan Ruang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Penataan ruang di daerah ini sangat penting untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota maupun keserasian dengan wilayah disekitarnya. Pengaturan mengenai

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah berjangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun dari mulai tahun 2017 sampai tahun 2037.

Dalam rangka implementasi kebijakan tata ruang dan sebagai perangkat operasional RTRW sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta mengacu Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), maka Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menindaklanjuti pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang, pemerintah kabupaten menyelenggarakan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Ijin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan sejak disosialisasikannya tahun 2014. Tahun 2016 jumlah izin yang dikeluarkan sebanyak 103 izin, tahun 2019 meningkat menjadi 961 izin kemudian menurun di tahun 2020 menjadi 383 izin. Kondisi selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 179 Jumlah IMB Per Satuan Bangunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

Kecamatan	Jumlah Bangunan Ber-IMB (Unit)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tobadak	58	85	47	331	170
Topoyo	16	41	197	505	174
Budong-Budong	12	49	16	45	6
Karossa	17	27	26	31	30
Pangale	0	3	2	49	3
Jumlah	103	205	288	961	383

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

Sementara itu untuk Rasio Ruang Terbuka Hijau Kota per Satuan Luas Wilayah tahun 2020 sebesar 0,113%. Kondisi selengkapnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2. 180 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020

No	Uraian	Tahun 2020
1	Luas Ruang Terbuka Hijau	352,00 Ha
2	Luas wilayah	310.501,66 Ha
3	Rasio Ruang Terbuka Hijau (1:2)	0,113%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Profil permukiman di Kabupaten Mamuju Tengah cenderung mengikuti pola linier dan cluster (pengelompokan) dengan konsentrasi pada kawasan pusat kota dan tersebar secara linear di beberapa bagian desa, hal ini lebih disebabkan oleh kondisi fisik lahan dan aktivitas mata pencaharian masyarakat, yang lebih dominan pada sektor agraris, sehingga lahan permukiman lebih cenderung pada lahan datar dan mengikuti pola jalan yang ada. Secara umum karakter permukiman mengikuti pola jaringan jalan dan sarana dan prasarana yang ada.

(1) Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni merupakan perbandingan antara jumlah rumah layak huni di bagi dengan jumlah penduduk pada satuan wilayah yang bersangkutan. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Rumah layak huni terdiri dari empat indikator yaitu: ketahanan bangunan, kecukupan luas bangunan, akses sanitasi, dan akses air minum. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menunjukan selama tahun 2017-2020

Tabel 2. 181 Jumlah Rumah Layak Huni Di Kabupaten Mamuju Tengah Berdasarkan Jumlah Penduduk Dan Jumlah Rumah Tahun 2017-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk	-	124.380	124.380	124.380	125.050
2	Jumlah Rumah Layak Huni	-	19.842	21.464	22.538	16.333
3	Rasio rumah layak huni	0%	16%	17%	18%	13%

Sumber : DISPERKIM Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(2) Rasio Permukiman Layak Huni

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mamuju Tengah luas wilayah permukiman dibagi menjadi 2 yaitu luas wilayah permukiman perdesaan dengan cakupan areal seluas 12.348,48 Ha dan luas wilayah permukiman kawasan perkotaan dengan cakupan areal seluas 707,56 Ha. Jadi total luas wilayah permukiman di Kabupaten Mamuju Tengah seluas 13.056,04 Ha. Adapun luas kawasan kumuh di Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun 2020 seluas 75,17 Ha. Sehingga dari luasan kawasan permukiman dan kawasan kumuh dapat diketahui luas kawasan area permukiman tertata, untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2. 182 Luas area Permukiman berdasarkan indikatornya

di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017-2020

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Luas permukiman layak huni	249.892	249.892	249.892	249.892
2	luas wilayah permukiman	350.127	350.127	350.127	350.127
3	Rasio permukiman layak huni	71,37%	71,37%	71,37%	71,37%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Mamuju Tengah, 2021

(3) Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan pemenuhan rumah layak huni merupakan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2020 sebesar 67,22%.

Tabel 2. 183 Cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Mamuju Tengah 2017-2020

No	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Rumah Layak Huni	72,90%	72,90%	77,35%	67,22%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Mamuju Tengah, 2021

(4) Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau

Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan harga yang terjangkau baik untuk dimiliki maupun disewa oleh seluruh lapisan masyarakat. Cakupan rumah layak huni terjangkau merupakan upaya tercapainya fasilitasi keterjangkauan menghuni rumah layak huni oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Data belum/tidak tersedia pada dinas Perumahan dan Pemukiman.

Tabel 2. 184 Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau di Kabupaten Mamuju Tengah 2017-2020

No	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Rumah Layak Huni	72,90%	72,90%	77,35%	67,22%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Mamuju Tengah, 2021

(5) Persentase lingkungan pemukiman kumuh

Daerah kumuh adalah daerah atau kawasan tempat tinggal (hunian) yang dihuni sekelompok orang yang menempati bangunan sementara, tidak ada akses air yang aman untuk diminum, tidak ada fasilitas sanitasi yang layak, dan kondisi lingkungan yang

tidak memadai. Di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2020 terdapat 0,024% persen lingkungan pemukiman kumuh.

Tabel 2. 185 Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh

No	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,024%	0,024%	0,024%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(6) Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan

Permukiman kumuh adalah produk pertumbuhan penduduk kemiskinan dan kurangnya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan dan menyediakan pelayanan kota yang memadai. Kawasan permukiman kumuh dianggap sebagai penyakit kota yang harus diatasi. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan permukiman. Data persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Kabupaten Mamuju Tengah belum tersedia

(7) Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

Rumah tangga yang tidak memiliki akses air minum (air minum layak), akses sanitasi (sanitasi layak) merupakan rumah tangga kumuh. Proporsi rumah tanggah kumuh di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2018 dan 2019 sebesar 1,04%.

Tabel 2. 186 Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	-	-	1,04%	1,04%	1,16%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(8) Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan PSU

Lingkungan perumahan yang sehat dan aman serta didukung ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum merupakan dambaan setiap orang. Kawasan dengan keberadaannya didominasi oleh rumah-rumah dan dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas untuk menyelenggarakan kegiatan penduduk yang tinggal di dalamnya merupakan konsep dari lingkungan yang sehat dan aman. Konsep ini memberikan jaminan kesehatan dan keamanan bagi masyarakat yang tinggal didalamnya. Namun data terkait dengan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU belum tersedia di dinas terkait.

5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

(1) Cakupan petugas Linmas

Kondisi yang tentram tertib dan teratur memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dalam rangka penegakan peraturan daerah dan kepala daerah yang sesuai dengan kewenangannya secara baik. Hal ini sangat perlu didukung dengan cakupan petugas perlindungan masyarakat yang memadai. Cakupan petugas linmas di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2020 sebesar 22%, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2. 187 Cakupan Petugas Linmas di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	Na	23%	22%	22%	22%

Sumber: Dinas Ketenteraman, Ketertiban dan Linmas Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(2) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 merupakan jumlah pelanggaran yang diselesaikan dalam 24 jam berdasarkan pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat atau diidentifikasi oleh satpol PP. Tingkat penyelesaian K3 di Kabupaten Mamuju Tengah pada tiap tahunnya terus meningkat yakni pada tahun 2017 sebesar 56%, tahun 2018 sebesar 78% dan pada tahun 2019 sebesar 86%. Dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2. 188 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, keindahan)	-	56%	78%	86%	0%

Sumber: Dinas Ketenteraman, Ketertiban dan Linmas Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

Pada tahun 2020 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, keindahan) 0% dikarenakan tidak adanya pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP.

(3) Cakupan pelayanan bencana kebakaran

Pada tahun 2020 bidang pemadam kebakaran yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah memiliki cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 0,97%. Dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2. 189 Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,97%

Sumber: Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Linmas Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(4) Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran

Pada tahun 2020 tingkat waktu tanggap sebesar 83% di mana jumlah kasus yang ditangani dalam waktu maksimal 15 menit sebanyak 24 kasus dari jumlah keseluruhan kasus kebakaran yang terjangkau sebanyak 29 kasus. Menunjukkan bahwa masih ada 17% yang tidak dapat memenuhi tingkat waktu tanggap. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 190 waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		100%	67%	80%	83%

Sumber: Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Linmas Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(5) Persentase Penegakan PERDA

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam menjalankan tugas Satpol PP punya kewenangan untuk melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada. Persentase penegakan Perda di Kabupaten Mamuju Tengah sejak tahun 2017 terus meningkat hingga tahun 2020. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 2. 191 Persentase Penegakan PERDA di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penegakan PERDA		64%	69%	86%	100%

Sumber: Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Linmas Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

6) Sosial

(1) Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Pemberian bantuan sosial merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawab negara dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam Undang-Undang tersebut dijabarkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Terdapat 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yakni anak Balita terlantar, anak terlantar, Anak Berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak penyandang disabilitas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga permasyarakatan, Orang dengan HIV/AIDS, korban penyalahgunaan NAPZA, Korban trafficking, korban tindak kekerasan, Pekerja migran bermasalah, korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis, dan komunitas adat terpencil. Sementara itu, bantuan Sosial didefinisikan sebagai bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial atau dalam hal ini PMKS. Berikut ini adalah tabel tentang persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Mamuju Tengah terhitung sejak 2016 sampai dengan 2020 :

Tabel 2. 192 Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial

Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS yang diberikan Bantuan Sosial	55.180	58.040	63.858	64.362	35.065
2	Jumlah PMKS yang seharusnya diberikan Bantuan	58.045	64.495	66.331	66.372	37.270
3	Persentase	95,06%	89,99%	96,27%	96,97%	94,08%

Sumber: Dinas Sosial Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

Jumlah PMKS yang diberikan bantuan sosial pada Tahun 2016 sebanyak 55.180 jiwa atau sekitar 95,06% dari jumlah keseluruhan PMKS yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah yakni sebanyak 58.045 jiwa. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial mengalami penurunan pada tahun 2017. Namun perlu diketahui sebenarnya jumlah PMKS yang diberikan bantuan sosial bertambah, tetapi jumlah PMKS juga meningkat secara signifikan yakni dari 58.045 jiwa menjadi 64.495 jiwa atau sekitar 11,11%. Bertambahnya data PMKS diperoleh dari data hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi Data di Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Pada Tahun 2017.

Pada Tahun 2018 kembali diadakan verifikasi dan validasi data sehingga diperoleh data jumlah PMKS bertambah sebanyak 1.836 jiwa atau sekitar 2,8% dari jumlah PMKS pada tahun sebelumnya (dari 64.495 jiwa menjadi 66.331 jiwa). Sejalan dengan hal tersebut maka pemberian bantuan sosial kepada PMKS juga semakin ditingkatkan. Jumlah PMKS yang diberikan bantuan sosial sebanyak 63.858 jiwa atau sebanyak 96,27% dari 66.331 jiwa jumlah total PMKS yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Dengan kata lain PMKS yang memperoleh bantuan sosial bertambah sebanyak 5.818 jiwa atau sebesar 9% dari jumlah PMKS yang diberikan bantuan pada tahun sebelumnya (dari 58.040 jiwa menjadi 63.858 jiwa). Dari hasil verifikasi dan validasi yang dilaksanakan pada tahun 2019, jumlah PMKS kembali meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tetapi dengan rasio yang sangat kecil yakni sebesar 0,06% atau sebanyak 41 jiwa (dari 66.331 jiwa menjadi 66.372 jiwa). Jumlah PMKS yang diberikan bantuan sosial juga meningkat yakni sebanyak 64.362 jiwa atau sekitar 96,97% dari jumlah keseluruhan PMKS yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Dari data tersebut diperoleh bahwa jumlah PMKS yang diberikan bantuan sosial bertambah sebanyak 504 jiwa atau sekitar 0,7% dari jumlah PMKS yang diberikan bantuan pada tahun sebelumnya (63.858 menjadi 64.362 jiwa). Bantuan sosial kepada PMKS bersumber dari Anggaran daerah dan Anggaran Pusat.

Pada tahun 2020 jumlah PMKS yang diberikan bantuan mengalami penurunan dari 64.362 jiwa menjadi 35.065 jiwa hal tersebut dikarenakan jumlah PMKS mengalami penurunan dari 66.372 jiwa menjadi 37.270 jiwa.

Pemberian bantuan sosial merupakan salah satu indikator dari pemenuhan 4 SPM bidang sosial yakni rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti, serta rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.

(2) Persentase PMKS yang tertangani

Ada beberapa bentuk penanganan PMKS sebagai upaya pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yakni rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi para PMKS.

Berikut adalah tabel persentase PMKS yang tertangani terhitung dari tahun 2016 sampai dengan 2020 :

Tabel 2. 193 Persentase PMKS yang Tertangani di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS yang tertangani	55.180	58.040	63.858	64.362	35.065
2	Jumlah PMKS yang ada	58.045	64.495	66.331	66.372	37.270
3	Persentase	95,06%	89,99%	96,27%	96,97%	94,08%

Sumber: Dinas Sosial Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

Jumlah PMKS yang tertangani pada Tahun 2016 sebanyak 55.180 jiwa atau sekitar 95,06% dari jumlah keseluruhan PMKS yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah yakni sebanyak 58.045 jiwa. Persentase PMKS tertangani mengalami penurunan pada tahun 2017. Namun perlu diketahui sebenarnya jumlah PMKS tertangani bertambah, tetapi jumlah PMKS juga meningkat secara signifikan yakni dari 58.045 jiwa menjadi 64.495 jiwa atau sekitar 11,11%. Bertambahnya data PMKS diperoleh dari data hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi Data di Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Pada Tahun 2017.

Pada Tahun 2018 kembali diadakan verifikasi dan validasi data sehingga diperoleh data jumlah PMKS bertambah sebanyak 1.836 jiwa atau sekitar 2,8% dari jumlah PMKS pada tahun sebelumnya (dari 64.495 jiwa menjadi 66.331 jiwa). Sejalan



dengan hal tersebut maka penanganan PMKS juga semakin ditingkatkan. Jumlah PMKS yang ditangani sebanyak 63.858 jiwa atau sebanyak 96,27% dari 63.858 jiwa jumlah total PMKS yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Dengan kata lain PMKS yang ditangani bertambah sebanyak 5.818 jiwa atau sebesar 9% dari jumlah PMKS yang ditangani pada tahun sebelumnya (dari 58.040 jiwa menjadi 63.858 jiwa). Pada Tahun 2019 jumlah PMKS kembali meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tetapi dengan rasio yang sangat kecil yakni sebesar 0,06% atau sebanyak 41 jiwa (dari 66.331 jiwa menjadi 66.372 jiwa). Jumlah PMKS yang dtangani juga meningkat yakni sebanyak 64.362 jiwa atau sekitar 96,97% dari jumlah keseluruhan PMKS yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Dari data tersebut diperoleh bahwa jumlah PMKS yang ditangani bertambah sebanyak 504 jiwa atau sekitar 0,7% dari jumlah PMKS yang ditangani pada tahun sebelumnya (63.858 menjadi 64.362 jiwa). Peningkatan capaian penanganan PMKS dipengaruhi oleh dukungan anggaran baik itu dari pusat maupun yang bersumber dari APBD.

Pada tahun 2020 jumlah PMKS yang tertangani mengalami penurunan dari 64.362 jiwa menjadi 35.065 jiwa hal tersebut dikarenakan jumlah PMKS mengalami penurunan dari 66.372 jiwa menjadi 37.270 jiwa.

Penanganan PMKS merupakan salah satu indikator dari pemenuhan 4 SPM bidang sosial yakni rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti, serta rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.

(3) Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk kebutuhan dasar

Tujuan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai tanggung jawab dari sebuah negara adalah menjamin seluruh rakyatnya agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan bagi mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yakni seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, serta eksploitasi dan diskriminasi. Berikut ini adalah tabel persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar :



Tabel 2. 194 Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial dalam 1 tahun	55.180	58.040	63.858	64.362	35.065
2	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh Bantuan Sosial	58.045	64.495	66.331	66.372	37.270
3	Persentase	95,06%	89,99%	96,27%	96,97%	94,08%

Sumber: Dinas Sosial Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(4) Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan

Berdasarkan indikator yang tertuang dalam permendagri 86, kita dapat melihat tidak adanya kesesuaian antara indikator dan variabel yang ditentukan. Untuk memperoleh Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial, maka tentunya merupakan rasio antara jumlah panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) dan jumlah keseluruhan panti sosial yang ada. Panti sosial dan PMKS adalah dua variabel yang sangat berbeda.

Namun jika tetap merujuk pada permendagri 86 terlepas dari kesesuaian antara indikator dan variabelnya, maka diperoleh persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya sebagai berikut :

Tabel 2. 195 Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS dalam 1 Tahun yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	488	30	70	100	15



2	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	58.045	64.495	66.331	66.372	37.270
3	Persentase	0,84%	0,05%	0,11%	0,15%	0,04%

Sumber: Dinas Sosial Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

Dari tabel di atas diketahui bahwa persentase PMKS penerima Program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya masih sangat kecil. Terhitung sejak Tahun 2016 Penerima Program hanya sebanyak 488 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan PMKS pada tahun yang sama yakni sebanyak 58.045 jiwa, maka persentase penerima program hanya sebesar 0,84%. Pada Tahun 2017 tren kembali menurun, jumlah PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya hanya sebanyak 30 orang atau hanya 0,05% dari keseluruhan jumlah PMKS yang ada. Pada Tahun 2018, jumlah PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya mengalami peningkatan menjadi 70 orang atau sekitar 0,11% dari jumlah keseluruhan PMKS yang ada. Tren yang sama terjadi pada tahun 2019, jumlah PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya mengalami peningkatan sebanyak 30 Orang menjadi 100 orang atau sebesar 0,15% dari jumlah keseluruhan PMKS yang ada. Namun pada tahun 2020 jumlah PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya mengalami penurunan menjadi 15 Orang. Fluktuasi persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial diakibatkan oleh penganggaran program Pemberdayaan sosial yang berupa KUBE hanya bersumber dari anggaran pusat dan tidak adanya dukungan anggaran di daerah. Anggaran dari pusat bersifat tetap namun tidak seiring dengan melonjaknya jumlah PMKS yang ada di daerah.

(5) Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017

Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak dijabarkan bahwa Panti Sosial merupakan lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Sejak terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah hingga sekarang tidak ada satupun Panti sosial yang dibentuk. Namun dalam kenyataannya, penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak dilaksanakan oleh 6 Lembaga Kejahateraan Sosial Anak yang telah terbentuk di Kabupaten Mamuju Tengah.

Tabel 2. 196 Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah panti sosial dalam 1 Tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial	0	0	0	0	0
2	Jumlah panti sosial dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial	0	0	0	0	0
Persentase		0 %	0 %	0%	0%	0 %

Sumber: Dinas Sosial Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(6) Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) merupakan sistem kerjasama antar keperangkat pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Pada dasarnya tujuan WKBSM adalah agar masyarakat mampu secara mandiri mengentaskan masalah kesejahteraan sosial yang dialaminya. Sederhananya, prinsip dari WKSBM adalah kesejahteraan sosial berasal dari, oleh, dan untuk masyarakat. Namun sampai saat ini belum ada satupun Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang terbentuk di Kabupaten Mamuju Tengah

Tabel 2. 197 Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) dalam 1 Tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	0	0	0	0	0
2	Jumlah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) dalam 1 Tahun yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	0	0	0	0	0
Persentase		0%	0%	0%	0%	0%

Sumber: Dinas Sosial Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(7) Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Saat Tanggap Bencana

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Pada tahun 2016 sebesar 99,70%. Dari 3.722 jiwa total korban bencana, sebanyak 3.711 jiwa di antaranya yang menerima bantuan sosial dan hanya 11 jiwa yang tidak menerima bantuan. hal ini dikarenakan masyarakat yang terdampak tersebut menolak untuk menerima bantuan yang diberikan oleh tim dari Dinas Sosial dan lebih memilih hidup bersama dengan keluarganya. Pada Tahun 2017 korban bencana mengalami peningkatan yang signifikan mencapai 4.264 jiwa, Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 1.294 jiwa, dan Pada Tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 2.976 jiwa, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 188 jiwa. Namun sejak tahun 2017 hingga 2020 persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial mencapai 100%. Tentunya ini dikarenakan kinerja maksimal dari tim Tagana Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah serta alokasi anggaran yang cukup dari APBD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 2. 198 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun	3.711	4.264	1.294	2.976	188
2	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun	3.722	4.264	1.294	2.976	188
Persentase		99,70%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Dinas Sosial Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(8) Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi

Pada tahun 2016, dari seluruh korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun yang berjumlah 96 jiwa, hanya 1 di antaranya yang tidak dievakuasi atau dengan persentase sebesar 98,96%. Hal ini dikarenakan korban bencana tersebut menolak untuk dievakuasi dan lebih memilih untuk tetap di rumahnya. Pada Tahun 2017 korban bencana yang seharusnya dievakuasi mengalami peningkatan yakni menjadi 341 jiwa, dan 339 di antaranya berhasil dievakuasi atau dengan persentase sebesar 99,41%. 2 orang korban bencana menolak untuk dievakuasi dan lebih memilih untuk tetap di rumahnya. Pada Tahun 2018 korban bencana yang seharusnya dievakuasi mengalami peningkatan yang signifikan yakni mencapai 1.294 jiwa, namun pada tahun 2019 menurun menjadi 721 jiwa sampai pada tahun 2020 yaitu 188 jiwa. Tingkat keberhasilan dalam mengevakuasi korban bencana pada tahun 2018 hingga 2020 mencapai 100%. Evakuasi korban bencana didukung oleh kinerja maksima tim Tagana Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah dan sokongan anggaran yang cukup dari APBD.\

Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah tabel persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap Pada Tahun 2016 sampai dengan 2020 :



Tabel 2. 199 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun	95	339	1.294	721	188
2	Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun	96	341	1.294	721	188
Persentase		98,96%	99,41%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Sosial Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(9) Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lansia Penerima Bantuan Sosial

Penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia termasuk 3 dari 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sebagai warga Negara. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial maka dipandang sangat perlu agar kelompok masyarakat ini diberikan Jaminan sosial sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Berikut adalah tabel persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan Sosial Pada Tahun 2016-2020 :

Tabel 2. 200 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan Sosial di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan Sosial	20	10	146	266	275

2	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan Sosial	47	99	262	483	595
	Persentase	42,55%	10,10%	55,73%	55,07%	46,22%

Sumber: Dinas Sosial Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

2.4.3. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

1) Tenaga Kerja

(1) Angka sengketa pengusaha dan pekerja

Berdasarkan data dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa tidak ada data yang tersedia terkait sengketa antara pengusaha dengan pekerja yang tercatat di Kabupaten, karena Bidang Pengawasan telah menjadi kewenangan Provinsi sejak lima tahun terakhir. Data jumlah sengketa pengusaha dan pekerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 201 Jumlah Sengketa Pengusaha dan Pekerja Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sengketa pengusaha kerja	0	0	0	0	0
2	Jumlah perusahaan	66	91	264	279	0
3	Jumlah sengketa pengusaha dengan pekerja per tahun	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Transmigrasi Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(2) Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama

Berdasarkan data dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa tidak ada data yang tersedia terkait jumlah yang diselesaikan melalui perjanjian bersama di Kabupaten, karena Bidang Pengawasan telah menjadi kewenangan di Provinsi sejak lima tahun terakhir. Data jumlah kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 202 Jumlah Kasus yang Diselesaikan melalui Perjanjian Bersama Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasus yang dicatatkan	0	0	0	0	0

2	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	200	4	3	1	0
3	Jumlah kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Transmigrasi Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(3) Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan

Berdasarkan data dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja tahun 2016-2020 menunjukan pada tahun 2016 jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat pada dinas kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan sebanyak 477 orang, sedangkan jumlah pencari kerja yang diterima bekerja sebanyak 200 orang, atau sebesar 42% jumlah pencari kerja yang terdaftar di wilayah tersebut yang telah ditempatkan. Kemudian pada tahun 2017 Persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan meningkat menjadi 83% dari total 187 pencari kerja yang terdaftar. Sedangkan pada tahun 2018 presentase pencari kerja yang ditempatkan menurun dratis sebesar 82% dari 83% menjadi 1% yang artinya dari 230 pendaftar hanya 3 orang pencari kerja yang telah ditempatkan. Pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 0%.

Berdasarkan hasil survey dari Badan Pusat Statistik menunjukan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Mamuju Tengah meningkat pada tahun 2019 sebesar 0,04% yakni dari angka 2,63% menjadi 2,67%. Angka ini akan diprediksi kembali meningkat pada tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Data Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 203 Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan
Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	200	155	3	0	0
2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	477	187	230	259	172
3	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	42%	83%	1%	0%	0%

Sumber: Dinas Transmigrasi Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(4) Keselamatan dan Perlindungan Kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau disingkat K3 merupakan upaya perlindungan terhadap keselamatan serta kesehatan para tenaga kerja selama mereka bekerja di perusahaan tempat mereka bekerja. K3 memiliki 2 aspek

penting, yaitu mengenai keselamatan kerja dan kesehatan para karyawan. Berdasarkan data dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tahun 2016-2020 dapat disimpulkan bahwa penerapan K3 di perusahaan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah masih perlu menjadi perhatian penting baik bagi pemerintah daerah ataupun pihak dari perusahaan karena penerapan K3 belum dilakukan secara maksimal. Hal ini bisa dilihat dari data 5 tahunan yang menunjukkan bahwa rata-rata penerapan K3 masih sangat minim karena masih dibawah angka 50%. Pada tahun 2016 Persentase penerapan K3 hanya sebesar 5% dari total 66 perusahaan. Kemudian Pada tahun 2017 penerapan K3 meningkat menjadi 29%, dan menurun menjadi 13% di tahun 2018 dan tetap stagnan sebesar 13% di tahun 2019, sedangkan di tahun 2020 menurun menjadi 2%. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun terjadi peningkatan jumlah perusahaan tetapi tidak diiringi dengan peningkatan jumlah perusahaan yang melakukan penerapan K3 ditempat kerja. Data keselamatan dan perlindungan kerja dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2. 204 Keselamatan dan Perlindungan Kerja Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 pada tahun n	3	26	33	35	5
2	Jumlah perusahaan di wilayah kabupaten pada tahun n	66	91	264	279	284
3	Keselamatan dan pendidikan	5%	29%	13%	13%	2%

Sumber: Dinas Transmigrasi Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(5) Besaran Pekerja Yang Menjadi Peserta Program Jaminan Sosial

Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa selama tahun 2016-2020 tingkat besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program JAMSOSTEK mengalami fluktuatif. Di tahun 2016 jumlah pekerja yang memiliki JAMSOSTEK sebesar 289 pekerja atau sebesar 43% dari dari total 669 pekerja. Kemudian pada tahun 2017 pengguna JAMSOSTEK menurun menjadi 18%, hal ini dipengaruhi karena ketidakseimbangan antara peningkatan pekerja sebesar 958 orang sedangkan tidak ada penambahan pekerja/buruh yang memiliki JAMSOSTEK. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan menjadi 29% yang disebabkan oleh penurunan jumlah pekerja/buruh sebesar 639 orang, sedangkan pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 25% dari total 1.562 pekerja. Pada akhir tahun 2020 menunjukkan peningkatan yang signifikan mencapai 100% yang artinya

seluruh pekerja/buruh telah memiliki JAMSOSTEK. Data pekerja/buruh yang menjadi peserta program JAMSOSTEK dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. 205 Pekerja/ Buruh yang menjadi Peserta Program JAMSOSTEK Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pekerja/buruh JAMSOSTEK	289	289	289	398	500
2	Jumlah pekerja/buruh	669	1.627	988	1.562	500
3	Besaran pekerja/Buruh yang menjadi peserta program JAMSOSTEK	43%	18%	29%	25%	100%

Sumber: Dinas Transmigrasi Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(6) Besaran Pemeriksa Perusahaan

Berdasarkan data dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menunjukan pada tahun 2016 presentase besaran pemeriksaan perusahaan sebesar 8% kemudian menurun ditahun 2017 sebesar 2% dan stagnan sampai akhir tahun 2020, Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah perusahaan tetapi tidak diimbangi dengan jumlah perusahaan yang diperiksa. Data besaran pemeriksaaan perusahaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 206 Besaran Pemeriksaan Perusahaan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perusahaan yang telah diperiksa	5	5	5	5	5
2	Jumlah perusahaan yang terdaftar	66	91	264	279	280
3	Besaran pemeriksaan perusahaan	8%	2%	2%	2%	2%

Sumber: Dinas Transmigrasi Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(7) Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan

Berdasarkan data dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tahun 2016-2020 menunjukan bahwa dalam lima tahun terakhir persentasi terhadap pengujian peralatan yang dilakukan sudah 100%, yang artinya bahwa telah dilakukan pengujian peralatan dari 12 peralatan yang telah didaftarkan. Data jumlah pengujian peralatan di perusahaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 207 Pengujian Peralatan Di Perusahaan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020

1	Jumlah peralatan yang diuji	12	12	12	12	12
2	Jumlah peralatan yang terdaftar	12	12	12	12	12
3	Jumlah pengujian peralatan di perusahaan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Transmigrasi Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(8) Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Kompetensi

Berdasarkan data dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menunjukkan bahwa pada tahun 2016-2018 presentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kompetensi sebesar 0%, kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 100% yang artinya sebanyak 16 peserta yang mendaftar pelatihan telah diakomodir seluruhnya. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 10% karena terjadi peningkatan jumlah pendaftar pelatihan kompetensi namun yang hanya mampu diakomodir sebanyak 10 orang. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan APBD sehingga kegiatan pelatihan ini dilaksanakan melalui intervensi Provinsi melalui dana Refocusing. Data besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kompetensi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 208 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kompetensi di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	0	0	0	16	10
2	Jumlah pendaftaran pelatihan kompetensi	0	0	0	16	100
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kompetensi	0%	0%	0%	100%	10%

Sumber: Dinas Transmigrasi Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(9) Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Berdasarkan data dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menunjukkan bahwa selama tahun 2016-2020 besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat adalah 0%. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan APBD. Data besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 209 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	0	0	0	0	0



2	Jumlah pendaftaran pelatihan berbasis masyarakat	0	0	0	0	0
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber: Dinas Transmigrasi Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(10) Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Berdasarkan data dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa pada tahun 2017 telah dilakukan pelatihan kewirausahaan dimana jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan sebanyak 60 orang dari total 60 pendaftar pelatihan kewirausahaan. Pada tahun 2018 jumlah tenaga kerja yang mendaftar pelatihan kewirausahaan meningkat menjadi 80 peserta dan telah diakomodir secara keseluruhan. Sedangkan pada tahun 2019 menurun menjadi 0% kemudian meningkat di tahun 2020 menjadi 60%. Data besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 210 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	0	60	80	0	90
2	Jumlah pendaftaran pelatihan kewirausahaan	0	60	80	0	150
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	0%	100%	100%	0%	60%

Sumber: Dinas Transmigrasi Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(11) Rasio Lulusan S1/S2/S3

SDM yang berkualitas akan meningkatkan daya saing dan perkembangan investasi yang masuk di suatu daerah. Kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas, karena mayoritas perusahaan-perusahaan atau lapangan kerja lainnya lebih memilih tenaga kerja yang berkualitas baik. Berdasarkan data dari Dinas Transmigrasi tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 rasio lulusan S1/S2/S3 yaitu sebesar 249,32. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat 249 orang lulusan S1/S2/S3 per 10.000 orang penduduk Kabupaten Mamuju Tengah. Pada tahun 2019 rasio lulusan S1/S2/S3 meningkat menjadi 277,30 hal ini berarti terdapat 277 orang lulusan S1/S2/S3 per 10.000 orang penduduk Kabupaten Mamuju Tengah. Data rasio lulusan S1/S2/S3 penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 211 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Penduduk

Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah lulusan S1/S2/S3	2.674	2.980	3.598	3.973	4.208
2	Jumlah penduduk	149.520	143.946	145.756	143.272	138.130
3	Rasio lulusan S1/S2/S3	0,018	0,021	0,025	0,028	0,030

Sumber: Dinas Transmigrasi Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

2) Pangan

(1) Ketersediaan pangan utama

Tanaman pangan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah terdiri atas Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Jalar, dan Ubi Kayu. Jumlah produktivitas tanaman pangan pada tahun 2019 yang paling tinggi nilai produktivitasnya terdapat pada tanaman padi dengan nilai 87.602,24 sedangkan untuk tanaman dengan nilai produktivitas terkecil yaitu kacang tanah dengan nilai 9,41. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa Jumlah ketersediaan pangan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah cenderung menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2017 jumlah ketersediaan pangan sebesar 276.520% dari rata-rata jumlah kesediaan pangan sebesar 398.039.130 ton. Kemudian pada tahun 2018 menurun menjadi 269.643% dan kembali menurun pada tahun 2019 menjadi 159.086%. Jumlah cadangan Pangan yang ada di kabupaten Mamuju Tengah masih mengikut di Bulok Provinsi Sulawesi Barat yang bertempat di Kabupaten Mamuju Tengah. Data ketersediaan pangan tahun dapat dilihat pada tabel berikut: Data ketersediaan pangan tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 212 Ketersediaan Pangan Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (ton)	231.007.421	398.039.130	393.021.460	227.925.620	Na
2	Jumlah penduduk	142.139	143.946	145.756	143.272	Na
3	Ketersediaan Pangan Utama	162.522%	276.520%	269.643%	159.086%	Na

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(2) Ketersediaan Energi Dan Protein Per Kapita

Pada tahun 2018 ketersediaan energi dan protein per kapita yang ada sebesar 35,26 persen dengan ketersediaan energi sebesar 1.748,65 kalori dan protein sebesar 49,60 gram hal ini menunjukkan jika tingkat ketahanan pangan di Mamuju Tengah masih kecil dan perlu adanya perhatian agar pangan utama yang tersedia tetap dalam kondisi yang wajar. Sedangkan untuk data yang masih kosong disebabkan karena belum adanya pendataan data yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Ketersediaan informasi data pangan ini perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka merumuskan kebijakan penyelenggaraan ketahanan pangan yang diharapkan memberikan output yang dapat mengarah pada suatu pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian, peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan. Selain itu diharapkan peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal, peningkatan status gizi masyarakat serta peningkatan mutu dan keamanan pangan Data ketersediaan energi dan protein per kapita dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 213 Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita
Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari):	Na	Na	Na	Na	Na
	Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandungan Kalori X BDD/ 100					
	Nabati/ Vegetal	Na	Na	Na	Na	Na
	Hewani/ Animal	Na	Na	Na	Na	Na
2	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari):	Na	Na	Na	Na	Na
	Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandungan Protein X BDD/ 100					
	Nabati/ Vegetal	Na	Na	Na	Na	Na



	Hewani/ Animal	Na	Na	Na	Na	Na
3	Ketersediaan energi dan protein per kapita	Na	Na	Na	Na	Na

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(3) Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan

Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tengah periode 2016- 2020 menunjukkan telah dilakukannya pengawasan dan pembinaan terhadap konsumsi pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah. Sebanyak 84 sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul yang telah diuji menunjukkan bahwa 84 pangan tersebut aman untuk dikonsumsi. Data pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 214 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016- 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di perdagangan pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku	0	84	84	84	Na
2	Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul disuatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan	0	84	84	84	Na
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	0	100%	100%	100%	Na

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

3) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam berbagai sektor pembangunan diarahkan pada upaya mencapai sasaran meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dan dalam proses pembangunan serta terpenuhinya hak-hak anak dan perlindungan anak serta kelompok rentan lainnya dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Peningkatan pemberdayaan perempuan memegang peran dan posisi yang strategis di antaranya terhadap keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan kesehatan dan keluarga berencana dengan mengintegrasikan sesuai dengan proporsi dan karakteristik yang dimiliki. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan sejak tahun 2016 sebesar 58% kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi 87%. Pada tahun 2018 persentase

partisipasi perempuan dilembaga pemerintahan turun sebesar 72% disebabkan karena meningkatnya jumlah pekerja perempuan sebesar 22.733 pekerja perempuan tetapi yang berpartisipasi di Lembaga pemerintah hanya sebesar 3.894 orang. Pada tahun 2019 mengalami penurunan yang drastis sebesar 12%. Total pekerja perempuan yang aktif dilembaga pemerintahan sampai tahun 2020 sebanyak 798 orang. Data persentase partisipasi perempuan di Lembaga pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 215 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Tahun 2016-2020 Kabupaten Mamuju Tengah

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	1.815	3.402	3.894	751	798
2	Jumlah pekerja perempuan	3.128	3.910	26.643	26.643	26.643
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	58%	87%	15%	3%	3%

Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(2) Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa pada tahun 2017 jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan sebanyak 8% dari total 25 kursi di anggota DPRD, kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 20% karena adanya penambahan 3 perempuan yang menjadi anggota DPRD, kemudian pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 24% atau dari total 25 kursi di keanggotaan DPRD sebanyak 6 perempuan yang menjadi anggota DPRD di Kabupaten Mamuju Tengah. Data proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 216 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	5	2	5	6	6

2	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	25	25	25	25	25
3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	20%	8%	20%	24%	24%

Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(3) Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016-2020 menunjukkan adanya penurunan yang signifikan di tahun 2019 sebesar 86%. Total akhir perempuan yang berpartisipasi di tahun 2019 sebanyak 157 orang dari total 26.643 jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta kemudian pada akhir tahun jumlah partisipasi perempuan di Lembaga swasta meningkat menjadi 1980 pekerja perempuan. Data partisipasi perempuan di Lembaga swasta dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 217 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pekerja perempuan di lembaga swasta	403	503	23.256	157	180
2	Jumlah pekerja perempuan	3.128	3.910	26.643	26.643	26.643
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	13%	13%	87%	1%	1%

Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(4) Rasio KDRT

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016-2020 menunjukkan jumlah rasio KDRT yang meningkat menjadi 0,34% di tahun 2018 sedangkan di tahun 2019 menurun menjadi 0.03%. Atau pada tahun 2019 dari total 13.083 jumlah rumah tangga sebanyak 4 kasus KDRT yang terjadi. Pada tahun 2020 jumlah KDRT meningkat sebanyak 5 kasus dengan total jumlah rumah tangga 65.027. Data rasio KDRT dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 218 Rasio KDRT di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KDRT	4	16	10	4	5

2	Jumlah rumah tangga	30.532	38.166	2.959	13.083	65.027
3	Rasio KDRT	0,01%	0,04%	0,34%	0,03%	0,007%

Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(5) Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur sebesar 0%. Data persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 219 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pekerja anak usia 5-14 tahun	0	0	0	0	0
2	Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas	0	10	11	11	11
3	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(6) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016-2020 menunjukkan tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 94% dari tahun sebelumnya, atau jumlah partisipasi Angkatan kerja perempuan meningkat sebesar 22.733 angkatan kerja. Pada tahun 2020 tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan mencapai 99% dari jumlah Angkatan kerja perempuan yang ada. Data partisipasi Angkatan kerja perempuan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 220 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	3.128	3.910	26.643	26.734	26.734

2	Jumlah angkatan kerja perempuan	74.237	75.035	27.088	27.033	27.052
3	Partisipasi angkatan kerja perempuan	4%	5%	98%	99%	99%

Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(7) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan walaupun sempat menurun di tahun 2017. Pada tahun 2018 jumlah laporan yang ditangani sebesar 10 laporan dari 13 laporan yang diadukan, kemudian cakupan yang mendapatkan penanganan pengaduan meningkat pada tahun 2019 menjadi 95%. Dari total 20 laporan yang masuk sebesar 19 kasus yang telah ditindaklanjuti. Pada tahun 2020 cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan mencapai 100% dari jumlah 5 pengaduan, Ccakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 221 Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	6	11	10	19	5
2	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	9	25	13	20	5
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	67%	44%	77%	95%	100%

Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021



(8) Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016-2020 menunjukkan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan Kesehatan telah mencapai 100% pada tahun 2020. Artinya bahwa semua korban yang terdata telah mendapatkan layanan Kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih. Data cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 222 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan Kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah	9	15	8	10	3
2	Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu	9	17	13	10	3
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih	100%	88%	62%	100%	100%

Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(9) Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa dari rata-rata jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan hampir 90% kasus perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan. Data cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan atas kasus kekerasan pada perempuan dan anak sampai dengan putusan pengadilan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 223 Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan	5	1	12	6	8
2	Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan	7	2	13	7	17
3	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan	71%	50%	92%	86%	47%

Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(10) Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016-2020 menunjukkan pada tahun 2018 sampai tahun 2020 cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum sebesar 100%. Datanya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 224 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum	5	12	13	15	5

2	Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum	8	26	13	15	5
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	63%	46%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas PPKBPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(11) Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016-2020 menunjukkan cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan korban kekerasan cenderung menurun walaupun meningkat di tahun 2018 sebesar 85%. Pada tahun 2019 menurun sebesar 37% dari tahun sebelumnya, atau dari total 8 anak yang membutuhkan reintegrasi sosial sebesar 3 orang yang telah dikembalikan kepada keluarga masing-masing. Sedangkan pada tahun 2020 cakupan layanan integrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan menurun menjadi 18% dari total 17 korban yang membutuhkan reintegrasi sebanyak 17 korban yang ditangani hanya 3 korban. Data cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 225 Cakupan Layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya	3	5	11	3	3
2	Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial	4	13	13	8	17
3	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	75%	38%	85%	38%	18%

Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(12) Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non Pertanian

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016-2020 menunjukkan kontribusi perempuan upahan di sector non pertanian yang bervariasi setiap tahunnya. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 47,46% dari total 10.711 pekerja upahan yang bekerja di sektor non pertanian. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 37,84% disebabkan karena penurunan jumlah pekerja upahan perempuan yang bekerja di sektor non pertanian sebesar 119 pekerja perempuan. Data kontribusi perempuan upahan di sektor non pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 226 Kontribusi Perempuan Upahan di Sektor Non pertanian di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Banyaknya pekerja upahan perempuan di sektor non pertanian	5.329	6.257	5.083	4.964	Na
2	Banyaknya pekerja upahan di sektor non pertanian	8.250	14.094	10.711	13.119	Na
3	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	64,59%	44,39%	47,46%	37,84%	Na

Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(13) Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan oleh Petugas Rehabilitasi Sosial terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016-2020 menunjukkan pada tahun 2017 dan 2018 cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial telah mencapai 100%. Data cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 227 Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan oleh Petugas Rehabilitasi di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos	0	1	1	0	0
2	Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos	0	1	1	0	0
3	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan oleh Petugas Rehabilitasi	0%	100%	100%	0%	0%

Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(14) Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa cakupan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 persentase pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan telah mencapai 94%. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 47 persen, yang artinya dari 17 kasus kekerasan yang tercatat hanya 8 jumlah kasus yang mendapatkan pelayanan pemulangan. Data cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan pemulangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 228 Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan	2	1	11	17	8
2	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT	7	3	13	18	17

3	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	29%	33%	85%	94%	47%
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

4) Lingkungan Hidup

Pengolaan lingkungan hidup merupakan suatu upaya penting yang harus dilakukan untuk memelihara dan atau melestarikan serta memperbaiki mutu lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia dengan sebaik-baiknya. Secara garis besar ada empat lingkup pengelolaan lingkungan hidup, meliputi pengelolaan lingkungan secara rutin, perencanaan dini dalam pengelolaan lingkungan yang menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan, perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak yang akan terjadi sebagai akibat dari suatu proyek pembangunan yang direncanakan, serta perencanaan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan baik karena alamiah maupun karena ulah manusia sendiri. Terkhusus di Kabupaten Mamuju Tengah belum adanya realisasi kegiatan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPHL) di sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Sesuai amanat dalam Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pasal 63 ayat 3 Bagian i melakukan pembinaan dan pengawasan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang undangan yang dimana di tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup Bidang PPLH telah melaksanakan kegiatan Inventarisasi Izin Lingkungan di 5 Kecamatan /Sekabupaten Mamuju Tengah. Untuk peningkatan kapasistas di Bidang PPLH dilakukan melalui bimbingan teknis atau pelatihan.

Terkait dengan indeks kualitas air dan indeks kualitas udara di Kabupaten Mamuju Tengah dari hasil pengukuran pada tahun 2019 menunjukan kualitas air berada pada indeks pencemaran diatas 10 yaitu \ pada skor 55,56 yang artinya bahwa tingkat kualitas air yang diuji digolongkan kedalam kategori tercemar berat (*heavily polluted*). Sedangkan untuk kualitas indeks kualitas udara pada tahun 2018 sebesar 91 dan tahun 2019 sebesar 90. Hal ini mengindikasikan bahwa indeks kualitas udara di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dikategorikan sangat baik

Salah satu upaya untuk menjaga lingkungan hidup adalah melalui pengelolaan sampah. Dibutuhkan pengelolaan yang dilakukan secara komferensif dan terpadu

dari hulu ke hilir. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan Jumlah timbulan sampah terus meningkat setiap tahunnya seiring meningkatnya pertumbuhan, aktivitas dan konsumsi penduduk. Pada tahun 2017 timbulan sampah sebesar 174 m³/hari, kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 179 m³/hari, dan Kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 190 m³/hari. Data perolehan Timbulan Sampah menunjukkan bahwa setiap 1 jiwa menyumbangkan 0,4 kg per 1000 sampah dalam setiap harinya. Sampah ini di peroleh dari sampah yang di angkut tiap hari oleh personil persampahan dan di bawa ke TPA, lalu di timbang untuk mengetahui beratnya, Perolehan sampah hanya dapat di lakukan di 2 Kecamatan (Topoyo dan Tobadak) di karenakan Jumlah Armada dan Keterbatasan anggaran Operasional Persampahan di Dinas LH.

Terkait Izin Pengelolaan Sampah Swasta di terbitkan di DPMPTSP-KUKM sedangkan Dinas Lingkungan Hidup hanya mengeluarkan Rekomendasi Izin. Total Perusahaan swasta yang mengajukan Rekomendasi penerbitan Izin sampai Tahun 2020 sebanyak 3 perusahaan yaitu, PT. Surya Raya Lestari 2, PT. Trinita dan PT. Global. Data indikator urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 229 Indikator Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersusunnya RPPLH	0	0	0	0	0
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/ kota	0	0	0	0	0
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	ada	Tidak ada	ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	0	0	0	55,56	0
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	0	0	91	90	0
6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	0	0	79	0	0
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait	0%	53%	68%	72%	80%



	ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang					
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	0	0	0	1	0
9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	0	0	0	0	0
10	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	0	0	0	0	0
11	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	0	0	0	0	0
12	Penetapan hak MHA	0	0	0	0	0
13	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	0	0	0	100%	100%
14	Timbulan sampah yang ditangani	17%	18%	19%	18%	10%
15	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	17%	17%	20%	21%	14%
16	Persentase cakupan area pelayanan	1%	1%	1%	1%	1%
17	Persentase jumlah sampah yang tertangani	17%	18%	19%	18%	10%

18	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	0%	100%	100%	100%	100%
19	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	67%	75%	75%	75%	75%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kab.Mamuju Tengah 2021

5) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

(1) Rasio Penduduk ber KTP

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016-2020 menunjukkan tingkat rasio penduduk yang ber KTP mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 rasio penduduk ber KTP sebesar 0.06 dari total penduduk sebesar 111.266 jiwa, kemudian meningkat menjadi 0,10 di tahun 2017 dan di tahun 2020 juga kembali meningkat menjadi 0.92 persen dari total penduduk yang berada diatas 17 tahun sebesar 96.459 jiwa . Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP. Data rasio penduduk yang ber KTP dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 230 Rasio Penduduk yang ber KTP
Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	6.760	10.091	43.177	60.813	86.039
2	Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah	111.266	103.944	97.825	96.346	93.459
3	Rasio Penduduk ber KTP	0,06	0,10	0,47	0,63	0,92

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(2) Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan tingkat rasio bayi yang berakte kelahiran cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 rasio bayi yang memiliki akte kelahiran sebesar 0.06 kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 0,83 dan kembali meningkat

sebesar 1 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2019 dari total 3.538 bayi yang ada sebanyak 2.980 bayi telah memiliki akte kelahiran. Di akhir tahun 2020 rasio bayi yang memiliki akte kelahiran sebesar 0,95. Data rasio bayi yang memiliki akte kelahiran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 231 Rasio Bayi yang memiliki Akte Kelahiran Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah bayi berakte kelahiran	115	945	2.941	2.980	3.028
2	Jumlah Bayi	187	1.132	3.530	3.538	3.201
3	Rasio Bayi berakte kelahiran	0,61	0,83	0,83	0,84	0,95

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(3) Rasio Pasangan Berakte Nikah

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode tahun 2016- 2020 menunjukkan rasio pasangan yang memiliki akte nikah per 1000 penduduk meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah pasangan yang memiliki akte nikah sebesar 3.598 orang atau sebesar 0.06. kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 0.17 hal ini disebabkan peningkatan jumlah penduduk dan jumlah kepemilikan pasangan yang berakte nikah. Pada tahun 2018 rasio meningkat sebesar 0,15 dan kembali meningkat menjadi 0,22 atau meningkat sebesar 0.07 dari tahun 2018. Pada tahun 2019 meningkat sebesar 0.06 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan terjadinya peningkatan kesadaran pasangan yang telah menikah untuk memiliki akta nikah. Data rasio pasangan yang memiliki akte nikah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 232 Rasio Pasangan yang memiliki Akte Nikah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pasangan Nikah Berakte Nikah	3.598	11.248	9.394	13.503	17.200

2	Jumlah Keseluruhan Pasangan yang menikah	63.527	64.980	60.936	60.192	61.789
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	0,06	0,17	0,15	0,22	0,28

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(4) Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

Kementrian dalam negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan pendataan penduduk dengan membangun database penduduk yang sistimatik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016-2020 menunjukan sudah adanya ketersediaan database kependudukan pada skala provinsi untuk Kabupaten Mamuju Tengah. Data Ketersediaan database kependudukan skala provinsi di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 233 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi
Tahun 2016-2020 Kabupaten Mamuju Tengah**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	ada

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(5) Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

KTP berbasis NIK, yang selanjutnya disebut KTP Elektronik, adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Untuk Kabupaten Mamuju Tengah telah menerapkan KTP Nasional berbasis NIK dari tahun 2016 sampai saat ini. Data Penerapan KTP Nasional berbasis NIK dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 234 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun
----	--------	-------

		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penerapan KTP Nasional bebrbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(6) Cakupan Penerbitan KTP

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016-2020 menunjukkan cakupan penerbitan KTP yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017 jumlah KTP yang diterbitkan sebesar 10 persen dari total 103.944 penduduk wajib KTP. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 47 persen dan kembali meningkat di tahun 2019 menjadi 63 persen. Pada akhir tahun 2020 cakupan penerbitan KTP yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah sudah mencapai 95 persen. Peningkatan ini menunjukkan kinerja yang baik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menerbitkan KTP yang berbasis NIK. Data cakupan penerbitan KTP dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 235 Cakupan Penerbitan KTP di
Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KTP ber- NIK yang diterbitkan	6.760	10.091	43.177	60.813	86.039
2	Jumlah penduduk wajib KTP	111.266	103.944	97.825	96.356	93.459
3	Cakupan Penerbitan KTP	6%	10%	47%	63%	92%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(7) Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016-2020 menunjukkan jumlah penerbitan akta kelahiran yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 cakupan penerbitan akta kelahiran sebesar 55%, kemudian meningkat menjadi 85 persen dari total 1.132 jumlah kelahiran pada tahun tersebut . Pada tahun 2018 jumlah penerbitan akta kelahiran tidak mengalami perubahan masih sebesar 83 persen. Kemudian meningkat kembali di tahun 2019 menjadi 85%. Pada akhir tahun 2020 dinas kependudukan dan pencatatan sipil mencatatkan jumlah cakupan penerbitan akta kelahiran sudah

mencapai 95 persen Data cakupan penerbitan akta kelahiran dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. 236 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah akta kelahiran ditahun bersangkutan	115	945	2.941	2.554	3.028
2	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan	208	1.132	3.530	2.996	3.201
3	Cakupan penerbitan akta kelahiran	55%	83%	83%	85%	95%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

6) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(1) Cakupan Sarpras Perkantoran Pemerintah Desa

Undang-Undang No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara. Pemerintah desa merupakan salah satu pihak yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam pemberian layanan publik. Baik atau buruknya pelayanan kepada masyarakat akan tergantung pada kualitas dan kuantitas,serta efektivitas dan efisiensinya. Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik juga memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara profesional. Oleh karena itu sekarang menjadi tugas utama pemerintah desa adalah bagaimana memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan masyarakat. Salah satu cara untuk mendukung dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yaitu melalui peningkatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah desa.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016-2020 menunjukan adanya rata-rata peningkatan sebesar 3% setiap tahunnya untuk sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang ada di kabupaten Mamuju Tengah. Pada tahun 2016 jumlah kantor pemerintahan desa dalam kondisi baik sebesar 33 kantor dari total 54 kantor desa, kemudian meningkat sebanyak 6 kantor dalam kondisi baik sampai pada tahun 2019. Data cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 237 Cakupan Sarana Prasarana Perkantor Pemerintahan Desa Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kantor pemerintahan desa dalam kondisi baik	33	34	36	38	40
2	Jumlah seluruh pemerintah desa	54	54	54	54	54
3	Cakupan sarpras perkantoran pemerintah desa	61%	63%	67%	70%	74%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(2) Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan LPM

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa jumlah kelompok binaan LPM sebesar 108 kelompok, dari total 54 desa atau rata-rata jumlah kelompok binaan LPM sebesar 2% setiap tahunnya. Dalam kurun 4 tahun terakhir tidak ada perubahan baik peningkatan atau penurunan jumlah kelompok binaan LPM yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Data rata-rata jumlah kelompok binaan LPM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 238 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan LPM Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok binaan LPM	108	108	108	108	108
2	Jumlah seluruh LPM	54	54	54	54	54
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(3) Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016-2020 rata-rata jumlah kelompok binaan PKK untuk tahun 2016 dan 2017 adalah sebesar 0,17% atau dari total 60 PKK yang ada sebanyak 10 kelompok menjadi binaan PKK. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 0,23% karena terjadi

penambahan sebanyak 4 kelompok yang dibina oleh PKK. Sedangkan pada tahun 2019 rata-rata jumlah kelompok binaan PKK kembali menurun menjadi 0.17% dan tetap stagnan di tahun 2020. Data rata-rata jumlah kelompok binaan PKK dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 2. 239 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok binaan PKK	10	10	14	10	10
2	Jumlah seluruh PKK	60	60	60	60	60
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	0,17	0,17	0,23	0,17	0,17

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(4) Persentase LSM Aktif

Pembangunan desa tidak terlepas dari sebuah manajemen dimana pembangunan itu diharapkan dapat berhasil dan berdayaguna dengan baik. Rangkaian kegiatan tersebut tidak lepas dari peran serta dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) selaku perwakilan masyarakat secara totalitas, selain LPM di Kabupaten Mamuju Tengah juga memiliki Lembaga Swadaya Masyarakat yang berfungsi untuk mengawasi/*social control* kinerja pemerintahan desa. Melalui LSM diharapkan dapat membantu program pemberdayaan masyarakat desa, baik yang dilaksanakan oleh desa, maupun tugas pembantuan kabupaten, provinsi maupun nasional.

Salah satu syarat untuk menentukan aktif atau tidaknya kelompok LSM adalah dengan melihat keaktifan dalam melakukan kegiatan serta pembuatan laporan bulanan, semesteran, atau tahunan untuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016-2020 jumlah LSM yang aktif meningkat sebanyak 2 kelompok LSM setiap tahunnya. Pada tahun 2016 presentase LSM yang aktif sebesar 52% atau 28 dari total 54 LPM. Kemudian pada tahun 2017 sampai tahun 2019 persentase LSM meningkat menjadi 25% karena adanya penambahan 9 LSM yang aktif. Pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 37 LSM aktif atau sebesar 69 persen dari total LSM yang ada. Data presentase LSM yang aktif dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 240 Persentase LSM Aktif
Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah LSM aktif	28	30	32	35	37
2	Jumlah LPM	54	54	54	54	54
3	Persentase LSM Aktif	52%	56%	59%	65%	69%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(5) Persentase LPM Berprestasi

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa tidak ada perubahan baik peningkatan atau penurunan terkait presentase LPM yang berprestasi. Selama kurun 4 tahun terakhir rata-rata persentase LSM yang aktif sebesar 9% atau dari total 54 LPM yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak 5 LPM yang berprestasi setiap tahunnya. Data presentase LPM yang berprestasi dalam dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 241 Persentase LPM Berprestasi Di
Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah LPM berprestasi	5	5	5	5	5
2	Jumlah LPM	54	54	54	54	54
3	Persentase LPM berprestasi	9%	9%	9%	9%	9%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(6) Persentase PKK Aktif

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 presentase PKK yang aktif sebesar 17% atau dari total 60 PKK, yang aktif hanya sebanyak 10 PKK, kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 25%, atau jumlah PKK yang aktif bertambah menjadi 15 PKK, pada tahun 2018 tidak ada perubahan baik terkait peningkatan atau penurunan jumlah PKK yang aktif. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan jumlah PKK yang aktif menjadi 23% hal ini disebabkan karena berkurangnya 1 jumlah anggota PKK yang aktif, kemudian menurun kembali menjadi 17 persen di tahun 2020. Data persentase PKK yang aktif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 242 PKK Aktif di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PKK Aktif	10	15	15	14	10
2	Jumlah PKK	60	60	60	60	60
3	Persentase PKK Aktif	17%	25%	25%	23%	17%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(7) Persentase Posyandu Aktif

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa presentase posyandu yang aktif meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 persentase posyandu yang aktif sebesar 16% atau dari total 188 posyandu, yang aktif berjumlah 30 posyandu. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 19% karena adanya penambahan posyandu yang aktif sebanyak 5 posyandu dari tahun sebelumnya. Kemudian kembali meningkat pada tahun menjadi 20%. Pada tahun 2019 total posyandu yang aktif sebanyak 42 posyandu dan tahun 2020 sebanyak 45 posyandu atau sebesar 24 persen dari total 188 posyandu yang ada. Jika melihat dari persentase posyandu yang aktif maka masih diperlukannya perhatian pemerintah dalam melakukan pemberdayaan dan pengelolaan posyandu sebagaimana posyandu merupakan kebutuhan yang urgensi dalam mendorong pelaksanaan program kesehatan anak balita. Data persentase posyandu yang aktif dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 243 Persentase Posyandu Aktif Di
Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah posyandu aktif	30	35	38	42	45
2	Total posyandu	188	188	188	188	188
3	Persentase posyandu aktif	16%	19%	20%	22%	24%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(8) Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan

Masyarakat merupakan objek utama dalam pembangunan, oleh karena itu sangat diperlukan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan program-program strategis yang akan dilakukan melalui musyawarah desa. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa rata-rata presentase swadaya masyarakat terhadap total program pemberdayaan sebesar 20% atau dari 50 program jumlah swadaya masyarakat yang mendukung program sebanyak 10

swadaya. Data presentase swadaya masyarakat terhadap total program pemberdayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 244 Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat	10	10	10	10	10
2	Total Program	50	50	50	50	50
3	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan	20%	20%	20%	20%	20%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(9) Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat tidak mengalami penurunan baik peningkatan ataupun penurunan. Selama kurun empat tahun terakhir, jumlah program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara sebanyak 5 program atau sebesar 20% dari Total 35 pasca program pemberdayaan masyarakat. Data persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 245 Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara	5	5	5	5	5
2	Total pasca program pemberdayaan masyarakat	25	25	25	25	25
3	Persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	20%	20%	20%	20%	20%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

7) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

(1) Laju pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2016-2020 dilihat pada tiga aspek. Pertama, Angka kelahiran Kasar, kedua angka

kematian kasar dan ketiga angka kematian Bayi. Data jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Mamuju Tengah per kecamatan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 246 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	-	2,77	2,77	2,77	2,77

Sumber: Kabupaten Mamuju Tengah Dalam Angka, Tahun 2021

(2) Total Fertility Rate

Total *Fertility Rate* merupakan jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya (antara umur 15-49). Indikator ini penting dan strategis untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan suatu negara dalam mengendalikan jumlah penduduknya melalui program keluarga berencana. Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2019 menunjukkan bahwa Total *Fertility Rate* yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah berada pada angka 2,57 dan meningkat 0,1 persen menjadi 2,67 di tahun 2020.. TFR sebesar 2,67 berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2 sampai 6 anak selama masa usia suburnya. Angka ini jika dibandingkan dengan standar indikator dinamis kesimbangan penduduk yaitu 2,1 (yang merupakan angka target) sampai 2,8 (atau angka nasional), maka TFR Kabupaten Mamuju Tengah telah berada di rentang cukup/sedang. Data total *Fertility Rate* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 247 Total *Fertility Rate* Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Total <i>Fertility Rate</i>	0	2,57	2,57	2,57	2,67

Sumber: DPPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(3) Persentase Perangkat Daerah berperan pada Kampung KB

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2020 menunjukkan tingkat persentase perangkat daerah yang berperan pada kampung KB bervariasi setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah perangkat daerah yang berpartisipasi sebanyak 10 perangkat daerah dari total 25 perangkat daerah yang ada. Pada tahun meningkat menjadi 52% dan tetap stagnan di tahun

2018. Kemudian pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 72%, atau meningkat sebesar 20% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan karena adanya penambahan 5 Perangkat Daerah yang turut berperan aktif pada kampung KB. Data persentase perangkat daerah yang berperan pada kampung KB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 248 Persentase Perangkat Daerah berperan pada Kampung KB di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB	10	13	13	18	20
2	Jumlah semua perangkat daerah	25	25	25	25	26
3	Persentase PD yang berperan	40%	52%	52%	72%	77%

Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(4) Persentase Perangkat Daerah Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Rancangan induk pengendalian penduduk ini sangat penting untuk disinergikan dengan rencana pembangunan pemerintah, karena laju pertumbuhan penduduk akan berkorelasi dengan laju pergerakan pembangunan. Oleh karena itu diharapkan rancangan induk pengendalian penduduk bisa menjadi acuan penyusunan rancangan pembangunan daerah.

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2020 menunjukkan persentase PD yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 presentase opd yang memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk sebesar 20% kemudian meningkat menjadi 32% dan stagnan di tahun 2018. Pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 52% karena adanya 5 penambahan Perangkat daerah, total akhir di tahun 2020 menunjukkan sebanyak 9 perangkat daerah yang telah menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk. Data persentase perangkat daerah yang Menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 249 Persentase Perangkat Daerah Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PD yang menyusun & memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	5	8	8	13	9
2	Jumlah semua perangkat daerah	25	25	25	25	26
3	Persentase PD yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	20%	32%	32%	52%	35%

Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(5) Jumlah Kebijakan Yang Mengatur Tentang Kependudukan

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 1 Peraturan Daerah yang dibuat terkait kebijakan pengaturan kualitas dan kuantitas penduduk. Kebijakan ini merupakan Kerjasama dengan 8 sektor yang berasal dari penyelenggaraan pendidikan formal yang melakukan pendidikan dibidang kependudukan. Data jumlah kebijakan yang mengatur tentang kependudukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 250 Jumlah Kebijakan Yang Mengatur Tetang Kependudukan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sektor yang menyepati dan memanfaatkan data profil	0	0	0	8	8
2	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan	0	0	0	1	5
3	Jumlah kebijakan	0	0	0	1	1

Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(6) Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah jumlah anak dibagi dengan jumlah keluarga. Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa pada

tahun 2016 rata-rata anak per keluarga adalah sebanyak 2 anak dari total 45.452 anak, kemudian pada tahun 2017 sampai tahun 2020 meningkat menjadi rata-rata 3 anak per keluarga. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah anak dalam 2 tahun terakhir sebesar 3,7%, Data rata-rata jumlah anak perkeluarga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 251 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Kependudukan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak	45.542	59.126	61.291	61.291	61.291
2	Jumlah keluarga	20.221	21.106	20.327	20.327	20.327
3	Rata-rata anak per keluarga	2	3	3	3	3

Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(7) Rasio Akseptor KB

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk salah satu caranya adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk pada wilayah tersebut. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2020 menunjukan bahwa pada tahun 2016 rasio akseptor KB sebesar 68.09 kemudian menurun menjadi 65,99 dan kembali meningkat pada tahun 2018 dan 2019 sebesar 5,6 persen. Pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 77 persen Peningkatan ini menunjukan adanya keberhasilan dalam pengendalian jumlah penduduk dalam tiga tahun terakhir. Data rasio akseptor KB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 252 Rasio Askseptor KB di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Akseptor KB	14.878	14.474	14.846	15.870	14.883
2	Jumlah pasangan usia subur	21.850	21.934	21.288	21.549	19.302

3	Ratio Akseptor KB	68,09	65,99	69,74	73,65	77
---	-------------------	-------	-------	-------	-------	----

Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(8) Angka Pemakaian Kontrasepsi Bagi Perempuan Usia 15-49

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2020 menunjukkan pemakaian kontrasepsi bagi perempuan usia 15-49 tahun yang cenderung meningkat setiap tahun. Pada tahun 2016 jumlah pemakaian kontrasepsi sebesar 68% dari total 21.850 pasangan usia subur. Kemudian menurun sebesar 2% di tahun 2017 menjadi 66% dan kembali meningkat menjadi 70% di tahun 2018 dan 74% di tahun 2019. Pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 77 persen. Peningkatan ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam pengendalian jumlah penduduk dalam tiga tahun terakhir. Data rasio akseptor KB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 253 Jumlah Pemakaian Kontrasepsi Bagi Perempuan Usia Nikah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah peserta KB aktif	14.878	14.474	14.846	15.870	14.883
2	Jumlah pasangan usia subur	21.850	21.934	21.288	21.549	19.302
3	Jumlah pemakai kontrasepsi	68%	66%	70%	74%	77

Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(9) Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) beristri < 20 tahun

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 jumlah pemakai kontrasepsi untuk usia dibawah 20 tahun sebesar 71% dari total 21.850 jumlah pasangan usia subur, pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 12,4% hal ini disebabkan karena berkurangnya jumlah pasangan usia subur dengan istri umur kurang 20 tahun sebanyak 1.979 pasangan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 jumlah pemakaian kontrasepsi mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan menjadi 65% dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 70%. Peningkatan ini menunjukkan kesadaran yang cukup baik bagi pasangan usia subur dibawah 20 tahun untuk menggunakan alat kontrasepsi. Data jumlah pemakaian kontrasepsi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 254 Cakupan PUS beristri dibawah 20 Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasangan usia subur dengan istri umur kurang 20 tahun	15.621	13.642	13.845	14.983	115
2	Jumlah pasangan usia subur	21.850	21.934	21.288	21.549	10.302
3	Cakupan PUS yang istrinya < 20 tahun	71%	62%	65%	70%	1%

Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(10) Cakupan PUS Tidak Terpenuhi Keinginan ber-KB

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2020 menunjukkan tingkat yang berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah PUS yang tidak terpenuhi keinginan ber-KB sebesar 36%, kemudian menurun pada tahun 2017 menjadi 13% dan kembali meningkat menjadi 18%. Pada tahun 2019 kembali menurun menjadi 12% atau sebesar 2.597 orang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani. Angka ini sudah cukup baik jika dibanding dengan target pada tahun 2019 yaitu sebesar 19 persen. Pada tahun 2020 menurun menjadi 9 persen disebabkan karena penurunan jumlah pasangan usia subur dan jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak dilayani. Data jumlah PUS yang tidak terpenuhi keinginan ber-KB dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 255 Cakupan PUS Tidak terpenuhi Keingan ber-KB
Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	7.798	2.613	3.868	2.597	1.764
2	Jumlah pasangan usia subur	21.850	21.934	21.288	21.549	19.302
3	Jumlah PUS tidak terpenuhi keinginan ber-KB	36%	13%	18%	12%	9%

Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(11) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2020 menunjukkan adanya peningkatan pada penggunaan kontrasepsi jangka panjang walaupun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2016 jumlah pengguna MKJP sebesar 16% dari total 14.878 jumlah akseptor KB, kemudian pada tahun 2017 menurun menjadi 15%. Pada tahun 2019 jumlah pengguna MKJP kembali



meningkat menjadi 23%. Sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi 19%, Data jumlah pengguna MJKP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 256 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	2.345	2.114	2.930	3.628	3,675
2	Jumlah akseptor KB	14.878	14.474	14.846	15.870	19.302
3	Jumlah pengguna MJKP	16%	15%	20%	23%	19%

Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(12) Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2020 menunjukkan persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi yang semakin meningkat. Pada tahun 2017 jumlah pemakaian kontrasepsi sebesar 23% dari total 14,878 akseptor KB. Kemudian meningkat sebesar 30% di tahun 2017. Pada tahun 2018 kembali menurun sampai pada tahun 2019 menjadi 11%. Sedangkan pada tahun 2020 presentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi meningkat menjadi 30%. Hal ini disebabkan karena pemetaan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi belum dilakukan sehingga distribusi obat dan permintaan obat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dikarenakan belum adanya Gudang Alat. Data capaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 257 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PUS yang tidak menggunakan kontrasepsi	3.418	7.691	2.018	1.679	4.419
2	Jumlah akseptor KB	14.878	14.474	14.846	15.870	14.883
3	Persentase tingkat kerlangsungan pemakaian kontrasepsi	23%	53%	14%	11%	30%

Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(13) Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita Ber-KB

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2020 menunjukkan cakupan anggota bina keluarga balita ber-KB yang berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2016 cakupan anggota BKB ber-KB sebesar 50% yang artinya setengah dari anggota BKB telah melakukan KB. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 76%, kemudian menurun menjadi 68% dari total 13.473 anggota kelompok BKB. Pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 73% dari total 1.572 anggota BKB. Pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan sebesar 21%. Data cakupan anggota bina keluarga balita ber-KB dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 258 Cakupan Anggotan Bina Keluarga Balita ber-KB
Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	170	1.078	9.130	1.140	1.559
2	Jumlah anggota kelompok BKB	340	1.423	13.473	1.572	1.691
3	Cakupan anggota BKB ber-KB	50%	76%	68%	73%	92%

Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(14) Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber-KB

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2020 menunjukkan cakupan anggota bina keluarga remaja ber-KB setiap tahunnya mengalami peningkatan walaupun sempat menurun di tahun 2017. Pada tahun 2016 cakupan anggota bina keluarga remaja yang ber-KB sebanyak 55% yang artinya dari total 60 orang kelompok BKR sebanyak 30 orang telah melakukan KB. Kemudian pada tahun 2017 menurun menjadi 54%, dan kembali meningkat 1 % di tahun 2018 dan pada akhir tahun 2020 meningkat menjadi 84%. Peningkatan ini menunjukkan tingkat partisipasi remaja yang cukup baik dalam menggunakan alat kontrasepsi. Data cakupan anggota bina keluarga remaja ber-KB dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 259 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber-KB
Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	33	1.055	914	459	656
2	Jumlah anggota kelompok BKR	60	1.966	1.651	600	783



3	Cakupan anggota BKR ber-KB	55%	54%	55%	77%	84%
---	----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(15) Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia ber-KB

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana periode 2016-2020 menunjukkan persentase anggota bina keluarga lansia yang ber KB mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan dan sempat mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar 13%. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan anggota kelompok BKL sebesar 7,9% dan penurunan anggota kelompok yang ber-KB sebesar 26,3% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 68% yang artinya dari total 600 anggota kelompok BKL sebanyak 408 orang yang telah menggunakan alat kontrasepsi. Pada akhir tahun 2020 cakupan anggota BKL ber-KB mencapai 80%. Data cakupan bina keluarga lansia ber-KB dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 260 Cakupan Anggotan Bina Keluarga Lansia ber-KB
Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	33	1.055	914	459	656
2	Jumlah anggota kelompok BKR	60	1.966	1.651	600	783
3	Cakupan anggota BKR ber-KB	55%	54%	55%	77%	84%

Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(16) Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2020 terdapat 1 pusat pelayanan keluarga sejahtera dari 5 kecamatan yang ada, yaitu bertempat di kecamatan tobadak. Data pusat pelayanan keluarga sejahtera dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 261 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
Di Kabupaten Tengah Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	21	380	280	408	766

2	Jumlah anggota kelompok BKL	60	565	520	600	952
3	Cakupan anggota BKL ber-KB	35%	67%	54%	68%	80%

Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(17) Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja

Menurut hasil Sensus tahun 2019 perkiraan jumlah pemuda sebesar 64,19 jiwa atau seperempat dari total penduduk Indonesia. Disamping jumlah banyaknya tercatat angka kelahiran di usia remaja yang masih tinggi. Permasalahan lain yang cukup memprihatinkan pada remaja adalah pernikahan dini, perilaku seks pranikah dan penyalahgunaan Napza. Sekitar 2,52% pemuda di Indonesia melakukan perkawinan dibawah umur 16 tahun. Dari 100 pemuda perempuan sekitar 6 diantaranya pernah melahirkan ketika umurnya belum mencapai 20 tahun.

Dalam rangka merespon permasalahan remaja tersebut, BKKBN menyediakan PIK R/M atau Pusat Informasi Konseling Remaja/ Mahasiswa. Program ini merupakan program Genre yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan sehingga mereka mampu melaksanakan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana serta menikah dengan perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi.

Berdasarkan data dari Dinas Penduduk dan Keluarga periode 2016-2019 menunjukkan jumlah PIK R/M yang ada di kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2016 dan 2017 berjumlah 17 yang tersebar di 5 kecamatan, kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 43 PIK R/M dan menurun pada tahun 2019 menjadi 32 PIK R/M. PIK R/M ini diharapkan bisa menjadi wadah bagi remaja untuk berkumpul, bercerita, berkreaitifitas dan saling berbagi informasi. Data cakupan remaja dalam pusat informasi konseling remaja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 262 Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PIK R/M	17	17	42	32	32
2	Jumlah kecamatan	5	5	5	5	5
3	Cakupan remaja dalam pusat konseling	34%	34%	84%	64%	64%

Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(18) Cakupan PKB/ PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB

PKB merupakan singkatan dari Penyuluh Keluarga Berencana sedangkan PKLB merupakan Petugas Lapangan Keluarga Berencana. Keduanya merupakan petugas BKKBN yang berkedudukan di tingkat lini lapangan yang menjadi andalan terdepan dalam mewujudkan keberhasilan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). PKB dan PLKB masing-masing bertugas melaksanakan, mengelola, menggerakkan dan memberdayakan serta menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana bersama institusi masyarakat perdesaa/perkotaan ditingkat desa/kelurahan.

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2020 menunjukan bahwa dalam empat tahun terakhir cakupan PKB/PLKB yang didayahgunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk telah mencapai 100% yang artinya keseluruhan jumlah PKB/PLKB telah didayagunakan dengan baik. Data cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 263 Cakupan PKB/ PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	17	17	19	19	19
2	Jumlah PKB/PLKB	17	17	19	19	19
3	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(19) Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang ber-KB Mandiri

Cara ber-KB Mandiri adalah salah satu upaya mengendalikan kemungkinan kehamilan tanpa melibatkan alat kontrasepsi apapun, baik kondom maupun kontrasepsi hormonal. Misalnya Pil KB, susuk, suntikan, dan spiral (IUD) Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2020 menunjukan bahwa dalam empat tahun terakhir cakupan PUS anggota UPPKS yang ber-KB Mandiri setiap tahunnya mengalami peningkatan walaupun satgnan di tahun 2019. Pada tahun 2019 jumlah cakupan PUS anggota UPPKS yang ber-KB Mandiri sebanyak 405 orang atau sekitar 63% dari total keseluruhan anggota UPPKS sebesar

640 orang. Pemerintah daerah melalui dinas terkait harus tetap melakukan pengawasan, bimbingan serta pendampingan bagi anggota UPPKS yang melakukan KB mandiri. Data cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 264 Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri	32	269	375	405	5.058
2	Jumlah anggota UPPKS	80	599	600	640	7.266
3	Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS	40%	45%	63%	63%	70%

Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(20) Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa Setiap Desa/Kelurahan

Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) merupakan seorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif dalam melaksanakan/mengelola program Keluarga Berencana Nasional ditingkat RT/RW. Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana periode 2016-2020 menunjukkan bahwa dari 54 jumlah desa jumlah petugas pembantu pembina KB sebanyak 54 orang, yang artinya bahwa setiap 1 desa terdapat 1 petugas pembantu pembina KB. Data rasio petugas pembantu pembina KB desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 265 Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah petugas pembantu Pembina KB desa	54	54	54	54	54
2	Jmlah desa/kelurahan	54	54	54	54	54
3	Rasio petugas pembantu Pembina Kb Desa	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(21) Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi

Kegiatan pelayanan KB dilapangan melibatkan dua kementerian/lemabaga, yaitu BKKBN dan Kementerian Kesehatan. BKKBN bertanggungjawab menciptakan permintaan kan layanan KB (*demand creation*), yaitu mengajak pasangan usia subur (PUS) untuk ber-KB dan menjaga PUS tersebut untuk terus aktif ber-KB melalui tenaga lini lapangan. Sementara itu, Kementerian Kesehatan bertanggungjawab terhadap sisi penawaran/*supply* yaitu dengan memberikan pelayanan KB di klinik/puskesmas/rumah sakit melalui bidan dan dokter terlatih. Kegiatan *demand creation* yang mencakup prmosi dan KIE serta penyediaan alat dan obat kontrasepsi. Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana periode 2016-2019 menunjukkan cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi yang telah melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 100% pada tahun 2016 sampai tahun 2017. Walaupun tahun 2018 sampai 2019 menurun menjadi 97%, tapi penurunan ini tidak terlalu signifikan dari target yang telah ditentukan. Data cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 266 Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah alkon per mx kontrasepsi yang tersedia di faskes dan gudang alkon	30.250	16.629	17.522	17.043	11.998
2	Perkiraan permintaan masyarakat	11.396	16.363	18.576	17.560	15.788
3	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi	265%	102%	94%	97%	76%

Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(22) Persentase Faskes Dan Jejaringnya Bekerja Sama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana periode 2016-2019 menunjukkan bahwa selama 4 tahun persentase faskes dan jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS telah mencapai 100% artinya dari 12 jumlah faskes dan jejaringnya sebanyak 12 faskes tesebut telah bekerja sama dengan BPJS. Data persentase faskes dan jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 267 Persentase Faskes dan Jejaringnya Bekerja Sama dengan BPJS Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	12	12	12	12	13
2	Jumlah faskes dan jejaring	12	12	12	12	13
3	Persentase faskes dan jejaringnya bekerja sama dengan BPJS	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(23) Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Di Setiap Desa

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana periode 2016-2019 menunjukkan bahwa selama 4 tahun cakupan penyediaan informasi data mikro di setiap desa yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah telah mencapai 100%, hal ini tentu baik karena telah melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 97,50%. Data penyediaan informasi data mikro di setiap desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 268 Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro di Setiap Desa Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia	2	2	2	2	5
2	Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga	2	2	2	2	5
3	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga setiap desa	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(24) Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga

Keluarga menjadi entitas terpenting bagi kehidupan seseorang sejak ia balita karena melalui keluarga karakter dan kebiasaan seseorang dapat terbentuk. Hilangnya peran penting keluarga dalam kehidupan seorang anak mampu menumbuhkan perilaku negatif yang ia akan bawa sampai dewasa. Oleh karena

itu melalui BKKBN membentuk 8 fungsi keluarga yang harus dipahami dan diketahui bersama yaitu: fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi lingkungan.

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa dalam empat tahun terakhir kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga sudah mencapai realisasi 100% dari target 90% yang ditentukan pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan tingkat partisipasi yang baik dari kelompok masyarakat untuk melakukan pembinaan, dan edukasi mengenai penerapan 8 peran fungsi keluarga tersebut. Data cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 269 Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga melalui 8 Fungsi Keluarga di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga 8 fungsi keluarga	5	5	5	5	5
2	Jumlah kelompok kegiatan	5	5	5	5	5
3	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(25) Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang Memahami Pengasuhan Anak

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami pengasuhan anak meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang telah memahami pengasuhan anak sebesar 120 keluarga atau sebesar 35% dari total 340 keluarga yang mempunyai balita dan anak. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 53% dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 75% yang artinya dari 1.260 keluarga yang memiliki balita dan anak sebesar 945 keluarga telah memahami cara pengasuhan anak. Hal ini menunjukkan pencapaian yang

sangat baik jika dibandingkan dengan target pada tahun 2019 sebesar 11,74%. Data cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 270 Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak yang Memahami Pengasuhan Anak Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2019

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang	120	330	572	945	1.475
2	Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak	340	620	1.040	1.260	2.475
3	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak	35%	53%	55%	75%	60%

Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

(26) Persentase Pembiayaan Program Kependudukan Melalui APBD Dan Apbdes

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa penyerapan APBD dan APDES untuk pembiayaan program kependudukan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 penyerapan anggaran hanya berkisar 3% dari total Rp. 72.675.004.019 dari dana APBD dan APBDes yang ada. Kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi 24% dan ditahun 2018 menjadi 33%, Pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 43% yang artinya bahwa dari total Rp. 7.174.572.098 anggaran yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.104.808.700. Pencapaian ini memiliki selisih 12% dari target tahun 2019 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 55%. Data Persentase pembiayaan program kependudukan melalui APBD dan APBDes dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 271 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan melalui APBD dan APBDES Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020

1	Jumlah anggaran untuk urusan PPKB	2.231.331.000	2.021.325.000	2.809.885.222	3.104.808.700	3.263.140.000
2	Jumlah APBD dan APBDes	72.675.004.019	8.427.061.516	8.427.061.516	7.174.572.098	6.479.379.919
3	Persentase pembiayaan program kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga	3%	24%	33%	43%	50%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

8) Perhubungan

(1) Rasio Ijin Trayek

Izin trayek merupakan izin yang diberikan untuk penyelenggaraan angkutan penumpang dan barang di sungai, danau dan penyebrangan pada trayek atau lintas kabupaten/kota. Berdasarkan data yang ada sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 menunjukkan bahwa tidak adanya realisasi besaran izin trayek yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah karena sejak tahun 2017 pengelolaan izin trayek tersebut telah dihapuskan. Data rasio ijin trayek dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 272 Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun 2016-2020**

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	0	0	0	0	0
2	Jumlah penduduk	0	0	0	0	0
3	Rasio Ijin Trayek	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Perhubungan kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(2) Persentase Layanan Angkutan Darat

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan menunjukkan persentase layanan angkutan darat setiap tahunnya rata-rata sebesar 14%. Tahun 2016 sampai tahun 2019 terjadi peningkatan baik jumlah angkutan maupun jumlah penumpang angkutan darat kemudian meurun drastis pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 terjadi pandemic Covid-19 yang menyebabkan adanya



pembatasan untuk keluar dari suatu wilayah. Data persentase layanan angkutan darat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 273 Persentase Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah angkutan darat	2.536	2.591	2.592	2.978	1.534
2	Jumlah Penumpang angkutan darat	10.896	10.991	19.021	20.432	10.975
3	Persentase layanan angkutan darat	13%	14%	14%	15%	14%

Sumber : Dinas Perhubungan kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(3) Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Kepemilikan KIR pada angkutan umum didefinisikan sebagai persentase jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR terhadap jumlah seluruh angkutan umum. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan menunjukkan pada tahun 2017 jumlah angkutan umum di Kabupaten Mamuju tengah sebesar 2.536 unit kendaraan dengan jumlah kepemilikan KIR sebanyak 732 atau sebesar 28% kemudian menurun sampai tahun 2019 menjadi 23%. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 58%. Artinya masih belum seluruhnya angkutan umum di Kabupaten Mamuju Tengah mengujikan kendaraannya secara berkala dua kali dalam setahun. Data persentase kepemilikan KIR angkutan umum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 274 Persentase Kepemilikan Angkutan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada tahun n	749	732	670	671	884
2	Jumlah angkutan umum pada tahun n	2.536	2.591	2.592	2.978	1.534
3	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	30%	28%	26%	23%	58%

Sumber : Dinas Perhubungan kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(4) Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas

Dalam rangka melengkapi sarana dan prasarana jalan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, Dinas perhubungan sejak tahun 2018 sudah melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 12 rambu, atau sekitar 16% dari

target yang telah ditentukan. Pada tahun 2019 jumlah rambu yang telah dipasang sebanyak 42 rambu atau meningkat menjadi 42% dari target yang telah ditentukan, dan menurun menjadi 8% pada tahun 2020 Berdasarkan dari realisasi tersebut menunjukkan bahwa pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang ada di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah masih sangat minim. Hal ini juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah dengan maksud agar supaya keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan dapat terlayani dengan optimal. Data pemasangan rambu-rambu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 275 Pemasangan Rambu-Rambu di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun n	196	0	12	42	10
2	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	216	0	77	100	125
3	Persentase pemasangan rambu-rambu	91%	0%	16%	42%	8%

Sumber : Dinas Perhubungan kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(5) Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan menunjukkan adanya peningkatan rasio Panjang jalan per kendaraan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 rasio Panjang jalan per kendaraan sebesar 2,68 kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 25,20 dan pada akhir tahun 2020 rasio Panjang jalan per kendaraan mencapai 26%. Artinya setiap 26,22 KM melayani 17.764 unit kendaraan. Data rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 276 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Jalan	46.617	46.617	465.879	465.879	465.879
2	Jumlah Kendaraan	17.352	17,430	18.481	19.028	17.764
3	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	2,68	2,67	25,20	24,48	26,22

Sumber : Dinas Perhubungan kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(6) Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah periode 2016-2020 jumlah arus penumpang angkutan umum meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah penumpang angkutan umum sebanyak 18.896 penumpang. Pada tahun 2017 meningkat 18.991 penumpang atau sekitar 0,5% dari tahun sebelumnya kemudian stagnan di tahun 2018. Pada Tahun 2019 kembali meningkat sebanyak 20.432 penumpang. Sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi 10.975 penumpang atau sebesar 53,7% dari tahun sebelumnya.

Tabel 2. 277 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	18.896	18.991	18.991	20.432	10.975

Sumber : Dinas Perhubungan kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(7) Jumlah Uji Kir Angkutan Umum (Pengujian Setiap Angkutan Umum Yang Diimpor, Baik Yang Dibuat Dan/Atau Dirakit Di Dalam Negeri Yang Akan Dioperasikan Di Jalan Agar Memenuhi Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan)

Melihat kondisi di lapangan dengan semakin bertambahnya kendaraan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya uji kendaraan bermotor maka sewajarnya juga terjadi peningkatan pada uji kir angkutan umum dan angkutan barang. Akan tetapi berdasarkan data yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah belum dilakukannya uji kir angkutan umum dan angkutan barang. Hal ini disebabkan karena belum adanya ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pengujian kendaraan tersebut. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk menjadikan sebagai salah satu prioritas dalam rangka mendukung penambahan pada penerimaan pendapatan daerah.

Tabel 2. 278 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Perhubungan kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(8) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan tahun 2016-2020 menunjukkan jumlah Pelabuhan yang ada Mamuju Tengah sebanyak 1 pelabuhan dan 1 terminal bis. Data jumlah Pelabuhan laut/udara/terminal bis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 279 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bus	1	1	1	1	1
2	Jumlah Terminal Bus	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Perhubungan kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(9) Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 sebanyak 18.991 kemudian meningkat menjadi 20.432 atau meningkat sebesar 7% dari tahun sebelumnya dan menurun pada tahun 2020 sebesar 53,7% Data Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 280 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	18.896	18.991	19.021	20.432	10.975

Sumber : Dinas Perhubungan kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(10) Jumlah Orang/Barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun

Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa jumlah orang/barang yang melalui dermaga/bandara/terminal berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2018 bahwa jumlah orang/barang yang melalui dermaga/bandara/terminal sebanyak 8.600 kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 9.380 orang/barang dan menurun menjadi 42% dari tahun sebelumnya. Data Jumlah orang/barang yang melalui dermaga/bandara/terminal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 281 Jumlah Orang/Barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Orang/Barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	6.420	8.600	9.380	10.090	4.244

Sumber : Dinas Perhubungan kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

9) Komunikasi dan Informatika

Layanan Urusan Pemerintahan Wajib (Bukan Pelayanan Dasar) pada Bidang Komunikasi dan Informatika mencakup beberapa Indikator Kinerja di antaranya yaitu, Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan, Cakupan Layanan Telekomunikasi, Persentase Penduduk yang Menggunakan Hp/telepon, Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet, Proporsi Rumah Tangga yang memiliki komputer pribadi. Dengan adanya Indikator Kinerja tersebut menggambarkan adanya ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media elektronik sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Mamuju Tengah.

(1) Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM

Berdasarkan data dari Dinas Persandian Komunikasi dan Informatika tahun 2016-2020 menunjukkan cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi di tingkat kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah telah mencapai 100%. Data cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 282 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kecamatan yang ada di dalam Kabupaten/Kota	5	5	5	5	5
2	Jumlah KIM	5	5	5	5	6
3	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	100%	100%	100%	100%	120%

Sumber : Dinas Persandian Komunikasi dan Informatika Kab.Mamuju Tengah Tahun 2021

(2) Cakupan Layanan Telekomunikasi

Berdasarkan data dari Dinas Persandian Komunikasi dan Informatika tahun 2016-2020 menunjukkan tingkat cakupan layanan telekomunikasi sebesar 3,25 Km. Data cakupan layanan telekomunikasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 283 Cakupan Layanan Telekomunikasi (KM²) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja	Tahun
-----	-------------------	-------

		2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Wilayah yang Tercoverge	0	0	0	909.640	248.000
2	Luas Wilayah Keseluruhan	0	0	0	279.626	279.626
3	Cakupan Layanan Telekomunikasi	0	0	0	3,25	0,88

Sumber : Dinas Persandian Komunikasi dan Informatika Kab.Mamuju Tengah Tahun 2021

(3) Persentase Penduduk yang menggunakan HP/Telpon

Berdasarkan data dari Dinas Persandian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa pada tahun 2019 persentase penduduk yang sudah menggunakan HP/Telpon sebesar 0,54% dari total 143.272 jumlah penduduk. Data persentase penduduk yang menggunakan HP/Telpon dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 284 Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telpon Tahun Kabupaten Mamuju Tengah 2016-2020

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk menggunakan HP/telpon	0	0	0	78.492	79.706
2	Jumlah penduduk	0	0	77.916	143.272	145.756
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telpon	0	0	0	0,54%	0,55%

Sumber : Dinas Persandian Komunikasi dan Informatika Kab.Mamuju Tengah Tahun 2021

(4) Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet

Berdasarkan data dari Dinas Persandian Komunikasi dan Informatika menunjukkan sampai tahun 2020 proporsi rumah tangga yang dengan akses internet sebesar 3. Data proporsi rumah tangga dengan akses internet dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.273 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses internet	0	0	0	88.700	89.252
2	Jumlah rumah tangga	0	0	34.948	34.348	34.858
3	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0	0	0	3	3

Sumber : Dinas Persandian Komunikasi dan Informatika Kab.Mamuju Tengah Tahun 2021

(5) Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer

Berdasarkan data dari Dinas Persandian Komunikasi dan Informatika menunjukkan pada tahun 2019 proporsi rumah tangga yang memiliki komputer sebesar 7,46 dan menurun sebesar 0,11 persen di tahun 2020. Data proporsi rumah tangga yang memiliki Komputer dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 285 Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer
Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer	0	0	0	256.087	256.343
2	Jumlah rumah tangga	0	0	34.948	34.348	34.858
3	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer	0	0	0	7,46	7,35

Sumber : Dinas Persandian Komunikasi dan Informatika Kab.Mamuju Tengah Tahun 2021

10) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan Pekerjaan. Semakin banyak jumlah koperasi yang aktif, diharapkan semakin berdaya ekonomi kerakyatan, menurun jumlah kemiskinan dan menurun jumlah pengangguran. Selain itu, dengan dukungan kepada pelaku UKM ataupun usaha mikro dalam mengembangkan maupun memahami bagaimana cara memulai usaha yang benar dan berinovasi sesuai dengan keahlian yang dimiliki, diharapkan dapat menjadi harapan bertumbuh nya pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu menunjukkan tingkat persentase koperasi yang aktif cenderung meningkat setiap tahunnya walaupun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2018 jumlah koperasi yang aktif sebesar 27% dan meningkat sebesar 4% ditahun 2019 dan 1% ditahun 2020. Terkait BPR/LKM yang aktif selama lima tahun terakhir sebesar 100%. Sedangkan presentase usaha mikro dan kecil dari tahun 2017-2019 sebesar 100% kemudian menurun di tahun 2020 menjadi 89%. Data indikator Urusan Koperasi, usaha kecil dan menengah kabupaten mamuju tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 286 Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase koperasi aktif	0	28%	27%	31%	32%
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	0%	0%	0%	0%	0%
3	Persentase BPR/LKM aktif	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	0%	100%	100%	100%	89%

Sumber : Dinas DPM-PTSP dan Koperasi UKM Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

11) Penanaman Modal

Majunya perekonomian suatu daerah memang tak dapat lepas dari peran investasi. Investasi menjadi hal penting karena merupakan modal utama dalam menggerakkan potensi - potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah. Sejalan dengan Otonomi Daerah di mana daerah mempunyai hak untuk mencari sumber - sumber pendapatan daerah, maka pemerintah daerah saat ini berlomba - lomba untuk menggali potensi ekonomi di daerahnya agar berkembang dan menghasilkan pendapatan daerah. Salah satu sektor yang mampu menjadi sumber pendapatan asli daerah adalah sektor investasi.

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menunjukan pada tahun 2018-2019 jumlah investor berskala nasional sebanyak 5 investor, kemudian pada tahun 2020 bertambah 1 investor menjadi 6 investor. Terkait jumlah investasi tahun 2019 mencapai Rp 1.026.822.159.311 kemudian menurun di tahun 2020 sebesar 479.791.548.431. Rasio daya serap tenaga kerja tertinggi pada tahun 2016 dimana dari total 6 PMA/PMD sebanyak 3.241 jumlah tenaga kerja yang berkerja di perusahaan. Kemudian terus mengalami penurunan sampai pada tahun 2020 tercatat rasio daya serap sebesar 195 yang artinya dari total 6 PMA/PMDN jumlah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan sebanyak 1.171 tenaga kerja. Untuk realisasi nilai PMDN mengalami peningkatan yang cukup baik di akhir tahun 2020 dimana nilainya mencapai 47 persen yang sempat menurun di tahun 2019 menjadi 1 persen. Data indikator Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Mamuju tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 287 Indikator Kinerja Penanaman Modal
Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	3	6	5	5	6
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	361.720.968.757	1.898.020.985.085	962.851.756.675	1.026.822.159.311	479.791.584.431
3	Rasio daya serap tenaga kerja	158	540	201	234	195
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	100%	54%	25%	1%	47%%

Sumber : Dinas DPM-PTSP dan Koperasi UKM, 2021

12) Kepemudaan dan Olahraga

Layanan Urusan Pemerintahan Wajib (Bukan Pelayanan Dasar) pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga mencakup beberapa Indikator Kinerja diantaranya yaitu, Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif, Persentase Wirausaha Muda, Cakupan Pembinaan Olahraga, Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi, Cakupan Pembinaan Atlet Muda, Jumlah Atlet Berprestasi, Jumlah Prestasi Olahraga.

Berdasarkan Data Tabel Realisasi Indikator Kinerja Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tengah di atas, dapat di lihat bahwa persentase organisasi pemuda yang aktif pada tahun 2017-2019 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan yaitu dengan persentase 100% Persentase Wirausaha Muda pada tahun 2019 sebesar 1010%. Cakupan pembinaan olahraga pada tahun 2019 dengan

persentase 28%. Cakupan pelatih yang bersertifikat pada tahun 2019 dengan persentase 19%. Cakupan pembinaan atlet muda dengan persentase 66%. Jumlah atlet berprestasi tercatat pada tahun 2019 sebanyak 12 Atlet dengan jumlah prestasi olahraga sebanyak 12 prestasi olahraga yang di raih pada tahun 2019. Data realisasi kinerja bidang pemuda dan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 288 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga tahun 2016-2020 Kabupaten Mamuju Tengah

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif (%)	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Wirausaha Muda (%)	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan Pembinaan Olahraga (%)	10%	14%	17%	28%	30%
4	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi (%)	5%	8%	12%	19%	16%
5	Cakupan Pembinaan Atlet Muda (%)	29%	36%	42%	66%	56%
6	Jumlah Atlet Berprestasi	0	3	8	12	0
7	Jumlah Prestasi Olahraga	0	2	10	12	0

Sumber :Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab.Mamuju Tengah Tahun 2021

13) Statistik

Pembangunan dibidang statistik diarahkan pada upaya penyediaan data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan terpublikasinya data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan manajemen kebijakan serta meningkatnya mutu pelayanan statistik daerah. Berikut ini ketersediaan data dan statistik yang terintegrasi, Ketersediaan buku-buku Kabupaten dalam angka dan ketersediaan buku "PDRB" di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2016-2020 yang semuanya sudah tersedia pada setiap tahunnya. Adapun Realisasi Indikator Kinerjanya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 289 Realisasi Indikator Urusan Bidang Statistika Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku-buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



3	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
---	-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber : Dinas Persandian Komunikasi dan Informatika, Tahun 2020

14) Persandian

Layanan Urusan Pemerintahan Wajib (Bukan Pelayanan Dasar) pada Bidang Komunikasi dan Informatika mencakup Indikator Kinerja yaitu Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah. Berdasarkan data dari Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah, dapat di lihat bahwa persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah mengalami penurunan dari tahun 2018 dengan persentase 15,15 turun pada tahun 2019 dengan persentase 13,33. Penurunan persentase tersebut di akibatkan karena masih sedikitnya perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah sedangkan perangkat daerah yang bertambah.

Tabel 2. 246 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Bidang Persandian Kabupaten Mamuju tengah Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah (%)	0	0	15,15	13,33	Na

Sumber : Dinas Persandian Komunikasi dan Informatika Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

15) Kebudayaan

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016-2020 menunjukan bahwa rata-rata penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilakukan setiap tahunnya sebanyak 10 kegiatan. Untuk benda situs yang dilestarikan pada tahun 2019 sebanyak 31 situs yang tersebar di lima kecamatan, Sedangkan untuk jumlah karya budaya yang dapat direvitalisasi dan diinventarisasi sampai tahun 2019 sebanyak 23 karya budaya dan untuk jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu sebanyak 1 cagar budaya. Data realisasi indikator kinerja urusan bidang kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 290 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Bidang Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	10	10	10	10	Na

2	Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	4	15	0	31	Na
3	Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	4	11	18	23	Na
4	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	0	0	0	1	Na

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

16) Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sarana sumber belajar mandiri bagi masyarakat. Keberadaan perpustakaan di tengah masyarakat semakin diperhitungkan karena dengan adanya perpustakaan maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bertambahnya wawasan ilmu yang dimiliki dari aktivitas membaca. Data yang dirilis UNESCO apda tahun 2017 menyebutkan Indonesia berada di urutan kedua dari bawah soal literasi , persis dibawah Thailad (59) dan diatas Bostwana (61). Menurut data UNESCO minat baca masyrakat Indonesia masih sangat memperhatikan karena hanya sebesar 0.001%.

Berdasarkan data dari Dinas Perpustakaan kabupaten mamuju tengah menunjukan bahwa tingkat partisipasi pengunjung perpustakaan yang ada di kabupaten Mamuju Tengah cenderung meningkat setiap tahunnya walaupun kondisi ini masih jauh dari kondisi yang ideal. Pada tahun 2018 jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 500 pengunjung dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 1.616 pengunjung. Pada tahun 2019 jumlah koleksi buku juga meningkat sebesar 85% dari tahun sebelumnya. Data Realisasi indikator kinerja urusan bidang perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 291 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Bidang Perpustakaan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun	0	0.002	0.003	0.01	0,002
2	Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	0,2	0,3	0,01	0,02	0.09
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0.007	0.007	0.007	0.007	0,08
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan pertahun	-	22,50	41,67	134,67	21,75



5	Jumlah Koleksi judul buku perpustakaan	326	101	26	22	146
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2021

17) Kearsipan

Layanan Urusan Pemerintahan Wajib (Bukan Pelayanan Dasar) pada Bidang Kearsipan mencakup dua Indikator Kinerja yaitu persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku dan peningkatan SDM pengelola kearsipan. Berdasarkan data dari Dinas Perpustakaan menunjukan pada tahun 2020 presentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku sebesar 3%, yang artinya hanya 1 perangkat daerah dari total 33 perangkat daerah telah mengelola arsip secara baku. Sedangkan untuk peningkatan SDM pengelola kearsipan telah dilakukan sebanyak 2 kegiatan setiap tahunnya. Data indikator kinerja urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 292 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Bidang Kearsipan Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku (%)	0	0	0	3%	3%
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	0	1	2	2	2

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

2.4.4. Layanan Urusan Pilihan

1) Pariwisata

(1) Kunjungan Wisata

Kunjungan wisata di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2015 berjumlah 38.740 pengunjung meningkat menjadi 45.017 pada tahun 2019 dengan peningkatan 14 persen. Pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisata mengalami penurunan sebesar 62% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan karena adanya pandemic covid-19. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 293 Kunjungan Wisata di Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se-Kabupaten dan Kota	39.982	41.863	43.052	45.017	17.608
2	Jumlah Kunjungan Wisata yang direncanakan se-Kabupaten dan Kota	39.900	41.000	43.000	45.000	46.000
3	Kunjungan wisata	100%	102%	100%	100%	38%

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

2) Pertanian

(1) Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB

PDRB memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sektor Pertanian/Perkebunan merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB di Kabupaten Mamuju Tengah dengan rata-rata kontribusi setiap tahunnya sebesar 87 persen, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 294 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB
Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan	61.26	61.37	62.88	62.17	62,50
2	Jumlah PDRB	70.43	70.40	71.44	71.20	71,81
3	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	87%	87%	88%	87%	87%

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(2) Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2015 sebesar 9 persen meningkat sampai pada tahun 2020 menjadi 18 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 295 Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Di
Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun
----	--------	-------



		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kontribusi sektor pertanian (palawija)	6.63	8.57	7.75	10.73	11.39
2	Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan	61.26	61.37	62.88	62.17	62.50
3	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	11%	14%	12%	17%	18%

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(3) Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2017 sebesar 65 persen kemudian menurun pada tahun 2019 menjadi 59 persen dan kembali menurun menjadi 56 persen atau sekitar 3 persen dari tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 296 Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kontribusi perkebunan (tanaman keras)	0.01	39.61	41.64	36.51	34.93
2	Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan	61.26	61.37	62.88	62.17	62.40
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	0%	65%	66%	59%	56%

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(4) Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB

Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB di Kabupaten Mamuju Tengah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 memiliki nilai yang sama yaitu 100 persen, artinya jumlah produksi padi/bahan pangan utama semuanya berasal dari hasil kelompok petani. Berikut tabel kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB di Kabupaten Mamuju Tengah:

Tabel 2. 297 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020

1	Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani (ton) Tahun n	47,016.40	92,896.40	159,558.34	98,018.15	46.493,6
2	Jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah (ton) Tahun n	47,016.40	92,896.40	159,558.34	98,018.15	46.493,6
3	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(5) Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan produktivitas 1.193 persen pada tahun 2018, dengan luas areal sebesar 10,779 Ha dapat menghasilkan Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya sebesar 128,598.84 Ton, akan tetapi produksi ini menurun pada tahun 2019 menjadi 68,744 Ton atau sekitar 46 persen kemudian menurun kembali ditahun 2020 sebesar 432%.. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 298 Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)	50,968.93	92,896.40	128,598.84	68,744.00	46.493,58
2	Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)	10,779.00	10,779.00	10,779.00	10,779.00	11.004,00
3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	473%	862%	1,193%	638%	423%

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(6) Cakupan Bina Kelompok Petani

Cakupan bina kelompok tani di Kabupaten Mamuju Tengah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tidak ada yang melebihi angka 8 persen, artinya jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda sangat sedikit jika

dibandingkan dari total kelompok tani yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah, pada tahun 2015 cakupan bina kelompok petani berada pada angka 1,28 persen kemudian meningkat pada Tahun 2016 meningkat menjadi 7,95 persen, ini merupakan angka tertinggi dari cakupan bina kelompok tani pertahun, kemudian mengalami penurunan sampai pada tahun 2019 dengan menyentuh angka 1,65 persen, sedangkan tahun 2020 menurun menjadi 1,10 persen untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 299 Cakupan Bina Kelompok Petani Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n	87	63	35	18	12
2	jumlah kelompok tani	1,094	1,094	1,094	1,094	1.094
3	Cakupan bina kelompok petani	7.95%	5.76%	3.20%	1.65%	1,10%

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

3) Kehutanan

Hutan adalah salah satu ekosistem yang sangat penting bagi bumi. Pemanasan global yang terjadi akhir-akhir ini dalam implikasi dari adanya deforestasi dan degradasi hutan. Kebijakan kementerian kehutanan dalam pengelolaan hutan yang mengamanatkan terbentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan di tiap daerah, diharapkan mampu menjawab berbagai macam permasalahan pengelolaan hutan lestari. Pemerintah daerah menaruh harapan kepada organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan, guna mengembalikan dan mempertahankan hutan lestari serta mengangkat perekonomian masyarakat sehingga bisa menciptakan peningkatan pembangunan daerah. Berdasarkan data yang ada menunjukkan luas hutan produksi tetap sebesar 30.064,83 ha yang tersebar di semua kecamatan yang ada di kabupaten mamuju tengah dengan luas hutan produksi terluas berada di kecamatan tobadak sebesar 15.959,27 ha, dan luas hutan produksi terkecil di kecamatan budong-budong dengan luas sebesar 0,12 ha. Untuk hutan produksi luas sebesar 96.796,34 ha yang tersebar di tiga kecamatan yaitu. Kecamatan tobadak, kecamatan topoyo dan kecamatan karossa. Sedangkan hutan lindung dengan luas 16.109,6 ha yang tersebar di dua kecamatan yaitu kecamatan tobadak, dan kecamatan karossa. Data luas Kawasan hutan menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 300 Kerusakan Kawasan Hutan di Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Hutan Produksi Tetap (HP)	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Hutan Lindung (HL)
1	Pangale	410,55	-	-
2	Budong-Budong	0,12	-	-
3	Tobadak	15.959,27	2.855,43	494,37
4	Topoyo	10.977,74	42.491,71	-
5	Karossa	2.717,15	9.129,92	15.615,23
Mamuju Tengah		30.064,83	96.796,34	16.109,6

Sumber: BPS Kab.Mamuju Tengah, Tahun 2021

Luas kawasan lindung di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 26,795 Ha sedangkan total luas kawasan hutan 220,464 Ha, jadi rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan sebesar 0.12, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

4) Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan energi dan sumber daya mineral merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tingkat provinsi. Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya pada tahun 2020 jumlah pelanggan listrik sebanyak 27.662 pelanggan atau meningkat sebesar 3, 15 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan bertambahnya permintaan dan kebutuhan kapasitas daya oleh aparat daerah dan masyarakat pendatang baru dari daerah lain di tahun pertama yang bekerja mengisi organisasi pemerintahan dan minat masyarakat luar yang tertarik berdomisili di kabupaten ini. Jumlah pelanggan listrik di kabupaten mamuju tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 301 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju tengah Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Jumlah Pelanggan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Budong-Budong	-	3.863	4.829	5.530	5.664
2	Pangale	-	1.908	2.385	2.798	3.107
3	Topoyo	-	5.232	6.540	7.671	7.805
4	Karossa	-	3.409	4.261	4.864	4.998
5	Tobadak	-	4.152	5.190	5.954	6.088
Jumlah		-	18.564	23.205	26.817	27.662

Sumber: Mamuju Tengah Dalam Angka, Tahun 2021

2.4.5. Layanan Urusan Penunjang

1) Perencanaan Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah telah disahkan menjadi Peraturan Daerah, yaitu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2013-2025. Kemudian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah juga telah ditetapkan menjadi peraturan daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2021. Berkaitan dengan perencanaan tata ruang wilayah, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah juga telah menetapkan Peraturan Daerah terkait perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Mamuju Tengah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017-2037. Hal ini bermakna bahwa selama kurun waktu 2017-2019 telah ada dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi acuan dan terlegitimasi. Selain itu setiap tahun Kabupaten Mamuju Tengah dalam menjabarkan dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah juga telah menetapkan dokumen tahunan yang setiap tahunnya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, dalam nomenklatrunya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

(1) Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda

Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah telah disahkan menjadi Peraturan Daerah, yaitu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2013-2025.

Tabel 2. 302 Ketersediaan Dokumen RPJPD di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2013-2025

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappeda Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021



(2) Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah juga telah ditetapkan menjadi peraturan daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2021

Tabel 2. 303 Ketersediaan Dokumen RPJMD di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2021

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappeda Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(3) Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati setiap tahunnya. Dokumen perencanaan tahunan daerah masih perlu ditingkatkan kualitasnya dengan menaati jadwal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah serta mengoptimalkan proses evaluasi perencanaan pembangunan daerah, sehingga dokumen bisa menjadi rujukan, acuan pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang lebih berkualitas.

Tabel 2. 304 Ketersediaan Dokumen RKPD di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada/Perbup	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappeda Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(4) Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan Dengan Perda

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah juga telah menetapkan Peraturan Daerah terkait perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Mamuju Tengah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017-2037. Hal ini bermakna bahwa selama kurun waktu 2017-2019 telah ada dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi acuan dan terlegitimasi.

Tabel 2. 305 Ketersediaan Dokumen RTRW di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda	-	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappeda Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dokumen perencanaan daerah baik itu jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan dari tahun 2017-2020 semuanya telah ditetapkan dengan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah.

(5) Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD

Program RKPD didasarkan pada program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenan. Tahun 2016 hingga 2021 merupakan periode RPJMD Mamuju Tengah yang pertama bagi Kabupaten Mamuju Tengah yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2019. Akan tetapi, terdapat banyak kekurangan pada dokumen tersebut yang salah satu akibatnya banyaknya program yang bermuculan di luar dari program yang diatur di dalam RPJMD. Selain itu, kurangnya kontrol dalam penyusunan dokumen perencanaan juga disinyalir menjadi salah satu penyebab. Barulah pada Perubahan RPJMD melalui Perda Nomor 1 Tahun 2019 Mamuju Tengah memperbaiki kesalah tersebut selain itu penerapan perencanaan berbasis e-planning menambah kekuatan kontrol akan proses perencanaan sehingga konsistensi dapat di jaga. Pada tahun 2019 program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD sebesar 100%. Sejumlah 133 program yang ditetapkan pada dokumen RPJMD dan semuanya terakomodir ke dalam dokumen RKPD. Kualitas perencanaan pembangunan daerah diukur dengan kesesuaian perencanaan program yang membandingkan kesesuaian antara program di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Program yang ada pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai berikut:

Tabel 2. 306 Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020



1	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD (%)	262,13	262,13	336,686	100	100
2	Jumlah Program RKPD Tahun berkenaan	443	443	569	133	133
3	Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	169	169	169	133	133

Sumber: Bappeda Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(6) Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD

Program RKPD didasarkan pada program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan dan terjabarkan dalam APBD.

Tabel 2. 307 Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (%)	262,13	262,13	363,686	100	100
2	Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan	443	443	569	133	133
3	Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	169	169	169	133	133

Sumber: Bappeda Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(7) Penjabaran Kesesuaian Rencana Pembangunan Daerah dengan RTRW Kabupaten Mamuju Tengah

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mamuju Tengah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah pada tahun 2017 melalui Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2017 sehingga untuk kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada tahun 2016 belum dapat ditentukan dan pada tahun 2017 hingga tahun 2020 berdasarkan program / kegiatan yang terdapat pada RKPD dinyatakan semua telah sesuai dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik Pola Ruang maupun Struktur Ruang.

Tabel 2. 308 Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	-	100	100	100	100
2	Kesesuaian program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang	-	443	569	133	133
3	Dokumen RTRW	-	443	569	133	133

Sumber: Bappeda Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

2) Keuangan

(1) Opini BPK Terhadap laporan keuangan

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan pengelolaan keuangan negara, pemerintah daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik tersebut saat ini telah menjadi sasaran kinerja Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah dengan indikator opini WTP oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan nilai WTP. Sebagai perbandingan dengan capaian Kinerja tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah meraih predikat opini WTP terhadap laporan keuangan daerah selama 5 tahun secara berturut-turut. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen dari seluruh manajemen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk secara konsisten menjaga dan mentati aspek-aspek penting dalam siklus pengelolaan keuangan. Selain itu, keberhasilan tersebut menunjukkan tata kelola keuangan yang lebih baik, namun predikat tersebut tetap harus dipertahankan, olehnya itu Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan peran pengawasan secara berkelanjutan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui optimalisasi pengawasan melalui pembinaan, pendampingan, evaluasi dan monitoring dan revidi laporan keuangan.



**Tabel 2. 309 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020**

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(2) Persentase SILPA

Pada perkembangannya SILPA APBD Kabupaten Mamuju Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir secara persentase mengalami pola yang berfluktuatif pada tahun 2016 persentase SILPA sebesar 1 persen, kemudian meningkat pada tahun 2017 meningkat menjadi 4 persen, dan menurun ditahun 2018 sebesar 1 persen dan tetap stagnan 1 persen di tahun 2019. Data persentase SILPA dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 310 Persentase SILPA di Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun 2016-2020**

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Total SILPA	5.930.346.917	21.695.988.117	7.550.931.573	7.940.595.045	18.639.380.591,31
Total APBD	622.136.938.962	516.080.740.404	580.727.954.454	814.693.378.080	649.360.270.502,23
Persentase SILPA	1%	4%	1%	1%	2,8%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(3) Persentase Program/ kegiatan yang tidak terlaksana

Berdasarkan data dari Badan Keuangan selama lima tahun terakhir menunjukan presentase program yang tidak terlaksana dalam APBD mengalami pola yang berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2016 presentase program yang tidak terlaksana mencapai 0,67 persen artinya dari total 443 program didalam APBD sebanyak 3 program yang tidak terlaksana, kemudia pada tahun 2018 menurun menjadi 0,35 persen dan kembali meningkat di tahun 2020. Peninngkatan ini disebabkan karena penurunan jumlah program APBD yang dilaksanakan. Terkait dengan presentase kegiatan yang tidak dilaksanakan dalam APBD belum dapat ditampilkan karena belum tersedianya data dari dinas terait.

**Tabel 2. 311 Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana
Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020**

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Program	0,67	0,67	0,35	0,75	Na
2	Jumlah program dalam APBD yang tidak terlaksana	3	3	2	1	Na
3	Total Program dalam APBD	443	443	569	133	Na
4	Persentase Kegiatan	-	-	-	-	Na
5	Jumlah kegiatan dalam APBD yang tidak terlaksana	17	18	7	36	Na
6	Total kegiatan dalam APBD	-	-	-	-	Na

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(4) Persentase Belanja Pendidikan

Persentase belanja pendidikan dalam memenuhi amanat undang-undang yaitu sebesar 20 persen dari APBD. Namun realisasi selama lima tahun terakhir menunjukkan belum mencapai 20 persen. Pada tahun 2016 presentase belanja Pendidikan sebesar 13 persen kemudian meningkat pada tahun 2019 mencapai 16 persen. Pada tahun 2020 menurun menurun 4 persen. Yang artinya dari total APBD sebesar Rp 649.360.370.502,23, realisasi untuk Pendidikan hanya sebesar Rp 23.764.452.153 adapun hal di Kabupaten Mamuju Tengah dalam lima tahun terakhir. Data persentase belanja Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 312 Persentase Belanja Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun 2016-2020**

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase belanja pendidikan	13	16	13	16	4
Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan	81.028.762.509	84.209.467.423	75.475.807.538	129.642.865.082	23.764.452.153
Total APBD	622.136.938.962	516.080.740.404	580.727.954.454	814.693.378.080	649.360.270.502,23

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2020

(5) Persentase Belanja Kesehatan

Persentase belanja kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah dalam lima tahun terakhir. Pada Tahun 2016 presentase belanja Kesehatan sebesar 14 persen, kemudian meningkat pada tahun 2017 mencapai 15 persen, dan kembali menurun

pada tahun 2018 menjadi 14 persen. Pada tahun presentase belanja Kesehatan pada APBD sebesar 18 persen kemudian menurun sebesar 10% di tahun 2020.

Tabel 2. 313 Persentase Belanja Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase belanja kesehatan	14	15	14	18	8
2	Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan	84.680.119.398	78.782.560.378	79.118.360.378	147.744.904.263	49.852.499.549,77
3	Total APBD	622.136.938.962	516.080.740.404	580.727.954.454	814.693.378.080	649.360.270.502,23

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(6) Perbandingan antara BL dan BTL Bagi hasil Kabupaten

Persentase belanja Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung di Kabupaten Mamuju Tengah dalam lima tahun terakhir juga berfluktuatif, pada tahun 2015 sebanyak 40%, dan yang terendah pada tahun 2019 sebanyak 20%

Tabel 2. 314 Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Belanja Langsung	479.641.277.284	366.304.107.745	428.586.639.403	505.045.876.290	360.325.301.215,13
2	Total APBD	622.136.938.962	516.080.740.404	580.727.954.454	814.693.378.080	649.360.270.502,23
3	Perbandingan Belanja Langsung	77%	71%	74%	62%	55%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(7) Penetapan APBD

Idealnya suatu APBD ditetapkan lebih awal sebelum tahun anggaran berakhir. Dalam penetapan APBD berdasarkan data antara tahun 2015 sampai dengan 2019 jadwal penetapannya di bulan Desember.

Tabel 2. 315 Penetapan APBD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Penetapan APBD	No. Perda dan Tanggal	No.3 Tahun 2015 Tanggal 30 Nov 2015	No.10 Tahun 2016 Tanggal 30 Nov 2016	No.15 Tahun 2017 Tanggal 30 Nov 2017	No.8 Tahun 2018 Tanggal 30 Nov 2018	No. 3 Tahun 2020 Tanggal 14 Okt 2020

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

3) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(1) Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Diklat

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan daerah. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan Kabupaten Mamuju Tengah, pada rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk tahun 2016 sampai 2019 tidak ada perubahan yakni selama 127 hari tiap tahunnya, dimana ketentuan lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan telah di atur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 12 Tahun 2018 yang meliputi *On Campus* yang dilaksanakan di Lembaga Diklat dan *Off Campus* dilaksanakan di tempat pegawai/peserta Pendidikan dan Pelatihan tersebut ditugaskan baik pada Instansi Pusat maupun Daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 316 Rata-Rata Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	3440 Jpl	1160 Jpl	56 Jpl	1944 Jpl	1200 Jpl

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pelatihan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(2) Persentase ASN yang mengikuti Diklat Formal

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada Instansi Pemerintah Kabupaten Daerah Mamuju Tengah, dimana untuk tahun 2016

merupakan persentase yang tertinggi yaitu 28,44%. Sedangkan persentase yang terendah pada tahun 2018 yaitu 0,46%. Adapun persentase tinggi rendahnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dipengaruhi oleh pada Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan Jumlah total ASN. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 317 Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase ASN mengikuti DIKLAT Formal (%)	28,44	9,37	0,46	12,68	8,08

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pelatihan Kab. Mamuju Tengah, 2021

(3) Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, dimana untuk tahun 2017 merupakan persentase yang tertinggi yaitu 15,04%. Sedangkan persentase yang terendah pada tahun 2020 yaitu 0,33% dengan satu orang peserta pelatihan dikarenakan adanya situasi yang tidak memungkinkan yakni adanya virus covid-19. Adapun persentase tinggi rendahnya Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural pada Instansi Pemerintah Kabupaten Daerah Mamuju Tengah tergantung pada Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural dan Jumlah total jabatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 318 Persentase Pejabat ASN yang mengikuti DIKLAT Struktural di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pejabat ASN mengikuti DIKLAT Struktural (%)	13,10	15,03	10,86	7,72	0,33
2	Jumlah Pejabat ASN yang telah Mengikuti Diklat Struktural	38	43	34	23	1
3	Jumlah Total jabatan	290	286	313	298	3.017

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pelatihan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(4) Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi

Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2016 ke

tahun 2017. Dimana, peningkatan jumlah jabatan pimpinan tinggi pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, meningkat secara signifikan disebabkan oleh adanya Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2017 yang sekaligus mengisi hampir seluruh kursi jabatan pimpinan tinggi yang lowong pada tahun 2016. Sedangkan jumlah jabatan pimpinan tinggi pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan yang tidak begitu signifikan. Adapun penyebab tren jumlah jabatan pimpinan tinggi pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah mengalami penurunan dikarenakan beberapa dari pemilik atau pemangku jabatan pimpinan tinggi pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah telah mencapai masa purna bhakti atau pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 319 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Jabatan pimpinan tertinggi pada instansi pemerintah	14	32	31	29	26

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pelatihan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(5) Jumlah Jabatan Administrasi

Jumlah jabatan administrasi pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2016 – 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu 546 Jabatan turun menjadi 540 jabatan administrasi. Penurunan tren jumlah jabatan administrasi pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju disebabkan oleh masih banyaknya kursi jabatan administrasi pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2016 – 2018 yang lowong. Lowongnya atau tidak terisinya kursi jabatan administrasi tersebut dipengaruhi oleh masih kurangnya jumlah pegawai negeri sipil (PNS) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah serta para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada belum memenuhi kualifikasi atau syarat untuk menduduki jabatan administrasi tersebut. Sedangkan jumlah jabatan administrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang pada tahun 2018 berjumlah 540 jabatan administrasi meningkat menjadi 619 jabatan administrasi pada tahun 2020. Peningkatan tren jumlah jabatan administrasi pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dipengaruhi oleh makin bertambahnya jumlah pegawai negeri sipil (PNS) pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dan secara

kuantitas jumlah pegawai yang telah memenuhi kualifikasi atau syarat untuk menduduki jabatan administrasi juga ikut bertambah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 320 Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Jabatan pimpinan tertinggi pada instansi pemerintah	546	545	540	563	619

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pelatihan Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(6) Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu

Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yang mana jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada tahun 2016 berjumlah 952 jabatan fungsional tertentu meningkat menjadi 1.230 jabatan fungsional tertentu pada tahun 2020. Peningkatan jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dipengaruhi oleh pengusulan formasi kebutuhan pegawai negeri sipil (PNS) daerah, dimana tenaga pendidik dan kesehatan atau medis menjadi prioritas utama dalam penerimaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Sehingga jabatan fungsional tertentu di Kabupaten Mamuju Tengah di dominasi oleh tenaga pendidik dan kesehatan atau medis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2. 321 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Jabatan pimpinan tertinggi pada instansi pemerintah	546	545	540	563	619

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pelatihan Kabupaten Mamuju Tengah, 2021

4) Penelitian dan Pengembangan

Kelitbangan adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di lingkungan pemerintahan daerah. Didalam kegiatan kelitbangan terdapat beberapa tahapan pengkajian yang meliputi Penelitian daerah,

Pengembangan daerah dan Inovasi daerah. Peningkatan kuantitas dan kualitas kelitbangan serta kualitas sumber daya manusia yang diimplementasikan membutuhkan kerjasama dari unsur-unsur didalam maupun diluar, yang memiliki visi dan misi yang sama dalam memajukan hasil-hasil kelitbangan. Penguatan kelitbangan tidak hanya dapat dilakukan melalui tema-tema yang sinkron dengan program-program pemerintah daerah, tetapi besaran anggaran pelaksanaan kegiatan kelitbangan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan melalui kerjasama dengan instansi lain serta dampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang lebih signifikan, juga menjadi faktor kunci.

a. Penerapan Sistem Inovasi Daerah

Strategi untuk menjalankan arah kebijakan Penguatan sistem inovasi daerah adalah Penerapan road-map Sistem Inovasi Daerah yang didukung oleh pengembangan iklim inovasi daerah di kalangan Pemerintah dan Masyarakat, fasilitasi dan implementasi kebijakan serta program/kegiatan yang mengandung inovasi daerah dengan fokus pada inovasi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah pada masing-masing perangkat daerah Pengembangan kolaborasi multi pihak lingkup internal dan eksternal pemerintah daerah dalam mematkan dan memberlanjutan pencapaian inovasi daerah, koordinasi untuk implementasi bagi inovasi yang telah dibuat oleh sejumlah SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim), penilaian dan pemberian insentif kepada perangkat daerah

(1) Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

kurangnya koordinasi perangkat daerah dengan bidang litbang terkait fungsinya dalam penelitian dan pengembangan yang menyebabkan masih banyak PD yang melakukan kajian sendiri dimana kegiatan tersebut melekat pada renstra maupun renja perangkat daerah. oleh karena itu data kelitbangan masih sangat kurang. 2. keterbatasan anggaran terkait kelitbangan daerah.

Tabel 2. 322 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100	100	100	67	100

Sumber: Bappeda Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(2) Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

kurangnya koordinasi perangkat daerah dengan bidang litbang terkait fungsinya dalam penelitian dan pengembangan yang menyebabkan masih banyak PD yang melakukan kajian sendiri dimana kegiatan tersebut melekan pada renstra maupun renja perangkat daerah. oleh karena itu data kelitbangan masih sangat kurang. 2. keterbatasan anggaran terkait kelitbangan daerah.

Tabel 2. 323 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	100	100	88	100

Sumber: Bappeda Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(3) Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah

yang berposisi terbaik dalam pengembangan inovasi daerah. tidak adanya laporan ataupun inovasi yang diusulkan dari perangkat daerah kepada bidang litbang melalui seksi inovasi dikarenakan masih kurangnya koordinasi dan pemahaman tupoksi seksi inovasi pada bidang litbang oleh perangkat daerah.

Tabel 2. 324 Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Inovasi	0	0	3	15	9

Sumber: Bappeda Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021

(4) Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah

adanya kegiatan yang melekat pada renstra bidang litbang terkait kebijakan inovasi, namun belum ada inovasi yang diusulkan dari perangkat daerah dikarenakan masih kurangnya koordinasi dan pemahaman tupoksi seksi inovasi pada bidang litbang oleh perangkat daerah.

Tabel 2. 325 Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Daerah Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di daerah	0	0	0	0	4

2	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan	1	3	1	1	3
---	--	---	---	---	---	---

Sumber: Bappeda Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2021

5) Pengawasan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 yang menyatakan “Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian yang tidak terputus yang dimulai dengan hasil perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindak lanjuti

(1) Persentase Tindak Lanjut Temuan

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan. Untuk tahun 2018 capaian kinerja cukup optimal mencapai 15 temuan dan pada tahun 2019 sebanyak 67 temuan dan tahun 2020 sebanyak 68 temuan yang ditindaklanjuti. Tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu pemeriksaan. Secara kumulatif penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah masih cukup rendah. Hal ini terlihat pada masih banyaknya rekomendasi yang belum sesuai atau dalam proses tindak lanjut dan belum ditindak lanjuti.

Tabel 2. 326 Persentase Tindaklanjuti Temuan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Tindak Lanjut Temuan (%)	0	0	38	72	74
2	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	0	0	15	63	68
3	Jumlah Total Temuan	0	0	40	87	92

Sumber: Inspektorat Kab. Mamuju Tengah, 2021

Diharapkan dengan peningkatan komitmen bersama dan pemberian sanksi yang lebih tegas sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku serta penguatan peran APIP dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan maupun meminimalisir penyimpangan yang dapat menyebabkan kerugian daerah/negara.

(2) Persentase Pelanggaran Pegawai

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah PNS yang direkomendasikan mendapatkan Sanksi Disiplin dibandingkan dengan total pegawai Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Berdasarkan data tersebut bahwa capaian indikator pada tahun 2016 yaitu 0,66% dan mengalami penurunan pada tahun 2017 yaitu 0,52%. Pada tahun 2018 dan 2019 terus mengalami peningkatan capaian indikator persentase pelanggaran pegawai yaitu 1,05 dan 1,22%. Hal ini disebabkan karena

keseluruhan laporan yang dikategorikan sebagai perbuatan indisipliner yang diadakan oleh Kepala OPD masing-masing ASN yang tidak mentaati jam kerja sehingga mendapatkan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Tabel 2. 327 Persentase Pelanggaran Pegawai di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pelanggaran pegawai (%)	0,66	0,52	1,05	1,22	0,87
2	Jumlah ASN yang dikenakan sanksi	10	8	16	23	16
3	Jumlah Total ASN	1.512	1.553	1.523	1.885	1.845

Sumber: Inspektorat Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(3) Jumlah Temuan BPK

Indikator Jumlah temuan BPK dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal (BPK RI) yang telah ditindaklanjuti dibandingkan dengan total seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Pada tahun 2016 sejumlah 54 temuan, dimana secara umum temua BPK RI setiap tahunnya mengalami penurunan sebanyak 15 temuan pada tahun 2017, namun pada tahun 2018 senyak 22 temuan dan tahun 2019 sebanyak 53 temuan, dan kemudian menurun di tahun 2020 sebanyak 37 temuan. Hal ini menjadi perhatian dimana dua tahun terakhir temuan terus mengalami peningkatan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti :

- 1) Masih rendahnya respon dari obrik pemeriksaan untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI;
- 2) Rekomendasi BPK yang ditujukan kepada penyedia jasa dan pejabat teknis kegiatan sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga sulit menindaklanjuti temua;
- 3) Untuk rekomendasi tentang persertifikatan asset tanah memang belum dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh tetapi dilakukan secara bertahap mengingat anggaran sertifikasi tanah dianggarkan secara bertahap tiap tahunnya;

Tabel 2. 328 Persentase dan jumlah Temuan BPK RI di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Temuan BPK RI	54	15	22	53	37

Sumber: Inspektorat Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021



6) Sekretariat Dewan

(1) Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat kelengkapan DPRD

Berdasarkan data dari Sekretariat Dewan menunjukkan bahwa selama lima tahun telah tersedia rencana kerja tahunan DPRD di Kabupaten Mamuju Tengah. Data dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. 329 Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat Kelengkapan DPRD	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber:: Sekwan DPRD Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(2) Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat kelengkapan DPRD

Berdasarkan data dari Sekretariat Dewan menunjukkan bahwa selama lima tahun telah tersusun dan terintegrasinya dokumen Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKP) DPRD di Kabupaten Mamuju Tengah. Data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 330 Integrasi Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJM Dan RKP

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKP)	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber:: Sekwan DPRD Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021

(3) Terintegrasinya Program-Program untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan PERDA dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.

Berdasarkan data dari Sekretariat Dewan, menunjukkan bahwa selama lima tahun telah terintegrasinya program-program untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan PERDA dan Anggaran kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran DPRD. Data dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2. 331 Integrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: Sekwan DPRD Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2021



Tabel 2. 332 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Pembangunan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

No	Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja					Target RPJMD 2020	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,94	5,45	5,72	5,62	-0,40	7,38	<
2	Laju Inflasi	2,23	1,8	1,8	1,43	1,78	±3,5	<
3	PDRB per kapita	15,29	21,14	22,70	23,53	23,24	28,64	<
4	Indeks Gini	0,37	0,31	0,34	0,30	0,31	0,31	=
5	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	Na	Na	Na	Na	Na	Na	-
6	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Na	Na	Na	Na	Na	Na	-
7	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	93,17	93,41	92,86	93,13	93,21	93,38	>
8	Rasio kesenjangan kemiskinan	Na	Na	Na	Na	Na	Na	-
9	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari	Na	Na	Na	Na	Na	Na	-
10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	62,89	63,64	64,43	65,10	65,71	64,72	<
11	Angka melek huruf	94,35	91,41	93,58	93,84	94,68	95,45	<
12	Angka rata-rata lama sekolah	7,10	7,13	7,23	7,24	7,46	7,45	>
13	Angka usia harapan hidup	67,36	67,52	67,79	68,06	68,33	67,85	>
14	Persentase balita gizi buruk	0,17%	0,14%	0,64%	0,63 %	0,65%	0,6%	>
15	Prevalensi balita gizi kurang	0, %	0, %	1,27%	1,42 %	8,77%	6%	>
16	Cakupan Desa Siaga Aktif	Na	Na	Na	100%	104%	95%	>
17	Angka partisipasi angkatan kerja	Na	75,34%	74,86%	69,90%	70,57%	-	-
18	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Na	74,98	75,94	69,59	70,04	-	-
19	Tingkat pengangguran terbuka	2,92%	2,78%	2,63%	2,67 %	2,71 %	2,72	>
20	Rasio penduduk yang bekerja	97,08%	97,22%	97,37%	97,33%	97,29%	-	-
21	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	1,21%	11,85%	2,05%	Na	Na	-	-
22	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	69,09%	73,25%	72,89%	63,50%	66,60%	-	-
23	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	47,21%	38,78%	49,50%	23,32%	22,6%	-	-
24	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	28,03%	24,64%	26,41%	26,12%	4%	-	-
25	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	C	C	C	=



No	Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja					Target RPJMD 2020	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
26	Persentase PAD terhadap pendapatan	2,72	5,95	7,03	4,55	3,03	Na	-
27	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=
28	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	82,3	86,7	91,2	95,6	Na	95,6%	-
29	Penguatan cadangan pangan	17,5%	20,167%	49,95%	70,80%	Na	Na	-
30	Penanganan daerah rawan pangan	45%	67%	83,5%	90,7%	100%	5%	<
31	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	87%	87%	88%	87%	87%	2,56	<
32	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	11%	14%	12%	17%	18%	Na	-
33	Produksi sektor pertanian	107.024	333.441	416.583	333.994	175.683	Na	-
34	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	-	65 %	66%	59 %	56%	Na	-
35	Produksi sektor perkebunan	117.961	114.142	133.623	234.118	105.465	Na	-
36	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	100%	100%	100%	100%	100%	Na	-
37	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	0,61	0,59	0,55	0,59	0,58	Na	-
38	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	1,27	1,22	1,19	1,17	1,13	Na	-
39	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB						Na	-
40	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	8,56	8,44	8,06	8,51	8,74	Na	-
41	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	4,73	4,64	4,51	4,42	4,34	4,7%	<
42	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	7,77	8,03	7,94	8,47	8,51	9,9%	<
43	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	Na	Na	Na	Na	Na	Na	-
44	Pertumbuhan Industri	28,5	70,7	21,3	Na	Na	Na	-
45	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB	Na	Na	Na	3%	1%	Na	-
B ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Na	771,741	870,490	1,043,492	976,512	870.330	>
2	Nilai tukar petani	Na	10,93	110,92	Na	Na	37,93	-
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	52.86	44.77	50.16	51.88	Na	50,10	-
4	Produktivitas total daerah	Na	25.12	27.67	50.33	Na	28,60	-
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	29.62	35.18	38.88	38.88	40.74	44,4	<
6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	-1.72939	-0.01485	-0.023568	0.0001	Na	-0,30	-
7	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na
8	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na
9	Angka kriminalitas yang tertangani	9.33	7.76	10.71	12.39	5.47	9,10	<
10	Rasio ketergantungan	Na	35	43	46	49	40,20	>



No	Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja					Target RPJMD 2020	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
C	ASPEK PELAYANAN UMUM							
C.1	Pelayanan Urusan Wajib Dasar							
1.1	Pendidikan							
	Angka Partisipasi Kasar:							
1	Angka partisipasi kasar PAUD	34%	37%	30%	30%	24%	90,9%	<
2	Angka partisipasi kasar SD/MI	100%	98%	84%	83%	86%	98%	<
3	Angka partisipasi kasar SMP/MTs	60%	62%	54%	48%	50%	98%	<
4	Angka pendidikan yang ditamatkan	Na	Na	Na	Na	Na	98,5%	-
	Angka Partisipasi Murni:							
5	Angka Partisipasi Murni (APM) Paud	NA	25%	29%	27%	24%	Na	-
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	88%	86%	74%	74%	86%	99,4%	<
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mt/Paket B	60%	60%	49%	49%	50%	94,9%	<
	Angka Partisipasi Sekolah:							
8	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	88,42%	85,70%	74,08%	73,86%	85,95%	99%	<
9	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/Mt/Paket B	55,91%	60,21%	49,44%	48,73%	50,31%	98,5%	<
	Angka Putus Sekolah:							
10	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Na	Na	Na	Na	Na	61%	-
11	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/Mt	Na	Na	Na	Na	Na	64%	-
	Angka Kelulusan:							
12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	97,42%	100%	96,99%	96,27%	90,44%	100%	<
13	Angka Kelulusan (AL) SMP/Mt	100%	96,45%	97,13%	100%	93,29%	98,5%	<
	Angka Melanjutkan (AM):							
14	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/Mt	69,69%	72,76%	63,92%	62,03%	10,93%	98%	<
15	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/Mt ke SMA/SMK/MA	Na	Na	Na	Na	Na	Na	-
	Fasilitas Pendidikan:							
16	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Na	Na	Na	Na	Na	85%	-



No	Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja					Target RPJMD 2020	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
17	Sekolah pendidikan SMP/Mt dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	11,32%	11,10%	10,47%	10,03%	10,38%	55,6%	<
18	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	59,49	60,23	54,23	54,99	58,92	87%	<
19	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	6,18	7,80	9,45	Na	Na	Na	-
20	Rasio guru/murid sekolah SD	283,44	320,82	328,82	460,81	474,96	368,8	>
21	Rasio guru/murid sekolah SMP	Na	800,08	852,23	844	Na	Na	-
22	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	203,14	226,80	234,38	264,92	272,54	37,49	<
23	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	322,64	382,74	383,85	587,28	608,62	Na	-
24	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	204%	216%	211%	106%	Na	100%	>
25	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	94,35%	91,41%	93,58%	93,84%	94,68%	97,85%	<
36	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	99%	99%	99%	99%	93%	75%	>
1.2	Kesehatan							
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	6	9	7	3	14	24	>
2	Angka kelangsungan hidup bayi	5	8	6	2	13	9	>
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	1	0	1	0	2	24	>
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	12	17	7	7	12	24	>
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	129	240	239	160	347	102	>
6	Rasio posyandu per satuan balita	15	17	17	15	19	1	>
7	Rasio puskesmas, poliklinik, Pustu per satuan penduduk	0,44	0,40	0,40	0,48	0,44	1	<
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	1	<
9	Rasio dokter per satuan penduduk	0,12	0,12	0,09	0,08	0,19	1	<
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1,06	1,14	1,06	1,37	1,32	1	>
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	95%	96%	94%	78%	71%	100%	<
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	275%	82%	88%	85%	84%	95%	<
13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	76%	96%	78%	68%	114%	96%	>
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	=
15	Proporsi penduduk dengan asuhan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 KKal/kapita/hari)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	=



No	Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja					Target RPJMD 2020	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	103%	107%	94%	94%	36%	95%	<
17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	0	0	0	0	0	0	=
18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	3%	10%	12%	10%	Na	50%	
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	3%	10%	12%	10%	Na	100%	-
20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	27	51	145	187	107	100	.>
21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	1	13	10	8	Na	0	-
22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Na	Na	Na	Na	Na	100%	-
23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Na	Na	Na	Na	Na	100%	-
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	99%	100%	100%	100%	100%	100%	=
25	Penderita diare yang ditangani	68,9%	83%	98,8 %	100%	100%	100%	=
26	Angka kejadian Malaria	1,65	3,13	2,06	0,75	0,74	0	<
27	Tingkat kematian akibat malaria	0	0	0	0	0	0	=
28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	Na	Na	Na	Na	Na	50%	-
29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	Na	Na	Na	Na	Na	50%	.-
30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Na	Na	Na	Na	Na	100%	-
31	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	Na	Na	Na	Na	Na	50%	-
32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Na	Na	Na	Na	Na	0,1	-
33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	0%	0%	0%	2%	0%	100%	-
34	Cakupan kunjungan bayi	120%	80%	103%	98%	100%	95%	,<
35	Cakupan puskesmas	200%	200%	200%	200%	200%	100%	>
36	Cakupan pembantu puskesmas	84%	84%	81%	83%	Na	100%	
37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	80%	75%	62%	97%	79%	100%	<



No	Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja					Target RPJMD 2020	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
38	Cakupan pelayanan nifas	92%	100%	78%	86%	78%	100%	<
39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	39%	45%	42%	6%	36%	100%	<
40	Cakupan pelayanan anak balita	53%	59%	63%	76%	62%	100%	<
41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	Na	Na	Na	Na	Na	100%	-
42	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	47%	44%	100%	94%	75%	100%	<
43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Na	Na	Na	171%	Na	100%	-
44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Na	Na	Na	Na	Na	100%	-
45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Na	Na	Na	Na	Na	100%	-
1.3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang							
	Pekerjaan Umum:							
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,29	0,32	0,32	0,34	0,45	89,72	<
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,49	<
3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	Na	Na	Na	Na	Na	Na	-
4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	29,44%	32,30%	32,49%	33,63%	45,25%	86,93%	<
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Na	Na	Na	Na	Na	Na	-
6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	Na	Na	Na	Na	Na	Na	-
7	Persentase rumah tinggal Bersanitasi	22%	37%	47%	69%	72%	14,2%	<
8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	Na	Na	Na	Na	Na	0%	-
9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	19%	37%	25%	18%	Na	70,99%	-
10	Tidak terjadi gerangan> 2 kali setahun	48%	56%	71%	66%	Na	0%	-



No	Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja					Target RPJMD 2020	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Na	Na	Na	Na	Na	70,37%	-
12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	0,57%	0,60%	0,68%	0,80%	Na	90,10%	-
13	Rasio Jaringan Irigasi	4,79	5,24	5,69	6,41	Na	72,73%	-
14	Persentase penduduk berakses air minum	26,92%	35,71%	42,77%	65,09%	75,45%	10,38%	<
15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Na	Na	Na	Na	Na	1,13	-
16	Persentase areal kawasan kumuh	Na	Na	Na	56%	Na	Na	-
17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Na	Na	Na	Na	Na	Na	-
18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Na	Na	Na	Na	Na	Na	-
19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Na	Na	Na	Na	Na	Na	-
	Penataan Ruang:							
20	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Na	Na	Na	Na	0,11%	Na	-
21	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Na	Na	Na	Na	Na	Na	-
22	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Na	Na	Na	Na	Na	1,71	-
23	Ruang publik yang berubah peruntukannya	Na	Na	Na	Na	Na	Na	--
24	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	1	1	1	1	11	Na	-
25	Ketaatan terhadap RTRW	63%	71%	93%	64%	65%	100%	<
1.4	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman							
1	Rasio rumah layak huni	Na	16%	17%	18%	13%	18%	<
2	Rasio Permukiman layak huni	Na	71%	71%	71%	71%	76%	<
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Na	73%	73%	77%	67%	76%	<
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	Na	Na	Na	Na	Na	37,4%	-
5	Persentase pemukiman yang tertata	Na	Na	Na	Na	Na	65,6%	-
6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Na	Na	0,24%	0,24%	0,24%	1,43%	<



No	Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja					Target RPJMD 2020	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Na	Na	1,04%	1,04%	1,16%	-	-
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Na	Na	1%	1%	Na	2,85%	-
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Na	Na	Na	Na	70%	16,2%	>
1.5	Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Na	23%	22%	22%	22%	3%	<
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	Na	56%	78%	86%	100%	100%	=
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	23%	23%	23%	23%	97%	100%	<
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Na	100%	67%	80%	83%	100%	=
5	Persentase Penegakan PERDA	Na	64%	69%	86%	100%	100%	=
1.6	Sosial							
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	95,06%	89,99%	96,27%	96,97%	94,08%	100%	<
2	Persentase PMKS yang tertangani	95,06%	89,99%	96,27%	96,97%	94,08%	100%	<
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	95,06%	89,99%	96,27%	96,97%	94,08%	100%	<
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	0,84%	0,05%	0,11%	0,15%	0,04%	100%	<
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	0%	0%	0%	0%	0%	100%	<
6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	0%	0%	0%	0%	0%	100%	<
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	99,7%	100%	100%	100%	100%	100%	=
8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	98,96%	99,41%	100%	100%	100%	100%	=
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	42,55%	10,10%	55,73%	55,07%	46,22%	100%	<



No	Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja					Target RPJMD 2020	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
C.2	Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
2.1	Tenaga Kerja							
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	0%	0%	0%	0%	0%	32%	<
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	0%	0%	0%	0%	0%	34%	<
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	42%	83%	1%	0%	0%	40%	<
4	Keselamatan dan perlindungan	5%	29%	13%	13%	2%	44%	<
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	43%	18%	29%	25%	100%	30%	<
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0%	0%	0%	0%	0%	33%	<
7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	8%	2%	2%	2%	2%	47%	<
8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	100%	100%	100%	100%	100%	36%	>
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	0%	0%	0%	100%	10%	30%	<
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	0%	0%	0%	0%	0%	30%	<
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan	0%	100%	100%	0%	60%	24%	>
12	Rasio lulusan S1/S2/S3	0,012	0,02	0,03	0,03	0,03	0,13	<
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	58%	87%	15%	3%	3%	29,1%	<
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	20%	8%	20%	24%	24%	25%	<
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	13%	13%	87%	1%	1%	25%	<
4	Rasio KDRT	0,01%	0,04%	0,34%	0,03%	0,07%	0,07%	=
5	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	Na	Na	Na	Na	Na	27%	-
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	4%	5%	98%	99%	99%	35,70%	<
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	67%	44%	77%	95%	100%	90%	>
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%	88%	62%	100%	100%	100%	=



No	Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja					Target RPJMD 2020	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	0%	100%	100%	0%	0%	100%	<
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	71%	50%	92%	86%	47%	71%	<
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	63%	46%	100%	100%	100%	71%	>
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	29%	33%	85%	94%	47%	80%	<
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	75%	38%	85%	38%	18%	80%	
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Na	Na	Na	Na	Na	1,12%	
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Na	Na	Na	Na	Na	3,70%	
16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	1,24	1,17	1,17	1,20	1,17	1,17%	=
17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	1,47	1,41	1,38	1,32	1,41	2%	<
18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Na	Na	Na	Na	Na	70%	
19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektornon pertanian	64,59%	44,39%	47,46%	37,84%	Na	65%	
2.3 Pangan								
1	Ketersediaan pangan utama	162.522%	276.520%	269.643%	159.086%	Na	-	-
2	Ketersediaan energi dan protein per kapita	Na	Na	Na	Na	Na	2000 Kkal/Kap/Hr; 40 Kap/Hr	-
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	0	100%	100%	100%	Na	--	-
2.4 Lingkungan Hidup								
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	Na	-
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	0	0	0	0	0	Na	-
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	ada	Tidak ada	ada	Tidak ada	Tidak ada	Na	-
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	0	0	0	55,56	0	Na	-
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	0	0	91	90	0	Na	-
6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	0	0	79	0	0	Na	-



No	Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja					Target RPJMD 2020	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	0%	53%	68%	72%	80%	Na	-
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	0	0	0	1	0	Na	-
9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	0	0	0	0	0	Na	-
10	Tersertifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	0	0	0	0	0	Na	-
11	Ter verifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	0	0	0	0	0	Na	-
12	Penetapan hak MHA	0	0	0	0	0	Na	-
13	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	0	0	0	0	0	Na	-
14	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana MHA	0%	0%	0%	0%	0%	Na	-
15	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat MHA	0	0	0	1	0	Na	-
16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	0	0	0	0	0	Na	-
17	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	0	0	0	100%	0	Na	-
18	Timbunan sampah yang ditangani	17%	18%	19%	18%	10%	Na	-
19	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	17%	17%	20%	21%	14%	Na	-
20	Persentase cakupan area pelayanan	1%	1%	1%	1%	1%	Na	-
21	Persentase jumlah sampah yang tertangani	17%	18%	19%	18%	10%	Na	-
22	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	0	0	0	0	0	Na	-
23	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	0%	100%	100%	100%	100%	Na	-
24	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	67%	75%	75%	75%	75%	Na	-
2.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
1	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk	0,06	0,10	0,47	0,63	0,92	0,85	<
2	Rasio bayi berakta kelahiran	0,61	0,83	0,83	0,84	0,95	0,85	>
3	Rasio pasangan berakta nikah	0,06	0,17	0,15	0,22	0,28	0,57	<
4	Ketersediaan data Base kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	ada	Ada	=



No	Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja					Target RPJMD 2020	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	=
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	6%	10%	47%	63%	92%	75%	>
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	55%	83%	83%	85%	95%	75%	>
2.6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	61%	63%	67%	70%	74%	70%	>
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2	=
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	0,17	0,17	0,23	0,17	0,17	1	<
4	Persentase LSM aktif	52%	56%	59%	65%	69%	100%	<
5	Persentase LPM Berprestasi	9%	9%	9%	9%	9%	9,26	<
6	Persentase PKK aktif	17%	25%	25%	23%	17%	100%	<
7	Persentase Posyandu aktif	16%	19%	20%	22%	24%	100%	<
8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	20%	20%	20%	20%	20%	100%	<
9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	20%	20%	20%	20%	20%	88%	<
2.7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Na	2,77	2,77	2,77	2,77	2,55	>
2	Total Fertility Rate (TFR)	Na	2,57	2,57	2,57	2,67	2,50	>
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	40%	52%	52%	72%	77%	38,5%	<
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	20%	32%	32%	52%	35%	38%	>
5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	0	0	0	1	1	2	<
6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Na	Na	Na	8	8	8	=
7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Na	Na	Na	1	5	2	<
8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	3	3	3	3	3	=
9	Rasio Akseptor KB	68%	66%	69,7%	73,7%	77%	59,7%	<



No	Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja					Target RPJMD 2020	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	68%	66%	70%	74%	77%	59%	>
11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Na	Na	Na	Na	Na	Na	-
12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun	71%	62%	65%	70%	1%	2,3%	<
13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	36%	13%	18%	12%	9%	19%	<
14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	16%	15%	20%	23%	19%	15,2%	>
15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	23%	53%	14%	11%	30%	15,6%	<
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	50%	76%	68%	73%	92%	75%	>
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	55%	54%	55%	77%	84%	75%	>
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	55%	54%	55%	77%	84%	65%	>
19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	35%	67%	54%	68%	80%	100%	<
20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	34%	34%	84%	64%	64%	100%	<
21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	=
22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	40%	45%	63%	63%	70%	80%	<
23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	=
24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	265%	102%	94%	97%	76%	100%	<
25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standardisasi pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	=
26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100%	100%	100%	100%	100%	97,5%	>
27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	Na	Na	Na	Na	Na	0	-
28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100%	100%	100%	100%	100%	90%	>



No	Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja					Target RPJMD 2020	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	35%	53%	55%	75%	60%	11,7%	<
30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Na	Na	Na	Na	2%	Na	-
31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	3%	24%	33%	43%	50%	55%	<
2.8	Perhubungan							
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	18.896	18.991	18.991	20.432	10.975	19.276	<
2	Rasio ijin trayek	0	0	0	0	0	0	=
3	Jumlah uji kir angkutan umum	0	0	0	0	0	500	<
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1	1	1	1	1	1	=
5	Persentase layanan angkutan darat	13%	14%	14%	15%	14%	100%	<
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	30%	28%	26%	23%	58%	40%	>
7	Pemasangan Rambu-rambu	91%	0%	16%	42%	8%	100%	<
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	2,68	2,67	25,20	24,48	26,22	30,66	<
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	18.896	18.991	19.021	20.432	10.975	36.257	<
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	6.420	8.600	9.380	10.090	4.244	9.564	<
2.9	Komunikasi dan Informatika							
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	120%	Na	-
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	0	0	0	3,25	0,88	Na	-
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	0	0	0	0,54%	0,55%	Na	-
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0	0	0	3	3	Na	-
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	0	0	0	7,46	7,35	Na	-
2.10	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah							
1	Persentase koperasi aktif	0	28%	27%	31%	32%	25,04%	>
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	0%	0%	0%	0%	0%	6,3%	<
3	Persentase BPR/LKM aktif	100%	100%	100%	100%	100%	66,67%	>
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	0%	100%	100%	100%	89%	98,04%	>



No	Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja					Target RPJMD 2020	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
	Penanaman Modal							
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	3	6	5	5	6	1	>
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	361.720.968.757	1.898.020.985.085	962.851.756.675	1.026.822.159.311	479.791.584.431	4.000.000.000	>
3	Rasio daya serap tenaga kerja	158	540	201	234	195	20	>
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	100%	54%	25%	1%	47%	3.999.999.000	>
2.11	Kepemudaan dan Olahraga							
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	90%	>
2	Persentase wiraswara muda	100%	100%	100%	100%	100%	9%	>
3	Cakupan pembinaan olahraga	10%	14%	17%	28%	30%	75%	<
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	5%	8%	12%	19%	16%	70%	<
5	Cakupan pembinaan atlet muda	29%	36%	42%	66%	56%	50 %	>
6	Jumlah atlet berprestasi	0	3	8	12	0	5 Orang	<
7	Jumlah prestasi olahraga	0	2	10	12	0	6 Cbg Olahraga	<
2.12	Statistik							
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
3	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.13	Persandian							
1	Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan sandi Dalam Komunikasi Antar Perangkat Daerah	0	0	15,15	13,33	Na	20	-
2.14	Kebudayaan							
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	10	10	10	10	Na	1000	-
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	4	15	0	31	Na	17,39%	-
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	4	11	18	23	Na	2	-
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	0	0	0	1	Na	1	-
2.15	Perpustakaan							
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0	0.002	0.003	0.01	0,002	0,84%	<



No	Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja					Target RPJMD 2020	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,2	0,3	0,01	0,02	0,09	29%	<
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0.007	0.007	0.007	0.007	0,08	0,87	<
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Na	22,50	41,67	134,67	21,75	100	<
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	326	101	26	22	146	1700	<
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	0	0	0	0	0	5	<
2.16	Kearsipan							
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	0	0	0	3%	3%	15%	<
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	0	1	2	2	2	4	<
3	Pelayanan Urusan Pilihan							
3.1	Pariwisata							
1	Kunjungan wisata	100%	102%	100%	100%	38%	60,%	<
2	Lama kunjungan Wisata	Na	Na	Na	Na	Na	20 Hari	-
3	PAD sektor pariwisata	0%	0%	0%	0%	0%	0,3%	<
3.2	Pertanian							
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	87%	87%	88%	87%	87%	37%	>
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	11%	14%	12%	17%	18%	72%	>
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	0%	65%	66%	59%	56%	19,2%	>
4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	=
5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	473%	862%	1,193%	638%	423%	500%	<
6	Cakupan bina kelompok petani	7.95%	5.76%	3.20%	1.65%	1,10%	0,5%	>
3.3	Perdagangan							
1	Ekspor Bersih Perdagangan	-43	-40	-6	326	Na	Na	-
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	0%	0%	0%	0%	0%	4%	<
3.4	Perindustrian	0	76%	37%	55%	36%	6%	>
1	Cakupan bina kelompok pengrajin							



No	Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja					Target RPJMD 2020	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
3.5	Transmigrasi							
1	Persentase transmigran swakarsa	0%	0%	0%	50%	39%	Na	-
3.6	Kelautan dan Perikanan							
1	Produksi perikanan	110%	106%	101%	104%	335%	100%	>
2	Konsumsi ikan	103%	100%	96%	124%	84%	100%	<
3	Cakupan bina kelompok nelayan	100%	100%	45%	41%	33%	30%	>
4	Produksi perikanan kelompok nelayan	5%	6%	2%	8%	8%	10%	<
5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	0%	0%	0%	0%	0%	0%	=
6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	=
7	Nilai tukar nelayan	95%	97%	100%	100%	100%	100%	=
4	Penunjang Urusan							
4.1	Perencanaan Pembangunan							
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	262%	262%	336%	100%	100%	68%	>
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	262%	262%	336%	100%	100%	68%	>
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	-	100%	100%	100%	100%	94%	>
4.2	Keuangan							
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=
2	Persentase SILPA	1%	4%	1%	1%	2,8%	4%	<
3	Persentase SILPA terhadap APBD	1%	4%	1%	1%	2,8%	4%	<
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	1%	1%	0%	1%	0%	3%	>
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	13%	16%	13%	16%	4%	20%	<



No	Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja					Target RPJMD 2020	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	14%	15%	14%	18%	8%	10%	<
7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	77%	71%	74%	62%	55%	21%	>
8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Na	Na	Na	Na	Na	10%	-
9	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	=
4.3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan							
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	3440 Jpl	1160 Jpl	56 Jpl	1944 Jpl	1200 Jpl	850jpl	>
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	28,44	9,37	0,46	12,68	8,08	9,48%	<
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	13,10	15,03	10,86	7,72	0,33	31,03%	<
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	14	32	31	29	26	34	<
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	546	545	540	563	619	260	>
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	546	545	540	563	619	800	<
4.4	Penelitian dan Pengembangan							
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	100%	100%	100%	67%	100%	100%	=
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	100%	100%	100%	88%	100%	50%	>
	Penerapan SIDA:							
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	0	0	3	15	9	50%	<
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	0	0	0	0	4	50%	<
4.5	Pengawasan							
1	Persentase tindak lanjut temuan	0%	0%	38%	72%	74%	85 %	<
2	Persentase pelanggaran pegawai	0,66%	0,52%	1,05%	1,22%	0,87%	0.12 %	<
3	Jumlah temuan BPK	54	15	22	53	37	28	>
4.6	Sekretariat Dewan							
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=



No	Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja					Target RPJMD 2020	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
3	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu RPJMD Teknokratik ini merupakan perspektif evaluasi yang bertujuan untuk menggambarkan kinerja keuangan daerah yang dituangkan dalam APBD dan posisi keseimbangan keuangan daerah berupa neraca daerah hingga tahun terakhir realisasi penyelenggaraan periode pemerintahan sebelumnya. Dalam hal ini selama empat tahun terakhir berjalannya RPJMD periode sebelumnya. Meliputi dua aspek penting, yakni perkembangan kinerja APBD dan kinerja neraca daerah, aspek keuangan daerah sebagai bukti penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berjalan dengan baik yang disertai dengan realisasi keuangannya. Analisis dan pengamatan difokuskan dalam empat tahun terakhir, yakni periode 2016-2019.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD mencakupi kinerja tiga komponen utama APBD, yakni kinerja pendapatan daerah, kinerja belanja daerah, dan kinerja pembiayaan daerah beserta semua komponen-komponennya. Ketiganya menggambarkan kinerja pertumbuhan hingga pada postur semua komponen-komponennya. Secara umum perbandingan kinerja pertumbuhan rata-rata pendapatan daerah tampak lebih rendah dari pertumbuhan belanja daerah, tentu hal berimplikasi pada kinerja pertumbuhan pembiayaan daerah yang menunjukkan surplus yang semakin berkurang.

3.1.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah

Kinerja pendapatan daerah, meliputi pertumbuhan dan postur komponen-komponen pendapatan daerah. Meliputi komponen pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kinerja pertumbuhan pendapatan daerah selama periode 2016-2019 secara umum mengalami peningkatan, rata-rata bertumbuh 4,20 persen per tahun. Hal ini terutama didorong oleh tingginya rata-rata pertumbuhan PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam periode yang sama. PAD mencatat pertumbuhan rata-rata 23,78 persen setiap tahunnya, sedangkan LLD Yang Sah bertumbuh 21,77 persen setiap tahunnya. Sedangkan komponen dana perimbangan, meskipun merupakan komponen pendapatan yang terbesar, tetapi selama periode 2016-2019 ini hanya mampu menunjukkan kinerja pertumbuhan rata-rata 0,79 persen setiap tahunnya. Selengkapnya rata-rata pertumbuhan komponen pendapatan daerah selama periode 2016-2019 ditunjukkan pada tabel berikut ini.



**Tabel 3. 1. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2016-2019**

No	Komponen Pendapatan Daerah	2016	2017	2018	2019	Rerata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN	632,376,498,713.00	616,641,469,808.00	623,527,716,638.08	715,475,201,757.17	4,20
1.1	Pendapatan Asli Daerah	17,169,464,181.00	36,714,595,466.00	43,816,586,733.36	32,562,615,960.00	23,78
1.1.1	Pajak daerah	2,400,489,673.00	5,640,071,983.00	7,452,547,578.00	7,808,115,520.75	48,17
1.1.2	Retribusi daerah	2,031,235,599.00	5,399,584,250.00	9,775,681,040.00	16,990,331,273.00	102,99
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan					
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	12,737,738,909.00	25,674,939,233.00	26,588,358,115.36	7,764,169,166.25	(15,210)
1.2	Dana Perimbangan	547,413,304,826.00	488,128,321,192.00	493,648,647,708.00	560,497,994,337.00	0,79
1.2.1	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	13,894,977,051.00	11,330,115,754.00	9,494,018,432.00	9,292,570,602.00	(12,55)
1.2.2	Dana alokasi umum	346,912,857,000.00	344,886,043,000.00	347,815,396,000.00	364,029,720,000.00	1,62
1.2.3	Dana alokasi khusus	186,605,470,775.00	131,912,162,438.00	136,339,233,276.00	187,175,703,735.00	0,10
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	67,793,729,706.00	91,798,553,150.00	86,062,482,196.72	122,414,591,460.17	21,77
1.3.1	Hibah	-	18,000,000,000.00	-	25,661,615,338.00	
1.3.2	Dana darurat	-	-	-		
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	14,469,575,706.00	16,492,893,150.00	17,836,482,196.72	18,969,178,922.17	9,45
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)	50,300,154,000.00	52,625,660,000.00	61,726,000,000.00	63,048,810,000.00	7,82
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	3,024,000,000.00	4,680,000,000.00	6,500,000,000.00	14,734,987,200.00	69,53

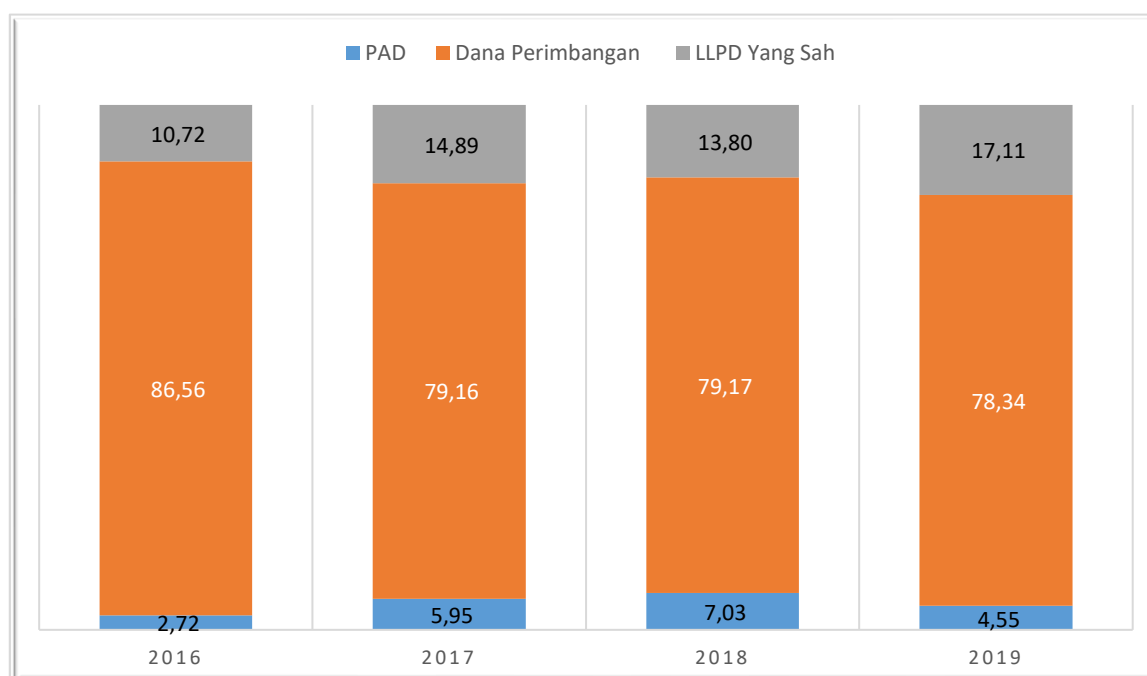
Sumber: Buku APBD Kabupaten Mamuju Tengah, series

Capaian pertumbuhan PAD yang cukup tajam, terutama dikontibusi oleh pertumbuhan retribusi daerah yang mencapai 102,99 persen setiap tahunnya. Lebih tinggi dari pertumbuhan pajak daerah yang hanya bertumbuh 48,17 persen setiap tahun pada periode yang sama. Sedangkan komponen LLPAD Yang Sah menunjukkan penurunan, dan komponen hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan hingga tahun 2019 ini belum menunjukkan kontribusinya dalam PAD Kabupaten Mamuju Tengah. Kinerja pertumbuhan dana perimbangan yang rendah selama periode ini, terutama penurunan yang dialami dari dana bagi hasil pajak dan non pajak, dan komponen DAK yang hanya bertumbuh 0,10 persen setiap tahunnya. Hanya komponen DAU yang sedikit bertumbuh lebih baik, meskipun tergolong sangat rendah, hanya bertumbuh 1,62 persen setiap tahunnya selama periode 2016-2019. Sedangkan sumber pendapatan lainnya, berupa LLPD Yang Sah, meskipun menunjukkan pertumbuhan yang relative tinggi, tetapi komponen tidak dapat diandalkan. Selain karena bersifat insidental, juga memiliki keleluasaan fiskal yang rendah, karena sudah memiliki alokasi yang fixed berdasarkan sumbernya. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan komponen

bantuan keuangan dari provinsi dan atau daerah lainnya yang mencatat pertumbuhan tertinggi, mencapai 69,53 persen setiap tahunnya. Pada komponen-komponen lainnya yang lebih fleksibel bertumbuh lebih rendah, dana bagi hasil pajak dari provinsi hanya bertumbuh 9,45 persen dan dana penyesuaian dan otonomi khusus bertumbuh lebih rendah lagi 7,82 persen setiap tahun selama periode 2016-2019.

Guna mencermati tingkat ketergantungan fiskal daerah, diamati kontribusi setiap komponen pembentuk pendapatan daerah. Struktur pendapatan daerah yang menggambarkan postur pendapatan daerah Kabupaten Mamuju Tengah selama tahun 2016-2019, selengkapnya diilustrasikan pada gambar berikut ini.

Gambar 3. 1 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2019 (persen)



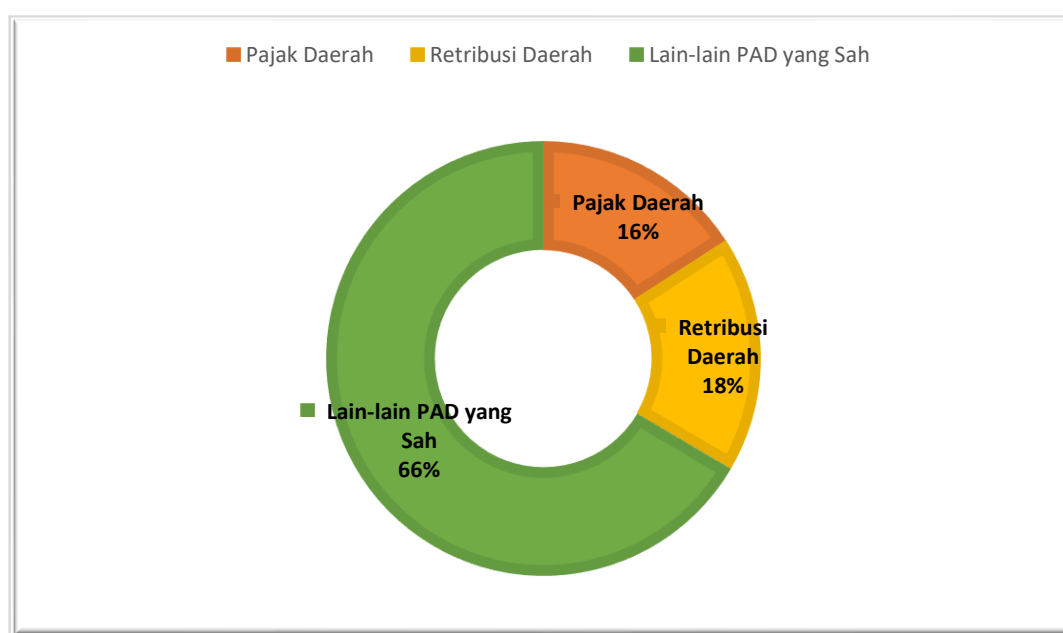
Sumber: Buku APBD Kabupaten Mamuju Tengah, series

Mekipun kemandirian pendapatan daerah masih tergolong rendah, tetapi terus menunjukkan kinerja yang semakin membaik selama periode 2016-2019 ini. Kontribusi PAD meningkat dari hanya 2,72 persen pada tahun 2016 meningkat menjadi 4,55 persen pada tahun 2019. Sejalan dengan itu, kontribusi LLPD Yang Sah meningkat dari hanya 10,72 persen pada tahun 2016 meningkat menjadi 17,11 persen pada tahun 2019. Sebaliknya, sumber ketergantungan fiskal daerah, meskipun masih cukup besar, tetapi perannya cenderung mengalami penurunan. Kontribusi dana perimbangan menurun dari 86,56 persen pada tahun 2016 menjadi hanya 78,34 persen pada tahun 2019. Sebuah kinerja peningkatan kemandirian pendapatan daerah yang cukup baik dari sebuah daerah otonom yang baru lahir. Kinerja tersebut Digambar lebih jauh berdasarkan sumber-sumber pendapatan daerah potensial di Kabupaten Mamuju

Tengah. Guna mendukung premis ini, maka penting mencermati postur setiap komponen pendapatan daerah tersebut.

Pertama, postur PAD. Selama periode 2016-2019 ini, sumber penerimaan PAD masih sangat bertumpu pada LLPAD Yang Sah. Selama empat tahun komponen ini berkontribusi 66,0 persen terhadap total PAD. Pajak daerah hanya berkontribusi 16,0 persen dan retribusi daerah sedikit lebih baik, yakni berkontribusi 18,0 persen. Selengkapnya pada gambar berikut.

Gambar 3. 2 Postur Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2016-2019

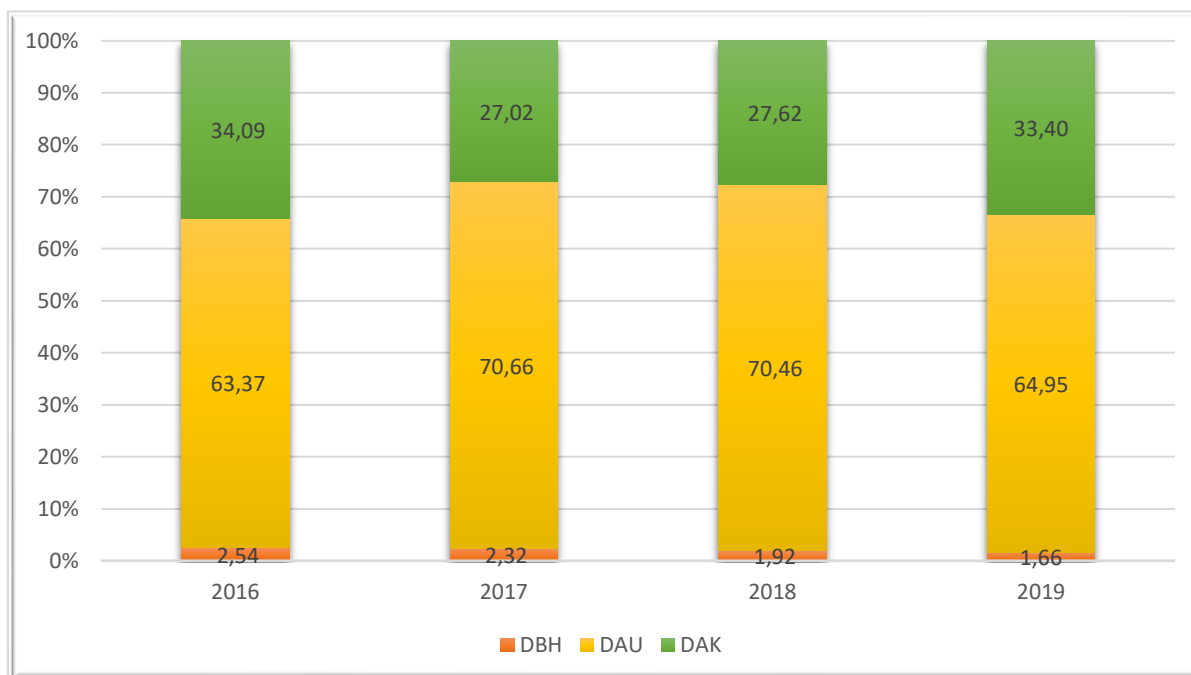


Sumber: Buku APBD Kabupaten Mamuju Tengah, series

Fakta ini mengindikasikan masih besarnya ketidakpastian sumber-sumber PAD Kabupaten Mamuju Tengah dalam empat tahun terakhir, karena masih didominasi oleh komponen lain-lain PAD yang sah. Komponen PAD ini tidak memberikan sumber pendapatan yang pasti setiap tahunnya, karena lebih banyak bersifat insidental, sehingga kurang dapat diprediksi secara pasti. Untuk itu diperlukan langkah strategis dan sistematis dalam mendorong peningkatan PAD melalui komponen utama peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, diperlukan upaya-upaya yang akseleratif dalam mendorong terbentuknya sumber PAD yang berasal dari komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, salah satunya melalui pembentukan BUMD atau Perusda sesuai dengan potensi sumber daya alam daerah.

Kedua, postur dana perimbangan. Transfer fiskal yang diterima Kabupaten Mamuju selama periode 2016-2019 masih didominasi oleh DAU, dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Kontribusi DAU terhadap dana perimbangan meningkat dari hanya 63,37 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 64,95 persen pada tahun 2019, bahkan pada tahun 2017-2018 berkontribusi lebih dari 70,0 persen terhadap total dana perimbangan yang diterima Kabupaten Mamuju Tengah. Selengkapnya postur dana perimbangan Kabupaten Mamuju Tengah selama periode 2016-2019 diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar 3. 3 Perkembangan Postur Dana Perimbangan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2019 (Persen)

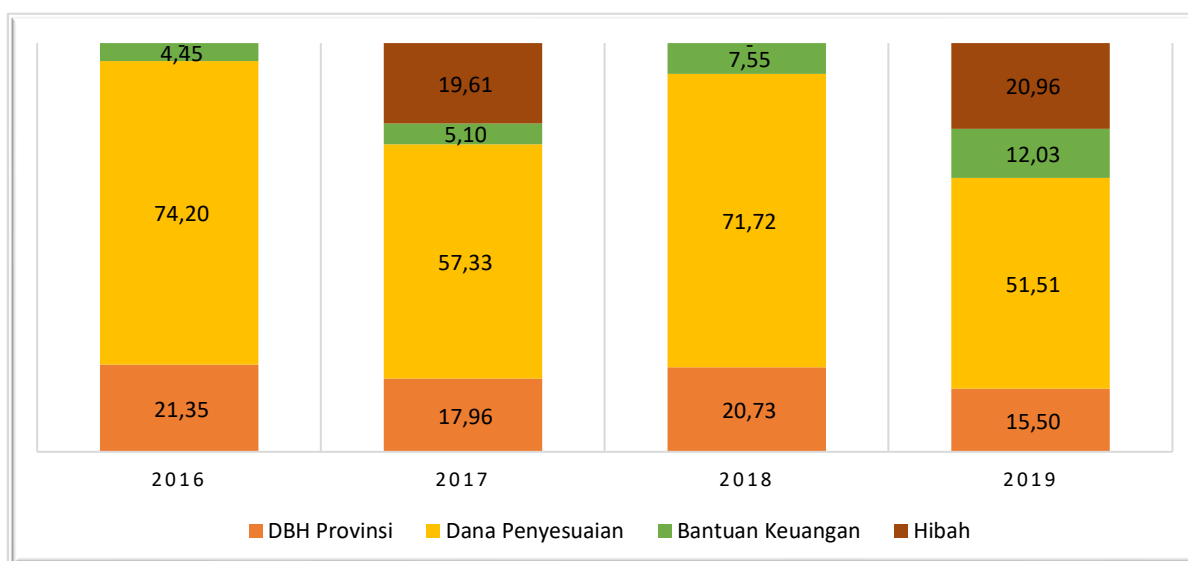


Sumber: Buku APBD Kabupaten Mamuju Tengah, series

Sebaliknya, peran DAK dan dana bagi hasil cenderung menunjukkan kontribusi yang menurun. DAK menurun perannya dari sebesar 34,09 persen pada tahun 2016 menjadi hanya sebesar 33,40 persen pada tahun 2019. Kinerja lebih buruk dicapai pada dana bagi hasil pajak dan non pajak. Selain kontribusinya yang masih sangat kecil, juga dengan peran yang semakin menurun. Kontribusi dana bagi hasil menurun dari hanya 2,54 persen pada tahun 2016 menjadi hanya 1,66 persen terhadap total dana perimbangan pada tahun 2019. Fakta ini mengindikasikan besarnya ketergantungan fiskal daerah yang bersumber dari pendapatan dari luar daerah. Meskipun pengelolaan sumber daya alam di daerah memperlihatkan dominasi dalam aktivitas ekonomi masyarakat, akan tetapi nampaknya belum banyak menunjukkan kontribusinya dalam peningkatan pendapatan daerah, khususnya dari bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Ketiga, postur LLPD Yang Sah. Pada lain-lain pendapatan daerah yang sah strukturnya yang lebih bersifat insidental, seperti sumber pendapatan yang berasal dari hibah, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya yang merupakan sumber pendapatan tidak tetap. Gambaran postur LLPD Yang Sah Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2016-2019, selengkapnya diilustrasikan pada gambar berikut ini.

Gambar 3. 4 Perkembangan Postur LLPD Yang Sah Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2016-2019 (Persen)



Sumber: Buku APBD Kabupaten Mamuju Tengah, series

Didominasi oleh komponen dana penyesuaian dan otonomi khusus, selain perannya yang fluktuatif juga menunjukkan kecenderungan peran yang semakin menurun. Menurun dari kontribusi yang mencapai 74,20 persen pada tahun 2016 menurun menjadi hanya 51,51 persen pada tahun 2019. Komponen LLPD Yang Sah yang juga cukup besar adalah dana bagi hasil dari provinsi, tetapi cenderung menurun dan berfluktuasi selama periode ini. Menurun dari kontribusi 21,35 persen pada tahun 2016 menjadi hanya 15,50 persen pada tahun 2019. Komponen ini sebetulnya tetap harus dijaga kinerjanya, karena sumber pendapatan ini sejatinya berasal dari daerah Mamuju Tengah sendiri, tapi merupakan obyek pajak provinsi sehingga harus ditingkat pengelolaannya supaya memberi kontribusi pada peningkatan pendapatan daerah Mamuju Tengah. Komponen LLPD Yang Sah yang sebetulnya menunjukkan kinerja peningkatan yang konsisten adalah bantuan keuangan dari provinsi, meningkat dari hanya 4,45 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 12,03 persen pada tahun 2019. Hanya saja komponen yang terakhir ini, lagi-lagi merupakan sumber pendapatan yang bersifat insidental dan keleluasaan fiskalnya terbatas sehingga tidak dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan daerah secara berkelanjutan dalam jangka panjang.



3.1.1.2. Kinerja Belanja Daerah

Secara garis besar belanja daerah dikelompokkan ke dalam dua alokasi, yakni alokasi belanja tidak langsung dan alokasi belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga nilai kemanfaatannya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dialokasikan secara langsung pelaksanaan program dan kegiatan, dan kemanfaatannya diterima langsung oleh masyarakat secara luas dari implementasi program dan kegiatan tersebut. Perkembangan alokasi belanja daerah beserta dengan pengelompokan alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung Kabupaten Mamuju Tengah selama periode 2016-2019, selengkapnya ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 2 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Beserta Komponen-komponennya Tahun 2016-2019

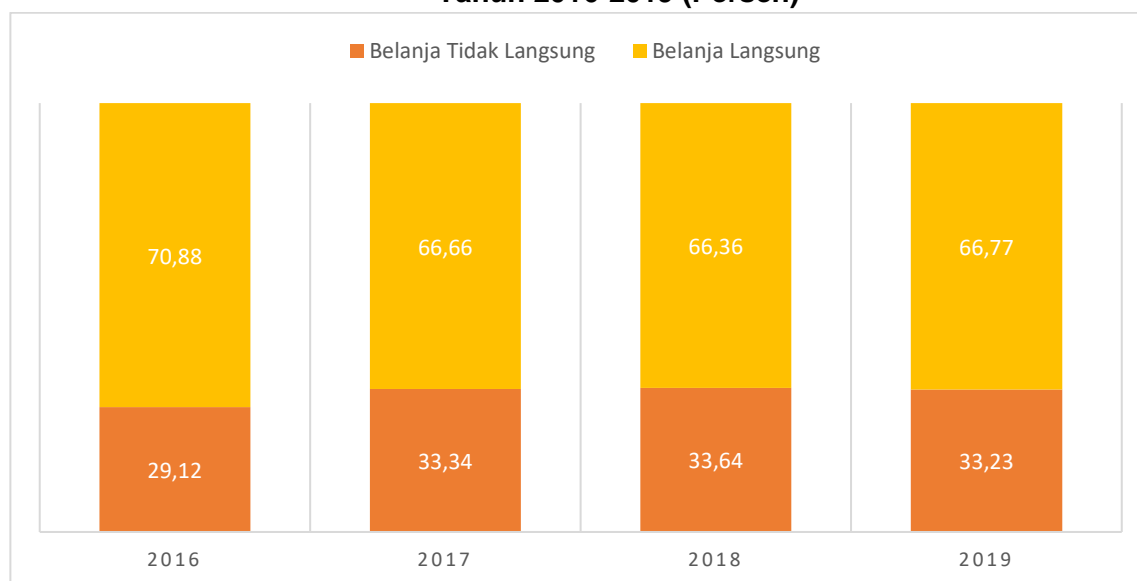
No	Uraian	2016	2017	2018	2019	Rerata Pertumbuh an (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2	Belanja	678,593,002,406.45	600,869,472,664.00	648,907,503,454.00	759,368,309,610.85	3,82
2.1	Belanja Tidak Langsung	197,586,190,622.45	200,345,659,616.00	218,323,491,894.00	252,334,046,321.35	8,49
2.1.1	Belanja Pegawai	128,087,734,844.45	124,055,901,916.00	141,060,181,894.00	149,466,773,973.35	5,28
2.1.2	Belanja Bunga	0	0	0	2,300,701,998.00	
2.1.4	Belanja Hibah	6,305,800,000.00	3,723,600,000.00	8,171,600,000.00	6,209,900,000.00	(0,51)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6,518,817,100.00	6,530,673,700.00	788,200,000.00	3,770,500,000.00	(16,68)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	56,456,063,444.00	65,985,484,000.00	68,179,549,000.00	90,428,352,000.00	17,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	217,775,234.00	50,000,000.00	123,961,000.00	157,818,350.00	(10,18)
2.2	Belanja Langsung	481,006,811,784.00	400,523,813,048.00	430,584,011,560.00	507,034,263,289.50	1,77
2.2.1	Belanja Pegawai	23,077,201,500.00	30,155,590,495.00	36,337,446,818	33,981,203,000.00	13,77
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	149,519,853,715.00	170,430,827,321.00	187,142,613,306.00	218,545,245,624.50	13,49
2.2.3	Belanja Modal	308,409,756,569.00	199,937,395,232.00	207,103,951,436.00	254,507,814,665.00	(6,20)

Sumber: Buku APBD Kabupaten Mamuju Tengah, series

Selama periode ini, alokasi belanja daerah Kabupaten Mamuju Tengah bertumbuh 3,82 persen setiap tahunnya. Meningkat dari Rp678,59 milyar pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp759,37 milyar pada tahun 2019. Pertumbuhan alokasi belanja ini terutama didorong oleh pertumbuhan alokasi belanja tidak langsung yang bertumbuh 8,49 persen setiap tahunnya. Sedangkan alokasi belanja langsung hanya bertumbuh 1,77 persen setiap tahun pada periode yang sama. Kondisi ini sangat logis terjadi pada daerah otonom baru, dimana kebutuhan akan belanja tidak langsung akan mengalami lonjakan seiring dengan penambahan sumberdaya

daerah untuk peningkatan layanan publik yang semakin besar. Hal ini Nampak pada kebutuhan alokasi belanja pegawai yang juga bertumbuh cukup signifikan, bertumbuh 5,28 persen setiap tahunnya. Meskipun demikian, pada sisi yang pertumbuhan alokasi belanja langsung tidak cukup besar, tetapi menunjukkan kontribusi terhadap alokasi belanja daerah yang sangat signifikan. Selengkapanya perkembangan postur alokasi belanja daerah Kabupaten Mamuju Tengah selama periode 2016-2019, ditunjukkan pada gambar berikut ini

Gambar 3. 5 Struktur Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2019 (Persen)



Sumber: Buku APBD Kabupaten Mamuju Tengah, series

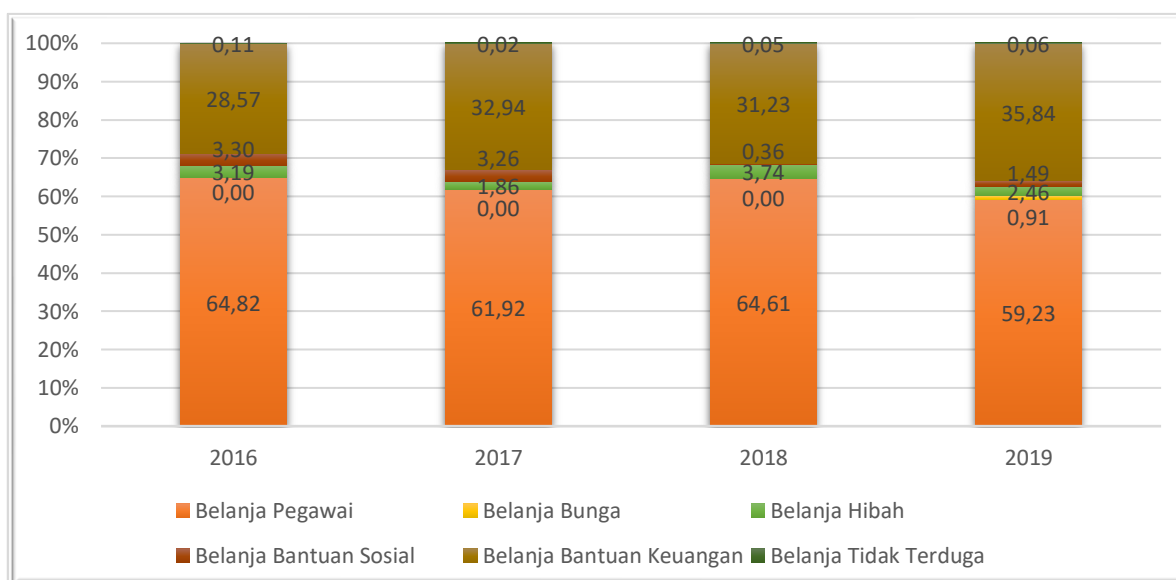
Kontribusi alokasi belanja langsung masih mendominasi belanja daerah hingga tahun 2019, meskipun menunjukkan kecenderungan yang menurun. Kontribusinya menurun dari 70,88 persen pada tahun 2016 menjadi hanya 66,77 persen pada tahun 2019. Sebaliknya, alokasi belanja tidak langsung, meskipun kontribusinya kecil, tetapi menunjukkan kecenderungan peningkatan dalam empat tahun terakhir. kontribusi alokasi belanja tidak langsung meningkat dari hanya 29,12 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 33,23 persen dari total Rp759,37 milyar alokasi belanja daerah pada tahun 2019.

Fakta ini mengindikasikan konsentrasi pemerintah yang lebih besar untuk mendorong pembangunan daerah dalam rangka akselerasi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat Kabupaten Mamuju Tengah sebagai daerah otonom baru sangat membutuhkan berbagai infrastruktur dasar, baik untuk mendukung aktivitas pelayanan publik sektor pemerintah maupun untuk kepentingan fasilitasi kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara luas. Pada tahap awal pengembangan daerah otonom baru seperti ini, fokus pemerintah daerah untuk membenahi pembangunan infrastruktur dasar untuk memastikan berjalannya kegiatan pemerintahan untuk pelayanan umum masyarakat, serta untuk memastikan kegiatan sosial ekonomi masyarakat berjalan

dengan baik. Pada tahapan berikutnya kebutuhan untuk belanja tidak langsung akan terus meningkat, hal ini tampak pada pertumbuhan alokasi belanja tidak langsung yang lebih besar dari rata-rata pertumbuhan alokasi belanja langsung.

Postur belanja tidak langsung didominasi oleh alokasi belanja pegawai, disusul alokasi belanja bantuan keuangan, alokasi belanja hibah, serta alokasi belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga. Alokasi belanja pegawai meskipun sangat dominan, tetapi perannya sedikit menunjukkan penurunan dalam periode ini. Perannya menurun 64,82 persen pada tahun 2016 menjadi hanya sebesar 59,23 persen terhadap total alokasi belanja tidak langsung pada tahun 2019. Selengkapnya postur belanja tidak langsung selama periode ini diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar 3. 6 Postur Alokasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2016-2019



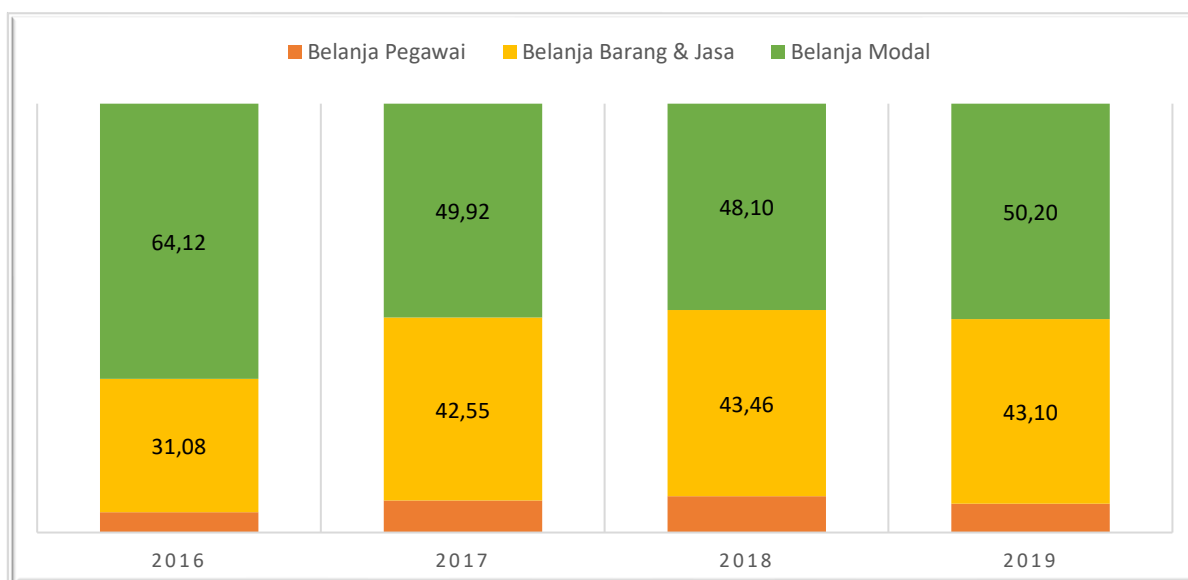
Sumber: Buku APBD Kabupaten Mamuju Tengah, series

Alokasi untuk belanja pegawai diperkirakan akan terus meningkat, selain karena menunjukkan rata-rata pertumbuhan tertinggi, juga sebagai konsekuensi sebagai daerah otonom baru yang membutuhkan peningkatan jumlah ASN yang lebih besar. Hal ini mengingat masih sejumlah kebutuhan tenaga ASN yang penting untuk memastikan berjalannya roda pemerintahan daerah, dan pelayanan umum bagi masyarakat berjalan dengan baik.

Sebaliknya, postur alokasi belanja langsung menunjukkan porsi untuk belanja pegawai merupakan komponen terkecil. Belanja langsung didominasi oleh alokasi belanja modal, setelahnya ditujukan untuk alokasi belanja barang dan jasa. Ketiganya ditujukan untuk implementasi program dan kegiatan pembangunan yang secara langsung untuk kemajuan daerah, pelayanan publik dan untuk memastikan terciptanya kesejahteraan masyarakat yang

lebih baik ke depan. Postur alokasi belanja langsung, selengkapanya diilustrasikan dalam gambar berikut ini.

Gambar 3. 7 Perkembangan Postur Alokasi Belanja Langsung Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2017 (Persen)



Sumber: Buku APBD Kabupaten Mamuju Tengah, series

Dominasi alokasi belanja modal hingga tahun 2019 tetap nampak, meskipun cenderung menurun. Alokasi belanja modal menurun dari 64,12 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 50,20 persen terhadap total Rp507,03 milyar alokasi belanja langsung pada tahun 2019. Sebaliknya, alokasi belanja barang dan jasa meningkat dari hanya 31,08 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 43,10 persen pada tahun 2019. Meskipun relatif kecil, alokasi belanja pegawai juga meningkat kontribusinya pada alokasi belanja langsung ini. meningkat dari hanya 4,80 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 6,70 persen terhadap total Rp507,03 milyar alokasi belanja langsung pada tahun 2019.

Fakta ini mengindikasikan kegiatan pembangunan daerah yang semakin akseleratif ke depan, alokasi belanja langsung, khususnya ditujukan untuk belanja modal akan terus meningkat secara signifikan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang menuntut dukungan sumber daya infrastruktur daerah yang memadai sehingga aktivitas ekonomi masyarakat berjalan baik untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap tinggi dan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan secara berkesinambungan.

3.1.1.3. Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan gambaran keseimbangan keuangan daerah, keseimbangan sisi pendapatan dan sisi belanja daerah yang tertuang dalam APBD setiap tahunnya.



Keseimbangan pendapatan dan belanja daerah ini akan menghasilkan dua kemungkinan pembiayaan, yakni pembiayaan surplus atau pembiayaan defisit. Surplus dicapai pada saat pendapatan daerah lebih besar dari kebutuhan belanja daerah, sebaliknya defisit dialami pada saat kebutuhan belanja daerah lebih besar dari kemampuan pendapatan daerah. Pada saat dicapai surplus, maka komponen pembiayaan daerah yang utama adalah alokasi pengeluaran daerah, sebaliknya jika mengalami defisit, maka pembiayaan daerah berupa penerimaan pembiayaan daerah. Selama periode 2016-2019 Kabupaten Mamuju Tengah menerapkan kebijakan pembiayaan defisit, alokasi belanja daerah selalu lebih besar daripada pendapatan daerah. Selengkapnya pembiayaan daerah Kabupaten Mamuju Tengah selama periode 2016-2019 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 3. 3 Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	Rerata Pertum- buhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3	Pembiayaan Defisit	52,141,600,610.27	5,923,988,116.81	33,320,381,860.91	62,532,481,444.99	6,24
3.1	Penerimaan Pembiayaan	52,141,600,610.27	5,923,988,116.81	33,320,381,860.91	62,532,481,444.99	6,24
3.1.1.	Penggunaan SiLPA	52,141,600,610.27	5,923,988,116.81	21,695,985,260.91	7,940,595,044.99	-46,60
3.1.4.	Pinjaman Dalam Negeri	0	0	11,624,396,600.00	54,591,886,400.00	369,63
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0		

Sumber: Buku APBD Kabupaten Mamuju Tengah, series

Defisit keuangan daerah meningkat dari Rp52,14 milyar pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp62,53 milyar pada tahun 2019 atau meningkat 6,24 persen per tahun selama periode tersebut. Pada tahun 2016 dan 2017, pembiayaan defisit sepenuhnya mampu ditutupi dengan SiLPA tahun sebelumnya. Sedangkan dua tahun terakhir, 2018-2019 pembiayaan defisit selain ditutupi dengan SiLPA, pemerintah daerah juga melakukan pinjaman dalam negeri untuk menutup defisit. Pinjaman dalam negeri ini meningkat dari Rp11,62 milyar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp54,59 milyar pada tahun 2019. Penerimaan dari pinjaman dalam negeri ini sepenuhnya ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah untuk mengakselerasi pembangunan daerah untuk mencapai target-target capaian pembangunan daerah yang telah ditetapkan sehingga mampu mendorong pertumbuhan daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level



rincikan obyek. Neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah selama kurun waktu 2016-2019 seperti terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 3. 4 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	Rerata Pertum- buhan (%)
	Rp	Rp	Rp	Rp	
ASET	870,292,693,031.03	903,477,883,112.62	1,110,832,143,695.14	1,276,549,458,436.28	13,0
ASET LANCAR	14,641,754,738.00	13,297,485,059.00	20,364,545,929.02	36,145,728,244.18	22,0
Kas	6,060,674,634.00	3,769,794,199.00	7,953,802,231.99	18,883,141,104.31	37,0
Piutang	3,928,328,389.00	4,453,255,107.00	7,191,674,958.92	11,452,491,458.12	37,0
Persediaan	4,652,751,715.00	5,074,435,753.00	5,219,068,738.11	5,783,590,125.50	6,0
ASET TETAP	821,442,117,420.03	848,673,387,330.62	1,087,127,956,481.71	1,215,230,251,999.41	16,0
Tanah	30,046,414,568.00	40,577,206,214.00	44,217,030,214.00	57,992,177,314.00	22,0
Peralatan dan mesin	149,764,176,545.00	164,240,412,598.00	179,424,960,932.06	188,528,832,999.60	9,0
Gedung dan bangunan	193,680,899,799.00	222,568,326,801.00	324,033,588,589.06	397,566,180,692.44	30,0
Jalan, irigasi, dan jaringan	533,132,283,122.00	597,006,061,182.00	765,334,314,001.90	840,556,918,957.04	20,0
Aset tetap lainnya	17,934,054,697.00	20,491,765,154.00	21,351,454,195.07	8,253,982,158.36	9,0
Konstruksi dalam pengerjaan	42,822,229,248.00	66,794,701,914.00	15,771,695,082.00	12,741,433,119.00	-10,0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(145,937,940,558.97)	(263,005,086,532.38)	(263,005,086,532.38)	(290,409,273,241.03)	40,0
ASET LAINNYA	34,208,820,873.00	41,507,010,723.00	3,339,641,284.41	25,173,478,192.69	-35,0
Tagihan penjualan angsuran					
Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah					
Kemitraan dengan pihak kedua					
Aset tak berwujud	730,990,000.00	1,447,021,000.00	925,953,800.00	1,280,485,200.00	31,0
Aset Lain-lain	33,477,830,873.00	40,059,989,723.00	2,413,687,484.41	23,892,992,992.69	-37,0
JUMLAH ASET DAERAH					
KEWAJIBAN	40,173,121,433.00	16,026,674,580.00	62,410,997,613.00		115,0
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	40,173,121,433.00	16,026,674,580.00	50,786,601,013.00	28,560,930,453.00	78,0



Utang perhitungan pihak ketiga	12.881.182.00	73.808.939.00	13.200.287.00	243.760.513.00	195,0
Uang muka dari kas daerah					
Pendapatan diterima dimuka					
Utang jangka pendek lainnya	40.160.240.251.00	15.952.865.641.00	50.773.400.726.00	28.317.169.940.00	79,0
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	11.624.396.600.00	66.216.283.000.00	
Utang Dalam negeri			11.624.396.600.00	66.216.283.000.00	
Utang Jangka Panjang Lainnya					
EKUITAS DANA	830.119.571.598.00	952.510.184.682.00	1.048.617.667.282.14	1.181.772.244.983.28	12,0
EKUITAS DANA LANCAR					
SILPA					
Cadangan piutang					
Cadangan persediaan					
EKUITAS DANA INVESTASI	830.119.571.598.00	952.510.184.682.00	1.048.617.667.282.14	1.181.772.244.983.28	12,0
Diinvestasikan dalam aset tetap	830.119.571.598.00	952.510.184.682.00	1.048.617.667.282.14	1.181.772.244.983.28	12,0
Diinvestasikan dalam aset lainnya					
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA					

Sumber: Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah (diolah), Series

Selama periode 2016-2019, perkembangan jumlah aset Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mengalami perkembangan yang meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13 persen. Aset tersebut terdiri atas aset lancar (kas, piutang dan persediaan), aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan), Aset lainnya (Aset Tak berwujud dan aset lain-lain), semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan. Kewajiban, baik jangka pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga, atau utang jangka pendek lainnya. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam kurun waktu tiga tahun (2016-2019) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 115,0 persen.

Selanjutnya, tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Sedangkan rasio



lancar (*current ratio*) adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu. Rata-rata pertumbuhan rasio keuangan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2016-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 5 Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun Anggaran 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	0,36	0,83	0,40	1,27	-
Rasio quick (<i>quick ratio</i>)	0,25	0,51	0,30	1,06	-
Rasio total hutang terhadap total ekuitas	0,05	0,02	0,06	0,08	-
Rasio total hutang terhadap total asset	0,05	0,02	0,06	0,07	-
Rata-rata umur piutang	2,14	2,48	3,41	4,76	-
Rata-rata umur persediaan	20,41	35,32	27	25,47	-
Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja	0,55	0,67	0,68	0,66	-

Sumber: Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah (diolah), Series

- 1) Pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (*current ratio*) dan rasio quick (*Quick Ratio*). Rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek, sedangkan Quick Ratio adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Rasio lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, maka semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya. Berdasarkan perhitungan lima tahun realisasi anggaran pemerintah daerah, Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan rasio likuiditas yang mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun sempat menurun di tahun 2018 sebesar 0,40 dari 0,83 pada tahun 2017 untuk rasio lancar dan 0,30 dari 0,51 pada tahun 2017 untuk quick ratio. Pada tahun 2020 rasio likuiditas meningkat untuk rasio lancar menjadi 1,27 dan untuk quick ratio sebesar 1,06. Hal ini menunjukkan likuiditas Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terus meningkat dalam kemampuan membayar utang. Dengan memperhitungkan utang pihak ketiga dan utang jangka pendek lainnya.



2) Kedua, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi semua kewajibannya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset (*Debt to Asset Ratio*) dan rasio kewajiban terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*). Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio kewajiban terhadap aset tahun 2016 sebesar 0,05 persen yang artinya setiap Rp.1,00 aset, Rp.0,05 persen nya dibiayai oleh hutang dan, 0,95 nya dibiayai oleh modal. Pada tahun 2017 menurun menjadi 0,02 persen, yang artinya setiap Rp.1,00 aset, Rp. 0,02 persen dibiayai oleh hutang, dan 0,98 persen nya dibiayai oleh modal. kemudian meningkat di tahun 2018 sebesar 0,06 dan ditahun 2019 sebesar 0,07. Yang artinya setiap Rp. 1,00 aset, Rp.0,07 dibiayai oleh hutang dan sebesar 0,93 dibiayai oleh modal. Semakin besar nilai rasio ini, maka semakin buruk rasio kewajiban terhadap aset. Jika dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan manajemen keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah masih dalam kondisi yang solvable.

Sedangkan untuk total hutang terhadap modal yang terus meningkat menunjukan pemerintah daerah mendapatkan pendanaan dari pemberian utang atau investor. Hal ini perlu menjadi evaluasi dan pengawasan manajemen karena semakin tinggi nilai hutang terhadap ekuitas maka akan semakin tinggi jumlah utang yang harus diluasi oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu.

3) Ketiga, rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio untuk mengukur tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah, rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam menggunakan aktiva yang dimiliki dan dalam pengalokasian sumber-sumber dananya. Rasio aktivitas terdiri dari dua alat ukur, yaitu rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan. Rata-rata umur persediaan digunakan untuk mengetahui seberapa besar dana tertanam dalam bentuk persediaan atau menggunakan persediaan untuk melayani publik. Semakin besar periode waktu, semakin besar risiko kemungkinan persediaan berada digudang, demikian sebaliknya. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa risiko kemungkinan persediaan berada digudang cukup rendah. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata 29 hari dana tertanam dalam bentuk persediaan. Sedangkan rata-rata umur piutang pemerintah daerah adalah 3 hari



3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Berdasarkan ketentuan Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencantumkan bahwa sumber penerimaan daerah Kabupaten/Kota terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA); Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; dan (3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah pada periode sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak, Retribusi dan Lain-lain PAD yang sah.
2. Menyusun peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber PAD baru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengupayakan peningkatan penerimaan dan transfer.
4. Melakukan pendataan potensi Pajak Bumi dan Bangunan pada 2 Kecamatan.
5. Penerapan pola intensifikasi dan ekstensifikasi PBB melalui pemberdayaan para kepala dusun sebagai penagih.
6. Penerapan Aplikasi pengelola data PBB-P2
7. Menambah perluasan jaringan pipa air bersih dan sambungan rumah.
8. Meningkatkan upaya pemanfaatan alat berat oleh pihak ketiga.
9. Meningkatkan upaya pendapatan dari sumbangan pihak ketiga, terutama dari sektor perkebunan sawit.
10. Meningkatkan upaya kesadaran masyarakat untuk membayar IMB melalui “kunjung bayar” dan pemasangan stiker Rumah ini belum bayar IMB.



3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah-Proporsi Belanja Aparatur

Kebijakan belanja daerah masa lalu, fokus pemaparan kinerjanya pada kebijakan alokasi belanja daerah untuk mendanai kebutuhan aparatur. Dalam tiga tahun terakhir, proporsi alokasi belanja daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur cenderung meningkat secara signifikan. Pada tahun 2016 proporsi belanja daerah untuk aparatur mencapai 32,04 persen, naik menjadi hanya 35,82 persen pada tahun 2017, tahun berikutnya persentasenya kembali meningkat tajam menjadi 37,59 persen dan kemudian menurun menjadi 23,39 persen di akhir tahun 2019. Data analisis proporsi belanja, pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 6 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	2016	217.405.460.114,45	678.593.002.406,45	32,04
2	2017	215.255.614.505,00	600.869.472.664,00	35,82
3	2018	243.954.260.100,00	648.907.503.454,00	37,59
4	2019	189.723.986.461,96	814.693.378.080,00	23,29
5	2020			

Sumber: Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah (diolah), Series

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka kebijakan belanja daerah selama tahun anggaran 2016-2018 sebagai berikut:

- Pemanfaatan belanja sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama;
- Pemanfaatan belanja menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
- Pemanfaatan belanja yang bersifat rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
- Pemanfaatan belanja program khusus dan penanganan isu-isu strategis yang difokuskan pada fungsi-fungsi pelayanan dasar, stimulasi ekonomi, pelayanan publik dan dukungan penyelenggaraan pemerintahan lainnya dalam rangka mendukung capaian target kinerja utama;



- e. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- f. Memenuhi ketentuan kebijakan pendampingan terhadap program-program Pemerintah Pusat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui belanja langsung dan Belanja tidak langsung sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk mendukung stimulasi capaian target kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah;
- h. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja yang bersumber dari sumber-sumber pendapatan khusus (DAK, Bagi Hasil Pajak Rokok, dan Bantuan Keuangan Khusus) untuk menstimulasi capaian target kinerja utama Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah selama tahun anggaran 2016-2019, secara umum dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Kebijakan umum penerimaan pembiayaan diarahkan pada perhitungan perkiraan sisa lebih (SiLPA) baik berupa pelampauan pendapatan atas dasar peningkatan kinerja maupun sisa belanja atas asumsi terjadinya efisiensi belanja;
- 2) Kebijakan umum pengeluaran pembiayaan diarahkan pada optimalisasi penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD;
- 3) Defisit APBD direncanakan akan di atasi melalui selisih antara proyeksi penerimaan pembiayaan dengan rencana pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;



pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Perkembangan defisit anggaran Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam kurun tahun 2016-2019 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 3. 7 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	632.376.498.713	616.641.469.808	623.527.716.638	715.475.208.757,17	
	Dikurangi realisasi:					
2.	Belanja Daerah	678.593.002.406	600.869.472.664	648.907.503.454	759.368.309.610,85	
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	-	0	
	Defisit riil	(46.216.503.693)	15.771.997.144	(25.379.786.815)	(43.893.100,853.68)	

Sumber: Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah (diolah), Series

Kecuali pada tahun 2017 yang mencapai surplus, pembiayaan defisit diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada tiga tahun lainnya selama periode 2016-2019 ini. Defisit riil menurun dari Rp46,22 milyar pada tahun 2016 menjadi hanya sebesar Rp43,89 milyar pada tahun 2019. Bahkan pada tahun 2018, defisit riil lebih rendah lagi, hanya sebesar Rp25,38 milyar. Penerapan pembiayaan defisit ini, terutama didorong oleh realisasi dana DAK yang tidak terpenuhi dan terdapat kenaikan gaji pegawai dalam tiga tahun tersebut. Pemerintah daerah mengambil berbagai guna menutup defisit tersebut, seperti ditunjukkan dalam komposisi penutup defisit berikut ini.

**Tabel 3. 8 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Proporsi Defisit Riil				
		2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	100,0	100,0	76,0	18,0	
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	24,0	82,0	
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	



Sumber: Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah (diolah), Series

Pada tahun 2016-2019, defisit riil sepenuhnya ditutup dengan SiLPA tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2018-2019, defisit riil selain ditutup dengan penggunaan SiLPA pada tahun sebelumnya, juga dipenuhi dari perolehan pinjaman dalam negeri yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah.

Terkait dengan pencapaian SiLPA sebagai sumber utama penutup defisit riil, pencapaiannya diperoleh dari dua aspek utama, sisi pendapatan daerah dan sisi belanja daerah. Pada sisi pendapatan, menunjukkan kinerja pengelolaan pendapatan yang dapat melampaui target, dan dari sisi belanja daerah lebih disebabkan oleh pengelolaan belanja yang menghasilkan berbagai penghematan atau penundaan kewajiban pada pihak ketiga. Perkembangan realisasi SiLPA pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada kurun waktu 2016-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 9 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2018

No	Uraian	Tahun Anggaran							
		2016		2017		2018		2019	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	5.923.988.117	8,80	21.695.985.261	0,27	7.940.595.045	4,20	18.639.380.591,31	
2	Pelampauan penerimaan PAD								
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	-	-	-	-	-		
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah								
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya					-	-		
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	40.160.240.251	6,78	15.952.865.641	0,74	50.576.879.626	6,37		
7	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-		

Sumber: Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah (diolah), Series



Penerimaan pembiayaan selama tiga tahun terakhir tahun 2016-2018 lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun lalu, sedangkan pada posisi pengeluaran pembiayaan tidak mendapat porsi, ini disebabkan karena selama periode 2016-2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah menganggarkan belanja selalu melampaui pendapatan, ini menyebabkan SiLPA selalu menutupi senilai defisit APBD. Pada tahun 2016 SiLPA sebesar Rp52,14 milyar dan pada tahun 2017 menurun drastis menjadi Rp 5,9 milyar dan pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi Rp21,7 milyar, SiLPA tampak fluktuatif setiap tahunnya. Sumber terjadinya SiLPA berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Di masa mendatang diharapkan SiLPA harus semakin menurun, karena dengan semakin menurunnya SiLPA merupakan salah satu indikasi semakin sinergisnya antara perencanaan dengan penganggaran. Selain itu semakin besar dana yang dikeluarkan untuk pembangunan maka akan memiliki multiplier effect yang besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Mamuju Tengah.

3.3 Kerangka Pendanaan

Perspektif rencana penganggaran pembangunan daerah dalam RPJMD ini diwujudkan dalam dokumen rencana sebagai kerangka pendanaan. Sebagai perspektif rencana, sejumlah asumsi yang mendasari penyusunan kerangka pendanaan ini. selain terkait dengan asumsi makro ekonomi dan sosial, juga terkait kebijakan keuangan negara dan kebijakan keuangan daerah yang diperkirakan akan mempengaruhi rencana penganggaran pada periode pemerintahan yang akan datang. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja langsung, berupa implementasi program-program pembangunan jangka menengah daerah, baik rumusan program pembangunan daerah maupun rumusan program perangkat daerah. Dalam perspektif RPJMD Teknokratik ini, kerangka pendanaan akan diproyeksikan kemampuan fiskal daerah yang dialokasikan untuk prioritas pertama, prioritas kedua serta prioritas ketiga untuk periode 2021-2026 yang akan datang.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam perspektif rencana, baik pendapatan maupun belanja dan pembiayaan daerah didasarkan atas sejumlah asumsi pokok, antara lain asumsi makro ekonomi daerah yang meliputi antara lain pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan per kapita, inflasi, tingkat



pengangguran, tingkat kemiskinan, serta asumsi sosial lainnya, seperti indeks pembangunan manusia, dan lain sebagainya. Selain itu, terkait dengan analisis kebijakan keuangan, baik kebijakan keuangan negara maupun kebijakan keuangan daerah khususnya yang terkait dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah yang akan diterapkan pada masa datang. Berikut ini hasil proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk 2021-2024, seperti disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 10 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi (Ribuan Rupiah)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	PENDAPATAN	626.477	646.734	662.782	674.542	680.376	681.259
1.1	Pendapatan Asli Daerah	31.779	25.961	27.008	28.769	29.603	30.485
1.1.1	Pajak Daerah	8.696	9.735	9.872	10.421	11.004	11.622
1.1.2	Retribusi Daerah	14.287	12.886	12.897	12.908	13.160	13.424
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	580	1.200	2.100	3.300	3.300	3.300
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	8.216	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
1.2	Pendapatan Transfer	576.080	596.080	611.080	621.080	626.080	626.080
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	563.113	583.113	598.113	608.113	613.113	613.113
	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	7.040	7.040	7.040	7.040	7.040	7.040
	Dana alokasi umum	344.703	344.703	344.703	344.703	344.703	344.703
	Dana Transfer Khusus :	154.268	154.268	154.268	154.268	154.268	154.268
	Dana alokasi khusus Fisik	107.227	107.227	107.227	107.227	107.227	107.227
	Dana alokasi khusus Non Fisik	47.041	47.041	47.041	47.041	47.041	47.041
1.2.1.1	Dana Insentif Daerah	0	20.000	35.000	45.000	50.000	50.000
1.2.1.2	Dana Desa	57.103	57.103	57.103	57.103	57.103	57.103
1.2.2	Transfer Antar Daerah :	12.967	12.967	12.967	12.967	12.967	12.967
	Pendapatan Bagi Hasil	12.967	12.967	12.967	12.967	12.967	12.967
	Bantuan keuangan						
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	18.617	24.693	24.693	24.693	24.693	24.693
1.3.1	Hibah	-	-				
1.3.2	Dana Darurat	-	-				
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	18.617	24.693	24.693	24.693	24.693	24.693
	Pendapatan FKTP		6.076	6.076	6.076	6.076	6.076
	Pendapatan Lainnya (BOS)	18,617	18,617	18,617	18,617	18,617	18,617
2	Belanja	626.001	634.567	666.782	675.042	680.876	681.759
2.1	Belanja Operasi	385.226	371.681	397.325	407.065	412.900	413.782
2.1.1	Belanja Pegawai	163.645	180.010	198.011	217.812	239.593	263.553
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	207.033	177.123	193.079	183.094	167.147	144.070
2.1.3	Belanja Bunga	3.500	3.500	000	000	000	000
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-		
2.1.5	Belanja Hibah	9.346	9.346	5.000	5.000	5.000	5.000



No	Uraian	Proyeksi (Ribuan Rupiah)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.702	1.702	1.235	1.160	1.160	1.160
2.2	Belanja Modal	145.398	160.609	167.179	170.699	170.699	170.699
2.3	Belanja Tidak Terduga	3.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
2.4	Belanja Transfer	92.377	92.277	92.277	92.277	92.277	92.277
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT	476	12.167	(4.000)	(500)	(500)	(500)
3	PEMBIAYAAN	(476)	(12.167)	4.000	500	500	500
3.1	Penerimaan Pembiayaan	22.691	12.000	7.000	4.500	4.500	4.500
3.1.1.	SiLPA	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	18.691	10.000	5.000	2.500	2.500	2.500
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	23.167	24.167	3.000	4.000	4.000	4.000
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	22.167	22.167	000	000	000	000
3.2.2	Penyertaan modal daerah	1.000	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	Pembiayaan netto	(476)	(12.167)	4.000	500	500	500
	Sisa Lebih Pembiayaan pada tahun yang berkenaan (SiLPA)	-	-	-	-	-	-

Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun RPJMD

*) Dalam satuan juta rupiah

Pendapatan daerah diproyeksi mencapai Rp.626.476.512.829 pada tahun 2021, meningkat menjadi Rp. 646.734.039.644 pada tahun 2022, pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 662.781.531.848 pada tahun 2024 mencapai Rp 674.541.789.174 dan ditahun 2025 mengalami peningkatan mencapai 680.376.208.097 hingga pada tahun 2026 pendapatan daerah mencapai Rp. 681.258.534.073. Komponen terbesar pendapatan daerah masih bersumber dari dana perimbangan, disusul lain-lain pendapatan daerah yang sah. Meskipun tetap diproyeksikan masih menjadi sumber pendapatan daerah terkecil, tetapi proyeksi PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang estimasinya paling optimis, dengan rata-rata tingkat pertumbuhan tertinggi dibandingkan sumber pendapatan daerah lainnya. Belanja daerah diproyeksikan kurang lebih sama dengan proyeksi pendapatan daerah. Pada tahun 2021 sebesar Rp.626.000.847.089 meningkat menjadi Rp. 634.567.373.864 pada tahun 2022, sebesar Rp. 666.781.531.848 pada tahun 2023, sebesar Rp. 675.041.789.174 pada tahun 2024, sebesar Rp. 680.876.208.097 pada tahun 2025, dan di tahun 2026 mengalami peningkatan mencapai Rp. 681.758.534.073. Alokasi belanja terbesar diperuntukkan untuk belanja modal dan belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, mengingat untuk empat tahun ke depan kebutuhan akan infrastruktur dasar masih sangat besar, terutama untuk menjamin kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat di daerah ini, selain untuk memastikan pelayanan publik yang semakin baik setiap tahunnya. Hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah tersebut, selisihnya akan menunjukkan hasil estimasi pembiayaan daerah, baik pembiayaan surplus maupun pembiayaan defisit.

3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah tersebut, maka selanjutnya diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk periode 2021-2026 sebagai berikut.

Tabel 3. 11 Hasil Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten mamuju Tengah Tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	626.477	646.734	662.782	674.542	680.376	681.259
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)						
3	Sisa Lebih Rill Perhitungan Anggaran	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Total Penerimaan	630.477	648.734	664.782	676.542	682.376	683.259
	Dikurangi:						
4	Belanja Tidak Langsung	446.455	489.720	514.408	539.134	565.915	589.874
5	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0		
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	180.022	157.014	148.374	135.408	114.461	91.385

Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun RPJMD

*) Dalam satuan juta rupiah

Hasil proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk periode 2021-2026 diproyeksikan akan mengalami penurunan, hal ini disebabkan ada nya peningkatan terhadap belanja pegawai dan proyeksi peningkatan pendapatan dana instentif daerah yang berpengaruh terhadap turunnya perhitungan kapasitas riil daerah Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah daerah untuk mempersiapkan aspek perundangan dan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif. Diperlukan rumusan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang tepat, menjangkau sumber-sumber pendapatan asli daerah potensial.

Postur rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk empat tahun yang datang, periode 2021-2026 akan didominasi oleh prioritas I untuk pemenuhan kebutuhan hak dasar masyarakat dan yang bersifat mandatori. Mencakup urusan , kesehatan, PU, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban, urusan sosial, dan bencana. Porsi anggaran untuk prioritas I ini sebanyak 50 persen dari total kapasitas riil keuangan daerah setiap tahunnya. Sedangkan alokasi untuk prioritas II sebanyak 30 persen, serta untuk prioritas III sebesar 20 persen. Selanjutnya, prioritas penggunaan kapasitas riil keuangan daerah



tersebut, didistribusikan berdasarkan perangkat daerah yang akan menjalankan program pembangunan daerah dan perangkat daerah. Selengkapnya pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 12 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026

Uraian	Proyeksi (Rp)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	180.022	157.014	148.374	135.408	114.461	91.385
Prioritas I	90.011	78.507	74.187	67.704	57.231	45.693
Prioritas II	54.007	47.104	44.512	40.622	34.338	27.416
Prioritas III	36.004	31.403	29.675	27.082	22.892	18.277

Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun RPJMD

*) Dalam satuan juta rupiah

Perangkat daerah yang ditempatkan sebagai prioritas I adalah perangkat daerah yang secara langsung mengimplementasikan program pembangunan daerah dan program perangkat daerah yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar. Prioritas II merupakan sekumpulan perangkat daerah yang mengimplementasikan program pembangunan daerah untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah yang belum terkover dalam prioritas I. Sedangkan perangkat daerah atau unit yang tergolong dalam prioritas III menjalankan program pembangunan daerah dan perangkat daerah lainnya yang belum ter-cover dalam prioritas I dan prioritas II.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan

Perumusan permasalahan pembangunan daerah merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di masa datang. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu. Permasalahan pembangunan daerah adalah kesenjangan (*gap*) antara capaian dan target kinerja pembangunan daerah, atau antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Artinya, pengukuran permasalahan pembangunan daerah dapat didekati dari dua sudut pandang kesenjangan. Pertama, kesenjangan antara target dan capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah, perspektif ini mengharuskan untuk menyajikan data secara *time series*. Kedua, kesenjangan antara capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah dengan capaian kinerja pembangunan yang sama dalam skala provinsi dan atau nasional.

Gambaran awal permasalahan pembangunan daerah harus diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tidak semua permasalahan dari setiap urusan dijadikan sasaran pokok hingga akhir periode perencanaan. Khusus untuk Kabupaten Mamuju Tengah, hingga akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2026. Selain faktor keterbatasan sumber pendanaan, juga berkaitan dengan tahapan dan prioritas pada isu yang diidentifikasi paling strategis pada periode perencanaan pembangunan daerah. Berikut ini diidentifikasi permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana periode RPJMD 2021-2026.

4.1.1. Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah yang diungkapkan pada bagian ini adalah permasalahan pada level makro daerah. Permasalahan tersebut diarahkan sebagai input dalam rumusan misi, tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan perumusan arah kebijakan pada Bab V dan Bab VI RPJMD ini. Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah ini disusun dalam suatu hirarki masalah yang terdiri dari masalah pokok, masalah dan akar masalah. Rumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah ini juga dihubungkan dengan arahan RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah tahap dua (2020-2025) yang merupakan tahap akselerasi sekaligus pematangan bagi pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah. Akselerasi difokuskan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah tetangga yang lebih dulu terbentuk. Pokok visinya diarahkan pada perwujudan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum yang lebih merata antar wilayah, antar golongan dan antar lapisan masyarakat. Fokus daya saing juga menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian agar bisa segera sejajar dan bisa melampaui daerah yang lebih dulu terbentuk. Memperhatikan arahan RPJPD dan hasil analisis terhadap capaian kinerja pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah hingga tahun 2019, maka permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada Rancangan Teknokratik RPJMD ini disusun sebagai berikut.

1) Tertinggalnya perkembangan kualitas manusia

Masalah pokok paling krusial di Kabupaten Mamuju Tengah adalah tertinggalnya kualitas manusia. Ini dapat dilihat pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Mamuju Tengah telah mengalami peningkatan dari nilai 62,22 (2015) menjadi 65,10 (2019), 65,71 (2020) tetapi bila dibanding dengan rata-rata IPM Sulawesi Barat dengan nilai 65,73 (2019) dan 66,11(2020) maka IPM Kabupaten Mamuju Tengah lebih rendah. Dibanding Kabupaten lain di Sulawesi Barat, IPM Mamuju Tengah tahun 2020 berada di bawah Kabupaten Mamuju, Pasangkayu, Majene, dan Mamasa dan hanya di atas Kabupaten Polman. Dibanding dengan IPM nasional, capaian IPM Kabupaten Mamuju Tengah juga tertinggal. Masalah yang menyebabkan masalah pokok ini adalah rendahnya derajat pendidikan, derajat kesehatan dan daya beli masyarakat. Terkait derajat pendidikan, Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) pada 2019 adalah 7,24, ARLS 2020 adalah 7,46, paling rendah dibanding semua Kabupaten, dimana rata-rata Provinsi sebesar 7,73 di tahun 2019 dan 7,89 pada tahun 2020. Angka Harapan Lama Sekolah pada 2019 sebesar 11,92, tahun 2020 sebesar 12,23 dibawah rata-rata Provinsi sebesar 12,62 (2019) dan 12,77 (2020). Angka Putus Sekolah yang cukup tinggi di Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak 42 orang di tingkat SD pada tahun 2020 menjadi isu strategis dalam mendorong Pendidikan kesetaraan untuk meningkatkan IPM Mamuju Tengah pada dimensi Pendidikan. Terkait dengan derajat

kesehatan, Angka Harapan Hidup pada 2019 sebesar 68,06, 2020 sebesar 68,33 lebih tinggi dari rata-rata Provinsi di tahun 2019 sebesar 64,82 dan tahun 2020 sebesar 65,06. Dalam hal daya beli, pengeluaran per kapita riil disesuaikan berfluktuasi dalam lima tahun terakhir, pada tahun 2019 senilai Rp. 8.501 juta, lebih rendah dari rata-rata Provinsi Rp. 9.235 juta dan pada tahun 2020 sebesar Rp.8.414 juta lebih rendah dibandingkan dengan provinsi sebesar Rp.9.168 juta. Akar masalah terkait pendidikan adalah rendahnya angka partisipasi PAUD sebesar 39,57% di tahun 2020, pendidikan dasar 93,95% di tingkat SD/Mi dan 50,31% di tingkat SMP/MTs pada tahun 2020 dan pendidikan kesetaraan. Untuk aspek kesehatan, akar masalahnya adalah masih adanya kematian bayi, kematian ibu melahirkan, gizi buruk dan penderita stunting yang mencapai 32,14%. Akar masalah terkait daya beli masyarakat adalah rendahnya pendapatan per kapita masyarakat yang hanya sebesar 23,24 juta rupiah pada tahun 2020.

2) Terbatasnya kapasitas infrastruktur dasar dan wilayah

Masalah pokok kedua adalah terbatasnya aksesibilitas wilayah, terutama wilayah pedesaan. Dampak dari aksesibilitas wilayah pedesaan yang terbatas adalah rendahnya status desa. Berdasarkan data Indeks Desa Mandiri (IDM) pada Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal (2020), dari total 54 desa di Kabupaten Mamuju Tengah terdapat satu Desa Mandiri (1,85%), satu Desa Maju (1,85%), 28 Desa Berkembang (51,85%), dan 24 Desa Tertinggal (44,44%). IDM adalah indikator kemajuan desa yang mencakup dimensi ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan ketahanan ekologi. Desa yang masih berstatus tertinggal adalah: 1. Tappilina, 2. Kadaila, 3. Bojo, 4. Salupangkang IV, 5. Bambamanurung, 6. Pasapa, 7. Parigi, 8. Pangallolang, 9. Saloadak, 10. Sejati, 11. Bambadaru, 12. Tumbu, 13. Paraili, 14. Sanjango, 15. Lembah Hopo, 16. Salubiro, 17. Kayu Calla, 18. Salulekbo, 19. Sartanamaju, 20. Kombiling, 21. Tangkou, 22. Lemo-Lemo, 24. Pangale. Desa yang berstatus maju adalah Karossa dan yang berstatus mandiri adalah Topoyo. Masalah dibalik realitas ini adalah kondisi infrastruktur jalan yang masih buruk sehingga mempengaruhi aspek ekonomi dan pelayanan di desa. Dari total panjang jalan kabupaten, hanya sekitar 20% dalam kondisi baik. Sebagian besar jalan antar desa serta jalan dari desa ke ibu kota kabupaten masih berstatus jalan tanah dan jalan kerikil. Jalan aspal antar desa atau dari desa ke ibu kota kabupaten sebagian dalam kondisi rusak dan rusak berat. Selain itu, sarana/prasarana dalam mewujudkan agropolitan di ibu kota Kabupaten serta sarana/prasarana pendukung sentra agribisnis di ibu kota kecamatan, belum tersedia dengan cukup. Akar masalah dari kondisi ini terkait dengan aspek historis daerah ini yang awalnya merupakan daerah transmigrasi berbasis unit pemukiman transmigrasi (UPT), setelah berstatus desa maka jalan antar desa itu sebelumnya merupakan jalan antar UPT yang memerlukan dana dalam jumlah besar untuk pembangunannya. Misi ini

juga mencakup upaya umum dalam pembangunan sarana/prasarana dalam mewujudkan agropolitan di ibukota kabupaten yang ditopang oleh sarana/prasarana pendukung sentra agribisnis di seluruh kecamatan. Ini juga mencakup diperlukannya pembangunan infrastruktur yang menjadi penanda Ibu Kota Kabupaten, mencakup jalan lingkar di sekitar Tugu Benteng Kayu Mangiwang yang dilengkapi dengan sarana lampu jalan, trotoar dan taman kota. Selain itu, juga diperlukan pembangunan pintu gerbang sebagai batas ibukota kabupaten baik dari arah Mamuju maupun dari arah Pasangkayu. Pengembangan Kawasan ibu kota kabupaten ini juga perlu dilengkapi dengan bangunan-bangunan kantor yang memenuhi standar untuk beberapa pelayanan publik.

3) Rendahnya daya saing perekonomian rakyat

Masalah pokok lainnya adalah rendahnya daya saing perekonomian rakyat. Ini ditandai pertumbuhan ekonomi daerah yang stagnan pada angka 5% - 6%. Sebagai daerah otonomi baru dan pernah menyandang status sebagai daerah tertinggal, Kabupaten Mamuju Tengah dituntut mengakselerasi pertumbuhan ekonominya untuk mengejar ketertinggalan. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi berfluktuasi dan cenderung menurun, dari 6,7% (2015) menjadi 5,62 % (2019) dan berkontraksi hingga -0,4 % di tahun 2020 karena dampak pandemic Covid-19. Masalah terkait hal ini adalah struktur perekonomian yang didominasi pertanian dalam arti umum, dengan dominasi pada perkebunan sawit yang nilai tambahnya diekspor keluar. Struktur PDRB berdasarkan bidang usaha didominasi oleh pertanian, kehutanan perikanan sebesar 71,20% (2019), 71,81% (2020) dan ini tidak banyak berubah dari empat tahun lalu (70,43%). Industri pengolahan di urutan kedua yakni 8,49% (2019) dan 8,51% (2020), yang dominan di dalamnya adalah pengolahan pada pabrik sawit. Tantangan kedepan adalah pengembangan bidang usaha perdagangan besar dan eceran yang saat ini kontribusinya pada PDRB baru 4,42% (2019) dan 4,43% (2020), serta berbagai sektor jasa seperti transportasi, penginapan dan hotel, rumah makan dan restoran, jasa keuangan/perbankan, serta jasa pendidikan dan kesehatan. Akar masalah terletak pada pertumbuhan ekonomi pertanian rakyat yang lambat karena kurang terakselerasinya pemanfaatan beberapa potensi pertanian, termasuk belum adanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berfungsi menangani pengelolaan potensi perekonomian daerah. Untuk tanaman pangan, terdapat peluang pengembangan komoditas unggulan yakni jagung dan pisang. Pada tahun 2019, menurut data Mantri Tani dan Penyuluh Pertanian, luas pertanaman jagung sekitar 40 Ha dengan jumlah produksi sekitar 200.000 ton, meningkat dari sekitar 10 Ha pada tahun 2016 dengan jumlah produksi 50.000 ton. Luasan dan produksi terbesar di Tobadak dan Pangale. Komoditas pisang juga memiliki prospek yang baik. Produk dari komoditas ini sebagian dipasarkan ke Kalimantan. Bila pemindahan ibukota negara



terealisasi, mobilitas manusia dan barang antara Mamuju Tengah dengan ibukota negara bisa lebih intensif, dan komoditas utama yang diperdagangkan ke sana adalah pisang. Luas pertanaman pisang pada 2019 menurut pendataan Mantri Tani dan Penyuluh Pertanian sebanyak 529,35 Ha, menurun dari 622,37 Ha (2016).

4) Kemiskinan dan kesenjangan

Kemiskinan termasuk masalah pokok dalam pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah dalam lima tahun kedepan. Menurut SDGs, tujuan yang dituju adalah terhapusnya semua kemiskinan. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Mamuju Tengah 9.160 orang, di tahun 2020 meningkat 9.250 orang bertambah dibanding tahun 2015 yang sebanyak 8.390 orang. Berdasarkan persentase penduduk miskin tahun 2019 adalah 6,87%, dan di tahun 2020 turun 6,79 % dibanding tahun 2015 (6,86%). Masalah dibalik kemiskinan ini adalah pengangguran terbuka dan pengangguran tersembunyi serta rendahnya pendapatan masyarakat yang bekerja. Pada tahun 2019, jumlah penduduk yang bekerja sendiri sebanyak 10.880 orang meningkat di tahun 2020 menjadi 11.324 orang, memiliki usaha dan dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar sebanyak 17.499 orang dan menurun di tahun 2020 menjadi 14.811 orang, berusaha dan dibantu buruh tetap sebanyak 1.222 orang dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 2.284 orang, pekerja bebas pertanian pada tahun 2019 sejumlah 4.004 orang dan di tahun 2020 sebesar 3.483 orang, pekerja bebas non pertanian 3.976 orang di tahun 2019 dan 2250 orang di tahun 2020. Pekerja pada berbagai jenis pekerjaan utama ini rata-rata memiliki pendapatan rendah. Masalah lain terkait dengan perbedaan sistem nafkah rumah tangga yang mengarah pada kesenjangan. Lebih dari 50% rumah tangga hidup dari sistem nafkah kebun sawit yang hingga saat ini hasil nafkahnya relatif tinggi (di atas garis kemiskinan), bersifat reguler, dan sebagian besar pelakunya adalah bekas transmigran. Berbeda dengan masyarakat nelayan yang bermukim pada sepanjang pesisir Kabupaten Mamuju Tengah yang sistem nafkahnya bergantung pada musim tangkap, teknologinya sederhana, alokasi waktu kerjanya tinggi, dan pendapatannya rendah sehingga hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan sosial-ekonomi di balik realitas kemiskinan. Masalah lain juga terkait dengan ancaman terhadap eksistensi sistem nafkah pertanian yakni alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan menjadi peruntukan sawit atau non pertanian sehingga bukan hanya mengganggu sistem nafkah pertanian tetapi juga ketahanan pangan daerah.

5) Rendahnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik

Rendahnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik juga merupakan masalah pokok. Pada tahun 2019, kepuasan masyarakat atas pelayanan pada RSUD, UPTD Air Minum, DPM

PTSP Koperasi dan UKM, serta Disdukcapil hanya mencapai kategori C atau Kurang Baik, sementara pelayanan pada Dinas Sosial kategori B atau Baik. Capaian SPM juga belum memenuhi target 100% pada berbagai indikator yakni pelayanan ibu hamil sesuai (76,51%), pelayanan ibu melahirkan (84,88%), pelayanan bayi baru lahir (88,67%), pelayanan kesehatan balita (76,36%), penyediaan air minum sehari-hari (65%), pengelolaan limbah domestik (69%), pelayanan warga terkait penegakan hukum Perda (50%), pelayanan informasi bencana (14%) dan rehabilitasi sosial dasar di luar panti 63,90%. Masalah terkait rendahnya kepuasan masyarakat dan capaian SPM terkait dengan keterbatasan sarana-prasarana, teknologi, dan SDM penyelenggaraan pelayanan. Fasilitas dan tenaga kesehatan, termasuk dokter ahli, untuk pelayanan kesehatan level rumah sakit, puskesmas serta puskesmas pembantu dan jaringannya belum sepenuhnya memenuhi standar dan sebarannya belum menjangkau seluruh penerima layanan terutama layanan ibu hamil, ibu melahirkan, bayi baru lahir dan balita. Pelayanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar juga berhadapan dengan masalah terbatasnya jumlah dan kualitas sarana. Demikian halnya dengan tenaga guru yang dari segi jumlah, kualitas dan sebaran belum optimal. Fasilitas pelayanan air minum sehari-hari dan fasilitas sanitasi juga masih terbatas.

6) Degradasi lingkungan dan sumberdaya alam

Degradasi lingkungan dan sumberdaya alam juga merupakan masalah pokok yang mengancam keberlanjutan pembangunan. Sebagai daerah yang mengandalkan sumberdaya alam sebagai basis nafkah masyarakat, Kabupaten Mamuju Tengah sangat berkepentingan untuk memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam. Degradasi lingkungan dapat mengganggu siklus hidrologi dengan dampak pada terjadinya banjir karena luapan air sungai. Lokasi rawan banjir dan longsor terutama Desa Pangale, Desa Lemo-Lemo dan Desa Karama Kecamatan Pangale; Desa Lumu, Desa Kire dan Desa Babana Kecamatan Budong-Budong; Desa Tumbu Kecamatan Topoyo; dan Desa Benggaulu Kecamatan Karossa. Bencana tsunami juga rawan pada sejumlah desa pantai di Kecamatan Pangale, Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Topoyo, dan Kecamatan Karossa. Wilayah pesisir ini juga rawan bencana gelombang pasang. Kabupaten Mamuju Tengah masih tergolong rawan bencana kebakaran lahan dan hutan. Masalah dibalik degradasi lingkungan ini adalah aktivitas perambahan hutan, dinamika siklus hidrologi terkait keberadaan perkebunan sawit, pencemaran lingkungan oleh aktivitas pabrik dan aktivitas masyarakat, aktivitas pertanian pada lokasi berkemiringan, pendangkalan sungai karena sedimentasi, berkurangnya keanekaragaman hayati, belum optimalnya pengelolaan sampah perkotaan, dan belum kuatnya keasadaran masyarakat atas kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam.

7) Ancaman disharmoni sosial di balik heterogenitas sosial budaya

Ancaman disharmoni sosial juga merupakan masalah yang perlu diantisipasi. Apa lagi bila mengarah kepada konflik sosial. Ini disebabkan oleh karena secara sosial-budaya masyarakat yang menghuni Kabupaten Mamuju Tengah terdiri dari berbagai macam suku/etnis. Artinya, masyarakat Mamuju Tengah hidup dalam keberagaman, dalam heterogenitas sosial yang tinggi. Wilayah Mamuju Tengah dihuni oleh suku/etnis Mamuju, Mandar, Jawa, Lombok, Bali, Toraja, Timor Timur, Bugis, Makassar dan lainnya. Sebagian dari suku/etnis ini hidup pada desa-desa yang sebelumnya merupakan unit pemukiman transmigran (UPT), bahkan saat ini masih ada yang statusnya sebagai UPT. Kondisi heterogen ini merupakan modal sosial dalam pembangunan daerah. Akar masalah yang perlu diantisipasi efeknya adalah bila terjadi kesenjangan ekonomi yang tinggi, maka heterogenitas sosial budaya yang tinggi dapat merupakan potensi konflik sosial. Karena itu, nilai La'la Tassisara yang kurang lebih bermakna meskipun berbeda tetapi tetap dalam kebersamaan untuk mencapai tujuan, merupakan bingkai pengikat yang perlu terus direvitalisasi oleh seluruh elemen sosial-budaya dalam masyarakat serta dalam relasi antara pemerintah dan masyarakat, demi persatuan dan kesatuan.

8) Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik

Masalah pokok lainnya adalah belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Ini ditandai dengan masih rendahnya sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP) daerah, yang menandakan bahwa kegiatan pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan belum sepenuhnya berorientasi pada hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Masalah di balik itu adalah belum mantapnya penyelenggaraan reformasi birokrasi. Delapan area reformasi birokrasi yang menjadi perhatian adalah budaya kerja, organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik. Akar masalahnya adalah kuantitas SDM aparatur yang belum mencukupi, ini merupakan konsekuensi sebagai daerah otonomi baru. Selain itu, kompetensi sebagian SDM aparatur masih terbatas, disebabkan oleh kurangnya keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan terkait tupoksinya, baik pada level OPD Kabupaten dan Kecamatan maupun pada pemerintahan desa.

4.1.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap

tingkatan dan susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Identifikasi permasalahan pembangunan untuk penyelenggaraan urusan adalah sebagai berikut.

Sebaiknya permasalahan berdasarkan urusan dinarasikan dengan memperhatikan isi tabel identifikasi permasalahan (Tabel 3.13). Tabel tersebut disimpan sebagai kertas kerja, tetapi penyajian masalah setiap urusan sebaiknya dinarasikan seperti berikut.

1) Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a) Urusan Pendidikan

Masalah pokok urusan pendidikan adalah rendahnya APM PAUD, APM Pendidikan Dasar, serta tingginya angka melek huruf. Partisipasi sekolah untuk PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan belum mencapai 100%, sesuai target SPM. Ini disebabkan oleh belum cukupnya ketersediaan PAUD berstatus sekolah negeri dan terbatasnya tenaga pengajar sarjana PAUD. Selain itu, rasio yang ideal antara sekolah (SD dan SMP) dan murid, antara guru (SD dan SMP) dan murid, belum tercapai secara merata. Masalah lainnya adalah terbatasnya pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) untuk penyelenggaraan pendidikan kesetaraan serta belum adanya kurikulum muatan lokal.

b) Urusan Kesehatan

Masalah pokok urusan kesehatan adalah masih belum tercapainya target SPM untuk urusan kesehatan. Data terakhir tahun 2019 menunjukkan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan masih mencapai 76,51%. Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebesar 84,88%. Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar sebesar 88,67%. Pelayanan kesehatan balita sebesar 76,38%. Pelayanan kesehatan sesuai usia untuk usia pendidikan dasar 97,97%, usia produktif 81,83%, usia lanjut 83,27%. Untuk pelayanan kesehatan penderita hipertensi 74,09%, penderita diabetes 95,94%. Capaian ini dibawah target yang ditetapkan untuk Standar pelayanan Minimal yaitu 100%. Masih rendahnya rasio fasilitas kesehatan baik puskesmas, poli klinik, pustu dan rumah sakit terhadap jumlah penduduk menjadi hambatan dalam pelayanan dan penanganan dini untuk pelayanan ibu dan bayi. Masih kurangnya tenaga kesehatan utamanya dokter spesialis juga menjadi kendala dalam penanganan kelahiran yang berisiko. Kesadaran masyarakat dan ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya sedini mungkin ke fasilitas kesehatan juga masih rendah.

Kurangnya kader posyandu terlatih yang aktif untuk menemukenali dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memeriksakan kehamilan sedini mungkin juga menjadi kendala.

Selanjutnya untuk penanganan pasien hipertensi, diabetes, HIV, TBC dan penyakit menular lainnya juga harus menjadi perhatian. Kurangnya tenaga dokter spesialis yang menangani menjadi keterbatasan sehingga pasien harus di rujuk ke rumah sakit rujukan. Sekalipun cakupan penemuan terhadap penderita TBC sudah mencapai 100% akan tetapi terdapat kendala di lapangan yang biasa dihadapi. Yakni meningkatnya tingkat prevalensi TBC yang naik selama lima tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan ketidaktahuan pasien sehingga pasien tidak memeriksakan kesehatannya ke fasilitas kesehatan untuk segera mendapat pengobatan. Stigma dan diskriminasi masyarakat tentang penyakit menular yang masih sangat tinggi. Penolakan masyarakat untuk diperiksa karena anggapan bahwa TBC bukanlah penyakit medis.

c) PUPR

Bidang Pekerjaan Umum Permasalahan utama pada aspek kebinamargaan adalah (1) kuantitas dan kualitas aksesibilitas jalan menuju sentra pertanian, wisata dan permukiman. Dampak dari aksesibilitas wilayah pedesaan yang terbatas adalah rendahnya status desa. Berdasarkan data Indeks Desa Mandiri (IDM) pada Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal (2020), dari total 54 desa di Kabupaten Mamuju Tengah terdapat satu Desa Mandiri (1,85%), satu Desa Maju (1,85%), 28 Desa Berkembang (51,85%), dan 24 Desa Tertinggal (44,44%). IDM adalah indikator kemajuan desa yang mencakup dimensi ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan ketahanan ekologi. Desa yang masih berstatus tertinggal adalah: 1. Tappilina, 2. Kadaila, 3. Bojo, 4. Salupangkang IV, 5. Bambamanurung, 6. Pasapa, 7. Parigi, 8. Pangallolang, 9. Salobadak, 10. Sejati, 11. Bambadu, 12. Tubu, 13. Paraili, 14. Sanjango, 15. Lembah Hopo, 16. Salubiro, 17. Calla, 18. Salukebo, 19. Maju, 20. Kombiling, 21. Sartanamaju, 22. Tangkou, 23. Lemo-Lemo, 24. Pangale. Desa yang berstatus maju adalah Karossa dan yang berstatus mandiri adalah Topoyo. Masalah dibalik realitas ini adalah kondisi infrastruktur jalan yang masih buruk sehingga mempengaruhi aspek ekonomi dan pelayanan di desa. Dari total panjang jalan kabupaten, hanya sekitar 20% dalam kondisi baik. Sebagian besar jalan antar desa serta jalan dari desa ke ibu kota kabupaten masih berstatus jalan tanah dan jalan kerikil. Jalan aspal antar desa atau dari desa ke ibu kota kabupaten sebagian dalam kondisi rusak dan rusak berat.

Selain itu, sarana/prasarana dalam mewujudkan agropolitan di ibu kota Kabupaten serta sarana/prasarana pendukung sentra agribisnis di ibu kota kecamatan, belum tersedia

dengan cukup. Akar masalah dari kondisi ini terkait dengan aspek historis daerah ini yang awalnya merupakan daerah transmigrasi berbasis unit pemukiman transmigrasi (UPT), setelah berstatus desa maka jalan antar desa itu sebelumnya merupakan jalan antar UPT yang memerlukan dana dalam jumlah besar untuk pembangunannya. Misi ini juga mencakup upaya umum dalam pembangunan sarana/prasarana dalam mewujudkan agropolitan di ibukota kabupaten yang ditopang oleh sarana/prasarana pendukung sentra agribisnis di seluruh kecamatan ; (2) belum terpenuhinya standar lebar jalan pada sebagian besar jalan kabupaten dan infrastruktur pendukung jalan (drainase, pedestrian dll) belum dioptimalkan eksistensinya.

Permasalahan utama terkait aspek sumber daya air dan irigasi adalah: (1) rendahnya penyediaan sumber air baku untuk air minum dan irigasi; (2) tingginya kerusakan jaringan pipa uptd air bersih daerah dan irigasi; (3) menurunnya daya tampung sungai serta kurang tegasnya regulasi pemerintah daerah tentang daerah sempadan sungai. Akar masalah dari kondisi ini terkait dengan base line data daerah yang tidak optimal dan efektif dalam penanganan daerah rawan air bersih serta kualitas infrastruktur masih rendah.

Permasalahan utama pada aspek keciptakarya adalah: (1) rendahnya penyediaan dan distribusi pelayanan air minum (2) rendahnya cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi permukiman (limbah, sampah, drainase); (3) terbatasnya penyediaan infrastruktur sampah pada masing-masing kecamatan. Akar masalah dari kondisi ini terkait dengan base line data daerah yang tidak optimal dan efektif dalam penanganan kebutuhan pemenuhan SPM Air bersih dan sanitasi.

Bidang Penataan Ruang Permasalahan utama adalah (1) belum memadainya pranata bidang penataan ruang khususnya rencana rinci tata ruang; (2) rendahnya keterkaitan fungsional antar wilayah perkotaan dan pedesaan; (3) menurunnya ketersedianya ruang untuk ketahanan pangan dan ruang terbuka hijau (RTH) publik; (4) belum terwujudnya sinergitas koordinasi penataan ruang baik yang bersifat fisik lingkungan, kebencanaan maupun ekonomi pada kawasan strategis; (5) belum optimalnya perwujudan ruang investasi di kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

d) Perumahan Rakyat

Pembangunan kawasan perumahan dan permukiman telah menjadi suatu kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk tinggal dan menetap secara permanen. Pemerintah



Kabupaten Mamuju Tengah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi kebutuhan dasar tersebut seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Maka identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan Tupoksi adalah:

- a. Adanya kesenjangan antara kebutuhan rumah layak huni dengan jumlah rumah layak huni yang tersedia (backlog)
- b. Belum tersedianya database perumahan permukiman dan pertanahan yang berbasis spasial;
- c. Belum tersedianya prasarana dan sarana utilitas yang memadai pada perumahan dan kawasan permukiman;
- d. Bertambahnya luasan Kawasan kumuh setiap tahun.
- e. Belum adanya legalitas dokumen perencanaan untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan tata ruang wilayah;
- f. Meningkatnya jumlah rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menempati rumah tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai;
- g. Adanya kebutuhan lahan yang perlu dibebaskan untuk Pembangunan infrastruktur pemerintah daerah

e) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Masalah pokok urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah masih rendahnya warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara belum mencapai 100% sesuai target SPM. Begitu pula pada indikator lainnya yang tertuang pada bab sebelumnya sebagian belum mampu untuk dicapai. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya sumber daya manusia PNS maupun non PNS yang memadai. Hal ini disebabkan, belum adanya PP PNS pada Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang mendapatkan diklat untuk pengembangan kapasitas penengakkan perda. Selain itu belum maksimalnya koordinasi antara OPD yang terkait perda mengakibatkan perda yang ditegakkan masih belum jelas, terkait itu Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat juga belum mempunyai payung hukum dalam melaksanakan tugasnya yakni perda penengakkan Satpol-PP. Masalah lain yang menjadi penghambat yakni masyarakat pada umumnya belum memahami tugas Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Sedangkan untuk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi juga belum mampu untuk memenuhi target SPM 100%, dikarenakan terbatasnya sarana dan

prasarana yang memadai dilapangan baik itu suplai air, APD pemadam yang masih sangat minim. Selain itu sumberdaya manusianya masih sangat terbatas belum mampu untuk memenuhi kebutuhan seharusnya pemadam kebakaran dalam satu regu dan kurangnya tenaga yang terlatih. Serta belum adanya penetapan wilayah manajemen kebakaran yang mengakibatkan pihak Dinas Trantib hanya menentukan titik-titik tertentu sebanyak tujuh titik posko

f) Sosial

Masalah pokok urusan sosial adalah belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik dalam bentuk rehabilitasi sosial dasar, perlindungan dan jaminan sosial, maupun melalui pemberdayaan sosial. Capaian Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, serta tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti masih belum mencapai 100% sesuai target SPM. Begitupun dengan pencapaian indikator kinerja dalam hal penanganan dan pemberian bantuan bagi PMKS yang masih di bawah target. Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut adalah tidak adanya pemutakhiran data PMKS yang seharusnya dilakukan minimal satu kali dalam setahun serta adanya ketergantungan terhadap program yang berasal dari pusat yang tidak dibarengi dengan pelaksanaan program dan kegiatan di daerah yang mendukung indikator tersebut.

Selain itu masalah lainnya adalah tidak tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial di panti sosial serta tidak adanya wadah bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan adanya regulasi di daerah sebagai payung hukum dalam pembentukan dan pelaksanaannya. Adapun Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti dan penanganan korban bencana telah mencapai target SPM, namun dalam pelaksanaannya masih menemui beberapa kendala, di antaranya adalah sulitnya akses jangkauan PMKS dan kurangnya peran aktif masyarakat.

Masalah pokok pada sub-urusan kebencanaan adalah rendahnya layanan informasi rawan bencana serta pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang capaiannya jauh di bawah target capaian SPM. Akar permasalahan dari hal ini adalah belum adanya update terbaru dari peta daerah rawan bencana sehingga data jumlah masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana tidak akurat. Dalam pemberian layanan informasi rawan bencana juga hanya berfokus pada satu jenis produk layanan yakni berupa bimtek dan sosialisasi sehingga data tentang jumlah warga yang memperoleh layanan informasi pun hanya berdasarkan jumlah peserta yang hadir pada saat bimtek dan sosialisasi tersebut. Padahal sebenarnya produk layanan informasi bisa



dalam berbagai bentuk sehingga jangkauan informasi semakin luas, seperti layanan informasi melalui media cetak, elektronik maupun media sosial. Selain itu masalah lainnya adalah tidak adanya program dan kegiatan yang secara konsisten dilakukan di setiap tahunnya sebagai penjabaran dari tiap indikator capaian SPM. Adapun layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana telah mencapai target namun dalam pelaksanaannya menemui beberapa kendala di antaranya adalah kurangnya sarana dan prasarana lapangan serta minimnya logistik. Oleh karena itu hal-hal yang menjadi faktor pendukung keberhasilan pencapaian target SPM ini adalah ketersediaan data dan informasi terkait daerah rawan bencana yang akurat, adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas terkait pemberian layanan informasi dan kesiapsiagaan bencana, Sumber Daya Manusia Tim Reaksi Cepat (TRC), sarana dan prasarana yang memadai, serta adanya koordinasi/kerjasama lintas sektoral dan dukungan stakeholder.

2) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

a) Tenaga Kerja

Masalah pokok pada urusan tenaga kerja adalah rendahnya kualitas tenaga kerja, hal ini disebabkan masih kurangnya pelatihan tenaga kerja baik yang berbasis kompetensi, berbasis masyarakat dan berbasis kewirausahaan. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja sehingga tingkat pengangguran masih tinggi. Adanya sengketa antara tenaga kerja dengan pihak pengusaha yang tidak tertangani disebabkan tidak adanya laporan dari pekerja itu sendiri, kurangnya kesadaran dari pihak perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya untuk memperoleh layanan K3.

b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masalah pokok dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah rendahnya persentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah/Swasta dan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR serta rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan hukum, layanan pemulangan dan layanan reintegrasi sosial belum tercapai. Ini disebabkan karena banyak kasus yang belum dilaporkan karena masyarakat menganggap kasus itu adalah kasus yang tabu, tidak adanya sarana dan prasarana layanan rehabilitasi sosial dan tidak ada petugas rehabilitasi yang terlatih di Kabupaten Mamuju Tengah, Belum terbentuknya UPTD PPPA, serta minimnya koordinasi lintas sektoral. Selain itu Rasio Angka Partisipasi

Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD dan SMP serta Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun masih belum memenuhi target.

c) Pangan

Masalah pokok urusan pangan yaitu terkait dengan ketersediaan pangan utama yang dari kuantitas semakin menurun setiap tahunnya walaupun dari segi persentase sudah melebihi 100%. Ketersediaan energi dan protein perkapita pun juga masih sangat rendah dan ditambah dengan pendataan yang tidak dilakukan secara berkala. Sementara itu terkait dengan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan sudah cukup baik. Beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian adalah penguatan terhadap distribusi pangan khususnya di daerah terpencil dan di waktu inflasi yang tinggi yang disebabkan wilayah-wilayah rawan pangan belum terpetakan dan belum ada strategi untuk mengatasi beberapa daerah yang sudah teridentifikasi.

d) Pertanahan

Masalah Pokok Pertanahan adalah masih minimnya tanah yang bersertifikat. Hal ini dapat menyebabkan status kepemilikan yang belum jelas. Masalah ini disebabkan kurang sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pertanahan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah. Banyaknya kebutuhan pembebasan lahan untuk pembangunan perkantoran pemerintahan.

e) Lingkungan Hidup

Masalah pokok urusan Lingkungan hidup adalah Degradasi lingkungan dan sumberdaya alam yaitu berbagai persoalan seperti Deforestasi atau penggundulan hutan, pembuangan limbah dan persampahan. Degradasi lingkungan dapat mengganggu siklus hidrologi dengan dampak pada terjadinya banjir karena luapan air sungai, bencana kebakaran lahan dan hutan dan persoalan persoalan lain yang ditimbulkan dari Degradasi lingkungan dan sumberdaya alam. Tercemarnya air sungai karena limbah pabrik utamanya di dua sungai utama yaitu Sungai Budong-Budong dan Sungai Barakkang. Selain hal tersebut persoalan lingkungan juga dipicu dari kurangnya sarana prasarana yang mendukung baik dari pengelolaan persampahan maupun air limbah sehingga kondisi persampahan dan air limbah terutama di wilayah tumbuh perkotaan belum dikelola dengan maksimal hal lain yang menjadi persoalan adalah belum tersusunnya dokumen Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) sehingga potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya belum



dapat dipetakan dengan baik. Dari segi sumber daya manusia juga masih mengalami kendala yaitu masih sangat kurangnya pejabat pengawas lingkungan hidup yang mengikuti diklat bersertifikat hal ini mengakibatkan tidak maksimalnya Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaannya menemui beberapa kendala yang bisa dikatakan menghambat pelayanan langsung kepada Masyarakat yang khususnya berdomisili jauh dari Ibukota Kabupaten atau Pusat Pemerintahan, Masyarakat masih kurang peduli terhadap kelengkapan dokumen pencatatan sipil keluarganya seperti kurangnya laporan status Pernikahan (Khusus Non Muslim) atau Laporan Kelahiran Anaknya.

Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang saat ini sudah terhubung langsung dengan sistem jaringan yang terpusat pada Kementerian Dalam Negeri, sehingga data yang ada dapat diketahui secara Nasional, Permasalahan lainnya dihadapi saat tahun-tahun awal sejak terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat adalah masih terdapatnya data Kependudukan Ganda dan Data Anomali bagi penduduk yang berdomisili dan yang pindah datang ke Kabupaten Mamuju Tengah. Permasalahan tersebut dapat berangsur diperbaiki ditahun-tahun mendatang dengan melakukan sinkronisasi data dengan Kementerian Dalam Negeri, serta penempatan Infrastruktur Pendukung juga sangat perlu disediakan pada setiap Kantor Kecamatan seperti Set Unit Perekaman dan Cetak KTP Elektronik untuk menjangkau pelayanan yang lebih dekat ke Masyarakat.

g) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Masalah Pokok saat ini pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah diperlukan koordinasi yang intens antara Perangkat Daerah dengan Desa, terkait

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dan sejauh mana masyarakat dilibatkan dan aspek keberlanjutannya. Kemudian terhadap Program dan Kegiatan yang ada lebih melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada, Sebagai upaya mengembangkan kemandirian, swasembada dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Selain itu masih perlunya peningkatan kapasitas SDM Aparatur Desa dan peningkatan sarana dan prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa.

h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Masalah pokok dalam pengendalian penduduk adalah laju pertumbuhan penduduk masih tinggi, Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total masih tinggi. Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk juga masih belum terpenuhi. Ini disebabkan karena pelaksanaan advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) belum berjalan efektif serta dukungan lintas sektor dan regulasi Rencana induk kependudukan belum ada. Selain itu Angka kelahiran remaja (ASFR perempuan usia 15–19) dan Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun masih tinggi. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB, Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa belum tercapai. Masalah lainnya adalah rendahnya cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan bidang pengendalian penduduk serta rata-rata usia kawin pertama wanita masih belum sesuai standar yakni 17,5 tahun.

i) Perhubungan

Masalah pokok urusan perhubungan adalah kapasitas infrastruktur perhubungan daerah yang belum memadai ini dapat dilihat dari terbatasnya saran dan prasana yang ada ditempat bongkar muat barang maupun orang, selain itu tidak adanya alat uji kendaraan dan keterbatasan SDM untuk melakukan pengujian pada Dinas Perhubungan sehingga tidak dapat dilakukan uji kir angkutan umum yang menyebabkan angkutan penumpang dan barang masih harus melakukan uji kir di daerah lain. Hal lain yang menjadi masalah adalah kondisi pertumbuhan penambahan jumlah kendaraan tidak berimbang dengan penambahan jumlah panjang jalan (rasio jumlah kendaraan terhadap panjang jalan). Masalah lainnya yaitu masih kurangnya sosialisasi ke masyarakat sekaitan dengan perhubungan daerah baik itu pentingnya kir maupun tentang keamanan berkendara di jalan raya. Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas dikarenakan kurangnya rambu marka jalan.

j) Komunikasi dan Informatika

Masalah pokok dalam urusan komunikasi dan informatika adalah belum maksimalnya pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang telah tersedia di setiap kecamatan. Masih rendahnya cakupan layanan telekomunikasi dimana jangkauan BTS yang tersedia tidak bisa mencakup seluruh wilayah di Mamuju Tengah, terbatasnya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), belum adanya regulasi pengembangan e-government dan master plan IT dan belum optimalnya diseminasi informasi.

k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Masalah pokok urusan Koperasi, usaha kecil, dan menengah terletak pada menurunnya persentase koperasi aktif dan persentase usaha kecil mikro dan kecil bahkan Lembaga Keuangan Rakyat dan atau Bank Perkreditan Rakyat belum ada di Mamuju Tengah. Rendahnya minat masyarakat untuk membentuk koperasi serta rendahnya kemampuan manajerial dalam pengelolaannya. Keterbatasan dukungan teknologi sehingga pemanfaatannya belum maksimal dan menghambat perkembangan usaha mikro dan kecil di sektor-sektor baru khususnya yang memanfaatkan teknologi informasi.

l) Penanaman Modal

Masalah pokok pada penanaman modal daerah yaitu jumlah investor skala nasional yang belum menyentuh ke sektor lain selain pertanian sawit yang menyebabkan juga tidak adanya peningkatan yang signifikan terhadap nilai investasinya. Beberapa kendala yang menjadi penyebabnya seperti promosi untuk menarik investor skala nasional untuk sektor lainnya terasa kurang dengan perlu perbaikan terhadap proses perizinan yang mudah dan transparan yang berbasis teknologi agar calon investor dapat melihat potret peluang yang bisa di gali real time dan cepat. Jumlah tenaga kerja yang besar tetapi tidak banyak membantu dalam pengurangan angka kemiskinan karena sebagian besar masih berada pada upah minimum yang telah ditetapkan. Selain itu perlu segera disusun Rencana Umum Penanaman Modal.

m) Kepemudaan dan Olahraga

Terdapat beberapa masalah pokok terkait urusan kepemudaan dan olahraga diantaranya yaitu masalah rendahnya keaktifan organisasi pemuda dan rendahnya persentase



wirausaha muda hal ini tentu tidak lepas dari faktor internal dan eksternal dari organisasi atau individu tersebut.

Masalah internal yang mempengaruhi keaktifan organisasi pemuda seperti perlunya pendalaman pemahaman berorganisasi, tidak memiliki komitmen, kurangnya kemampuan literasi dan rendahnya motivasi pemuda yang ingin memajukan organisasi sebagai sarana pembinaan dan pengembangan diri yang tentunya mempengaruhi perkembangan organisasi dan anggota yang ada didalamnya. Sedangkan faktor eksternal yang memiliki pengaruh besar seperti faktor dukungan lingkungan masyarakat dalam hal ini keluarga, aparaturnya terkait, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat itu sendiri, kondisi saat ini masih kurangnya pembinaan dari tokoh masyarakat, pemerintah baik itu tingkat desa maupun kabupaten. Faktor eksternal lainnya adalah pengawasan organisasi pemuda belum berjalannya dengan baik terlihat dari masih ada organisasi pemuda yang belum terdata dan adanya tindakan anarkis dari oknum anggota organisasi pada saat menyampaikan aspirasinya.

Selain itu terdapat juga masalah keterbatasan pendanaan dalam melaksanakan program kerja organisasi tersebut, dalam hal ini perlu ada perubahan pola pikir dan inovasi dari para pengurus organisasi bukan hanya melihat pendanaan sebagai faktor penentu jalannya kegiatan tetapi juga seharusnya menjadi salah satu program kerja organisasi untuk menghasilkan dana secara mandiri, untuk itu hal ini juga berkaitan dengan masalah pokok lainnya seperti rendahnya persentase kewirausahaan pemuda, dimana karena masih rendahnya minat atau masih banyak pemuda yang belum sadar akan pentingnya kemandirian ekonomi melalui dunia usaha. Selanjutnya diperlukan peningkatan kualitas pelatihan wirausaha pemuda, yang mana harus lebih berorientasi pada output yaitu menghasilkan lebih banyak wirausahaan muda baru yang inovatif, kemudian yang tidak kalah pentingnya diperlukan peningkatan dukungan kemudahan mendapatkan modal usaha, promosi, serta pembinaan secara simultan dalam menjalankan usahanya hingga mandiri.

Permasalahan pokok selanjutnya terkait kepemudaan dan olahraga yaitu masih rendahnya persentase pelatih yang bersertifikasi disebabkan masih banyak pelatih yang belum memenuhi syarat untuk mengikuti ujian sertifikasi selain itu adanya keterbatasan anggaran sehingga pelatih yang diutus untuk mengikuti ujian dilakukan secara bertahap. Minimnya pembina dan pelatih di beberapa cabang olahraga bahkan masih banyak yang belum bersertifikasi juga memberi dampak pada rendahnya jumlah atlet berprestasi dan jumlah cabang olahraga yang dimenangkan karena masih sedikitnya cabang olahraga

yang dikuasai dan dibina selain ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan prestasi olahraga. Saat ini juga diperlukan upaya peningkatan motivasi dan minat baik bagi calon atlet juga calon pelatih pada cabang olahraga yang sama sekali masih belum disentuh.

Masih kurangnya cabang olahraga yang dibina disebabkan karena belum terdatanya semua potensi cabang olahraga di Kabupaten Mamuju Tengah dan belum memadainya sarana dan prasarana olahraga yang ada selain itu masih perlunya peningkatan target pembinaan atlet muda mengingat masih banyak atlet muda yang sudah tidak aktif bahkan belum terdata, hal ini juga tidak lepas dari jaranganya diadakan turnamen atau kejuaraan untuk menarik minat para atlet pelajar.

n) Statistik

Masalah pokok dalam urusan statistik adalah masih rendahnya ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi, hal ini disebabkan karena tata kelola data yang tidak maksimal dan sistem informasi data base yang belum terintegrasi dan terpadu.

o) Persandian

Masalah pokok urusan persandian adalah belum adanya tenaga fungsional yakni Sandiman yang bertugas untuk mengoperasikan Single Side Band (SSB) yang tersebar di lima kecamatan dan satu di Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika untuk tindak lanjut dari pengamanan informasi di Kabupaten Mamuju Tengah.

p) Kebudayaan

Masalah pokok urusan kebudayaan adalah penyelenggaraan festival seni dan budaya masih dalam skala kecil dan belum adanya fasilitas pendukung penyelenggaraan festival seni dan budaya. Pelestarian situs dan kawasan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya belum dilakukan. Hal ini disebabkan karena belum adanya regulasi (Perda/Perbub/Keputusan Bupati) penetapan kawasan situs dan cagar budaya di Mamuju Tengah. Selain itu benda dan karya budaya juga belum dilakukan revitalisasi dan masih dalam tahapan inventarisasi karena belum adanya SDM Kebudayaan dan belum tersedianya museum untuk menyimpan dan publikasi benda dan karya budaya.

q) Perpustakaan

Masalah pokok urusan perpustakaan adalah jumlah pengunjung perpustakaan belum tercapai, koleksi buku dan judul buku yang tersedia di perpustakaan masih sedikit. Hal ini disebabkan karena gedung perpustakaan belum layak atau belum adanya perpustakaan daerah serta koleksi judul buku yang belum beragam. Selain itu, rasio perpustakaan per satuan penduduk belum memenuhi dan belum tersedianya sumber daya manusia pustakawan yang memenuhi syarat. Serta masalah lainnya adalah belum maksimalnya pembinaan dan pengembangan perpustakaan desa serta minimnya koordinasi dengan dinas pendidikan dalam pengembangan perpustakaan sekolah.

r) Kearsipan

Masalah pokok urusan kearsipan adalah belum tercapainya persentase perangkat daerah yang mengelolah arsip secara baku. Hal ini disebabkan karena belum tersedianya SDM arsiparis yang merupakan pengelola kearsipan dan pelaksana pembinaan kearsipan kepada perangkat daerah melalui Jaringan Retensi Arsip (JRA). Selain itu peningkatan SDM pengelola kearsipan belum dilakukan karena SDM pengelola kearsipan dengan status sebagai ASN belum ada. Masalah lain adalah belum tersedianya sarana dan prasarana penyimpanan arsip daerah yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

3) Urusan Pemerintahan Pilihan

a) Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan dan konsumsi ikan di Kabupaten Mamuju Tengah sudah cukup baik akan tetapi belum menunjukkan kinerja yang baik pada cakupan bina kelompok nelayan yang berdampak pada produksi perikanan yang asalnya dari kelompok nelayan tersebut yang rendah yaitu 10% dari total produksi perikanan di Mamuju Tengah. Hal tersebut terjadi diakibatkan kurangnya sarana dan prasarana alat tangkap yang memadai dan permodalan sehingga kurang mampu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki yang kemudian berimbas pada nilai tukar nelayan yang juga kurang baik. kompetensi SDM pada kelompok nelayan yang perlu pengembangan serta kestabilan harga pakan ikan untuk pembudidaya yang belum stabil. Ketersediaan benih unggul yang berasal dari daerah sendiri juga belum memadai terhadap permintaan dan kebutuhan. Kondisi UMKM olahan perikanan yang belum maksimal pada unsur kualitas pengolahan dan SDM

pengelolanya dan juga fasilitas pemasaran perikanan baik dalam daerah berupa pasar pelelangan ikan maupun ke luar daerah.

b) Pariwisata

Ada beberapa masalah pokok terkait urusan pariwisata seperti jumlah kunjungan wisata dimana sudah mencapai target yang direncanakan namun jumlah capaian ini belum optimal mengingat jumlah penduduk yang menjadi potensi wisatawan lokal masih sangat besar dan belum tergerak semua untuk berwisata. Selain itu lama kunjungan wisata di Kabupaten Mamuju Tengah masih sangat singkat yaitu hanya satu hari saja. Permasalahan pokok ini disebabkan karena kesiapan variabel pendukung pembangunan kepariwisataan belum merata dari aspek *access* (akses), *attraction* (daya tarik pariwisata), *amenities* (sarana prasarana) dan *accommodation* (akomodasi); dan manajemen atau pengelola wisata yang resmi sesuai aturan berlaku.

Selain itu penyebab permasalahan lainnya adalah arah kebijakan pariwisata belum terintegrasi dan terpetakan; belum optimalnya kerjasama lintas sektor pariwisata (lembaga); rendahnya SDM pelaku industri kepariwisataan; rendahnya ekosistem digital dalam mendukung pembangunan kepariwisataan, khususnya pendekatan-pendekatan yang bersifat out of the box; belum optimalnya pengembangan pariwisata berbasis lingkungan (*ecotourism*), pariwisata berbasis *historical/budaya* dan berbasis *religi* (*religion tourism*); selanjutnya masih rendahnya daya tarik pariwisata dan pengelolaan potensi wisata khususnya yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta lemahnya branding pariwisata yang berkelanjutan serta kurangnya promosi/pemasaran pariwisata yang sinergis dan kolaboratif;

Salah satu permasalahan pokok lainnya adalah belum adanya realisasi PAD sektor pariwisata hal ini disebabkan karena belum ditetapkannya PERDA terkait retribusi di Destinasi Wisata untuk itu koordinasi dan penyusunan peraturan terkait perlu di percepat lagi mengingat hal tersebut akan mendorong PAD dan pengembangan pariwisata di Kab. Mamuju Tengah.

c) Pertanian

Masalah pokok urusan pertanian adalah adanya alih fungsi lahan pertanian yang diakibatkan oleh ketidakstabilan harga hasil produksi di tingkat petani. Ketersediaan infrastruktur prasarana pertanian yang kurang memadai seperti jalan tani dan dan jalan

produksi, irigasi teknis untuk mengairi lahan sawah seluas 198 Ha dalam kondisi rusak berat dan sedang. Untuk ketersediaan sarana pertanian yang masih kurang seperti pupuk bersubsidi, bibit dan benih tanaman yang tidak optimal. Dari segi SDM penyuluh pertanian juga menjadi masalah karena kurangnya kualitas pengetahuan SDM penyuluh dan jumlah tenaga penyuluh pertanian organik serta banyaknya penyuluh yang memasuki masa pensiun.

d) Perdagangan

Masalah pokok urusan perdagangan adalah Nilai Impor masih lebih besar dibandingkan dengan Nilai Ekspor, masih kurangnya pembinaan kelompok pedagang/usaha informal. Masih banyak produk/jasa yang didatangkan dari daerah luar seperti bahan kebutuhan pokok dan tak terkecuali bahan bangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan mamuju tengah sementara barang/jasa yang diekspor harganya tidak maksimal, hal ini disebabkan oleh produktivitas sektor pertanian/perkebunan, perikanan/kelautan dan jasa masih sangat minim sehingga tidak dapat menekan nilai impor dan memaksimalkan nilai ekspor, serta pengetahuan dan keterampilan kelompok pedagang/usaha informal yang masih minim dan tidak didukung dengan bantuan peralatan bagi kelompok pedagang/usaha informal.

e) Perindustrian

Masalah pada urusan perindustrian adalah Kurangnya inovasi dan sumber daya manusia kelompok pengrajin sehingga penjualan setiap tahunnya mengalami penurunan yang berdampak kepada penurunan pertumbuhan industri pengrajin. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh sumber daya manusia dikaerakan pembinaan terhadap kelompok pengrajin berupa pelatihan maupun bantuan peralatan masih sangat kurang

f) Transmigrasi

Masalah pokok dalam urusan transmigrasi adalah kurang optimalnya pelaksanaan 2C (clean and clear) dan 3 L (Layak huni, Layak usaha dan Layak berkembang) serta kurangnya pembinaan masyarakat transmigran. Hal ini disebabkan belum mengikuti ketentuan pemerintah pusat mengenai jumlah transmigran dan kebijakan pemerintah daerah serta kurang implementasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2013 tentang keseimbangan antara Transmigran Penduduk Asal (TPA) dan Transmigran



Penduduk Setempat (TPS). Terbatasnya anggaran belanja jaminan hidup warga transmigran selama pembinaan menjadi warga trans khusus warga transmigrasi TPS.

4) Urusan Penunjang Pemerintahan

a) Perencanaan dan Pembangunan

Permasalahan perencanaan diakibatkan tidak maksimalnya implementasi terhadap strategi yang telah direncanakan. Inkonsistensi program kegiatan berdasarkan jangka waktunya menjadi hal yang perlu pembenahan. Belum lagi dengan perencanaan yang sifatnya sektoral harus terintegrasi. Dengan digunakannya perencanaan berbasis e-planning akan dirasa membantu tinggal proses implementasinya serta dalam merumuskan masalah dan solusinya yang perlu ditempuh dengan mempertimbangkan berbagai pendekatan agar diperoleh solusi yang paling efektif.

b) Urusan Penelitian dan Pengembangan

Masalah pokok urusan penelitian dan pengembangan adalah implementasi dan pemanfaatan hasil kelitbangan yang dalam RPJMD dan RKPD masih sangat kurang serta fasilitasi dan kebijakan inovasi yang diterapkan juga masih sangat terbatas. Dari segi persentase capaian telah maksimal namun jumlah kelitbangan dan inovasinya masih sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah perangkat daerah yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Hal ini disebabkan, perangkat daerah masih belum memahami betul tugas dan fungsi kelitbangan, yang seharusnya melakukan kajian dan penelitian namun kenyataannya masih banyak perangkat daerah yang melakukan penelitian dan kajian sendiri tanpa berkoodinasi maupun melaporkannya. Sehingga data terkait kajian yang telah dilaksanakan oleh daerah masih sangat terbatas dan menyulitkan kelitbangan dalam mengukur implementasi dan pemanfaatan hasil kelitbangan. Begitu pula yang terkait dengan inovasi baik itu fasilitasnya maupun penerapan kebijakannya masih sangat kurang, hal ini dikarenakan belum adanya inovasi yang diusulkan dari perangkat daerah serta laporan inovasi apa saja yang dilaksanakan, serta koordinasi bidang litbang dengan perangkat daerah juga masih belum optimal sehingga pemahaman tupoksi terkait kelitbangan dan inovasi kurang.

c) Keuangan

1. Kelengkapan dan akurasi data dalam analisis dan pelaporan keuangan belum sepenuhnya terpenuhi. Ini terkait pada perhitungan dan analisis pagu indikatif



- dengan realisasi penggunaan anggaran yang kompleks dan memerlukan SDM yang memiliki kompetensi memadai pada perangkat daerah. Ini berakibat pada perhitungan anggaran belanja kegiatan dan pelaporannya yang belum sempurna.
2. Porsi SILPA dalam penyelenggaraan keuangan daerah masih signifikan. Ini disebabkan oleh implementasi kegiatan yang sering terhambat oleh faktor kondisi lapangan.
 3. Program/kegiatan yang tidak berjalan karena keterbatasan realisasi anggaran masih ada. Ini disebabkan oleh perkiraan penerimaan daerah yang sering kurang akurat atau karena adanya perubahan jumlah alokasi dana alokasi umum dan alokasi khusus dari pusat.
 4. Porsi belanja tidak langsung dalam APBD masih cukup besar.
 5. Proporsi PAD terhadap total APBD masih sangat minim

d) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Masalah pokok urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Mamuju Tengah yang masih sangat kurang. Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara merupakan kebutuhan yang mendasar dalam penyelenggaraan birokrasi pada suatu Organisasi Pemerintah Daerah, sehingga ketersediaan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara sangatlah diperlukan sebagai faktor penunjang keberlangsungan penyelenggaraan tata kelola birokrasi pada Pemerintah Daerah sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan semestinya. Ketersediaan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Mamuju Tengah yang masih sangat terbatas, sehingga hal inilah yang menjadi faktor utama sampai dengan saat ini masih terdapat kursi atau posisi pemangku jabatan yang belum terisi atau lowong, dimana tercatat sebanyak 139 jabatan yang lowong dari jumlah keseluruhan pemangku jabatan yaitu 296 jabatan, angka tersebut dilihat dari jumlah jabatan pimpinan tinggi dan administrasi pada instansi pemerintah daerah yang belum mencapai interpretasi. Hal tersebut disebabkan oleh masih banyaknya Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang belum memenuhi kualifikasi atau standar kompetensi untuk menduduki jabatan yang lowong tersebut. Masih banyaknya Pegawai Negeri Sipil yang belum memenuhi kualifikasi atau standar kompetensi untuk menduduki suatu jabatan, sehingga hal demikian inilah yang telah diamanatkan di dalam PP 17 Tahun 2020 perubahan atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengembangan karier, pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan kompetensi Pegawai



Negeri Sipil belum bisa terlaksana secara baik dan optimal. Hal tersebut disebabkan karena terbatasnya alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk pelaksanaan diklat kepemimpinan dan pelaksanaan kediklatan lainnya serta alokasi anggaran untuk diklat kepemimpinan masih melekat pada masing-masing OPD dan tidak terpusat pada Bidang Pengembangan Karier ASN Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju Tengah. Hal ini dapat dilihat dari persentase rata-rata lama pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan, persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan formal, dimana ketiga substansi tersebut juga masih belum mencapai interpretasi. Sehingga kedepannya perlu adanya penambahan alokasi anggaran baik untuk pelaksanaan diklat kepemimpinan dan pelaksanaan kediklatan lainnya yang kemudian pelaksanaannyapun baik itu berupa diklat kepemimpinan ataupun kediklatan lainnya semua pelaksanaannya terpusat atau dipusatkan secara satu pintu pada Bidang Pengembangan Karier Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju Tengah.

e) Pengawasan

Pengawasan intern pemerintah daerah merupakan unsur manajemen pemerintah yang penting mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk memberikan jaminan (reasonable assurance) bahwa pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien serta mempedomani ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dalam mewujudkan tujuan dan visi Inspektorat, terdapat beberapa kendala – kendala, antara lain :

- 1) Dari segi SDM yaitu kompetensi teknis (adanya kesenjangan antara bimtek/diklat dengan kebutuhan).
- 2) Dari segi Anggaran yaitu belum adanya jaminan kecukupan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan pengawasan.
- 3) Dari segi Stakeholder/Auditan yaitu masih kurangnya tanggapan objek pemeriksaan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Atas beberapa masalah tersebut, Inspektorat berharap dukungan dari Pemerintah Daerah, antara lain :



- 1) Program pembinaan Jabatan Fungsional secara periodic bagi APIP.
- 2) Dukungan kebijakan anggaran dalam bidang pengawasan APIP.
- 3) Komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Good Governance.

f) Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang terdiri dari sembilan bagian dengan tugas pokok dalam penyusunan kebijakan dan mengoordinasikan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh sekretariat daerah kepada OPD terkait memiliki masalah pokok yaitu kurangnya SDM yang terlatih untuk melaksanakan fungsi pelayanan administratif. Di bagian hukum belum tersedianya tenaga fungsional sebagai tim perancang produk hukum daerah, belum adanya SOP tata cara pengajuan rancangan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang di tahun 2022 ditargetkan menjadi CoE (Pusat Keunggulan) pengadaan Barang dan Jasa juga masih kekurangan SDM, kode etik dan SOP risiko pekerjaan yang belum maksimal.

Masalah Bagian pemerintahan, Belum adanya Peraturan Bupati mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) , masih rendahnya nilai LPPD , belum maksimalnya fungsi koordinasi dalam hal kerjasama antar daerah, dan penentuan batas daerah (rupa bumi alami). Masalah bagian Organisasi dan Tata Laksana yaitu masih rendahnya nilai LAKIP daerah yang tahun 2018 masih berpredikat C, belum tersusunnya roadmap Reformasi Birokrasi, Tidak adanya Sumberdaya Manusia yang terlatih dalam penyusunan analisis jabatan. Bagian Ekonomi dan Sumberdaya Alam, masih kurangnya koordinasi dalam rangka penyusunan data dan bahan rekomendasi daerah di bidang Sumberdaya Alam, belum adanya kebijakan untuk pembentukan BUMD.

Bagian Administrasi Pembangunan masih terkendala dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan, dimana data yang tersedia belum tersedia dan hanya mengambil data dari badan keuangan sebagai laporan. Koordinasi yang belum maksimal sehingga pelaporan mengalami keterlambatan.

Bagian Kesejahteraan Masyarakat memiliki masalah pokok kurang maksimalnya koordinasi lintas sektor dengan kementerian agama, kurangnya SDM, belum tersedianya SOP mekanisme atau prosedur untuk mengeluarkan rekomendasi penerima hibah keagamaan, belum adanya inventarisasi terhadap hari besar agama selain Islam. Hal ini penting untuk meredam konflik sosial antar agama.

Bagian Umum dan perlengkapan memiliki masalah pokok dalam pengelolaan gudang untuk aset, pelayanan persuratan berbasis elektronik untuk mempermudah

administrasi umum, koordinasi antar sektor untuk pembebasan lahan pembangunan kantor bupati.

Bagian Protokol dan Komunikasi pimpinan

g) Sekretariat DPRD

Masalah pokok yang terjadi dalam Sekretariat DPRD adalah kualitas Rencana Kerja Alat Kelengkapan DPRD yang masih rendah. Rencana kerja yang disusun baru sebatas rutinitas yang dilaksanakan pada tiap tahun dan belum mengarah pada inovasi-inovasi dan akselerasi dalam menjalankan fungsi-fungsi Sekretariat DPRD. Hal ini tentu tanpa sebab, tingginya intensitas pekerjaan Anggota Dewan membuat komunikasi tentang rencana-rencana kerja yang akan dibangun menjadi terbatas. Disisi lain keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia menjadi permasalahan utama, sehingga komunikasi-komunikasi tidak dapat dilaksanakan secara baik, sehingga dimasa yang akan datang Sekretariat DPRD membutuhkan tambahan Sumberdaya Manusia yang handal dan tangkas.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan anggaran, masih terdapat kendala lambatnya penyerahan rancangan dokumen perencanaan pemerintah daerah dikarenakan kurang kompaknya perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan, sehingga waktu dalam menganalisa, membahas dan mendiskusikan menjadi terbatas dan kurang detil sehingga beberapa program dan kegiatan pemerintah tidak dapat dibahas secara tuntas. Dalam melaksanakan fungsi pembentukan perda terdapat beberapa kendala yakni masih minimnya usulan Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Pemerintah Daerah, sehingga Perda Inisiatif banyak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Perda yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

h) Kesatuan Bangsa dan Politik

Mamuju Tengah adalah daerah yang multi etnis, multi agama dan multi budaya karena daerah ini merupakan salah satu pusat tujuan Transmigrasi, hal ini merupakan harta berharga bagi daerah yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain akan tetapi memiliki potensi konflik yang tinggi, sehingga diperlukan pendekatan-pendekatan yang baik sehingga mempertahankan keutuhan dalam kehidupan bersosial di Kabupaten Mamuju Tengah. Dan inilah salah satu masalah pokok Kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Mamuju Tengah. Forum Komunikasi Umat Beragama sangat diperlukan untuk menjalin silaturahmi dan kebersamaan dalam bingkai laila tasisarra, sehingga

bibit-bibit perpecahan segera bisa diredam. Banyaknya Lembaga organisasi masyarakat merupakan salah satu titik konsentrasi Kesatuan bangsa dan politik. Pendataan dan pembinaan terhadap Lembaga sosial dan masyarakat yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah perlu didata ulang mengingat banyak yang tidak terdaftar dan memiliki ijin.

Wawasan kebangsaan sangat diperlukan bagi para pemuda khususnya sehingga memupuk rasa cinta tanah air yang saat ini mulai luntur dengan semakin majunya teknologi dan informasi yang mempengaruhi ideologi para pemuda. Sosialisasi-solsialisai serta kampanye tentang cinta tanah air perlu digalakkan sehingga pemuda khususnya terhindar dari paham-paham radikal dna sesat. Selain itu, Mamuju Tengah merupakan daerah transit jalur Makassar-Palu, dan juga memiliki banyak pelabuhan rakyat yang memiliki potensi masuknya peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang, sehingga membutuhkan perhatian seluruh lapisan masyarakat agar peredaran narkoba di Mamuju Tengah bisa diredam.

i) Kecamatan

Dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Umum Kewilayahan di Kecamatan, kendala yang sering dihadapi adalah belum tersedianya payung hukum/pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Kepala Kantor Kecamatan di bidang pelayanan Masyarakat dan Pengawasan Pemerintahan Desa, saat ini pelayanan kepada masyarakat menjadi sulit dijangkau karena jarak yang jauh antara beberapa kecamatan ke Ibukota Kabupaten. Kemudian untuk mendukung hal tersebut diperlukan juga dukungan sarana dan prasarana yang memadai utamanya Kantor Kecamatan yang nyaman dan peningkatan kualitas SDM ASN di bidang pelayanan masyarakat dan pengawasan Desa serta pendukung mobilitas pengawasan pemerintahan Desa dengan kendaraan dinas operasional.

Ditengah kemajuan capaian pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah, pemerintahan kecamatan saat ini juga dihadapkan dengan konflik pengusaan tanah antar masyarakat / sengketa lahan yang masih sering terjadi dan belum optimalnya koordinasi antar *stakeholders* di bidang peningkatan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan pada wilayah kecamatan. Dengan demikian sangat dibutuhkan penegasan batas wilayah desa dan putusan penyelesaian kasus-kasus pertanahan yang terjadi antar desa oleh Pemerintah Kabupaten dan *stakeholders* terkait, serta pelibatan kecamatan dalam pelaksanaan peningkatan standar pelayanan minimal yang akan dilaksanakan dalam wilayah kecamatan.

4.2. Isu Strategis

3.3.1. Penentuan Isu Strategis

Isu strategis adalah faktor-faktor yang dianggap penting dan akan mempengaruhi penyelenggaraan pembangunan di masa datang. Isu strategis tersebut dapat bersumber dari isu internasional, kebijakan nasional, kebijakan provinsi ataupun dari permasalahan pembangunan daerah. Hasil identifikasi isu strategis Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut.

Isu-isu global yang dapat mempengaruhi pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah lima tahun ke depan bersumber dari pandemik Covid-19, implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean. Isu-isu tersebut teridentifikasi sebagai berikut:

1. Penghapusan kemiskinan
2. Pelayanan kesehatan yang inklusif
3. Pelayanan pendidikan yang inklusif
4. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5. Penyediaan air minum dan fasilitas sanitasi
6. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif
7. Kesempatan kerja yang produktif
8. Infrastruktur yang tangguh
9. Industri yang inklusif
10. Ketimpangan ekonomi
11. Perumahan dan pemukiman
12. Produksi dan konsumsi berkelanjutan
13. Ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim
14. Pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan
15. Degradasi hutan dan lahan serta keanekaragaman hayati
16. Masyarakat inklusif dan harmonis
17. Penanganan dampak pandemik Covid-19

Isu-isu nasional yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah lima tahun kedepan terutama bersumber dari RPJMN 2020-2024 yang dapat diidentifikasi berdasarkan agenda pembangunan nasional yang termuat di dalamnya yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan



5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Isu-isu regional provinsi bersumber dari RPJMD Provinsi, terutama yang terkait dengan program prioritas Gubernur yakni:

1. Pengembangan Trans-Sulawesi
2. Program Desa Mandiri, Sehat dan Cerdas

Isu-isu strategis dari permasalahan pembangunan daerah adalah:

1. Peningkatan kualitas manusia
2. Pengembangan infrastruktur dasar dan wilayah
3. Kemiskinan dan kesenjangan
4. Pembangunan pertanian, agribisnis dan agropolitan
5. Pengembangan UMKM
6. Perbaikan pelayanan publik
7. Tatakelola pemerintahan yang baik
8. Pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam
9. Penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat
10. Penguatan jalur logistik barang dan jasa unggulan daerah
11. Penguatan pemerintahan kecamatan
12. Pembangunan desa
13. Fasilitas jalur logistik produk dan jasa unggulan

Berdasarkan identifikasi dari level global, nasional, provinsi dan daerah tersebut diatas, terdapat rumusan isu yang berbeda tetapi substansinya sama, sehingga diperlukan rumusan yang menggabungkan substansi yang relatif sama tersebut. Dengan demikian, hasil identifikasi isu strategis dapat ditunjukkan sebagai berikut.

1. Penghapusan kemiskinan dan kelaparan
2. Pelayanan kesehatan
3. Pelayanan pendidikan
4. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5. Penyediaan air minum dan fasilitas sanitasi
6. Pembangunan pertanian, agribisnis, agroindustri dan agropolitan
7. Pengembangan kesempatan kerja yang produktif
8. Pengurangan ketimpangan ekonomi
9. Pembangunan infrastruktur dasar
10. Pembangunan perumahan dan pemukiman

11. Penguatan ketahanan bencana dan perubahan iklim
12. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
13. Pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam
14. Pemeliharaan ketertiban, ketenteraman, persatuan dan inklusifitas
15. Pengembangan daya saing SDM pemuda dan remaja
16. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
17. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
18. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik
19. Perbaikan sistem pelayanan publik
20. Komunikasi, informasi dan teknologi digital
21. Penguatan fasilitas jalur logistik produk dan jasa unggulan
22. Rehabilitasi dan perlindungan sosial
23. Pemberdayaan masyarakat
24. Penguatan pemerintahan kecamatan
25. Penguatan ketahanan desa
26. Penanganan dampak pandemik Covid-19

3.3.2. Prioritisasi Isu Strategis

Isu strategis yang telah diidentifikasi selanjutnya diberikan pembobotan melalui FGD yang di dalamnya masing-masing peserta memberikan penilaian terhadap setiap isu berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan untuk memprioritisasi isu strategis memiliki bobotnya masing-masing sebagaimana pada Tabel 4.3. Isu strategis yang memiliki nilai terbobotn paling tinggi menempati prioritas pertama dan berurut hingga yang terendah menempati prioritas terakhir.

Tabel 4. 1 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	15
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	20
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	15
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	15
5.	Kesesuaian dengan program prioritas kepala daerah	20
6.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
	Total	100

Penilaian isu-isu strategis dengan menggunakan enam kriteria menghasilkan prioritas isu strategis sebagai berikut.

1. Penanganan dampak pandemik Covid-19
2. Pelayanan kesehatan
3. Pelayanan pendidikan
4. Penghapusan kemiskinan
5. Penyediaan air minum dan fasilitas sanitasi
6. Pembangunan infrastruktur dasar
7. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
8. Pembangunan pertanian, agribisnis, agroindustri dan agropolitan
9. Perbaikan sistem pelayanan publik
10. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik
11. Pemeliharaan ketertiban, ketenteraman, persatuan dan inklusifitas
12. Penguatan ketahanan bencana dan perubahan iklim
13. Pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam
14. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
15. Penguatan fasilitas jalur logistik produk dan jasa unggulan
16. Pengembangan kesempatan kerja yang produktif
17. Pembangunan perumahan dan pemukiman
18. Pengembangan daya saing SDM pemuda dan remaja
19. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
20. Penguatan pemerintahan kecamatan
21. Rehabilitasi dan perlindungan sosial
22. Pemberdayaan masyarakat
23. Pengurangan ketimpangan ekonomi
24. Penguatan ketahanan desa
25. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi RPJMD adalah gambaran tentang kondisi yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Visi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah diambil dari rumusan visi kepala daerah terpilih. Selain itu, visi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 juga mengacu pada visi RPJMN 2020-2024, visi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2018-2023, dan visi RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah 2013-2025.

Visi RPJMN Indonesia 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Sedangkan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022 adalah **“Sulawesi Barat Maju dan *Malaqbi*”**. Visi RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah 2013-2025 adalah **“Kabupaten Mamuju Tengah sebagai Daerah Agribisnis yang Sejahtera, Mandiri dan Berwawasan Lingkungan”**.

Visi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 dijabarkan dari visi kepala daerah terpilih yakni H. Aras Tammauni dan H. Amin Jasa. Adapun rumusan visi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 adalah:

Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara

Kata kunci yang terkandung dalam rumusan visi ini adalah maju, sejahtera, dan bingkai *Lalla' Tassisara*. Ketiga kata kunci ini saling terkait satu sama lain dalam menggambarkan kondisi masa depan yang hendak dicapai bersama oleh seluruh warga Kabupaten Mamuju Tengah. Artikulasi atau penjelasan dari masing-masing kata kunci tersebut teruraikan sebagai berikut.

“Maju” adalah kondisi dimana kualitas manusia Kabupaten Mamuju Tengah semakin tinggi dan didukung oleh pemenuhan infrastruktur dasar yang memadai baik dari segi jangkauannya maupun dari segi kualitasnya.

“Sejahtera” adalah kondisi dimana kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah semakin meningkat dengan didukung oleh pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

“Bingkai La'la Tassisara” adalah kondisi dimana kebersamaan di tengah keberagaman menjadi acuan nilai dan norma bagi seluruh warga Kabupaten Mamuju Tengah dalam menjaga dan memelihara ketertiban dan ketenteraman.

Dengan visi tersebut, kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah dicitakan semakin membaik, ditandai dengan indeks pembangunan manusia yang terus meningkat.

5.2. Misi

Misi adalah upaya umum yang hendak dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Maksud dari perumusan misi adalah untuk menjabarkan upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan setiap kata kunci dari visi. Rumusan misi dan penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut.

(1) Mendorong Pemenuhan Infrastruktur Dasar

Upaya umum dalam misi ini mencakup pemenuhan infrastruktur jalan antar kecamatan, antara ibukota kecamatan dengan desa-desa, dan antar desa, baik dalam bentuk peningkatan kualitas jalan (terutama dari jalan kerikil menjadi jalan aspal) maupun dalam bentuk pemeliharaan jalan. Upaya umum ini juga mencakup pemenuhan fasilitas air minum sehari-hari dan fasilitas penanganan limbah domestik/sanitasi. Misi ini juga mencakup upaya umum dalam pembangunan sarana/prasarana dalam mewujudkan agropolitan di ibukota kabupaten yang ditopang oleh sarana/prasarana pendukung sentra agribisnis di seluruh kecamatan.

(2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar

Upaya umum dalam misi ini mencakup pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) untuk urusan wajib pelayanan dasar mencakup urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Misi ini juga mencakup upaya umum dalam meningkatkan kualitas pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan serta pelayanan umum lainnya.

(3) Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah

Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian dalam arti umum yakni tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan, selain memperkuat sistem agribisnis dan agroindustri berbasis kelapa sawit untuk sebanyak-banyaknya memberi manfaat bagi kehidupan rakyat. Seiring dengan peningkatan daya saing perekonomian, kesejahteraan sosial juga menjadi perhatian, terutama dalam penanggulangan kemiskinan.

(4) Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik

Misi ini mencakup upaya umum dalam memantapkan reformasi birokrasi. Area reformasi birokrasi yang menjadi perhatian adalah budaya kerja, organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas

dan pelayanan publik. Termasuk juga dalam misi ini adalah penguatan pemerintahan kecamatan dan pembinaan desa.

(5) Memelihara Persatuan dan Kesatuan Masyarakat

Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara, memperkuat dan mengembangkan persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah yang heterogen. Upaya itu dimaksudkan agar masyarakat tetap hidup rukun dan damai serta mengacu pada nilai *Lalla' Tassisara*, yakni berbeda-beda tetapi tetap dalam kebersamaan untuk membangun Kabupaten Mamuju Tengah.

(6) Menjaga Keberlanjutan Sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup

Misi ini mencakup upaya umum dalam pencegahan, penanggulangan dan pemulihan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan seperti degradasi lahan, kerusakan sungai, kerusakan pesisir dan kerusakan tutupan lahan. Misi ini juga terkait dengan pengelolaan keanekaragaman hayati serta pengelolaan sampah.

Masing-masing misi diarahkan untuk mempunyai kontribusi dominan terhadap kata kunci tertentu dari visi. Kata kunci “maju” dikontribusi oleh Misi-1 yakni “Mendorong Pemenuhan Infrastruktur Dasar”, Misi-2 yakni “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar”, dan Misi-4 yakni “Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik”. Kata kunci “sejahtera” dikontribusi oleh Misi-3 yakni “Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah” dan Misi-6 yakni “Menjaga Keberlanjutan Sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup”. Kata kunci *Lalla' Tassisara* dikontribusi oleh Misi-5 yakni “Memelihara Persatuan dan Kesatuan Masyarakat”.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun RPJMD. Kriteria rumusan tujuan pembangunan adalah: 1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; ^[L]_[SEP]2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; ^[L]_[SEP]3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; 4) dapat diukur dalam jangka waktu lima tahunan; dan 5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Langkah-langkah perumusan tujuan adalah: ^[L]_[SEP]1) merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih; ^[L]_[SEP]2) menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; 3) merumuskan indikator tujuan yang memenuhi kriteria SMART-C.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; 2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan 4) memenuhi kriteria SMART-C. Langkah-langkah perumusan sasaran adalah: 1) merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan; 2) merumuskan indikator sasaran yang terukur, sekurang-kurangnya memenuhi indikator sasaran pokok RPJPD periode RPJMDberkenaan; dan 3) menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN untuk penyusunan rancangan awal RPJMD.

Rumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.



Tabel 5. 1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun					Kondisi Akhir 2026
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara										
1	Misi 1: Mendorong pemenuhan infrastruktur dasar									
		Tujuan-1: Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar secara merata antar wilayah	Rasio gini (Ketimpangan antar kelompok pendapatan) (nilai)	0,314	0,341	0,367	0,375	0,356	0,345	0,339
		Sasaran-1: Terpenuhinya infrastruktur dasar untuk pemerataan pembangunan	Indeks Daya Saing Infrastruktur (nilai)	65,13	73,41	74,8	76,3	78,08	79,7	81,16
2	Misi 2: Meningkatkan kualitas pelayanan dasar									
		Tujuan-2: Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar dalam mendukung kualitas hidup yang layak	Indeks kepuasan masyarakat	C	C	C	C	B	B	B
		Sasaran-2: Meningkatnya kualitas kehidupan manusia	Indeks pembangunan manusia (%)	65,71	66,34	67,00	67,14	67,40	67,60	67,69
			Prevalensi Stunting (%)	8,15	8,15	8,00	7,85	7,50	7,15	6,90
		Sasaran-3: Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) Kabupaten	Rata-rata capaian SPM Pelayanan Dasar (%)	52,19	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Misi 3: Mendorong daya saing perekonomian daerah									
		Tujuan-3: Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah	PDRB/ Kapita ADHB (Rp. Juta)	23,57	24,18	26,86	26,51	27,16	28,67	29,21



No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun					Kondisi Akhir 2026
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		Sasaran-4: Meningkatnya produktivitas dan daya serap tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi (persen)	-0,40	1,69	3,87	4,33	5,17	5,84	6,15
			Tingkat pengangguran terbuka (persen)	2,71	2,62	2,53	2,52	2,48	2,45	2,44
		Sasaran-5: Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Angka kemiskinan (persen)	6,79	6,76	6,30	6,13	5,84	5,61	5,50
		Sasaran-6: Berkembangnya kawasan agropolitan berbasis kota terpadu mandiri	Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB (persen)	71,81	71,87	72,19	72,18	72,52	72,41	72,08
4	Misi 4: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik									
		Tujuan-4: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks reformasi birokrasi (IRB) (Nilai)	C	C	CC	CC	B	B	B
		Sasaran-7: Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai LPPD (nilai)		2,9	3	3,01	3,02	3,03	3,04
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (Nilai)	Rendah	rendah	rendah	sedang	sedang	sedang	sedang
			SAKIP	C	C	CC	CC	B	B	B
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Sasaran-8: Berkembangnya inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	kurang inovatif (skor 3)	50	100	200	300	500	500
5	Misi 5: Memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat									
		Tujuan-5: Meningkatkan ikatan kebersamaan dan kepatuhan norma hukum	Indeks Kriminalitas	5,47	5,2	5,0	4,8	4,6	4,4	4,0



No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun					Kondisi Akhir 2026
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		Sasaran-9: Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase penurunan gangguan ketertiban dan keamanan	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%
6	Misi 6: Menjaga Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup									
		Tujuan 6: Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan	Predikat daya dukung lingkungan (kategori)	Daya Dukung Pangan: Belum Terlampaui; Daya Dukung Air: Belum Terlampaui	Belum terlampaui	Belum terlampaui	terlampaui	terlampaui	terlampaui	terlampaui
		Sasaran-10: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati daerah	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD) (Nilai)	71,38	74,71	75,00	75,29	75,59	76,00	76,00
			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	N/A	2%	3%	4%	5%	6%	7%

Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kab. Mamuju Tengah 2021-2026, data diolah



BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1 Strategi

Dalam RPJMD ini, strategi dipahami sebagai rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi adalah 1. Mengkaji sasaran pembangunan yang akan diwujudkan serta indikator kinerjanya; 2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah; 3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah dalam mencapai setiap sasaran; 4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya; 5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta 6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah. Langkah-langkah ini dilakukan oleh tim melalui sejumlah diskusi dan penyiapan kertas kerja. Berdasarkan langkah-langkah tersebut maka strategi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 adalah sebagai berikut.

1. Mengefektifkan daya dukung infrastruktur transportasi dan perhubungan, informasi dan komunikasi, perumahan dan pemukiman, serta sumberdaya air sesuai karakteristik wilayah berbasis rencana tata ruang daerah.
2. Memenuhi ketersediaan data, sumberdaya manusia, dan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan SPM pelayanan dasar yang menjangkau semua target layanan.
3. Meningkatkan kemampuan literasi, resiliensi dampak pandemic dan penanganan 1.000 hari pertama kehidupan, serta daya beli masyarakat untuk hidup yang layak.
4. Memanfaatkan teknologi terkini dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, UMKM, ekonomi kreatif dan pariwisata melalui peran efektif pelaku utama dan pelaku usaha.
5. Pelibatan multistakeholder dalam penanggulangan kemiskinan diiringi dengan penyerapan tenaga kerja dengan pendapatan di atas upah minimum.



6. Pengembangan sarana/prasarana dan fasilitas ekonomi pendukung dalam produksi dan pengolahan komoditas unggulan agribisnis berbasis keterkaitan pusat kota dengan kawasan perdesaan.
7. Percepatan implementasi road-map reformasi birokrasi dengan dukungan sistem elektronik yang mengintegrasikan data sektoral dan keuangan dari level perangkat daerah hingga pemerintah desa.
8. Penguatan sistem inovasi daerah dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan ekonomi melibatkan kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat sipil.
9. Penguatan modal sosial antar kelompok masyarakat untuk memanifestasikan kebersamaan dalam mendorong kemajuan daerah yang membawa kemaslahatan untuk semua.
10. Penyadaran pemangku kepentingan untuk pengendalian pencemaran, pencegahan degradasi lahan, pemeliharaan keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim, penanganan sampah dan limbah seiring dengan penegakan aturan lingkungan hidup.



Tabel 6. 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi: Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai La'la Tassisara		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi-1: Mendorong pemenuhan infrastruktur dasar		
Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar secara merata antar wilayah (T1)	Terpenuhinya infrastruktur dasar dalam mendukung pemerataan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat (S1)	Mengefektifkan daya dukung infrastruktur transportasi dan perhubungan, informasi dan komunikasi, perumahan dan pemukiman, serta sumberdaya air sesuai karakteristik wilayah berbasis rencana tata ruang daerah
Misi-2: Meningkatkan kualitas pelayanan dasar		
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar dalam mendukung kualitas hidup yang layak (T2)	Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) Kabupaten (S2)	Memenuhi ketersediaan data, sumberdaya manusia, dan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan SPM pelayanan dasar yang menjangkau semua target layanan
	Meningkatnya kualitas kehidupan manusia (S3)	Meningkatkan kemampuan literasi, resiliensi dampak pandemic dan penanganan 1.000 hari pertama kehidupan dalam pencegahan dan penanganan stunting, serta daya beli masyarakat untuk hidup yang layak
Misi-3: Mendorong daya saing perekonomian daerah		



Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah (T3)	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk sektor-sektor perekonomian daerah (S4)	Memanfaatkan teknologi terkini dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, UMKM, ekonomi kreatif dan pariwisata melalui peran efektif pelaku utama dan pelaku usaha.
	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat (S5)	Pelibatan multistakeholder dalam penanggulangan kemiskinan diiringi dengan penyerapan tenaga kerja dengan pendapatan di atas upah minimum
	Berkembangnya kawasan agropolitan dan agribisnis berbasis kota terpadu mandiri (S6)	Pengembangan sarana/prasarana dan fasilitas ekonomi pendukung dalam produksi dan pengolahan komoditas unggulan agribisnis berbasis keterkaitan kawasan ibukota kabupaten dengan kawasan perdesaan.
Misi-4: Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik		
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi (T4)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (S7)	Percepatan implementasi road-map reformasi birokrasi dengan dukungan sistem elektronik yang mengintegrasikan data sektoral dan keuangan dari level perangkat daerah hingga pemerintah desa



	Berkembangnya inovasi daerah (S8)	Penguatan sistem inovasi daerah dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan ekonomi melibatkan kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat sipil.
Misi-5: Memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat		
Meningkatkan solidaritas sosial dan kerukunan antar ummat beragama (T5)	Terpeliharanya suasana tertib, tenteram, aman dan damai dalam interaksi antar kelompok masyarakat (S9)	Penguatan modal sosial antar kelompok masyarakat untuk memanifestasikan kebersamaan dalam mendorong kemajuan daerah yang membawa kemaslahatan untuk semua
Misi-6: Menjaga keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup		
Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan (T6)	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati daerah (S10)	Penyadaran pemangku kepentingan untuk pengendalian pencemaran, pencegahan degradasi lahan, pemeliharaan keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim, penanganan sampah dan limbah seiring dengan penegakan aturan lingkungan hidup



6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam mencapai tujuan dan sasaran. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Meskipun penekanan program prioritas pada setiap tahapan berbeda, namun memiliki sinkronisasi dan konsistensi dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan RPJMD. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 pada dasarnya berisi prioritas pembangunan yang akan dijalankan setiap tahun. Setiap tahun dijalankan tema pembangunan tertentu, dan dalam payung tema pembangunan itu dikembangkan kebijakan pembangunan yang diprioritaskan. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan substansi yang menjadi tema setiap tahun adalah sebagai berikut.



Gambar 6. 1 Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026





Tabel 6. 2 Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026

Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Visi: Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara						
Misi-1: Mendorong pemenuhan infrastruktur dasar						
Tujuan-1: Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar secara merata antar wilayah						
Sasaran-1:						
Terpenuhinya infrastruktur dasar dalam mendukung pemerataan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat (S1)	➤ Pemenuhan jangkauan infrastruktur dasar	➤ Pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan ➤ Penguatan infrastruktur ibukota kabupaten	➤ Peningkatan kualitas infrastruktur transportasi perdesaan ➤ Penguatan infrastruktur sumberdaya air	➤ Pemeliharaan infrastruktur transportasi perdesaan ➤ Penguatan infrastruktur kawasan pemukiman	➤ Pemantapan infrastruktur transportasi perdesaan	➤ Penguatan sistem penataan ruang dan wilayah
Misi-2: Meningkatkan kualitas pelayanan dasar						
Tujuan-2: Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar dalam mendukung kualitas hidup yang layak						
Sasaran-2:						
Meningkatnya kualitas kehidupan manusia (S3)	➤ Penguatan sarana/prasarana pendidikan dan kesehatan	➤ Pengembangan kurikulum pendidikan	➤ Penguatan kebudayaan daerah	➤ Pemerataan jumlah dan kualitas tenaga pendidik	➤ Pengembangan literasi, bahasa dan sastra daerah	➤ Pengembangan bahasa dan sastra daerah



		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemberdayaan masyarakat untuk resiliensi pandemic dan promosi kesehatan ➤ Pengembangan sistem penyediaan kebutuhan pokok masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemenuhan sarana/prasarana dan SDM kesehatan ➤ Pengembangan sistem distribusi kebutuhan pokok masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pencegahan dan penanganan stunting ➤ Pemantauan dan pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penguatan sistem ketersediaan obat dan alat kesehatan ➤ Penguatan sistem pengendalian laju inflasi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penguatan sistem keamanan makanan dan minuman ➤ Pengembangan sistem pengendalian laju inflasi
Sasaran-3:						
Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) Kabupaten (S3)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penataan sistem dalam pemenuhan SPM pelayanan dasar 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penguatan basis data dalam pemenuhan SPM terutama dalam mendukung Gerakan Kembali bersekolah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemantapan kapasitas SDM dalam pemenuhan SPM terutama dalam mendukung Gerakan Kembali ke sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemantapan sarana/ prasarana dalam pemenuhan SPM 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan kualitas capaian pemenuhan SPM 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemantapan capaian IKM atas SPM
Misi-3: Mendorong daya saing perekonomian daerah						
Tujuan-3: Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah						
Sasaran-4:						



Meningkatnya produktivitas dan daya serap tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah (S4)	➤ Pemulihan perekonomian dari dampak pandemic Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan produktivitas komoditas unggulan pertanian tanaman pangan ➤ Pemulihan bisnis UMKM bidang industri kecil dan perdagangan 	<p>Peningkatan daya saing produk pertanian tanaman pangan</p> <p>Peningkatan daya saing produk UMKM serta koperasi</p>	<p>Peningkatan produksi dan daya saing produk peternakan dan perikanan</p> <p>Pengembangan kemandirian dan kedaulatan pangan</p>	Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Pengembangan produk ekonomi kreatif dan daya tarik pariwisata
Sasaran-5:						
Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat (S5)	Pengembangan sistem data kemiskinan	Penanggulangan kemiskinan secara terpadu	Peningkatan produktivitas tenaga kerja	Penanganan lokasi rawan pangan	Pengembangan keluarga sejahtera	Pemantapan keluarga sejahtera
Sasaran-6:						
Berkembangnya kawasan agropolitan berbasis kota terpadu mandiri (S6)	Pengembangan pusat-pusat penyediaan sarana produksi pertanian	Penataan kawasan ibu kota kabupaten sebagai sentra agropolitan	Penguatan sistem perdagangan komoditas pertanian unggulan	Pengembangan kawasan transmigrasi berbasis agribisnis	Pemantapan fungsi kawasan terpadu mandiri sebagai sentra agropolitan	Penguatan hubungan industrial antara masyarakat dengan perusahaan
Misi-4: Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik						



Tujuan-4: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi (T4)						
Sasaran -7						
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (S7)	Penataan organisasi pemerintahan daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	<p>Pengembangan ASN yang professional bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel</p> <p>Pemantapan akuntabilitas kinerja dan keuangan birokrasi</p>	Penguatan tatalaksana meliputi sistem, proses dan prosedur kerja yg jelas, efektif, efisien dan terukur	Penataan perundang-undangan untuk berlakunya regulasi daerah yang tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif	Pemantapan pengawasan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN	Pemantapan integritas, kompetensi, kapabilitas, profesionalitas, kinerja dan kesejahteraan SDM aparatur
Sasaran-8						
Berkembangnya inovasi daerah (S8)		Penguatan fungsi laboratorium inovasi	Pemataan inovasi perangkat daerah dalam mendukung sasaran pembangunan daerah	Penguatan kualitas input dan proses inovasi perangkat daerah	Penguatan kuatitas output inovasi perangkat daerah	Penguatan kualitas outcome inovasi perangkat daerah
Misi-5: Memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat						
Tujuan-5: Meningkatkan ikatan kebersamaan dan kepatuhan norma hukum (T5)						
Sasaran -9						



Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (S9)		Penguatan sistem ketertiban dan ketenteraman berbasis masyarakat	Penguatan kerukunan antar umat beragama dan hubungan antar etnis	Penguatan sistem politik dan demokrasi serta partisipasi masyarakat dalam pemilihan	Penguatan sistem deteksi dini konflik sosial	Penguatan kesadaran dan perilaku yang mendukung kesatuan bangsa
Misi-6: Menjaga keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup						
Tujuan-6: Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan (T6)						
Sasaran-10						
Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati daerah (S10)		Penataan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup	Pemantauan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Pengembangan sistem pengelolaan persampahan terpadu	Pemeliharaan keanekaragaman hayati	Penguatan kapasitas masyarakat dan multistakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup



6.3. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah adalah program yang diprioritaskan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran secara langsung. Program yang tercakup di dalamnya adalah program untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan program untuk mewujudkan visi-misi dan program prioritas kepala daerah. Rumusan program untuk setiap sasaran beserta indikator outcome, target dan kebutuhan pagu indikatifnya dapat dilihat pada Tabel-6.3.



Tabel 6. 3 Program Pembangunan Daerah

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) (Income)	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2021		2022		2023		2024		2025				
								2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Misi 1			: Mendorong pemenuhan infrastruktur dasar																	
Tujuan 1			Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar secara merata antar wilayah (T1)	Rasio gini (Ketimpangan antar kelompok pendapatan)			0.314	0.341	53,119,394,974	0.367	39,886,196,400	0.375	76,501,196,400	0.356	94,567,196,400	0.345	100,754,018,300	0.339	100,754,018,300	
Sasaran 1			Terpenuhinya infrastruktur dasar dalam mendukung pemerataan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat (S1)	Indeks daya saing infrastruktur (IKU-1)			65.13	73.41	53,119,394,974	74.8	39,886,196,400	76.3	76,501,196,400	78.08	94,567,196,400	79.7	100,754,018,300	81.16	100,754,018,300	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten	45,25%	48%	36,022,133,141	51%	25,100,000,000	54%	56,300,000,000	57%	59,800,000,000	60%	69,800,000,000	60%	69,800,000,000	PUPR
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	1986 Ha	2283 Ha	8,461,946,000	2626 Ha	1,500,000,000	3000 Ha	5,300,000,000	4000 Ha	16,300,000,000	5000 Ha	11,300,000,000	5000 Ha	11,300,000,000	PUPR



1	03	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang drainase dalam keadaan baik di wilayah Kabupaten	25%	36%	2,430,000,000	41%	2,200,000,000	45%	3,000,000,000	51%	7,000,000,000	55%	7,000,000,000	55%	7,000,000,000	PUPR
1	03	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB	2228	2562	-	2946	4,500,000,000	3388	3,900,000,000	2896	3,900,000,000	4480	3,900,000,000	4480	3,900,000,000	PUPR
1	03	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap RTRW dan rencana rinci Tata Ruang (RTRR Kabupaten)	100%	100%	1,700,000,000	100%	1,700,000,000	100%	1,700,000,000	100%	1,700,000,000	100%	1,700,000,000	100%	1,700,000,000	PUPR
2	15	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja lalu lintas kabupaten kota	3.813007	2384%	599,877,433	2167%	980,758,000	1966%	2,395,758,000	1800%	2,610,758,000	1600%	3,845,758,000	1600%	3,845,758,000	DISHUB
1	04	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	0	100%	3,594,000,000	100%	3,594,000,000	100%	3,594,000,000	100%	2,945,000,000	100%	2,945,000,000	100%	2,945,000,000	DISPERKIM
2	16	02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	0%	70%	311,438,400	70%	311,438,400	70%	311,438,400	70%	311,438,400	100%	263,260,300	100%	263,260,300	DISANKO MINFO



Misi 2				: Meningkatkan kualitas pelayanan dasar																				
Tujuan 2				Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar dalam mendukung kualitas hidup yang layak (T2)	Indeks kepuasan masyarakat				C	C	307,200,690,685		C	518,284,537,824		C	684,476,160,562	B	709,698,823,536	B	655,383,323,160	B	656,819,223,160	
Sasaran 2				Meningkatnya kualitas kehidupan manusia (S2)	Indeks pembangunan manusia (IKU-2)			65.71	66.34	136,010,594,075	67	290,607,812,583	67.14	485,331,923,321	67.4	526,477,067,895	67.6	485,239,888,219	67.69	486,675,788,219				
1	01	03			PROGRAM PENGEMBA NGAN KURIKULUM	Persentas e Kurikulum Yang ditetapkan	0	67%	200,000,000	70%	1,040,000,000	75%	790,000,000	80%	2,099,428,532	83%	3,466,857,064	85%	3,466,857,064	Dinas Pendidikan				
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDI KAN	Rasio Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dengan Satuan Pendidikan	75%	75.00%	6000000000.00%	80%	600,000,000	85%	600,000,000	90%	600,000,000	95%	600,000,000	100%	600,000,000	Dinas Pendidikan				
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentas e Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal yang diselenggarakan Masyarakat Memiliki Izin	80%	83%	90,000,000	85%	90,000,000	87%	36,000,000	90%	18,000,000	93%	18,000,000	95%	18,000,000	Dinas Pendidikan				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S)	69.92%	75%	39,657,999,710	80%	40,375,000,000	85%	41,375,000,000	90%	42,375,000,000	95%	43,375,000,000	100%	43,375,000,000	Dinas Kesehatan				



						Rata-rata pencapai an SPM RSUD	50%	52%	21,062,250, 984	54%	35,050,000 ,000	56%	41,700,000 ,000	58%	46,995,000 ,000	60%	41,539,500 ,000	60%	41,539,500 ,000	RSUD
					-	Persentas e Keluarga Sehat	0.00 %	10%	22,794,710, 071	15%	65,870,000 ,000	20%	21,455,100 ,000	25%	35,358,100 ,000	30%	17,566,300 ,000	35%	17,566,300 ,000	Dinas Kesehatan
1	0 2	0 3			PROGRAM PENINGKAT AN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATA N	Persentas e Puskesm as Dengan 9 Jenis Tenaga Kesehata n Sesuai Standar	0.00 %	100 %	2,979,333,6 81	100%	6,100,000, 000	100%	6,100,000, 000	100 %	6,100,000, 000	100 %	6,100,000, 000	100 %	6,100,000, 000	Dinas Kesehatan
1	0 2	0 4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATA N DAN MAKANAN MINUMAN	Persentas e Penggna an Obat Rasional	0.00 %	100 %	326,777,08 1	100%	350,000,00 0	100%	350,000,00 0	100 %	350,000,00 0	100 %	350,000,00 0	100 %	350,000,00 0	Dinas Kesehatan
2	1 4	0 3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCAN A (KB)	Persentas e Penggna an Kontrase psi Jangka Panjang (MKJP)	19%	22%	3,567,165,4 02	25%	3,567,165, 402	35%	3,567,165, 402	45%	3,602,531, 579	55%	3,812,291, 820	55%	3,812,291, 820	PPKBP3A
2	1 4	0 4			PROGRAM PEMBERDA YAN DAN PENINGKAT AN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Ratio akseptor KB	77.1 1%	77.1 1%	1,041,451,1 70	77.50 %	1,041,451, 170	78.15 %	1,362,861, 908	78.5 0%	1,328,211, 773	78.8 0%	1,437,943, 324	78.8 0%	1,437,943, 324	PPKBP3A
2	1 4	0 2			PROGRAM PENGENDA LIAN PENDUDUK (LPP)	Laju Pertumbu han Penduduk (LPP)	35%	35%	520,596,01 1	40%	520,596,01 1	50%	497,096,01 1	65%	497,096,01 1	80%	497,096,01 1	80%	497,096,01 1	DP2KBP3 A



2	19	02		PROGRAM PENGEMBA NGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDA AN	Persentas e Pemuda yang Mendapat kan Pelatihan Kader Pengemb an Kepemim pinan, Kepedulia n, Kesukarel aan dan Kepelopo ran Pemuda	0%	0%	-	70%	3,870,000, 000	75%	3,295,000, 000	80%	3,800,000, 000	85%	4,455,000, 000	85%	4,455,000, 000	Dinas Pariwisata , Pemuda dan Olahraga
2	19	03		PROGRAM PENGEMBA NGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRA GAAN	Persentas e peningkat an prestasi olahraga	0%	0%	-	46%	31,192,000 ,000	46%	301,800,00 0,000	46%	301,890,00 0,000	46%	302,200,00 0,000	46%	302,200,00 0,000	Dinas Pariwisata , Pemuda dan Olahraga
2	19	04		PROGRAM PENGEMBA NGAN KAPASITAS KEPRAMUK AAN	Persentas e Pengemb an Keperam ukaan	0%	0%	-	40%	450,000,00 0	50%	450,000,00 0	55%	450,000,00 0	60%	450,000,00 0	60%	450,000,00 0	Dinas Pariwisata , Pemuda dan Olahraga
2	23	02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTA KAAAN	Persentas e perpustak aan sesuai Standar Nasional Perpustak aan	0%	0%	-	2000 %	660,000,00 0	2000%	745,000,00 0	2000 %	765,000,00 0	2000 %	690,000,00 0	2000 %	690,000,00 0	DISPERP US& ARSIP
2	23	03		PROGRAM PELESTARI AN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentas e koleksi nasional Naskah Kuno yang dilestarika n	0%	0%	-	5 Nask ah	50,000,000	6 Naska h	60,000,000	8 Nask ah	45,000,000	9 Nask ah	70,000,000	9 Nask ah	70,000,000	DISPERP US& ARSIP



2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip Dinamis dan Statis yang diarsipkan di Kearsipan	0%	0%	-	1471 %	150,000,000	1765%	180,000,000	2059 %	80,000,000	2353 %	1,580,000,000	2353 %	1,580,000,000	DISPERP US& ARSIP
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	0	-	0	95,000,000	5 Arsip	70,000,000	5 Arsip	70,000,000	50 Arsip	420,000,000	50 Arsip	420,000,000	DISPERP US& ARSIP
2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten yang sesuai NSPK	0	0	-	2 Izin	95,000,000	-	-	2 Izin	50,000,000	-	-	-	-	DISPERP US& ARSIP
2	08	02			PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase anggaran Responsif gender terhadap APBD	0.10 %	1%	83,000,000	1%	160,000,000	1%	65,000,000	1%	50,000,000	1%	65,000,000	1%	393,000,000	PPKBP3A
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000	100 %	100 %	195,000,000	100%	210,000,000	100%	150,000,000	100 %	150,000,000	100 %	150,000,000	100 %	150,000,000	PPKBP3A



						penduduk perempuan)														
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	persentase anak korban kekerasan yang dilayani	100%	100%	119,999,302	100%	690,000,000	100%	395,000,000	100%	540,000,000	100%	535,000,000	100%	530,000,000	DP2KBP3A
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan anak dari Tindak Kekerasan	100%	0	-	1	242,000,000	1	137,000,000	1	142,000,000	1	200,000,000	100%	155,000,000	DP2KBP3A
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan ketersediaan barang kebutuhan pokok sepanjang tahun	51.21	51.21	219,000,000	54.2	409,500,000	59.2	411,500,000	64.3	413,500,000	69.2	415,500,000	69.2	415,500,000	Bagian Ekonomi, SETDA
3	30	05			PROGRAM PENGEMBARAN EKSPOR	Nilai Ekspor bersih	1268	0	-	1,50	263,000,000	1,70	288,000,000	1,85	328,000,000	1,90	473,000,000	1,90	473,000,000	Dagperin
3	30	06			PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang telah bertandatangan	99%	99%	21,000,000	100%	160,000,000	100%	160,000,000	100%	185,000,000	100%	185,000,000	100%	185,000,000	Dagperin
Sasaran 3			Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) Kabupaten (S3)	Rata-rata capaian SPM Pelayanan Dasar (IKU-3)			100%	171,190,096,610	100%	227,676,725,241	100%	199,144,237,241	100%	183,221,755,641	100%	170,143,434,941	100%	170,143,434,941		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD; APK SMP; APK PAUD:	100.00%	100%	59,572,481,000	100%	68,146,429,000	100%	72,489,541,000	100%	71,998,506,000	100%	66,791,541,000	100%	66,791,541,000	Dinas Pendidikan



						APK Pendidikan Kesetaraan															
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Keluarga Sehat		10%	22,794,710,071	15%	65,870,000,000	20%	21,455,100,000	25%	35,358,100,000	30%	17,566,300,000	35%	17,566,300,000	Dinas Kesehatan
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas Dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar		100%	2,979,333,681	100%	6,100,000,000	100%	6,100,000,000	100%	6,100,000,000	100%	6,100,000,000	100%	6,100,000,000	Dinas Kesehatan
1	03	03				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAN AIR UMUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan dan yang bukan jaringan perpipaan yang terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	70.00%	70.00%	17,746,630,817	100.00%	17,500,000,000	100.00%	28,500,000,000	100.00%	27,000,000,000	100.00%	38,200,000,000	100.00%	38,200,000,000	PUPR



1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan air limbah domestik	22,11%	100,00%	33,300,000,000	100%	32,800,000,000	100%	33,300,000,000	100%	27,800,000,000	100%	28,300,000,000	100%	28,300,000,000	PUPR
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0%	100%	619,000,000	100%	619,000,000	100%	619,000,000	100%	1,089,000,000	100%	599,000,000	100%	599,000,000	DISPERKIM
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan	82%	100%	1,713,719,700	100%	1,713,719,700	100%	1,713,719,700	100%	1,563,962,400	100%	1,322,024,550	100%	1,322,024,550	Dinas Trantib
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran dan non kebakaran	100%	100%	1,713,719,700	100%	1,713,719,700	100%	1,713,719,700	100%	1,563,962,400	100%	1,322,024,550	100%	1,322,024,550	Dinas Trantib
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara terdampak bencana yang tertangani sesuai standar	70%	76%	29,206,556,841	96%	29,206,556,841	100%	29,206,556,841	100%	6,599,124,841	100%	5,573,444,841	100%	5,573,444,841	BPBD



1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	46.61%	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	324,300,000	100%	329,300,000	100%	384,300,000	100%	384,300,000	DINAS SOSIAL
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	667,574,800	100%	1,682,300,000	100%	1,547,300,000	100%	1,644,800,000	100%	1,809,800,000	100%	1,809,800,000	DINAS SOSIAL
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk Ber KTP Elektronik	92%	93%	200,000,000	94%	200,000,000	95%	200,000,000	97%	200,000,000	98%	200,000,000	98%	200,000,000	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran	61%	70%	200,000,000	75%	200,000,000	80%	200,000,000	85%	200,000,000	90%	200,000,000	90%	200,000,000	Dinas Kependudukan dan Capil
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan	Baik	Baik	276,370,000	Baik	1,725,000,000	Baik	1,775,000,000	Baik	1,775,000,000	Baik	1,775,000,000	Baik	1,775,000,000	Kecamatan



Misi 3				: Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah																	
Tujuan 3				Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah (T3)	PDRB/kapita (juta rupiah) ADHB			23.57	24.18	14,267,942,336	26.86	29,222,200,000	26.51	32,762,362,520	27.16	34,127,200,000	28.67	36,974,362,520	29.21	36,974,362,520	
Sasaran 4				Meningkatnya produktivitas dan daya serap tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah (S4)	Pertumbuhan ekonomi (persen) (IKU-4)			-0.4	1.69	10,968,174,903	3.87	21,199,000,000	4.33	22,963,162,520	5.17	24,147,000,000	5.84	26,783,162,520	6.15	26,783,162,520	
					Tingkat pengangguran terbuka (IKU-5) (persen)			2.71	2.62		2.53		2.52		2.48		2.45		2.44		
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi komoditas pertanian		2,60%	2,67%	2,850,000,000	2,72%	3,285,000,000	2,76%	3,285,000,000	2,79%	3,285,000,000	2,46%	3,285,000,000	2,46%	3,285,000,000	Dinas Pertanian
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	persentase meningkatnya populasi ternak		100%	100%	100,000,000	2%	595,000,000	2,20%	830,000,000	2,30%	830,000,000	2,40%	830,000,000	2,40%	830,000,000	Dinas Pertanian
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Sarana dan Prasarana perdagangan yang tersedia		1723	1723	815,000,000	1747	3,936,000,000	1771	3,936,000,000	1795	3,946,500,000	1819	3,967,500,000	1819	3,967,500,000	Dagperin



3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri	19.4872	8.6262	1,080,000,000	5.8974359	1,894,500,000	18.71794872	1,369,500,000	31.53846	1,544,500,000	44.35897	1,619,500,000	44.35897	1,619,500,000	Dagperin
2	17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	85%	100%	131,997,700	100%	168,500,000	100%	307,662,520	100%	256,000,000	100%	351,162,520	100%	351,162,520	Dinas PM, KUKM
2	17	08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha	85%	100%	676,660,910	100%	975,000,000	100%	855,000,000	100%	775,000,000	100%	1,010,000,000	100%	1,010,000,000	Dinas PM, KUKM
2	17	03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	36,36%	0%	-	100%	110,000,000	100%	115,000,000	100%	115,000,000	100%	115,000,000	100%	115,000,000	Dinas PM, KUKM
2	18	02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	0%	100%	53,582,568	100%	300,000,000	100%	250,000,000	100%	80,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	Dinas PM, KUKM
2	18	03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	persentase pelaksanaan promosi penanaman modal	0%	100%	171,292,703	100%	285,000,000	100%	285,000,000	100%	385,000,000	100%	285,000,000	100%	285,000,000	Dinas PM, KUKM



3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentas i daya tarik destinasi Pariwisata a	0.33	14.66%	3,065,000,000	0.65	6,200,000,000	0.7	8,320,000,000	0.8	9,480,000,000	1	11,800,000,000	1	11,800,000,000	Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga
3	26	05			PROGRAM PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA PARIWISAT A DAN EKONOMI KREATIF	Persentas e pengemb angan sumber daya pariwisataa dan ekonomi kreatif	0	0.4	600,000,000	0.6	1,050,000,000	0.8	1,050,000,000	0.9	1,050,000,000	1	1,050,000,000	1	1,050,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
5	02	04			PROGRAM PENGELOL AAN PENDAPAT AN DAERAH	persentas e Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	6%	6%	924,641,022	6%	1,470,000,000	6%	1,370,000,000	6%	1,370,000,000	6%	1,370,000,000	6%	1,370,000,000	badan Keuangan
2	13	05			PROGRAM PEMBERDA YAAN LEMBAGA KEMASYAR AKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAK AT HUKUM ADAT	persentas e lembaga kemasyar akatan yang diberdaya kan	100 %	100 %	320,000,000	100%	720,000,000	100%	720,000,000	100 %	720,000,000	100 %	720,000,000	100 %	720,000,000	Dinas PMD
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIV ITAS TENAGA KERJA	Persentas e tenaga kerja bersertifik at kompeten si	10%	15%	120,000,000	20%	130,000,000	25%	150,000,000	30%	170,000,000	40%	190,000,000	40%	190,000,000	DISTRAN SNAKER
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentas e jumlah perusaha an yang berselisih	100 %	100 %	60,000,000	100%	80,000,000	100%	120,000,000	100 %	140,000,000	100 %	160,000,000	100 %	160,000,000	DISTRAN SNAKER



Sasaran 5				Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Angka kemiskinan (IKU-6) (persen)			6.79	6.76	2,708,562,433	6.3	5,443,200,000	6.13	6,017,200,000	5.84	6,065,200,000	5.61	6,294,200,000	5.5	6,294,200,000	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh layanan perlindungan dan Jaminan sosial	100%	100%	650,000,000	100%	900,400,000	100%	900,400,000	100%	900,400,000	100%	944,400,000	100%	944,400,000	DINAS SOSIAL	
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase jenis PSKS yang menerima layanan pemberdayaan sosial	71.42%	100%	233,835,855	100%	513,800,000	100%	738,800,000	100%	513,800,000	100%	513,800,000	100%	513,800,000	DINAS SOSIAL	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang menerima Layanan Rehabilitasi Sosial	45%	45%	200,000,000	65%	200,000,000	85%	440,000,000	90%	605,000,000	100%	735,000,000	100%	735,000,000	DINAS SOSIAL	
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100%	100%	15,000,000	100%	21,000,000	100%	23,000,000	100%	23,000,000	100%	23,000,000	100%	23,000,000	DINAS SOSIAL	
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	100%	100%	61,726,578	100%	112,000,000	100%	112,000,000	100%	112,000,000	100%	112,000,000	100%	112,000,000	DINAS SOSIAL	
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	100%	100%	1,378,000,000	100%	1,785,000,000	100%	1,892,000,000	100%	2,000,000,000	100%	2,055,000,000	100%	2,055,000,000	Ketahanan Pangan	



2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAUWANA N PANGAN	Persentase penanganan kerawanan pangan	100 %	100 %	85,000,000	100%	725,000,000	100%	725,000,000	100 %	725,000,000	100 %	725,000,000	100 %	725,000,000	Ketahanan Pangan
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	0%	0%	-	100%	461,000,000	100%	461,000,000	100 %	461,000,000	100 %	461,000,000	100 %	461,000,000	Ketahanan Pangan
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pengawasan keamanan pangan	100 %	100 %	85,000,000	100%	725,000,000	100%	725,000,000	100 %	725,000,000	100 %	725,000,000	100 %	725,000,000	Ketahanan Pangan
Sasaran 6			Berkembangnya kawasan agropolitan berbasis kota terpadu mandiri	Kontribusi Sektor pertanian dalam PDRB (IKU-7) (persen)			71.81	71.87	591,205,000	72.19	2,580,000,000	72.18	3,782,000,000	72.52	3,915,000,000	72.41	3,897,000,000	72.08	3,897,000,000	
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	presentase cakupan pembinaan kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani	100 %	100 %	190,000,000	100%	510,000,000	100%	760,000,000	100 %	510,000,000	100 %	710,000,000	100 %	710,000,000	Dinas Pertanian
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	presentase ketersediaan prasarana pertanian	30%	31%	200,000,000	32%	1,560,000,000	35%	1,860,000,000	36%	2,210,000,000	40%	1,860,000,000	40%	1,860,000,000	Dinas Pertanian
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	persentase peningkatan usaha	0%	0%	-	1%	235,000,000	1,25%	835,000,000	1,27 %	835,000,000	1,29 %	835,000,000	1,29 %	835,000,000	Dinas Pertanian



						bidang pertanian dan peternakan																	
3	32	04			PROGRAM PENGEMBA NGAN KAWASAN TRANSMIG RASI	Persentas e Produktivitas Pertanian pada kawasan Transmigr asi	0	46%	134,000,000	66%	160,000,000	74%	205,000,000	82%	230,000,000	88%	270,000,000	88%	270,000,000	Dinas Transmigr asi dan Tenaga Kerja			
3	30	07			PROGRAM PENGGUNA AN DAN PEMASARA N PRODUK DALAM NEGERI	Persentas i produk dalam negeri yang dipasarka n dan digunaka n	0	20%	67,205,000	30%	115,000,000	45%	122,000,000	55%	130,000,000	65%	222,000,000	65%	222,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustri an			
Misi 4			: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik																				
Tujuan 4			Meningkatkan kualitas penyelenggaraa n reformasi birokrasi (T4)	Indeks Reform asi Birokra si (IRB)		C		31,738,742,997	C	40,192,261,848	CC	42,042,180,119	CC	48,358,136,105	CC	48,852,996,521	CC	48,852,996,521					
Sasaran 7			Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraa n pemerintahan daerah	Nilai LPPD (IKU-8)		2,9		28,903,742,997	3	37,372,261,848	3,01	39,187,180,119	3,02	45,468,136,105	3,03	45,937,996,521	3,04	45,937,996,521					
			Indeks Pengel olaan Keuang an Daerah (IPKD) (IKU-9)																				
			SAKIP																				
			Opini BPK			WTP	WT P				WTP				WTP				WTP		WTP		WTP



5	01	02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian penjabaran dokumen perencanaan dan penganggaran	100%	100%	1,375,000,000	100%	1,075,000,000	100%	1,085,000,000	100%	1,090,000,000	100%	1,310,000,000	100%	1,310,000,000	BAPPEDA
5	01	03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Yang sesuai dengan penganggaran	100%	100%	2,378,000,000	100%	2,496,800,000	100%	3,015,600,000	100%	3,064,400,000	100%	3,383,200,000	100%	3,383,200,000	BAPPEDA
6	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Pengawasan Tujuan Tertentu yang Ditangani	100%	100%	1,836,550,800	100%	3,862,020,000	100%	4,055,121,000	100%	4,257,877,050	100%	4,465,699,403	100%	4,465,699,403	INSPEKTORAT
6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Kebijakan yang dirumuskan pelaksanaannya, pendampingan dan asistensi	100%	100%	266,286,900	100%	653,872,790	100%	686,566,430	100%	720,894,751	100%	756,939,489	100%	756,939,489	INSPEKTORAT
5	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi (tidak termasuk guru dan Nakes) (%)	96%	96%	87,370,776	97%	258,517,776	98%	367,565,898	99%	4,627,458,705	100%	3,928,399,279	100%	3,928,399,279	BKPP



5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Pegawai Fungsional (%) PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan	0.069	7%	650,588,954	8%	1,036,725,641	15%	1,560,170,795	17%	1,398,065,939	19%	1,725,702,628	19%	1,725,702,628	BKPP
						Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar (%) PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan	0.1534	15%	650,588,954	15%	1,036,725,641	14%	1,560,170,795	14%	1,398,065,939	13%	1,725,702,628	13%	1,725,702,628	BKPP
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio PAD	100%	100%	10,738,116,364	100%	15,710,000,000	100%	12,410,000,000	100%	12,660,000,000	100%	13,010,000,000	100%	13,010,000,000	badan Keuangan
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	90%	95%	77,150,000	95%	1,940,000,000	95%	1,940,000,000	100%	1,940,000,000	100%	1,940,000,000	100%	1,940,000,000	Kecamatan
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	persentase pengentasan desa tertinggal	100%	100%	248,400,000	100%	710,000,000	100%	690,000,000	100%	520,000,000	100%	470,000,000	100%	470,000,000	Dinas PMD
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase peningkatan status desa mandiri	100%	100%	360,000,000	100%	360,000,000	100%	360,000,000	100%	360,000,000	100%	360,000,000	100%	360,000,000	Dinas PMD
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	persentase jumlah desa yang terfasilitasi kerjasam	100%	100%	120,000,000	100%	120,000,000	100%	120,000,000	100%	120,000,000	100%	120,000,000	100%	120,000,000	Dinas PMD



						a antar desa														
4	0 2	0 2			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentas e Dukunga n Pelaksan aan Tugas dan Fungsi DPRD	0%	100 %	10,115,690, 250	100%	8,112,600, 000	100%	11,336,985 ,202	100 %	13,311,373 ,722	100 %	12,742,353 ,095	100 %	12,742,353 ,095	Set DPRD
Sasaran 8		Berkembangnya inovasi daerah		Indeks inovasi daerah (IKU- 10)			3	50	2,835,000,0 00	100	2,820,000, 000	200	2,855,000, 000	300	2,890,000, 000	500	2,915,000, 000	500	2,915,000, 000	
5	0 5	0 2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN DAERAH	Cakupan Inovasi, Penelitian dan Pengemb angan Pembang unan Daerah yang Dilaksana kan	0%	20%	2,835,000,0 00	100%	2,820,000, 000	100%	2,855,000, 000	100 %	2,890,000, 000	100 %	2,915,000, 000	100 %	2,915,000, 000	BAPPEDA
Misi 5		: Memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat																		
Tujuan 5		Meningkatkan ikatan kebersamaan dan kepatuhan norma hukum		Indeks Kriminal itas					77,150,000		2,895,000, 000		2,870,500, 000		2,875,000, 000		2,880,000, 000		7,286,748, 500	
Sasaran 9		Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat		Persentase Penuru nan ganggu an ketenter aman dan ketertib an umum					77,150,000		2,895,000, 000		2,870,500, 000		2,875,000, 000		2,880,000, 000		7,286,748, 500	



			(IKU-11)																
8	01	06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan capaian penanganan konflik	0%	0%	-	100%	275,000,000	100%	275,000,000	100%	275,000,000	100%	275,000,000	100%	275,000,000	Kesbangpol
8	01	05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase kelompok yang dibina ketahanan ekonomi, sosial, dan budayanya	0%	0%	-	75%	145,000,000	80%	145,500,000	83%	150,000,000	85%	155,000,000	85%	155,000,000	Kesbangpol
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	0%	0%	-	100%	1,200,000,000	100%	1,200,000,000	100%	1,200,000,000	100%	1,200,000,000	100%	1,200,000,000	Kecamatan
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk	0	0	77,150,000	0	1,275,000,000	0	1,250,000,000	0	1,250,000,000	0	1,250,000,000	0	1,250,000,000	Kecamatan
4	01	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase capaian program pemerintahan dan kesejahteraan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	4,406,748,500	Setda

371



2	1 1	0 5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Jumlah Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3 yang dikoordinasikan Pengendalian Limbahnya	0%	0%	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1 1	1 1			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang dikelola	71%	72%	1,549,610,016	73.00%	1,600,000,000	74.00%	1,600,000,000	75.00%	1,600,000,000	76.00%	1,650,000,000	76.00%	1,650,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
1	0 3	0 4			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	rasio luas penampungan sampah perkotaan terhadap total sampah perkotaan	2200	3000	1,650,000,000	3700	1,650,000,000	4400	1,650,000,000	5100	1,650,000,000	5800	1,650,000,000	5800	1,650,000,000	PUPR
1	0 3	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	29.7%	33.7%	-	36.7%	1,500,000,000	39.7%	18,000,000,000	42.7%	18,000,000,000	45.7%	30,000,000,000	45.7%	30,000,000,000	PUPR
3	2 7	0 5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGUHAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	0%	0%	300,000,000	100%	550,000,000	100%	550,000,000	100%	550,000,000	100%	550,000,000	100%	550,000,000	Dinas Pertanian



1	0	0			PROGRAM PENANGGULA NGAN BENCANA	Persentas e Desa Tangguh Bencana	0%	100 %	1,995,014,92 6	100%	1,995,014,9 26	100%	1,995,014,9 26	100%	2,059,734,9 26	100%	1,822,334,9 26	100%	1,822,334,9 26	BPBD
---	---	---	--	--	--	---	----	----------	-------------------	------	-------------------	------	-------------------	------	-------------------	------	-------------------	------	-------------------	------

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan

Perspektif rencana penganggaran pembangunan daerah dalam RPJMD ini diwujudkan dalam dokumen rencana sebagai kerangka pendanaan. Sebagai perspektif rencana, sejumlah asumsi yang mendasari penyusunan kerangka pendanaan ini. selain terkait dengan asumsi makro ekonomi dan sosial, juga terkait kebijakan keuangan negara dan kebijakan keuangan daerah yang diperkirakan akan mempengaruhi rencana penganggaran pada periode pemerintahan yang akan datang.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja langsung, berupa implementasi program-program pembangunan jangka menengah daerah, baik rumusan program pembangunan daerah maupun rumusan program perangkat daerah. Dalam perspektif RPJMD ini, kerangka pendanaan akan diproyeksikan kemampuan fiskal daerah yang dialokasikan untuk prioritas pertama, prioritas kedua serta prioritas ketiga untuk periode 2021-2026.

7.1.1 Asumsi Makro dan Sosial Daerah

Guna memproyeksi kondisi masa depan keuangan daerah, khususnya menyangkut kerangka pendanaan daerah, baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi pengeluaran diperlukan asumsi makro ekonomi dan sosial yang berpengaruh langsung terhadap kondisi keuangan daerah bersangkutan. Asumsi makro ekonomi dan sosial daerah diperlukan untuk melakukan analisis keuangan daerah, antara lain: (1) pertumbuhan ekonomi daerah, (2) PDRB per kapita, (3) tingkat inflasi, (4) tingkat pengangguran terbuka, (5) Indeks Pembangunan Manusia, (6) tingkat kemiskinan sert (&) Rasio Gini) yang menjadi faktor determinan dalam capaian kinerja keuangan daerah untuk lima tahun ke depan di Kabupaten Mamuju Tengah.

Dalam perspektif peningkatan penerimaan daerah, baik berupa pendapatan maupun penerimaan pembiayaan, asumsi makro ekonomi dan sosial daerah merupakan potensi dalam mendorong peningkatan penerimaan daerah. Kondisi makro ekonomi dan sosial daerah diharapkan selalu membaik karena bukan hanya akan mendorong kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat yang semakin baik, tetapi juga diharapkan menjadi sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang baik. Dengan kemampuan ekonomi dan sosial masyarakat yang semakin baik, disertai dengan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi

pendapatan daerah, maka kemampuan dan kapasitas keuangan daerah juga akan semakin meningkat. Sebaliknya, dalam perspektif pengeluaran dan belanja daerah, asumsi-asumsi makro ekonomi dan sosial daerah yang ditetapkan akan berimplikasi pada tingginya kebutuhan fiskal daerah. Pada sisi yang lain, capaian indikator makro ekonomi dan sosial daerah tersebut merupakan potensi dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah untuk tahun-tahun berikutnya.

Asumsi makro ekonomi dan sosial daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang berimplikasi pada peningkatan kebutuhan pengeluaran pembiayaan dan belanja daerah, yang pada tahapan selanjutnya diharapkan dapat menciptakan sumber-sumber peningkatan kapasitas fiskal daerah. Selengkapnya asumsi-asumsi tersebut disajikan pada tabel berikut ini.

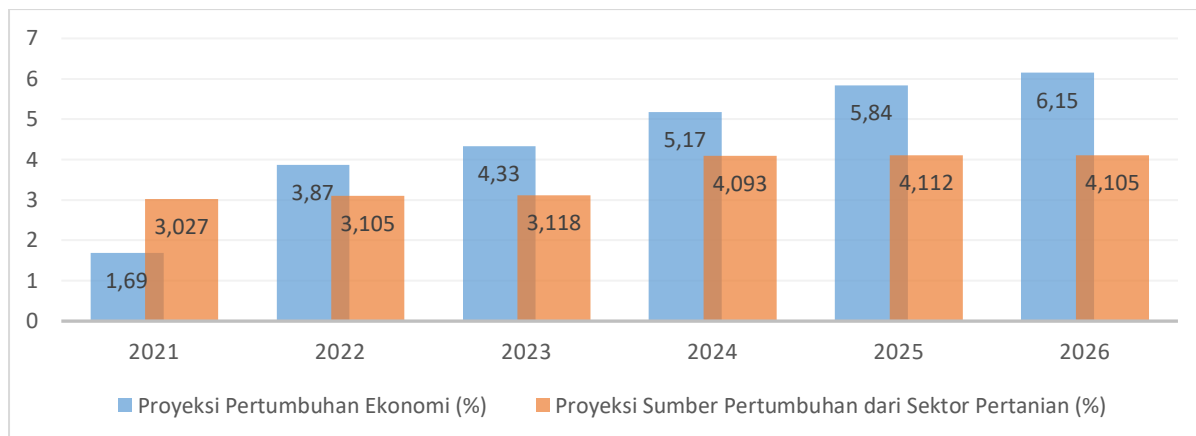
Tabel 7. 1 Proyeksi Indikator Makro Daerah Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026

No	Indikator Makro Daerah	Baseline	Proyeksi					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	-0,40	1,69	3,87	4,33	5,17	5,84	6,15
2	PDRB Per Kapita	23,57	24,18	25,86	26,51	27,16	28,67	29,21
3	Inflasi	1,80	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1
4	TPT	2,71	2,62	2,53	2,52	2,48	2,45	2,44
5	IPM	65,71	66,34	67,00	67,14	67,40	67,60	67,69
6	Tingkat Kemiskinan	6,79	6,76	6,30	6,13	5,84	5,61	5,50
7	Rasio Gini	0,314	0,341	0,367	0,375	0,356	0,345	0,339

Sumber: Proyeksi Tim Penyusun, 2021

Pertumbuhan ekonomi daerah diproyeksikan akan terus membaik, dengan mengandalkan sumber pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian yang terbukti mampu tetap bertumbuh pada saat sektor lainnya terdampak Pandemi COVID-19, pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan diharapkan akan semakin akseleratif melalui kebijakan pengembangan agribisnis dan agroindustry.

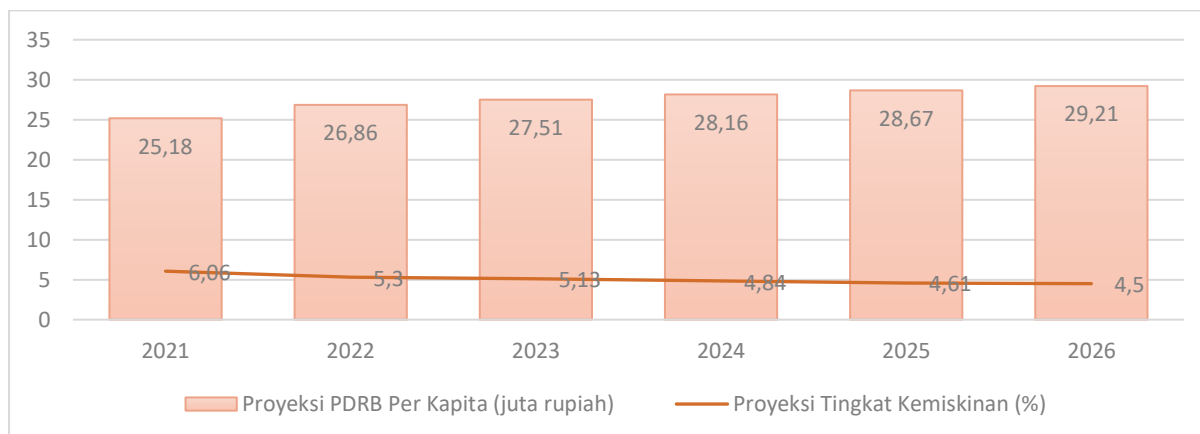
Tabel 7. 2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026



Sumber: Tim Penyusun RPJMD Mamuju Tengah 2021-2026, data diolah

PDRB per kapita diprediksi akan terus membaik seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang terus meningkat dan tingkat inflasi yang stabil di angka $2,5 \pm 1$, tingkat inflasi yang stabil disekitaran 2,0% selama periode sebelumnya mampu tetap menjaga daya beli masyarakat sehingga mampu tetap menekan jumlah penduduk miskin, sehingga tingkat kemiskinan juga diprediksi akan terus menurun selama periode 2021-2026.

Tabel 7. 3 Proyeksi PDRB Per Kapita dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026

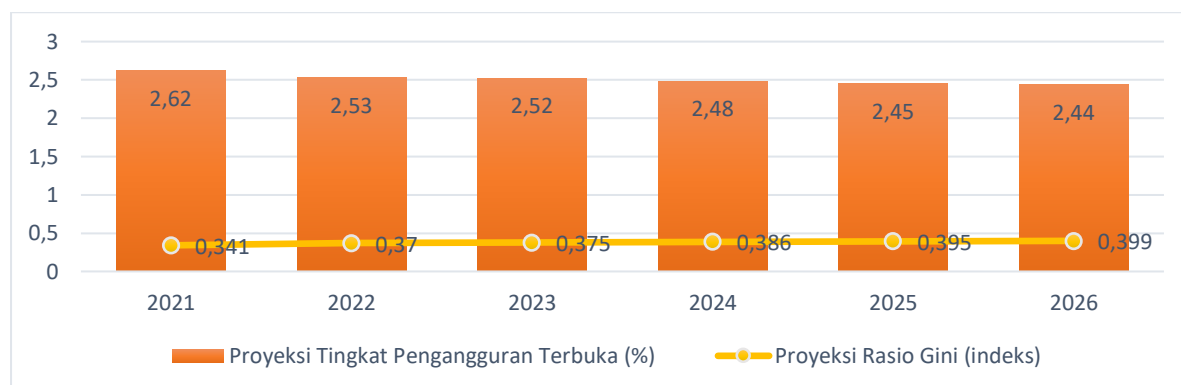


Sumber: Tim Penyusun RPJMD Mamuju Tengah 2021-2026, data diolah

Pengembangan agribisnis dan agroindustri yang mampu mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan akan berdampak tumbuhnya investasi dalam skala kecil dan menengah pada sektor UMKM berbasis pertanian/perikanan, baik dipedesaan maupun yang bercirikan perkotaa, bukan hanya diharapkan mampu mereduksi ketimpangan

pendapatan masyarakat, tetapi juga akan menyerap tenaga kerja yang *labor intensive* sehingga terus akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

Tabel 7. 4 Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka dan Rasio Gini Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026

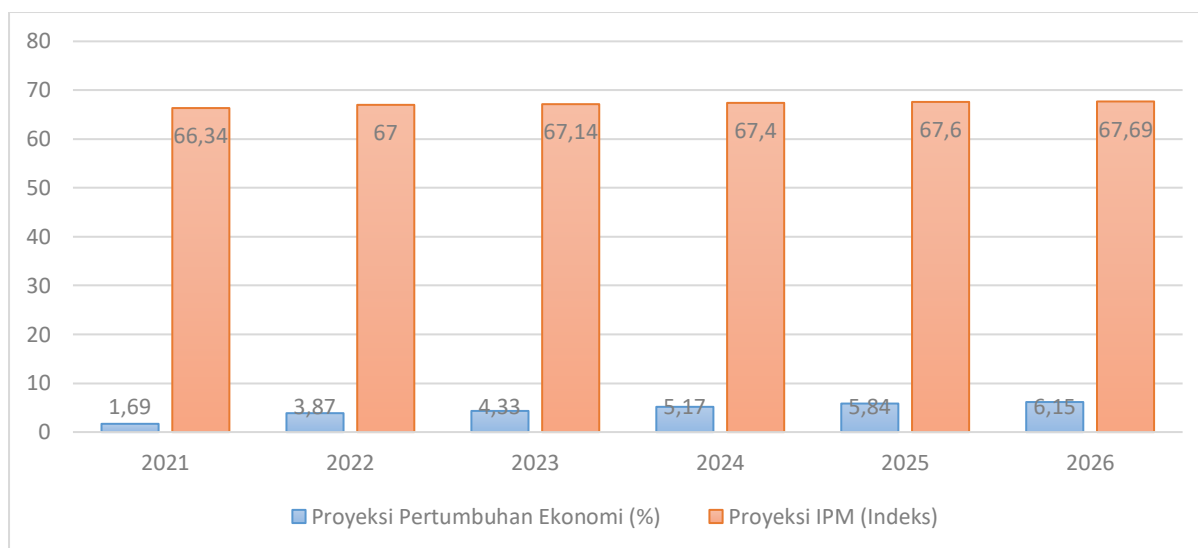


Sumber: Tim Penyusun RPJMD Mamuju Tengah 2021-2026, data diolah

Peningkatan Rasio Gini selama periode 2021-2024 merupakan konsekuensi pertumbuhan ekonomi akseleratif setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020, dan angka Rasio Gini akan kembali menurun meningkatnya pendapatan per kapita kelompok masyarakat bawah yang didorong oleh penurunan TPT (penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian/perikanan dan UMKM).

IPM diharapkan akan terus mengalami peningkatan yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang diharapkan konsisten mengalami peningkatan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan, sehingga akses layanan Pendidikan dan kesehatan juga meningkat yang ditandai dengan meningkatnya pengeluaran per kapita masyarakat.

Tabel 7. 5 Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026

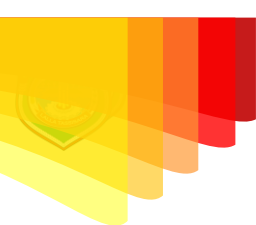


Sumber: Tim Penyusun RPJMD Mamuju Tengah 2021-2026, data diolah

7.1.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam perspektif rencana, baik pendapatan maupun belanja dan pembiayaan daerah didasarkan atas sejumlah asumsi pokok, antara lain asumsi makro ekonomi daerah yang meliputi antara lain pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan per kapita, inflasi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, serta asumsi sosial lainnya, seperti indeks pembangunan manusia, dan lain sebagainya. Selain itu, terkait dengan analisis kebijakan keuangan, baik kebijakan keuangan negara maupun kebijakan keuangan daerah khususnya yang terkait dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah yang akan diterapkan pada masa datang.

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, berikut ini hasil proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk lima tahun yang akan datang, 2021-2026, seperti disajikan pada tabel berikut ini.



Tabel 7. 6 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi (Ribu Rupiah)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	PENDAPATAN	626.477	646.734	662.782	674.542	680.376	681.259
1.1	Pendapatan Asli Daerah	31.779	25.961	27.008	28.769	29.603	30.485
1.1.1	Pajak Daerah	8.696	9.735	9.872	10.421	11.004	11.622
1.1.2	Retribusi Daerah	14.287	12.886	12.897	12.908	13.160	13.424
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	580	1.200	2.100	3.300	3.300	3.300
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	8.216	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
1.2	Pendapatan Transfer	576.080	596.080	611.080	621.080	626.080	626.080
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	563.113	583.113	598.113	608.113	613.113	613.113
	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	7.040	7.040	7.040	7.040	7.040	7.040
	Dana alokasi umum	344.703	344.703	344.703	344.703	344.703	344.703
	Dana Transfer Khusus :	154.268	154.268	154.268	154.268	154.268	154.268
	Dana alokasi khusus Fisik	107.227	107.227	107.227	107.227	107.227	107.227
	Dana alokasi khusus Non Fisik	47.041	47.041	47.041	47.041	47.041	47.041
1.2.1.1	Dana Insentif Daerah	0	20.000	35.000	45.000	50.000	50.000
1.2.1.2	Dana Desa	57.103	57.103	57.103	57.103	57.103	57.103
1.2.2	Transfer Antar Daerah :	12.967	12.967	12.967	12.967	12.967	12.967
	Pendapatan Bagi Hasil	12.967	12.967	12.967	12.967	12.967	12.967
	Bantuan keuangan						
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	18.617	24.693	24.693	24.693	24.693	24.693
1.3.1	Hibah	-	-				
1.3.2	Dana Darurat	-	-				
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	18.617	24.693	24.693	24.693	24.693	24.693
	Pendapatan FKTP		6.076	6.076	6.076	6.076	6.076
	Pendapatan Lainnya (BOS)	18,617	18,617	18,617	18,617	18,617	18,617
2	Belanja	626.001	634.567	666.782	675.042	680.876	681.759
2.1	Belanja Operasi	385.226	371.681	397.325	407.065	412.900	413.782
2.1.1	Belanja Pegawai	163.645	180.010	198.011	217.812	239.593	263.553
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	207.033	177.123	193.079	183.094	167.147	144.070
2.1.3	Belanja Bunga	3.500	3.500	000	000	000	000
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-		
2.1.5	Belanja Hibah	9.346	9.346	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.702	1.702	1.235	1.160	1.160	1.160
2.2	Belanja Modal	145.398	160.609	167.179	170.699	170.699	170.699
2.3	Belanja Tidak Terduga	3.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
2.4	Belanja Transfer	92.377	92.277	92.277	92.277	92.277	92.277
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	-					

	SURPLUS/DEFISIT	476	12.167	(4.000)	(500)	(500)	(500)
3	PEMBIAYAAN	(476)	(12.167)	4.000	500	500	500
3.1	Penerimaan Pembiayaan	22.691	12.000	7.000	4.500	4.500	4.500
3.1.1.	SILPA	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	18.691	10.000	5.000	2.500	2.500	2.500
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	23.167	24.167	3.000	4.000	4.000	4.000
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	22.167	22.167	000	000	000	000
3.2.2	Penyertaan modal daerah	1.000	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	Pembiayaan netto	(476)	(12.167)	4.000	500	500	500
	Sisa Lebih Pembiayaan pada tahun yang berkenaan (SILPA)	-	-	-	-		

Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun

*) Dalam satuan juta rupiah

Pendapatan daerah diproyeksi mencapai Rp.626.476.512.829 pada tahun 2021, meningkat menjadi Rp. 646.734.039.644 pada tahun 2022, pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 662.781.531.848 pada tahun 2024 mencapai Rp 674.541.789.174 dan ditahun 2025 mengalami peningkatan mencapai 680.376.208.097 hingga pada tahun 2026 pendapatan daerah mencapai Rp. 681.258.534.073. Komponen terbesar pendapatan daerah masih bersumber dari dana perimbangan, disusul lain-lain pendapatan daerah yang sah. Meskipun tetap diproyeksikan masih menjadi sumber pendapatan daerah terkecil, tetapi proyeksi PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang estimasinya paling optimis, dengan rata-rata tingkat pertumbuhan tertinggi dibandingkan sumber pendapatan daerah lainnya. Belanja daerah diproyeksikan kurang lebih sama dengan proyeksi pendapatan daerah. Pada tahun 2021 sebesar Rp.626.000.847.089 meningkat menjadi Rp. 634.567.373.864 pada tahun 2022, sebesar Rp. 666.781.531.848 pada tahun 2023, sebesar Rp. 675.041.789.174 pada tahun 2024, sebesar Rp. 680.876.208.097 pada tahun 2025, dan di tahun 2026 mengalami peningkatan mencapai Rp. 681.758.534.073. Alokasi belanja terbesar diperuntukkan untuk belanja modal dan belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, mengingat untuk empat tahun ke depan kebutuhan akan infrastruktur dasar masih sangat besar, terutama untuk menjamin kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat di daerah ini, selain untuk memastikan pelayanan publik yang semakin baik setiap tahunnya. Hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah tersebut, selisihnya akan menunjukkan hasil estimasi pembiayaan daerah, baik pembiayaan surplus maupun pembiayaan defisit.

7.1.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tersebut, maka selanjutnya diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk tiga tahun yang akan datang, periode 2021-2026 sebagai berikut.

Tabel 7. 7 Hasil Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	626.477	646.734	662.782	674.542	680.376	681.259
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)						
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Total Penerimaan	630.477	648.734	664.782	676.542	682.376	683.259
	Dikurangi:						
4	Belanja Tidak Langsung	446.455	489.720	514.408	539.134	565.915	589.874
5	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0		
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	180.022	157.014	148.374	135.408	114.461	91.385

Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun

*) Dalam satuan juta rupiah

Hasil proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk periode 2021-2026 diproyeksikan akan mengalami penurunan, hal ini disebabkan adanya peningkatan terhadap belanja pegawai dan proyeksi peningkatan pendapatan dana instentif daerah yang berpengaruh terhadap turunnya perhitungan kapasitas riil daerah. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah daerah untuk mempersiapkan aspek perundangan dan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif. Diperlukan rumusan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang tepat, menjangkau sumber-sumber pendapatan asli daerah potensial.

Postur rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk empat tahun yang datang, periode 2021-2026 akan didominasi oleh prioritas I untuk pemenuhan kebutuhan hak dasar masyarakat dan yang bersifat mandatori. Mencakup urusan , kesehatan, PU, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban, urusan sosial, dan bencana. Porsi anggaran untuk prioritas I ini sebanyak 50 persen dari total kapasitas riil keuangan daerah setiap tahunnya. Sedangkan alokasi untuk prioritas II sebanyak 30 persen, serta untuk prioritas III sebesar 20 persen. Selanjutnya, prioritas penggunaan

kapasitas riil keuangan daerah tersebut, didistribusikan berdasarkan perangkat daerah yang akan menjalankan program pembangunan daerah dan perangkat daerah. Selengkapnya pada tabel berikut ini.

Tabel 7. 8 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026

Uraian	Proyeksi				
	Tahun n+1	Tahun n+2	Tahun n+3	Tahun n+4	Tahun n+5
	2021	2022	2023	2024	2025
kapasitas Riil kemampuan keuangan	527,123,908,789	529,542,386,135	564,927,535,047	578,811,086,522	586,003,929,012
Prioritas I	301,254,090,425	283,429,370,432	284,850,689,193	298,678,342,237	317,105,546,224
Prioritas II	94,290,898,869	102,337,475,740	122,533,355,511	121,193,087,884	110,303,867,293
Prioritas III	34,793,825,977	46,190,607,554	49,670,406,240	50,856,772,119	52,044,202,039
Program Penunjang Urusan (program Rutin)	96,785,093,519	97,584,932,408	107,873,084,103	108,082,884,283	106,550,313,456

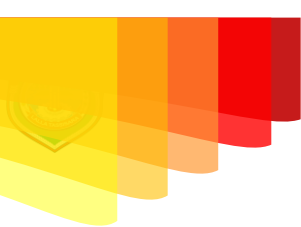
Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun

Perangkat daerah yang ditempatkan sebagai prioritas I adalah perangkat daerah yang secara langsung mengimplementasikan program pembangunan daerah dan program perangkat daerah yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Prioritas II merupakan sekumpulan perangkat daerah yang mengimplementasikan program pembangunan daerah untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah yang belum ter-cover dalam prioritas I. Sedangkan perangkat daerah atau unit yang tergolong dalam prioritas III menjalankan program pembangunan daerah dan perangkat daerah lainnya yang belum ter-cover dalam prioritas I dan prioritas II

7.2 Program dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah

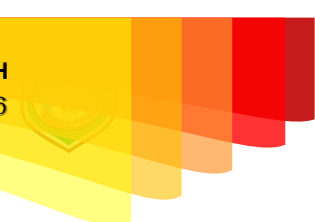
7.2.1 Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab			
								2021		2022		2023		2024		2025			2026		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	01				Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				60,462,481,000		69,876,429,000		73,915,541,000		74,715,934,532		70,876,398,064		70,876,398,064		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD; APK SMP; APK PAUD; APK Pendidikan Kesetaraan	100%	100%	59,572,481,000	100%	68,146,429,000	100%	72,489,541,000	100%	71,998,506,000	100%	66,791,541,000	100%	66,791,541,000	Dinas Pendidikan	
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum Yang ditetapkan		67%	200,000,000	70%	1,040,000,000	75%	790,000,000	80%	2,099,428,532	83%	3,466,857,064	85%	3,466,857,064	Dinas Pendidikan	
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dengan Satuan Pendidikan	75%	75%	600,000,000	80%	600,000,000	85%	600,000,000	90%	600,000,000	95%	600,000,000	100%	600,000,000	Dinas Pendidikan	
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal yang diselenggarakan Masyarakat Memiliki Izin	80%	83%	90,000,000	85%	90,000,000	87%	36,000,000	90%	18,000,000	93%	18,000,000	95%	18,000,000	Dinas Pendidikan	
1	02				Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan				66,652,942,346		113,445,000,000		70,280,100,000		85,183,100,000		68,391,300,000		68,391,300,000		



Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		
								Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Target	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S)	69.92%	75%	39,657,999,710	80%	40,375,000,000	85%	41,375,000,000	90%	42,375,000,000	95%	43,375,000,000	100%	43,375,000,000	Dinas Kesehatan
						Persentase Keluarga Sehat		10%	22,794,710,071	15%	65,870,000,000	20%	21,455,100,000	25%	35,358,100,000	30%	17,566,300,000	35%	17,566,300,000	Dinas Kesehatan
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk		1 Tenaga Medis : 5000 Penduduk		1 Tenaga Medis : 5000 Penduduk		1 Tenaga Medis : 5000 Penduduk	250,000,000	1 Tenaga Medis : 5000 Penduduk	250,000,000	1 Tenaga Medis : 5000 Penduduk	250,000,000	1 Tenaga Medis : 5000 Penduduk	250,000,000	Dinas Kesehatan
						Persentase Puskesmas Dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar		100%	2,979,333,681	100%	6,100,000,000	100%	6,100,000,000	100%	6,100,000,000	100%	6,100,000,000	100%	6,100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Penggunaan Obat Rasional		100%	326,777,081	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Sehat	0 Desa	3 Desa	894,121,803	5 Desa	750,000,000	5 Desa	750,000,000	5 Desa	750,000,000	5 Desa	750,000,000	58%	750,000,000	Dinas Kesehatan
					RSUD				21,062,250,984		35,050,000,000		41,700,000,000		46,995,000,000		41,539,500,000		41,539,500,000	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata pencapaian SPM RSUD	50 %	52%	21,062,250,984	54%	35,050,000,000	56%	41,700,000,000	58%	46,995,000,000	60%	41,539,500,000	60%	41,539,500,000	RSUD
1	03				Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				101,310,709,958		88,450,000,000		160,650,000,000		172,150,000,000		200,850,000,000		200,850,000,000	
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan rigasi	1986 Ha	2283 Ha	8,461,946,000	2626 Ha	1,500,000,000	3000 Ha	5,300,000,000	4000 Ha	16,300,000,000	5000 Ha	11,300,000,000	5000 Ha	11,300,000,000	PUPR
						Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktru pengendalian banjir di WS kewenangan kab/ kota	29.7 %	33.7 %		36.7 %	1,500,000,000	39.7 %	18,000,000,000	42.7%	18,000,000,000	45.7 %	30,000,000,000	45.7 %	30,000,000,000	PUPR



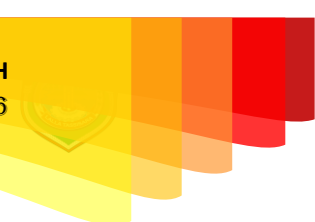
Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAN AIR UMUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan yang terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	70.0 %	70.0 %	17,746,630,817	100.0 %	17,500,000,000	100.0 %	28,500,000,000	100.0 %	27,000,000,000	100.0 %	38,200,000,000	100.0 %	38,200,000,000	PUPR
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	rasio luas penampungan sampah perkotaan terhadap total sampah perkotaan	2200	3000	1,650,000,000	3700	1,650,000,000	4400	1,650,000,000	5100	1,650,000,000	5800	1,650,000,000	5800	1,650,000,000	PUPR
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan air limbah domestik	22,11 %	100 %	33,300,000,000	100 %	32,800,000,000	100 %	33,300,000,000	100 %	27,800,000,000	100 %	28,300,000,000	100 %	28,300,000,000	PUPR
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Persentase Panjang drainase	25 %	36 %	2,430,000,000	41 %	2,200,000,000	45 %	3,000,000,000	51 %	7,000,000,000	55 %	7,000,000,000	55 %	7,000,000,000	PUPR

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPJM D	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								2021		2022		2023		2024		2025		2026			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
					PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	dalam keadaan baik di wilayah Kabupaten															
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB	2228	2562		2946	4,500,000,000	3388	3,900,000,000	2896	3,900,000,000	4480	3,900,000,000	4480	3,900,000,000	PUPR	
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	persentase bangunan milik pemerintah dan lingkungannya yang ditata	100%	100%		100%	9,000,000,000	100%		100%	9,000,000,000	100%	9,000,000,000	100%	9,000,000,000	PUPR	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten	45,25%	48%	36,022,133,141.00	51%	25,100,000,000.00	54%	56,300,000,000.00	57%	59,800,000,000.00	60%	69,800,000,000.00	60%	69,800,000,000.00	PUPR	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap RTRW dan rencana rinci Tata Ruang (RRTR Kabupaten)	100%	100%	1,700,000,000	100%	1,700,000,000	100%	1,700,000,000	100%	1,700,000,000	100%	1,700,000,000	100%	1,700,000,000	PUPR	
1	04				Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman					4,873,000,000		4,873,000,000		4,873,000,000		4,694,000,000		4,204,000,000		4,204,000,000	
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota		100%	619,000,000	100%	619,000,000	100%	619,000,000	100%	1,089,000,000	100%	599,000,000	100%	599,000,000	DISPERKIM	

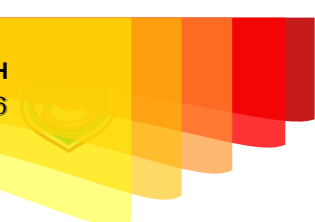
Kode						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2021		2022		2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						a															
1	04	03				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani		100 %	3,594,000,000	100 %	3,594,000,000	100 %	3,594,000,000	100%	2,945,000,000	100 %	2,945,000,000	100 %	2,945,000,000	DISPER KIM
1	04	04				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWSAN PERMUKIMAN KUMUH	Presentase rumah tidak layak huni yang tertangani		100 %	250,000,000	100 %	250,000,000	100 %	250,000,000	100%	250,000,000	100 %	250,000,000	100 %	250,000,000	DISPER KIM
1	04	05				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Presentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		61%	410,000,000	61%	410,000,000	61%	410,000,000	61%	410,000,000	61%	410,000,000	61%	410,000,000	DISPER KIM
1	05					Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				3,427,439,400		3,427,439,400		3,427,439,400		3,127,924,800		2,644,049,100		2,644,049,100	
1	05	02				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan	82 %	100 %	1,713,719,700	100 %	1,713,719,700	100 %	1,713,719,700	100%	1,563,962,400	100 %	1,322,024,550	100 %	1,322,024,550	Dinas Trantib

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1054	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				Presentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran dan non kebakaran	100%	100%	1,713,719,700	100%	1,713,719,700	100%	1,713,719,700	100%	1,563,962,400	100%	1,322,024,550	100%	1,322,024,550	Dinas Trantib	
					BPBD			31,201,571,767		31,201,571,767		31,201,571,767		8,658,859,767		7,395,779,767		7,395,779,767		
1053	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				Persentase warga negara terdampak bencana yang tertangani sesuai standar	70%	76%	29,206,556,841	95.8%	29,206,556,841	100%	29,206,556,841	100%	6,599,124,841	100%	5,573,444,841	100%	5,573,444,841	BPBD	
					Persentase Desa Tangguh Bencana		100%	1,995,014,926	100%	1,995,014,926	100%	1,995,014,926	100%	2,059,734,926	100%	1,822,334,926	100%	1,822,334,926	BPBD	
106	Urusan Pemerintah Bidang Sosial							2,028,137,233		3,629,500,000		4,085,800,000		4,128,300,000		4,522,300,000		4,522,300,000		
1062	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				Persentase jenis PSKS yang menerima layanan pemberdayaan sosial	71.42%	100%	233,835,855	100%	513,800,000	100%	738,800,000	100%	513,800,000	100%	513,800,000	100%	513,800,000	DINAS SOSIAL	
1063	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100%	100%	Rp 15,000,000	100%	Rp 21,000,000	100%	Rp 23,000,000	100%	Rp 23,000,000	100%	Rp 23,000,000	100%	Rp 23,000,000	DINAS SOSIAL	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang menerima Layanan Rehabilitasi Sosial	45%	45%	200,000,000	65%	200,000,000	85%	440,000,000	90%	605,000,000	100%	735,000,000	100%	735,000,000	DINAS SOSIAL
						Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	46.61%	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	324,300,000	100%	329,300,000	100%	384,300,000	100%	384,300,000	DINAS SOSIAL
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh layanan perlindungan dan Jaminan sosial	100%	100%	650,000,000	100%	900,400,000	100%	900,400,000	100%	900,400,000	100%	944,400,000	100%	944,400,000	DINAS SOSIAL
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	100%	667,574,800	100%	1,682,300,000	100%	1,547,300,000	100%	1,644,800,000	100%	1,809,800,000	100%	1,809,800,000	DINAS SOSIAL



Kode						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2021		2022		2023		2024		2025		2026		
									Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Target	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	
							daerah kabupaten/kota														
1	06	07				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	100 %	100 %	61,726,578	100 %	112,000,000	100 %	112,000,000	100%	112,000,000	100 %	112,000,000	DINAS SOSIAL		



7.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikat or Kinerja Progra m	Kondis i Kinerj a pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangka t Daerah Penanggu ngjawab						
								2021		2022		2023		2024		2025			2026					
								Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.		Targ et	Rp.				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
2					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2					07				310,499,960		404,000,000		510,000,000		588,000,000		666,000,000		666,000,000					
2					07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persenta se Rencana Tenaga Kerja		100%	30,499,960	100%	74,000,000	100 %	110,000,000	100 %	138,000,000	100 %	166,000,000	100 %	166,000,000	DISTRA NSNAKE R
2					07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persenta se tenaga kerja bersertif ikat kompete nsi	10%	15%	120,000,000	20%	130,000,000	25%	150,000,000	30%	170,000,000	40%	190,000,000	40%	190,000,000	DISTRA NSNAKE R
2					07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persenta se Pencari kerja yang ditempa tkan	23%	30%	100,000,000	35%	120,000,000	40%	130,000,000	45%	140,000,000	60%	150,000,000	60%	150,000,000	DISTRA NSNAKE R
2					07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persenta se jumlah perusah aan yang berselisi h	100%	100%	60,000,000	100%	80,000,000	100 %	120,000,000	100 %	140,000,000	100 %	160,000,000	100 %	160,000,000	DISTRA NSNAKE R
2					08				Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak				397,999,302		1,302,000,000		974,506,800		1,089,625,600		1,125,506,867		1,403,506,867	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikat or Kinerja Progra m	Kondis i Kinerj a pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangka t Daerah Penanggu ngjawab
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		
								Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persenta se anggara n Renspo nsif gender terhadap APBD	0.1%	1%	83,000,000	1%	160,000,000	1%	65,000,000	1%	50,000,000	1%	65,000,000	1%	393,000,000	PPKBP3A
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	100%	100%	195,000,000	100%	210,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	PPKBP3A
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupa n Penyele saiaan Pengadu an Perlindu ngan Peremp uan dan anak dari Tindak Kekeras an	100%			100%	242,000,000	100%	137,000,000	100%	142,000,000	100%	200,000,000	100%	155,000,000	DP2KBP3A
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persenta se keterpen uhan data gender dan	100%	100%		100%		100%	113,753,400	100%	103,812,800	100%	87,753,433	100%	87,753,433	DP2KBP3A

401

Kode						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikat or Kinerja Progra m	Kondis i Kinerj a pada Awal RPJM D	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangka t Daerah Penanggu ngjawab
									2021		2022		2023		2024		2025		2026		
									Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	
2	0	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persenta se peningk atan diversifi kasi dan ketahan an pangan masyara kat	100%	100%	1,378,000,0 00	100%	1,785,000,0 00	100 %	1,892,000,0 00	100 %	2,000,000,0 00	100 %	2,055,000,0 00	100 %	2,055,000,0 00.00	Ketahana n Pangan
2	0	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Ppersent ase penanga nan kerawan an pangan	100%	100%	85,000,000	100%	725,000,00 0	100 %	725,000,00 0	100 %	725,000,00 0	100 %	725,000,00 0	100 %	725,000,00 0.00	Ketahana n Pangan
2	0	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persenta se pengaw asan keaman an pangan	100%	100%	85,000,000	100%	725,000,00 0	100 %	725,000,00 0	100 %	725,000,00 0	100 %	725,000,00 0	100 %	725,000,00 0.00	Ketahana n Pangan
2	1	0				Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan				0		0		455,013,60 0		415,251,20 0		351,013,73 3		351,013,73 3	
2	1	0	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persenta se sengketa tanah garapan yang terselesa ikan							-		-		-	0	-	DISPER KIM
2	1	0	5			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KRUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persenta se Penyele saian ganti rugi dan santuna n							227,506,80 0		207,625,60 0		175,506,86 7	0	175,506,86 7	DISPER KIM

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikat or Kinerja Progra m	Kondis i Kinerj a pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangka t Daerah Penanggu ngjawab		
								2021		2022		2023		2024		2025			2026	
								Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.		Targ et	Rp.
2	1	0	6		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE						227,506,800		207,625,600		175,506,867	0	175,506,867	DISPER KIM		
2	1	1			Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				2,087,580,850		2,480,000,000		3,070,000,000		2,580,000,000		3,280,000,000	3,280,000,000		
2	1	1	2		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	-	20%	407,458,196	0%	-	20%	500,000,000	40%	60,000,000	60%	660,000,000	60%	660,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	1	3		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan wilayah pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	0	0%		100%	525,000,000	100%	525,000,000	100%	525,000,000	100%	525,000,000	100%	525,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	1	4		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	persentase keanekaragaman hayati yang dikelola	0	0%		63%		64%	40,000,000	65%	40,000,000	66%	40,000,000	66%	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikat or Kinerja Progra m	Kondis i Kinerj a pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangka t Daerah Penanggu ngjawab
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		
								Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	
2	1	1	0	5		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persenta se Jumlah Pelaku Usaha Penghas il Limbah B3 yang dikoordi nasikan Pengend alian Limbah nya	0	0%	0	100%	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	1	1	0	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persenta se ketaatan penanggu ng jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatan nya terhadap izin lingkun gan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitk an oleh Pemerin tah Daerah kabupat en/kota	67%	70%	130,512,638	75%	150,000,000	80%	200,000,000	85%	150,000,000	90%	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
								2021		2022		2023		2024		2025			2026	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
			08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	0	0	-	100 Orang	50,000,000	100 Orang	50,000,000	100 Orang	50,000,000	100 Orang	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	09				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah jenis pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	0	0	0	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	100 %	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	10				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerin	100%	0	0	100%	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikat or Kinerja Progra m	Kondis i Kinerj a pada Awal RPJM D	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangka t Daerah Penanggu ngjawab
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		
								Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	
						tah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang tertangani														
2	1	1	1		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang dikelola	71%	72%	1,549,610,016	73%	1,600,000,000	74%	1,600,000,000	75%	1,600,000,000	76%	1,650,000,000	76%	1,650,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	2			Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				800,000,000		800,000,000		800,000,000		800,000,000		800,000,000		800,000,000	
		1	0		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk Ber KTP Elektronik	92%	93%	200,000,000	94%	200,000,000	95%	200,000,000	97%	200,000,000	98%	200,000,000	98%	200,000,000	Dinas Kependudukan dan Capil
		1	0		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran	0.61	70%	200,000,000	75%	200,000,000	80%	200,000,000	85%	200,000,000	90%	200,000,000	90%	200,000,000	Dinas Kependudukan dan Capil
2		1	0		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan oleh	0.14	0.55	200,000,000	0.65	200,000,000	0.75	200,000,000	0.85	200,000,000	0.95	200,000,000	95%	200,000,000	Dinas Kependudukan dan Capil

407

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	persentase pengentasan desa tertinggal	100%	100%	248,400,000	100%	710,000,000	100%	690,000,000	100%	520,000,000	100%	470,000,000	100%	470,000,000	Dinas PMD
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	100%	100%	320,000,000	100%	720,000,000	100%	720,000,000	100%	720,000,000	100%	720,000,000	100%	720,000,000	Dinas PMD
2	14				Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				5,129,212,583		5,129,212,583		5,427,123,321		5,427,839,363		5,747,331,155		5,747,331,155	
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	35%	35%	520,596,011	40%	520,596,011	50%	497,096,011	65%	497,096,011	80%	497,096,011	80%	497,096,011	DP2KBP 3A
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	19%	22%	3,567,165,402	25%	3,567,165,402	35%	3,567,165,402	45%	3,602,531,579	55%	3,812,291,820	55%	3,812,291,820	DP2KBP 3A
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Ratio akseptor KB	77.11 %	77.11 %	1,041,451,170	77.50 %	1,041,451,170	78.15 %	1,362,861,908	78.50 %	1,328,211,773	78.80 %	1,437,943,324	78.80 %	1,437,943,324	DP2KBP 3A
2	15				Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan				1,062,063,766		1,300,758,000		3,085,758,000		3,510,758,000		3,965,758,000		3,965,758,000	

Kode						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikat or Kinerja Progra m	Kondis i Kinerj a pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangka t Daerah Penanggu ngjawab			
									2021		2022		2023		2024		2025			2026		
									Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.		Targ et	Rp.	
2	15	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja lalu lintas kabupaten kota	4		24	599,877,433	22	980,758,000	20	2,395,758,000	18	2,610,758,000	16	3,845,758,000	16	3,845,758,000	Dinas Perhubungan
2	15	03				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio angkutan sungai, danau, dan penyeberangan	15%		17	462,186,333	2000%	320,000,000	22	690,000,000	24	900,000,000	-	120,000,000	-	120,000,000	Dinas Perhubungan
2	16					Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika					311,438,400		311,438,400		652,698,600		622,876,800		526,520,600		526,520,600	
2	16	02				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi			70%	311,438,400	70%	311,438,400	70%	311,438,400	70%	311,438,400	100%	263,260,300	100%	263,260,300	Dinas Persandi an Kominfo
2	16	03				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase fasilitasi aplikasi perangkat daerah yang dikelola			0%		0%		50%	341,260,200	70%	311,438,400	100%	263,260,300	100%	263,260,300	Dinas Persandi an Kominfo
2	17					Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah					808,658,610		1,558,500,000		1,402,662,520		1,421,000,000		1,801,162,520		1,801,162,520	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikat or Kinerja Progra m	Kondis i Kinerj a pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangka t Daerah Penanggu ngjawab
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		
								Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persenta se pemerik saan dan pengaw asan yang dilakuka n untuk koperasi dengan wilayah keanggo taan dalam daerah kabupat en	36,36 %	0%	-	100%	110,000,000	100 %	115,000,000	100 %	115,000,000	100 %	115,000,000	Dinas PM, KUKM		
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persenta se KSP/US P yang patuh terhadap peratura n perunda ng- undanga n	-	0%		125,000,000	100 %	125,000,000	100 %	75,000,000	100 %	125,000,000	100 %	125,000,000	Dinas PM, KUKM	
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persenta se pelaksa naan pelatiha n		0%	-	100%	180,000,000	100 %	0	100 %	200,000,000	100 %	200,000,000	100 %	200,000,000	Dinas PM, KUKM

411

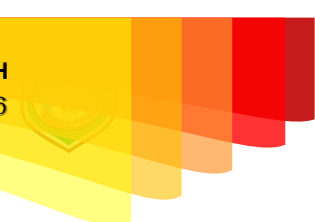
Kode						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikat or Kinerja Progra m	Kondis i Kinerj a pada Awal RPJM D	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangka t Daerah Penanggu ngjawab
									2021		2022		2023		2024		2025		2026		
									Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	
						pengem bangan usaha															
2	18					Urusan Pemerinahan Bidang Penanaman Modal			698,431,642		1,125,409,942		1,075,982,972		1,005,527,709		875,927,669		875,927,669		
2	18	02				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persenta se peningk atan investas i di kabupat en	0%	100%	53,582,568	100%	300,000,000	100%	250,000,000	100%	80,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	Dinas PM, KUKM
2	18	03				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	persenta se pelaksa naan promosi penana man modal	0%	100%	171,292,703	100%	285,000,000	100%	285,000,000	100%	385,000,000	100%	285,000,000	100%	285,000,000	Dinas PM, KUKM
2	18	04				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata-rata lama waktu penyele saian layanan perizina n dan non perizina n	5 Hari	5 Hari	150,983,371	5 Hari	217,836,942	4 Hari	218,409,972	4 Hari	217,954,709	4 Hari	238,354,669	4 Hari	238,354,669	Dinas PM, KUKM
2	18	05				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persenta se pengend alian pelaksa naan penana man modal	85%	100%	322,573,000	100%	322,573,000	100%	322,573,000	100%	322,573,000	100%	322,573,000	100%	322,573,000	Dinas PM, KUKM

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikat or Kinerja Progra m	Kondis i Kinerj a pada Awal RPJM D	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangka t Daerah Penanggu ngjawab
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		
								Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	
2	1	9			Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga				0		35,512,000,000		305,545,000,000		306,140,000,000		307,105,000,000		307,105,000,000	
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persenta se Pemuda yang Mendap atkan Pelatiha n Kader Pengem bangan Kepemi mpinan, Kepedul ian, Kesukar elaan dan Kepelop oran Pemuda			70%	3,870,000,000	75%	3,295,000,000	80%	3,800,000,000	85%	4,455,000,000	85%	4,455,000,000	Dinas Pariwisata a, Pemuda dan Olahraga	
2	1	9	0	2																
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persenta se peningk atan prestasi olahraga			46%	31,192,000,000	46%	301,800,000,000	46%	301,890,000,000	46%	302,200,000,000	46%	302,200,000,000	Dinas Pariwisata a, Pemuda dan Olahraga	
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persenta se Pengem bangan Kepera mukaa n	0		40%	450,000,000	50%	450,000,000	55%	450,000,000	60%	450,000,000	60%	450,000,000	Dinas Pariwisata a, Pemuda dan Olahraga	
2	2	0			Urusan Pemerintahan Bidang Statistik				0		0		341,260,200		311,438,400		263,260,300		263,260,300	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							341,260,200		311,438,400		263,260,300	0%	263,260,300		
2	2	1			Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				0		0		341,260,200		311,438,400		263,260,300		263,260,300	

Kode						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikat or Kinerja Progra m	Kondis i Kinerj a pada Awal RPJM D	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangka t Daerah Penanggu ngjawab
									2021		2022		2023		2024		2025		2026		
									Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	
2	2	1	0	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							341,260,200		311,438,400		263,260,300	0%	263,260,300	Dinas persandia n Kominfo	
2	2	2				Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			0		0		1,675,000,000		2,605,000,000		2,865,000,000		2,865,000,000		
2	2	2	0	2		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupa n Kebuda yaan yang Dikelola	6%	0.00%		10.00 %		30.0 0%	360,000,000	12.0 0%	1,260,000,000	70.0 0%	360,000,000	70.0 0%	360,000,000	Dinas Pendidika n
2	2	2	0	3		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupa n Kesenia n Tradisio nal yang Dikemb angsan	21%	0%		30%		40%	900,000,000	45%	920,000,000	50%	940,000,000	50%	940,000,000	Dinas Pendidika n
2	2	2	0	4		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupa n Sejarah Lokal yang Dibina	17%	0%		33%		50%	105,000,000	50%	105,000,000	83%	105,000,000	83%	105,000,000	Dinas Pendidika n
2	2	2	0	5		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupa n Cagar Budaya yang Dikelola	25%			25%		50%	310,000,000	75%	320,000,000	80%	310,000,000	80%	310,000,000	Dinas Pendidika n
2	2	2	0	6		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persenta se penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar	0%	0%		0%		0%	0		-	100 %	1,150,000,000	100 %	1,150,000,000	Dinas Pendidika n

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikat or Kinerja Progra m	Kondis i Kinerj a pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	
								2021		2022		2023		2024		2025		2026			
								Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.		
2	2	3			Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan				0		710,000,00 0		805,000,00 0		810,000,00 0		760,000,00 0		760,000,00 0		
2	2	3	0	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persenta se perpusta kaan sesuai Standar Nasiona l Perpusta kaan	0%		20	660,000,00 0	20	745,000,00 0	20	765,000,00 0	20	690,000,00 0	20	690,000,00 0		DISPERP US& ARSIP	
2	2	3	0	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persenta se koleksi nasional Naskah Kuno yang dilestari kan	0	0	-	5 Naska h	50,000,000	6 Nask ah	60,000,000	8 Nask ah	45,000,000	9 Nask ah	70,000,000	9 Nask ah	70,000,000		DISPERP US& ARSIP
2	2	4			Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan				0		340,000,00 0		250,000,00 0		200,000,00 0		2,000,000,0 00		2,000,000,0 00		
2	2	4	0	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persenta se Arsip Dinamis dan Statis yang diarsipk an di Kearsip an	0	0	-	14.71	150,000,00 0	17.6 5	180,000,00 0	20.5 9	80,000,000	23.5 3	1,580,000,0 00	23.5 3	1,580,000,0 00		DISPERP US& ARSIP
2	2	4	0	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persenta se perlindu ngan dan penyelam atan arsip akibat bencana yang sesuai	0		0	95,000,000	5 Arsi p	70,000,000	5 Arsi p	70,000,000	50 Arsi p	420,000,00 0	50 Arsi p	420,000,00 0		DISPERP US& ARSIP	

Kode						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikat or Kinerja Progra m	Kondis i Kinerj a pada Awal RPJM D	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangka t Daerah Penanggu ngjawab
									2021		2022		2023		2024		2025		2026		
									Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	
							NSPK														
2	4	2	0	4			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persenta se penerbit an izin penggun aan arsip yang bersifat tertutup yang disimpa n di lembaga kearsipa n daerah kabupat en yang sesuai NSPK	0		2 Izin	95,000,000	-	-	2 Izin	50,000,000	-	-	-	-	DISPERP US& ARSIP



7.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja a Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
								2021		2022		2023		2024		2025			2026	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	25				Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan				6,255,746,698		7,800,000,000		14,597,500,000		15,985,000,000		18,367,500,000		18,367,500,000	
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan tangkap	77%	100%	2,944,619,997	100%	1,220,000,000	100%	3,920,000,000	100%	4,280,000,000	100%	4,635,000,000	100%	4,635,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	441,34%	100%	2,811,126,701	100%	4,820,000,000	100%	8,042,500,000	100%	8,715,000,000	100%	9,937,500,000	100%	9,937,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase penguatan sumber daya kelautan dan perikanan	-	100%	-	100%	30,000,000	100%	150,000,000	100%	200,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	2	0			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan	37%	100%	500,000,000	100%	1,730,000,000	100%	2,485,000,000	100%	2,790,000,000	100%	3,545,000,000	100%	3,545,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	2	6			Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata				7,070,000,000		9,580,000,000		11,730,000,000		12,900,000,000		15,320,000,000		15,320,000,000	
3	2	0			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik destinasi Pariwisata	0.33	14,66%	3,065,000,000	65%	6,200,000,000	70%	8,320,000,000	80%	9,480,000,000	100%	11,800,000,000	100%	11,800,000,000	Dinas Pariwisata a Pemuda dan Olahraga
3	2	0			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Pariwisata	0.6	60%	3,065,000,000	60%	1,280,000,000	60%	1,310,000,000	60%	1,320,000,000	60%	1,420,000,000	60%	1,420,000,000	Dinas Pariwisata a Pemuda dan Olahraga
3	2	0			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	0.4	40%	340,000,000	50%	1,050,000,000	55%	1,050,000,000	60%	1,050,000,000	80%	1,050,000,000	80%	1,050,000,000	Dinas Pariwisata a Pemuda dan Olahraga

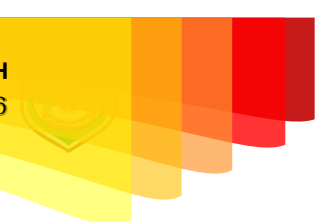
Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	0	40%	600,000,000	60%	1,050,000,000	80%	1,050,000,000	90%	1,050,000,000	100%	1,050,000,000	100%	1,050,000,000	Dinas Pariwisata Daerah Pemuda dan Olahraga
3	27				Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				3,640,000,000		6,735,000,000		8,120,000,000		8,220,000,000		8,070,000,000		8,070,000,000	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi komoditas pertanian	2,60%	2,67%	2,850,000,000	2,72%	3,285,000,000	2,76%	3,285,000,000	2,79%	3,285,000,000	2,46%	3,285,000,000	2,46%	3,285,000,000	Dinas Pertanian
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	presentase keterseediaan prasarana pertanian	30%	31%	200,000,000	32%	1,560,000,000	35%	1,860,000,000	36%	2,210,000,000	40%	1,860,000,000	40%	1,860,000,000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	persentase meningkatnya populasi ternak	100%	100%	100,000,000	2%	595,000,000	2,20%	830,000,000	2,30%	830,000,000	2,40%	830,000,000	2,40%	830,000,000	

420

Kode						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2021		2022		2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	3	0	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah perusahaan yang memiliki rekomendasi perizinan	0	0	-	1	40,000,000	1	65,000,000	1	65,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	Dinas Perdagangan dan industri
3	3	0	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Sarana dan Prasarana perdagangan yang tersedia	1723	1723	815,000,000	1747	3,936,000,000	1771	3,936,000,000	1795	3,946,500,000	1819	3,967,500,000	1819	3,967,500,000	Dinas Perdagangan dan industri
3	3	0	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan keterseediaan barang kebutuhan pokok sepanjang tahun	51.21	51.21	219,000,000	54.20	409,500,000	59.20	411,500,000	64.30	413,500,000	69.20	415,500,000	69.20	415,500,000	Dinas Perdagangan dan industri
3	3	0	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor bersih	1268	0.00	-	1,50	263,000,000	1,70	288,000,000	1,85	328,000,000	1,90	473,000,000	1,90	473,000,000	Dinas Perdagangan dan industri
3	3	0	6			PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTP yang telah bertanda terasah	0.99	99%	21,000,000	100%	160,000,000	100%	160,000,000	100%	185,000,000	100%	185,000,000	100%	185,000,000	Dinas Perdagangan dan industri

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	307				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk dalam negeri yang dipasarkan dan digunakan	0	20%	67,205,000	30%	115,000,000	45%	122,000,000	55%	130,000,000	65%	222,000,000	65%	222,000,000	Dinas Perdagangan dan industri
3	31				Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian				1,188,000,000		2,144,500,000		1,659,500,000		1,874,500,000		1,989,500,000		1,989,500,000	
3	312				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri	-19.48717949	-8.63	1,080,000,000	5.90	1,894,500,000	18.72	1,369,500,000	31.54	1,544,500,000	44.36	1,619,500,000	44.36	1,619,500,000	Dinas Perdagangan dan industri
3	314				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase peningkatan pengelolaan sistem informasi industri nasional	0	4.777070064	108,000,000	11.14649682	250,000,000	17.51592357	290,000,000	23.88535032	330,000,000	30.25477707	370,000,000	30.25	370,000,000	Dinas Perdagangan dan industri
3	32				Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi				581,287,480		1,260,500,000		1,452,500,000		1,615,500,000		1,754,500,000		1,754,500,000	
3	322				PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Perencanaan Pertahanan dan Kawasan Transmigrasi yang Terealisasi	100%	100%	216,618,480	100%	418,500,000	100%	468,500,000	100%	518,500,000	100%	538,500,000	100%	538,500,000	DISTRASNAKER

Kode						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja a Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2021		2022		2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
							menjadi Kegiatan Teknis														
3.	32	03				PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Perencanaan Pertanahan dan Kawasan Transmigrasi yang Terealisasi menjadi Kegiatan Teknis (Persen)	100%	100%	230,669,000	100%	682,000,000	100%	779,000,000	100%	867,000,000	100%	946,000,000	100%	946,000,000	DISTRASNAKER
3	32	04				PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Produktivitas Pertanian pada kawasan Transmigrasi	-	46%	134,000,000	66%	160,000,000	74%	205,000,000	82%	230,000,000	88%	270,000,000	88%	270,000,000	DISTRASNAKER



7.2.4 Urusan Pemerintahan Unsur Pemerintahan Umum, Pendukung, Penunjang Urusan, Pengawas Urusan, dan Kewilayahan Pemerintahan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
							2021		2022		2023		2024		2025		2026						
							Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
4								UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4				01				Sekretariat Daerah				12,865,690,250		10,262,600,000		13,506,985,202		15,491,373,722		15,362,353,095		13,220,245,500	
4				01	01			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase capaian program Adminstrasi Umum	0%	100%	10,115,690,250	100%	8,112,600,000	100%	11,336,985,202	100%	13,311,373,722	100%	12,742,353,095		4,406,748,500	Setda
4				01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase capaian program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	100%	1,375,000,000	100%	1,075,000,000	100%	1,085,000,000	100%	1,090,000,000	100%	1,310,000,000		4,406,748,500	Setda
4				01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase capaian program Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	1,375,000,000	100%	1,075,000,000	100%	1,085,000,000	100%	1,090,000,000	100%	1,310,000,000		4,406,748,500	Setda
4				02				Sekretariat DPRD				10,115,690,250		8,112,600,000		11,336,985,202		13,311,373,722		12,742,353,095		12,742,353,095	
4				02	02			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	0%	100%	10,115,690,250	100%	8,112,600,000	100%	11,336,985,202	100%	13,311,373,722	100%	12,742,353,095	100%	12,742,353,095	Set DPRD
5								UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kon di si Kine rja pada Awa l RPJ MD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		
								Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	
5	0	1			Perencanaan				3,753,000,000		3,571,800,000		4,100,600,000		4,154,400,000		4,693,200,000		4,693,200,000	
5	0	1	0	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaia n penjabara n dokumen perencanaan dan pengangg aran	100 %	100 %	1,375,000,000	100 %	1,075,000,000	100 %	1,085,000,000	100 %	1,090,000,000	100 %	1,310,000,000	100.0 0%	1,310,000,000	BAPPEDA
5	0	1	0	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencana an Yang sesuai dengan pengangg aran	100 %	100 %	2,378,000,000	100 %	2,496,800,000	100 %	3,015,600,000	100 %	3,064,400,000	100 %	3,383,200,000	100 %	3,383,200,000	BAPPEDA
5	0	2			Keuangan				21,065,261,03 8		30,769,000,00 1		27,869,000,00 1		28,319,000,00 1		29,029,000,00 1		29,029,000,00 1	
5	0	2	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	100 %	8,865,380,882	100 %	12,489,000,00 1	100 %	12,989,000,00 1	100 %	13,189,000,00 1	100 %	13,489,000,00 1	100 %	13,489,000,00 1	badan Keuangan
5	0	2	0	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio PAD	100 %	100 %	10,738,116,36 4	100 %	15,710,000,00 0	100 %	12,410,000,00 0	100 %	12,660,000,00 0	100 %	13,010,000,00 0	100 %	13,010,000,00 0	badan Keuangan
5	0	2	0	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase nilai pemanfaat an aset daerah terhadap	100 %	100 %	537,122,770	100 %	1,100,000,000	100 %	1,100,000,000	100 %	1,100,000,000	100 %	1,160,000,000	100 %	1,160,000,000	badan Keuangan

426

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kon di si Kine rja pada Awa l RPJ MD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		
								Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Targ et	Rp.	
					MANUSIA	bersertifik at kompeten si (tidak termasuk guru dan Nakes) (%)														
5	05				Penelitian dan Pengembangan			2,835,000,000	828,101,200	828,101,200		828,101,200		828,101,200		828,101,200				
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan Inovasi, Peneltian dan Pengemba ngan Pembangu nan Daerah yang Dilaksana kan	0%	20 %	2,835,000,000	100 %	2,820,000,000	100 %	2,855,000,000	100 %	2,890,000,000	100 %	2,915,000,000	100 %	2,915,000,000	BAPPEDA
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
6	01				Inspektorat Daerah			2,102,837,700	4,515,892,790	4,741,687,430		4,978,771,801		5,222,638,891		5,222,638,891				
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN	Persentase Penyelengaraan Pengawas an Internal dan Pengawas an Tujuan Tertentu yang Ditangani	100 %	100 %	1,836,550,800	100 %	3,862,020,000	100 %	4,055,121,000	100 %	4,257,877,050	100 %	4,465,699,403	100 %	4,465,699,403	INSPEKT ORAT

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kon di si Kine rja pada Awa l RPJ MD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggun gjawab		
								2021		2022		2023		2024		2025			2026	
								Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		Targ et	Rp.
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Kebijakan yang dirumuskan pelaksanaannya, pendampingan dan asistensi	100 %	100 %	266,286,900	100 %	653,872,790	100 %	686,566,430	100 %	720,894,751	100 %	756,939,489	100 %	756,939,489	INSPEKTORAT
7					UNSUR KEWIYALAHAN															
7	01				KECAMATAN				707,040,000		7,475,250,000		7,500,250,000		7,500,250,000		7,500,250,000		7,500,250,000	
7	01				Kecamatan Pangale				141,408,000		1,495,050,000		1,500,050,000		1,500,050,000		1,500,050,000		1,500,050,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan	Baik	Bai k	55,274,000	Bai k	345,000,000	Bai k	355,000,000	Bai k	355,000,000	Bai k	355,000,000	Baik	355,000,000	Kecamatan
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan pemberda yaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordin asikan	90%	95 %	55,274,000	95 %	267,050,000	95 %	267,050,000	100 %	267,050,000	100 %	267,050,000	100 %	267,050,000	Kecamatan
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentram an dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	0%	0%	-	100 %	240,000,000	100 %	240,000,000	100 %	240,000,000	100 %	240,000,000	100 %	240,000,000	Kecamatan

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		
								Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk			15,430,000		255,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000	0%	250,000,000	Kecamatan
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundang an yang berlaku	90%	95 %	15,430,000	95 %	388,000,000	95 %	388,000,000	100 %	388,000,000	100 %	388,000,000	100 %	388,000,000	Kecamatan
7	01				Kecamatan Budpng-Budong			141,408,000		1,495,050,000		1,500,050,000		1,500,050,000		1,500,050,000		1500050000		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan	Baik	Bai k	55,274,000	Bai k	345,000,000	Bai k	355,000,000	Bai k	355,000,000	Bai k	355,000,000	Baik	355,000,000	Kecamatan
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan pemberda yaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordin asikan	90%	95 %	55,274,000	95 %	267,050,000	95 %	267,050,000	100 %	267,050,000	100 %	267,050,000	100 %	267,050,000	Kecamatan
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Persentase kasus ketentram an dan	0%	0%	-	100 %	240,000,000	100 %	240,000,000	100 %	240,000,000	100 %	240,000,000	100 %	240,000,000	Kecamatan

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kon di si Kine rja pada Awa l RPJ MD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		
								Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Targ et	Rp.	
					KETERTIBAN UMUM	ketertiban yang berhasil diselesaikan														
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk			15,430,000		255,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000	0%	250,000,000	Kecamatan
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundang an yang berlaku	90%	95 %	15,430,000	95 %	388,000,000	95 %	388,000,000	100 %	388,000,000	100 %	388,000,000	100 %	388,000,000	Kecamatan
7	01				Kecamatan Tobadak			141,408,000		1,495,050,000.00		1,500,050,000.00		1,500,050,000.00		1,500,050,000.00		1,500,050,000.00		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan	Baik	Bai k	55,274,000	Bai k	345,000,000	Bai k	355,000,000	Bai k	355,000,000	Bai k	355,000,000	Baik	355,000,000	Kecamatan
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan pemberda yaan masyarakat desa dan Kelurahan yang	90%	95 %	55,274,000	95 %	267,050,000	95 %	267,050,000	100 %	267,050,000	100 %	267,050,000	100 %	267,050,000	Kecamatan

Kode						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kon di Kine rja pada Awa l RPJ MD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
									2021		2022		2023		2024		2025		2026		
									Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Targ et	Rp.	
							dikoordin asikan														
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN yang berhasil diselesaik an	Persentase kasus ketentram an dan ketertiban yang berhasil diselesaik an	0%	0%	-	100 %	240,000,000	100 %	240,000,000	100 %	240,000,000	100 %	240,000,000	Kecamatan		
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk			15,430,000		255,000,000		250,000,000		250,000,000	0%	250,000,000	Kecamatan		
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyeleng garaan pemerinta han desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundang an yang berlaku	90%	95 %	15,430,000	95 %	388,000,000	95 %	388,000,000	100 %	388,000,000	100 %	388,000,000	Kecamatan		
7	01					Kecamatan Topoyo				141,408,000		1,495,050,000		1,500,050,000		1,500,050,000		1500050000			
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan	Baik	Bai k	55,274,000	Bai k	345,000,000	Bai k	355,000,000	Bai k	355,000,000	Baik	355,000,000	Kecamatan		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kon di si Kine rja pada Awa l RPJ MD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		
								Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan pemberda yaan masyarakat t desa dan Kelurahan yang dikoordin asikan	90%	95 %	55,274,000	95 %	267,050,000	95 %	267,050,000	100 %	267,050,000	100 %	267,050,000	100 %	267,050,000	Kecamatan
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentram an dan ketertiban yang berhasil diselesaik an	0%	0%	-	100 %	240,000,000	100 %	240,000,000	100 %	240,000,000	100 %	240,000,000	100 %	240,000,000	Kecamatan
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk			15,430,000		255,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000	0%	250,000,000	Kecamatan
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyeleng garaan pemerinta han desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundang an yang berlaku	90%	95 %	15,430,000	95 %	388,000,000	95 %	388,000,000	100 %	388,000,000	100 %	388,000,000	100 %	388,000,000	Kecamatan
7	01				Kecamatan Karossa				141,408,000		1,495,050,000		1,500,050,000		1,500,050,000		1,500,050,000		1500050000	

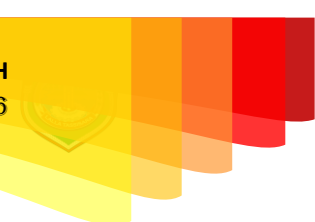
Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kon di si Kine rja pada Awa l RPJ MD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		
								Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Targ et	Rp.	
7	0	1	0	2	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan	Baik	Bai k	55,274,000	Bai k	345,000,000	Bai k	355,000,000	Bai k	355,000,000	Bai k	355,000,000	Baik	355,000,000	Kecamatan
7	0	1	0	3	PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan pemberda yaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordin asikan	90%	95 %	55,274,000	95 %	267,050,000	95 %	267,050,000	100 %	267,050,000	100 %	267,050,000	100 %	267,050,000	Kecamatan
7	0	1	0	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentram an dan ketertiban yang berhasil diselesaik an	0%	0%	-	100 %	240,000,000	100 %	240,000,000	100 %	240,000,000	100 %	240,000,000	100 %	240,000,000	Kecamatan
7	0	1	0	5	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk			15,430,000		255,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000	0%	250,000,000	Kecamatan
7	0	1	0	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyeleng garaan pemerinta han desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan	90%	95 %	15,430,000	95 %	388,000,000	95 %	388,000,000	100 %	388,000,000	100 %	388,000,000	100 %	388,000,000	Kecamatan

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kon di si Kine rja pada Awa l RPJ MD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		
								Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Targ et	Rp.	
						perundang an yang berlaku														
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8	01				Kesatuan Bangsa dan Politik			-		1,068,550,000		1,151,050,000		1,087,550,000		1,099,550,000		1,099,550,000		
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	0%	0%	100 %	250,000,000	100 %	257,000,000	100 %	264,000,000	100 %	271,000,000	100 %	271,000,000	Kesbangpol	
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	0%	0%	100 %	308,550,000	100 %	383,550,000	100 %	308,550,000	100 %	308,550,000	100 %	308,550,000	Kesbangpol	
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang pemberdayaan dan pengawasan	0%	0%	83 %	90,000,000	83 %	90,000,000	83 %	90,000,000	83 %	90,000,000	83%	90,000,000	Kesbangpol	

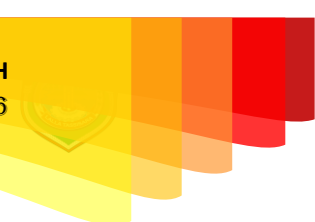
Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kon di Kine rja pada Awa l RPJ MD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		
								Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	
						an														
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase kelompok yang dibina ketahanan ekonomi, sosial, dan budayanya.	0%	0%	75 %	145,000,000	80 %	145,500,000	83 %	150,000,000	85 %	155,000,000	85%	155,000,000	Kesbangpol	
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan capaian penanganan konflik	0%	0%	100 %	275,000,000	100 %	275,000,000	100 %	275,000,000	100 %	275,000,000	100 %	275,000,000	Kesbangpol	

7.2.5 Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikat or Kinerj a Progra m	Kondi si Kiner ja pada Awal RPJ MD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab		
								2021		2022		2023		2024		2025			2026	
								Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.		Targ et	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH															
					1. Dinas Pendidikan															
x	x	01	2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	87,931,307,339	100%	87,928,307,339	100%	87,941,307,339	100%	87,946,307,339	100%	87,946,307,339	100%	87,946,307,339	
					2. Dinas Kesehatan															
x	x	01	2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	
					3. RSUD															
x	x	01	2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	
					4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															



Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
x	xx	01	2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000			
					5. Dinas Perumahan dan Permukiman															
x	xx	01	2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000			
					6. Dinas Ketenteraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat															
x	xx	01	2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000			
					7. BPBD															
x	xx	01	2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000			
					8. DINAS SOSIAL															



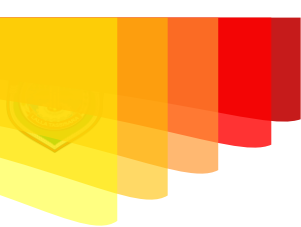
Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
x	x	01	2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000			
					9. Dinas Transmigrasi															
x	x	01	2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000			
					10. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak															
x	x	01	2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000			
					11. Dinas Ketahanan Pangan															
x	x	01	2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000			
					12. Dinas Lingkungan Hidup															



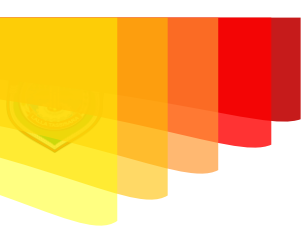
Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
x	xx	01	2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000			
					13. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil															
x	xx	01	2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000			
					14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
x	xx	01	2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000			
					15. Dinas Perhubungan															
x	xx	01	2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000			
					16. Dinas Persandian Komunikasi dan Informatika															



Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikat or Kinerj a Progra m	Kondi si Kiner ja pada Awal RPJ MD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		
								Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	
x	x	0	2.0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH	Persentase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar	100%	100 %	800,000,000	100 %	800,000,000	100 %	800,000,000	100 %	800,000,000	100 %	800,000,000			
					17. Dinas Penanaman Modal, PTSP Koperasi dan UKM															
x	x	0	2.0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH	Persentase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar	100%	100 %	800,000,000	100 %	800,000,000	100 %	800,000,000	100 %	800,000,000	100 %	800,000,000			
					18. Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga															
x	x	0	2.0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH	Persentase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar	100%	100 %	800,000,000	100 %	800,000,000	100 %	800,000,000	100 %	800,000,000	100 %	2,645,107,854			
					19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan															
x	x	0	2.0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH	Persentase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar	100%	100 %	800,000,000	100 %	800,000,000	100 %	800,000,000	100 %	800,000,000	100 %	800,000,000			
					20. Dinas Pertanian															



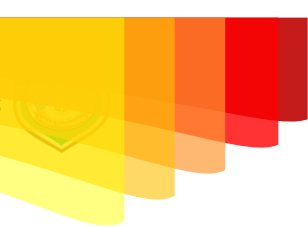
Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikat or Kinerj a pada Progra m	Kondi si Kiner ja pada Awal RPJ MD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		
								Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	
x	x	0	2.0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH	Persentase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar	85%	100 %	5,604,500,000	100 %	6,765,000,360	100 %	8,158,849,884	100 %	6,878,849,884	100 %	7,428,849,884	100 %	7,428,849,884	
					21. Dinas Perdagangan dan Perindustrian															
x	x	0	2.0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH	Persentase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar	100%	100 %	2,279,170,160	100 %	2,929,366,960	100 %	2,893,860,560	100 %	3,181,007,360	100 %	3,298,094,560	100 %	3,298,094,560	
					22. Dinas Kelautan dan Perikanan															
x	x	0	2.0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH	Persentase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar	100%	100 %	3,601,500,000	100 %	3,601,500,000	100 %	3,763,500,000	100 %	4,626,500,000	100 %	4,931,500,000	100 %	4,931,500,000	
					23. Sekretariat Daerah															
x	x	0	2.0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH	Persentase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar	100%	100 %	800,000,000	100 %	800,000,000	100 %	800,000,000	100 %	800,000,000	100 %	800,000,000	100 %	800,000,000	
					24. Sekretariat DPRD															



Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
x	xx	01	2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000			
					25. Bappeda															
x	xx	01	2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000			
					26. Badan Keuangan															
x	xx	01	2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	1,000,000,000	100%	1,000,000,000	100%	1,000,000,000	100%	1,000,000,000	100%	1,000,000,000			
					27. BKDD															
x	xx	01	2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	1,952,899,289	100%	2,304,919,107	100%	2,385,591,276	100%	2,744,506,970	100%	2,835,314,714			
					28. Inspektorat															



Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikat or Kinerj a Progra m	Kondi si Kiner ja pada Awal RPJ MD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		
								Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	
x	x	0	2.0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH	Persentase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar	100%	100 %	2,705,951,488	100 %	3,016,607,212	100 %	3,443,857,384	100 %	3,072,035,670	100 %	5,466,493,912	100 %	5,466,493,912	
					29. Kecamatan Pangale															
x	x	0	2.0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH	Persentase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar	100%	100 %	300,000,000	100 %	300,000,000	100 %	300,000,000	100 %	300,000,000	100 %	300,000,000	100 %	300,000,000	
					30. Kecamatan Budong-Budong															
x	x	0	2.0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH	Persentase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar	100%	100 %	300,000,000	100 %	300,000,000	100 %	300,000,000	100 %	300,000,000	100 %	300,000,000	100 %	300,000,000	
					31. Kecamatan Tobadak															
x	x	0	2.0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH	Persentase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar	100%	100 %	300,000,000	100 %	300,000,000	100 %	300,000,000	100 %	300,000,000	100 %	300,000,000	100 %	300,000,000	
					32. Kecamatan Topoyo															



Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
x	xx	01	2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000			
					33. Kecamatan Karossa															
x	xx	01	2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000			
					34. Kesbangpol															
x	xx	01	2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	522,574,730	100%	1,210,409,032	100%	1,151,209,032	100%	1,161,809,032	100%	1,163,409,032			



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

8.1.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program.

Tabel 8. 1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir 2026
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Misi 1: Mendorong pemenuhan infrastruktur dasar							
1.1	Indeks Daya Saing Infrastruktur (IKU-1) (nilai)	65,13	73,41	74,8	76,3	78,08	79,7	81,16
2	Misi 2: Meningkatkan kualitas pelayanan dasar							
2.1	Indeks pembangunan manusia (IKU-2) (%)	65,71	66,34	67,00	67,14	67,40	67,60	67,69
2.2	Rata-rata capaian SPM Pelayanan Dasar (IKU-3) (%)		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Misi 3: Mendorong daya saing perekonomian daerah							
3.1	Pertumbuhan ekonomi (persen) (IKU 4)	-0,40	1,69	3,87	4,33	5,17	5,84	6,15
3.2	Tingkat pengangguran terbuka (IKU-5) (persen)	2,71	2,62	2,53	2,52	2,48	2,45	2,44



NO	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir 2026
			2021	2022	2023	2024	2025	
3.3	Angka kemiskinan (IKU-6) (persen)	6,79	6,76	6,30	6,13	5,84	5,61	5,50
3.4	Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB (IKU-7) (persen)	71,81	71,87	72,19	72,18	72,52	72,41	72,08
4	Misi 4: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik							
4.1	Nilai LPPD (IKU-8) (nilai)		2,9	3	3,01	3,02	3,03	3,04
4.2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (IKU-9) (Nilai)	Rendah	rendah	rendah	sedang	sedang	sedang	sedang
4.3	SAKIP (IKU 10)	C	C	CC	CC	B	B	B
4.4	Opini BPK (IKU 11)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.5	Indeks Inovasi Daerah (IKU-12)	kurang inovatif (skor 3)	50	100	200	300	500	500
5	Misi 5: Memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat							
5.1	Persentase penurunan gangguan ketertiban dan keamanan (IKU-13)	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%
6	Misi 6: Menjaga Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup							
6.1	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD) (IKU-14) (Nilai)		74,71	75,00	75,29	75,59	76,00	76,00
6.2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (IKU-15) (%)	N/A	2%	3%	4%	5%	6%	7%

8.1.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah Daerah. Indikator Kinerja Kunci disusun berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Indikator Kinerja Kunci terbagi atas Indikator Kinerja Makro dan Indikator Kinerja Outcome.



Tabel 8. 2 Indikator Kinerja Makro

Indikator Pembangunan	Kondisi Awal	Target RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Laju Pertumbuhan ekonomi (%)	-0,40	1,69	3,87	4,33	5,17	5,84	6,15
Tingkat Kemiskinan (%)	6,79	6,76	6,3	6,13	5,84	5,61	5,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,71	2,62	2,53	2,52	2,48	2,45	2,44
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65,71	66,34	67,00	67,14	67,40	67,60	67,69
Rasio Gini	0,314	0,341	0,367	0,375	0,356	0,345	0,339
Penurunan Emisi GRK (%)	N/A	2%	3%	4%	5%	6%	7%



Tabel 8. 3 Target Indikator Kinerja SPM Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target					Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bidang Urusan Kesehatan								
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Persentase Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pelayanan Kesehatan balita	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Persentase Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Persentase Warga Negara Usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Warga Negara penderita diabetes militus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Pelayanan Kesehatan orang dengan TB	Persentase Warga Negara terduga tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Persentase Warga Negara resiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Bidang Urusan Pendidikan								
1	Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	100%	100%	100%	100%	100%	100%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target					Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	Pendidikan Kesenjangan	Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Bidang Urusan Pekerjaan Umum								
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penyediaan pengolahan air limbah domestik	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Bidang Urusan Perumahan Rakyat								
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di Kabupaten	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Bidang Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target					Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bidang Urusan Sosial								
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase warga Negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paksa bencana bagi korban bencana kabupaten	Persentase warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Tabel 8. 4 Indikator Kinerja Kunci

	Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi awal 2020	Target Tahun ke-					
			2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi akhir 2026
Indikator Kinerja Outcome								
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar								
	Urusan Pendidikan							
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tingkat partisipasi warga negara 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama		100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Urusan Kesehatan							
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk							
2	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi							
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100%	100%	100%	100%	100%	100%



5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								



1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/kota							
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota							
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi							
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota		2562	2946	3388	2896	4480	
7	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota		45,25 %	48,25 %	50%	53%	56%	59%
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi							
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan tanpa kecelakaan konstruksi							
Urusan Perumahan Rakyat								



1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangai		100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		55,11 %	48,39%	41,68%	34,96%	28,24%	21,52 %
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		61%	61%	61%	61%	61%	61%
Urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat								
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana		100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan							



	kebakaran							
Urusan Sosial								
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar								
Tenaga Kerja								
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja							
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		10%	15%	20%	25%	30%	40%
3	Tingkat Produktivitas tenaga kerja							
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)							
5	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota		23%	30%	35%	40%	45%	60%
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD							



2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)							
Pangan								
1	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)							
Pertanahan								
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan							
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum							
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal							
4	Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang siap diretribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee							
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat							
6	Pangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi							
Lingkungan Hidup								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		74,71	75,00	75,29	75,59	76,00	76,00
2	Terlaksananya pengelolaan							



	sampah di wilayah Kab/ Kota							
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/ Kota		70%	75%	80%	85%	90%	95%
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
1	Perekaman KTP elektronik		85%	86%	87%	88%	90%	93%
2	Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA		13%	28%	43%	58%	73%	88%
3	Kepemilikan akta kelahiran		61%	70%	75%	80%	85%	90%
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama		14%	55%	65%	75%	85%	95%
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1	Persentase pengentasan desa tertinggal		100%	100%				
2	Persentase peningkatan status desa mandiri							
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
1	TFR (Angka Kelahiran Total)		2,50	2,49	2,48	2,47	2,45	2,43
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern							
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)		9,14%	13,50%	12,50%	11,70%	10,80%	9%
Perhubungan								
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota							
2	kinerja lalu lintas kabupaten/ kota			22%				
Komunikasi dan Informatika								
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang		3%	5%	10%	15%	20%	25%



	disediakan oleh Dinas Kominfo							
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		0%	10%	20%	30%	40%	50%
3	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah kabupaten/ kota		14%	15%	20%	25%	30%	40%
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas							
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penanaman Modal								
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/ kota	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kepemudaan dan Olahraga								
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		31%	50%	60%	70%	80%	100%
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan		77 Organisasi	80 Organisasi	83 organisasi	86 organisasi	89 orgaisasi	92 organi sasi
3	Peningkatan prestasi olahraga		3 Cabang Olahraga	3 Cabang Olahraga	3 Cabang Olahraga	3 Cabang Olahraga	3 Cabang Olahraga	3 Cabang Olahraga
Statistik								
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik							



	dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah							
Persandian								
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah		0%	10%	20%	30%	40%	50%
Kebudayaan								
1	Terlestariannya Cagar Budaya		6%	15%	40%	75%	80%	100%
Perpustakaan								
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat							
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		71,74	43,66	72,39	86,69	101,00	115,29
Kearsipan								
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan							
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat							
Urusan Pilihan								
Kelautan dan Perikanan								
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten (sumber data: one data KKP)	76,61%	80,61%	84,61%	88,61%	92,61%	94%	96,61%
Pariwisata								



1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan				0	0	0	
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten			167,65	1,1	1,09	1,08	
3	Tingkat hunian akomodasi							
4	Kontribusi Sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku							
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	
Pertanian								
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun							
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	0	0	7%	5%	4%	3%	3%
Energi dan Sumber Daya Mineral								
1	Persentase perusahaan pemandaatan panas bumi yang memiliki izin di kabupaten							
Perdagangan								
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUUP/ SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP Toko Swalayan)		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	0	0	0,014	0,025	0,037		
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		95%	95%	95%	95%	95%	95%
Perindustrian								
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di		8,6	5,8	18,7	31,5	44,3	44,3



	kabupaten (%)							
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		4,7	11,14	17,5	23,8	30,25	30,25
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait							
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait							
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten							
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								
Perencanaan dan Keuangan								
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan							
2	Rasio PAD							
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		3	3	3	4	4	4
4	Perangkat Kapabilitas		3	3	3	4	4	4



	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)							
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditure)							
6	Opini Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Pengadaan								
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama							
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif							
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan							
Kepegawaian								
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)							
2	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)							
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)							
Manajemen Keuangan								
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD							
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD							
3	Manajemen Aset							



4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya							
Transparansi dan Partisipasi Publik								
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan							
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah							
Indikator Kinerja Output								
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar								
Urusan Pendidikan								
1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi							
2	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah							
3	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan							
4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD							
5	Jumlah pendidik pada PAUD							
6	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini							
7	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah							



	untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang							
8	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi							
9	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah							
10	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah							
11	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan							
12	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan							
13	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar							
14	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama							



1 5	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar							
1 6	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama							
1 7	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar							
1 8	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama							
1 9	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar							
2 0	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama							
2 1	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik							
2 2	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik							
2 3	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah							



2 4	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah							
2 5	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat							
2 6	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat							
2 7	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi							
2 8	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah							
2 9	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan							
3 0	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan							
3 1	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan							
3 2	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)							



3 3	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah							
3 4	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1							
Urusan Kesehatan								
1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar							
2	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya							
3	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia							
4	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia							
5	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia							
6	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar							
7	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia							
8	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar							
9	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia							
1 0	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar							
1 1	Jumlah dukungan logistik kesehatan							



	yang tersedia							
1 2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar							
1 3	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia							
1 4	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar							
1 5	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia							
1 6	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar							
1 7	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia							
1 8	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar							
1 9	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia							
2 0	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar							
2 1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia							
2 2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar							
2 3	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia							
2 4	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar							
2 5	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia							
2 6	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar							
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								



1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)							
2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)							
3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)							
4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)							
5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/loa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota							
6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota							
7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota							
8	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik							
9	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik							
10	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik							



1 1	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)							
1 2	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)							
1 3	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)							
1 4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM							
1 5	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.							
1 6	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S							
1 7	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T							
1 8	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T							
1 9	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa							



	penyedotan lumpur tinja							
20	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja							
21	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik							
22	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar							
23	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman							
24	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman							
25	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat							
26	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja							
27	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja							
28	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD							
29	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja							
30	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi							
31	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting							



3 2	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)							
3 3	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)							
3 4	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan							
3 5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi							
3 6	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota							
3 7	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat							
3 8	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota							
3 9	Panjang jalan yang dibangun							
4 0	Panjang jembatan yang dibangun							
4 1	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)							
4 2	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan							
4 3	Panjang jalan yang direkonstruksi/dir ehabilitasi							
4 4	Panjang jembatan yang direhabilitasi							
4 5	Panjang jembatan yang dipelihara							
4 6	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah							



	kabupaten/kota							
4 7	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota							
4 8	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota							
4 9	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir							
5 0	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota							
5 1	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN							
5 2	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya							
5 3	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala							



5 4	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota							
5 5	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya							
5 6	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis							
5 7	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota							
5 8	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota							
5 9	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui							



6 0	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya							
6 1	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya							
6 2	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya							
6 3	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota							
6 4	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota							
6 5	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota							
6 6	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota							
6 7	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui							



68	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya							
69	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya							
70	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya							
Urusan Perumahan Rakyat								
1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	N/A	5 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	24 unit	0	0	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	24 KK	15 unit	3 KK	3 KK	3 KK	3 KK	3 KK
4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	10 unit	20 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	2 unit	20 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit



6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	12 unit	40 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	253 unit	0	50 unit	50 unit	50 unit	50 unit	50 unit
8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi							
9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan							
10	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM							
11	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM							
12	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM							
13	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM							



14	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM							
15	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah							
16	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha							
17	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	32 unit	60 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit
18	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0 Ha		100%	100%	100%	100%	100%
19	Jumlah rumah di kab/kota							
20	Jumlah unit PK RTLH	32 unit	60 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit
21	Jumlah rumah tidak layak huni							
22	Jumlah rumah yang tidak dihuni							
23	Rasio rumah dan KK							
24	Jumlah rumah pembangunan baru							
25	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	0	61	61	61	61	61	61
26	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum							
27	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan							
28	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)							
29	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH							
30	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU							
31	Jumlah pengembang yang tersertifikasi							
32	Jumlah pengembang yang terregistrasi							



33	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan							
Urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat								
1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani							
2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan							
3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan							
4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS							
5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum							
6	Tersedianya sarana prasarana minimal							
7	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal							
8	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana							
9	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal							
10	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal							
11	Persentase jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan							



1 2	Persentase warga negara yang ikut pelatihan							
1 3	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana							
1 4	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan							
1 5	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB							
1 6	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana							
1 7	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana							
1 8	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana							
1 9	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota							
2 0	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan							
2 1	Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang							



	dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan							
2 2	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa							
2 3	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi							
2 4	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran							
2 5	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran							
2 6	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran							
Urusan Sosial								
1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki							
2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan							



	gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM							
3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk							
4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau							
5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki							
6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	14 orang	0	0	20 orang	30 orang	30 orang	30 orang
7	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar							
8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	27 orang	5 orang	5 orang	20 orang	30 orang	30 orang	30 orang
9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	0	0	0	5 orang	0	0	5 orang
10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter							
11	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia							



1 2	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan							
1 3	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah							
1 4	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan							
1 5	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	309 orang	0	0	0	10 orang	10 orang	10 orang
1 6	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	4 bimbingan	0	0	0	10 orang	10 orang	10 orang
1 7	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	10 orang	0	0	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang
1 8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan	312 orang	0	0	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang



	kesehatan dasar							
1 9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	3 orang	0	0	0	0	5 orang	5 orang
2 0	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga							
2 1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	5 orang	0	0	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang
2 2	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	141 orang	0	10 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang
2 3	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	193 orang	10 orang	0	12 orang	12 orang	12 orang	12 orang
2 4	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki							
2 5	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan							
2 6	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	273 orang	35 orang	350 orang	320 orang	320 orang	320 orang	320 orang
2 7	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia							
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar								
Tenaga Kerja								



1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota							
2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.							
3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota							
4	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster							
5	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi							
6	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan							
7	Persentase LPK yang terakreditasi							
8	Persentase LPK yang memiliki perizinan							
9	Jumlah penganggur yang dilatih							
10	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan							
11	Persentase penyerapan lulusan							
12	Lulusan bersertifikat kompetensi							
13	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan							
14	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)							
15	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas							



1 6	Data tingkat produktivitas total							
1 7	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	N/A	0	0%	12%	12%	12%	12%
1 8	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	N/A	0	0%	12%	12%	12%	12%
1 9	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan							
2 0	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah							
2 1	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan							
2 2	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih							
2 3	Jumlah mogok kerja							
2 4	Jumlah penutupan perusahaan							
2 5	Jumlah perselisihan kepentingan							
2 6	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan							
2 7	Jumlah perselisihan PHK							
2 8	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK							
2 9	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite							



30	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan							
31	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial							
32	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota							
33	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota							
34	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota							
35	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota							
36	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja							
37	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota							
38	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota							
39	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)							
40	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi							



4 1	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata							
4 2	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulauan							
4 3	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja							
4 4	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya							
4 5	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk							
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG							
2	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota							
3	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak							



4	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal							
5	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani							
6	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan							
7	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)							
8	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan							
9	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih							
10	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan							
11	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota							
12	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi							



13	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi							
14	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani							
Pangan								
1	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan							
2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya							
3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal							
4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang							
5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan							
6	Tertanganinya kerawanan pangan							
7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan							
8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar							
Pertanahan								
1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota							
2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang							



	bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek							
3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.							
4	Dokumen Izin membuka tanah							
5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota							
Lingkungan Hidup								
1	Hasil perhitungan provinsi terhadap:							
	a. Indeks kualitas air (IKA)							
	b. Indeks Kualitas Udara (IKU)							
	c. Indeks tutupan hutan (ITH)							
	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota							
2	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota							
3	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota							
4	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota							
5	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan							



	pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH							
6	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat							
7	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani.							
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
1	Penerbitan akta perkawinan							
2	Penerbitan akta perceraian							
3	Penerbitan akta kematian							
4	Penyajian data kependudukan							
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa							
2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya							
3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan							
4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi							



	produktif dan pemberdayaan							
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan							
2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun							
3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)							
4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)							
5	Jumlah stakeholders/pem angku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK							
6	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP							
7	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)							
8	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif							
9	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan							



10	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah							
11	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)							
Perhubungan								
1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C							
2	Terlaksananya pelayanan uji berkala							
3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi							
4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota							
Komunikasi dan Informatika								
1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo							
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo							
3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video,							



	teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah							
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015							
2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar							
3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan							
4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik							
5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik							



6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan							
7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah							
8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah							
9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah							
10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)							
11	Persentase data yang dapat berbagi pakai							
12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city							
13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo							
14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government							
15	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota							



	yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota							
1 6	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)							
1 7	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan							
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota							
2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota							
3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota							



4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota							
5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota							
6	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota							
7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota							
8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan							
9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota							
10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah							



	keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota							
1 1	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota							
1 2	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota							
1 3	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota							
1 4	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro							
1 5	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem <i>online data system</i> (ODS)							
1 6	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra							
1 7	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha							
1 8	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan							



	dukungan fasilitas pemasaran							
19	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan							
20	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan							
Penanaman Modal								
1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota							
2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal							
3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal							
4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting							
5	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting							
6	Kegiatan pameran penanaman modal							
7	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal							
8	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal							
9	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal							
10	Laporan realisasi penanaman							



	modal							
1	Pembinaan							
1	aparatur							
	penanaman							
	modal tingkat							
	kabupaten/kota							
1	Pembinaan							
2	penanaman							
	modal PMA dan							
	PMDN							
1	Tersedianya data							
3	dan informasi							
	perizinan dan non							
	peizinan							
	kabupaten/kota							
Kepemudaan dan Olahraga								
1	Jumlah pemuda							
	yang mendapat							
	pelatihan							
	kewirausahaan							
2	Jumlah pemuda							
	yang mendapat							
	bantuan							
	kewirausahaan							
3	Jumlah pemuda							
	yang medapat							
	pelatihan kader							
	pengembangan							
	kepemimpinan,							
	kepedulian,							
	kesukaelawanan							
	dan kepeloporan							
	pemuda							
4	Jumlah pengelola							
	organisasi							
	kepemudaan							
	yang mendapat							
	pelatihan							
	manajemen							
	organisasi							
	kepemudaan							
5	Jumlah pelatih							
	olah raga yang							
	memiliki							
	kompetensi di							
	satuan ²							
	pendidikan							
6	Jumlah							
	penyelenggaraan							
	event OR prestasi							
	tingkat daerah							
Statistik								
1	Tersedianya buku							
	profil daerah							
2	Jumlah survey							
	statistik sektoral							
	yang dilakukan							
3	Jumlah kompilasi							
	statistik sektoral							
	yang dilakukan							
4	Jumlah survey							
	statistik sektoral							
	yang mendapat							
	rekomendasi dari							
	BPS							



5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS							
6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik							
7	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik							
Persandian								
1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan							
2	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah							
3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah							
4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan							
Kebudayaan								



1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)							
2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)							
3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)							
4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)							
5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)							
6	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)							
7	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data							
8	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi,							



	adaptasi)							
9	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)							
10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum							
11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan							
12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota							
13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya							
14	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi							
15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya							
16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman							
17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman kabupaten/kota							
18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman							
19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat							
Perpustakaan								
1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk							



2	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat							
3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk							
4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan							
5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat							
6	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya							
7	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa							
8	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)							
Kearsipan								
1	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip							
2	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip							
3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik							
4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN							
5	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK							



6	Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi							
7	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten yang sesuai NSPK							
8	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK							
9	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten yang sesuai NSPK							
Urusan Pilihan								
Kelautan dan Perikanan								
1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)							
2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional							
3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan							
4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan							



	(pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)							
5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi							
Pariwisata								
1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi							
2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata							
3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota							
4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan							
5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri							
6	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi							
7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri							
8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi							
9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan							
10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat							



Pertanian								
1	Sarana pertanian yang diberikan							
2	Prasarana pertanian yang digunakan							
3	Penerbitan izin usaha pertanian	0	0					
4	Persentase prasarana yang digunakan							
5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota							
6	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana							
Kehutanan								
1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura							
2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga							
3	Pemulihan ekosistem pada Tahura							
4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA							
Energi dan Sumber Daya Mineral								
1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota							
Perdagangan								
1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :							
	a. Pusat perbelanjaan							
	b. Toko swalayan							
2	Persentase penerbitan TDG							
3	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG							
4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu							



5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota							
6	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu							
7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya							
8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu							
9	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan							
10	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan							
11	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku							
Perindustrian								
1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota							
2	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA							
3	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan							



4	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan							
5	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota							
Transmigrasi								
1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya							
2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya							
3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina							

8.1.3 Indikator Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Analisis capaian indikator dilakukan untuk melihat proyeksi beberapa tahun kedepan terkait gambaran pencapaian dari indikator TPB yang teridentifikasi sebagai indikator strategis yang perlu direkomendasikan didalam KLHS, agar dapat terintegrasi kedalam dokumen RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah. Hasil Proyeksi didasarkan pada target (nasional maupun daerah) dan realisasi capaian dari lima tahun sebelumnya, yaitu berdasarkan data baseline Kabupaten Mamuju Tengah untuk masing-masing indikator tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Sebaran masingmasing indikator dikaitkan dengan isu strategis pada masing-masing tujuan TPB. Isu strategis dalam kelompok SB di Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebanyak 54 isu yang terkait dengan pilar lingkungan, sosial, ekonomi dan tata kelola.

Terdapat 14 tujuan yang memiliki indikator strategis yakni terkait isu dari pilar lingkungan meliputi tujuan sebelas (11); isu dari pilar sosial meliputi tujuan pertama (1), kedua (2), ketiga (3), empat (4) dan kelima (5); isu dari pilar ekonomi meliputi tujuan delapan (8) dan ketujuh belas (17) sedangkan isu dari pilar tata kelola meliputi tujuan keenambelas (16).



Tabel berikut memperlihatkan penilaian dan analisis capaian indikator TPB yang dilaksanakan oleh masing-masing urusan Perangkat Daerah di Kabupaten Mamuju Tengah.

Tabel 8. 5 Proyeksi dan Target Indikator TPB

NO. TPB	INDIKATOR	JENIS URUSAN	PROYEKSI BAU						PD pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	kesehatan	71%	73%	76%	79%	81%	84%	Dinas Kesehatan
1	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	sosial	13.77%	14.14%	14.51%	14.88%	15.26%	15.63%	Dinas Sosial
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	sosial	282534	562253	841971	1121689	1401408	1681126	Dinas Sosial
1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	pekerjaan umum & penataan ruang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas PUPR
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	pendidikan	70.49%	73.19%	75.89%	81.29%	83.99%	86.68%	Dinas Pendidikan
1	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	administrasi kependudukan & catatan sipil	7.7%	15.5%	23.2%	31.0%	38.7%	46.4%	Dinas Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil
1	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	sosial	215898241	260150185	304402130	34865474	392906019	437157963	Dinas Sosial

NO. TPB	INDIKATOR	JENIS URUSAN	PROYEKSI BAU						PD pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	sosial	24%	22%	20%	19%	17%	15%	Dinas Sosial
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	pangan	86%	76%	67%	57%	48%	38%	Dinas Ketahanan Pangan
2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	pangan	90%	80%	70%	60%	50%	40%	Dinas Ketahanan Pangan
2	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	pangan	113%	102%	90%	78%	67%	55%	Dinas Ketahanan Pangan
2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	kesehatan	348	309	271	232	193	155	Dinas Kesehatan
2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	kesehatan	6%	9%	11%	13%	16%	18%	Dinas Kesehatan
3	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	kesehatan	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
3	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	kesehatan	76%	78%	81%	83%	85%	87%	Dinas Kesehatan
3	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	kesehatan	2%	2%	2%	2%	2%	1%	Dinas Kesehatan
3	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	kesehatan	2	2	2	2	1	1	Dinas Kesehatan
3	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	kesehatan	15	13	11	8	6	4	Dinas Kesehatan

NO. TPB	INDIKATOR	JENIS URUSAN	PROYEKSI BAU						PD pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	kesehatan	23	23	23	23	23	23	Dinas Kesehatan
3	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	kesehatan	78%	80%	82%	83%	85%	87%	Dinas Kesehatan
3	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	kesehatan	59%	63%	67%	71%	75%	83%	Dinas Kesehatan
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	pendidikan	2.07%	6.74%	15.55%	24.35%	33.16%	41.97%	Dinas Pendidikan
4	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	pendidikan	82.76%	90.52%	90.52%	90.52%	90.52%	90.52%	Dinas Pendidikan
4	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	pendidikan	82.76%	82.76%	82.76%	82.76%	82.76%	82.76%	Dinas Pendidikan
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	pendidikan	90.02%	92.69%	95.37%	98.04%	100.72%	103.39%	Dinas Pendidikan
4	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	pendidikan	0.4	0.6	1.6	2.7	3.7	4.7	Dinas Pendidikan
5	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	pemberdayaan perempuan & perlindungan anak	13	17	21	25	29	33	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO. TPB	INDIKATOR	JENIS URUSAN	PROYEKSI BAU						PD pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	pemberdayaan perempuan & perlindungan anak	64	68	72	76	80	84	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	kesehatan	56%	59%	62%	65%	69%	72%	Dinas Kesehatan
5	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	pemberdayaan perempuan & perlindungan anak	8	10	12	13	15	17	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	pemberdayaan perempuan & perlindungan anak	0	0	0	0	0	0	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO. TPB	INDIKATOR	JENIS URUSAN	PROYEKSI BAU						PD pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	pemberdayaan perempuan & perlindungan anak	21%	19%	17%	14%	12%	10%	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	pekerjaan umum & penataan ruang	10%	20%	30%	40%	50%	60%	Dinas PUPR
6	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	pekerjaan umum & penataan ruang	70	84	98	112	126	140	Dinas PUPR
6	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	pekerjaan umum & penataan ruang	98%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas PUPR
8	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	tenaga kerja	10	20	30	40	50	60	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
8	Persentase tenaga kerja formal.	tenaga kerja	4%	9%	15%	20%	25%	30%	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

NO. TPB	INDIKATOR	JENIS URUSAN	PROYEKSI BAU						PD pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
8	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	koperasi, usaha kecil, & menengah	2%	4%	7%	9%	12%	15%	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan UKM
8	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	pariwisata	2%	4%	7%	8%	12%	15%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
9	Jumlah dermaga penyeberangan	Perhubungan	1	2	3	4	5	6	Dinas Perhubungan
9	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Tenaga Kerja	20	40	60	80	100	120	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
10	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	Sosial	27%	24%	21%	18%	15%	12%	Dinas Sosial
10	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Sosial	27%	25%	23%	21%	18%	16%	Dinas Sosial
10	Jumlah desa tertinggal.	pemberdayaan masyarakat & desa	35	30	26	22	19	15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	sosial	28%	26%	25%	23%	22%	20%	Dinas Sosial

NO. TPB	INDIKATOR	JENIS URUSAN	PROYEKSI BAU						PD pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
11	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	lingkungan hidup	57%	63%	70%	77%	84%	84%	Dinas Lingkungan Hidup
11	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	perumahan rakyat & kawasan permukiman	371283	741140	1110998	1480855	1850713	2220507	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
16	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Keuangan	381,852,53,749	418,423,397,433	454,994,741,117	491,566,84,801	528,137,428,486	564,708,772,17	Badan Keuangan
16	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	administrasi kependudukan & catatan sipil	5%	10%	15%	20%	25%	30%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	administrasi kependudukan & catatan sipil	27%	34%	40%	46%	53%	59%	Dinas Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil
16	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	21%	19%	17%	14%	12%	9%	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO. TPB	INDIKATOR	JENIS URUSAN	PROYEKSI BAU						PD pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
17	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	komunikasi & informatika	24%	27%	30%	33%	36%	39%	Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika



BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 menjadi instrument penting dalam penyusunan dan pengendalian program kegiatan pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah selama periode lima tahun kedepan.

9.1 Pedoman Transisi

Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah periode 2021-2026 dilantik pada bulan Februari 2021 dan akan berakhir pada bulan November Tahun 2024 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Pasal 201 ayat 8 disebutkan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Dalam upaya mengantisipasi kekosongan rencana pembangunan pada akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah untuk masa bakti 2021-2024 atau sebelum masa bakti 2025-2029 ditetapkan, maka dokumen RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 tetap berlaku sebagai acuan dalam penyusunan RKPD.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kabupaten Mamuju Tengah dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah setiap tahunnya. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta melaksanakan strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026, kaidah-kaidah pelaksanaan yang harus diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah;
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Kepala Bappeda) Kabupaten Mamuju Tengah;
- (3) Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah;



- (4) Setiap PD, baik yang berbentuk Dinas, Badan dan Sekretariat berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Capaian Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Kerangka Pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026;
- (5) Renstra PD dapat digunakan sebagai acuan penyusunan kontrak kinerja antara Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat dengan para Pimpinan OPD yang selanjutnya menjadi dasar penilaian kinerja para Pimpinan OPD;
- (6) Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 untuk setiap tahunnya dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah;
- (7) RKPD Kabupaten Mamuju Tengah harus menjadi acuan bagi setiap PD dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
- (8) Renja PD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD);
- (9) Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Mamuju Tengah merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- (10) Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026, setiap PD perlu memperkuat peran pemangku kepentingan, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat;
- (11) Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi dan konsistensi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026, maka:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah bertugas untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah.
 - b. Pengendalian pelaksanaan Renstra PD dan Renja PD dilakukan oleh masing-masing pimpinan PD. Pimpinan PD wajib menyampaikan laporan secara rutin tentang hasil pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan Renja PD dan RKA kepada



- Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda.
- c. Kepala Bappeda Kabupaten Mamuju Tengah menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan Renstra PD dan Renja PD dari pimpinan PD sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dan melaporkan hasilnya kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah sebagai dasar penilaian kinerja Pimpinan PD.
 - d. Pimpinan PD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renstra PD, Renja PD serta Rencana Kerja dan Anggaran PD periode sebelumnya sebagai bagian dari laporan akuntabilitas kinerja.
 - e. Kepala Bappeda Kabupaten Mamuju Tengah menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (d).
 - f. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (e) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (12) Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah direncanakan dapat ditinjau Kembali dan hasilnya dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Mamuju Tengah untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

BUPATI MAMUJU TENGAH

ttd

H. ARAS TAMMAUNI